PENGUATAN EMPLOYABILITY DAN ENTEREPRENEURABILITY SISWA SMK

by Winardi Winardi

Submission date: 16-Jan-2020 01:15PM (UTC+0700)
Submission ID: 1242539318
File name: 7._Buku_Penguatan_Employability.pdf (1.77M)
Word count: 64757
Character count: 429829

Agus Prianto | Winardi
| Umi Nur Qomariyah

PENGUATAN EMPLOYABILITY DAN ENTREPRENEURABILITY SISWA SMK

PENGUATAN
EMPLOYABILITY DAN
ENTREPRENEURABILITY
SISWA SMK

Agus Prianto
Winardi
Umi Nur Qomariyah

KAIZEN
sarana edukasi

PENGUATAN
EMPLOYABILITY DAN
ENTREPRENEURABILITY
SISWA SMK

Agus Prianto
Winardi
Umi Nur Qomariyah

Editor: Apik Anitasari Intan Saputro, S.H., M.H.

Lay Out/Perwajahan Isi: KibarCreation

Desain Sampul: Atta Huruh

Penerbit:
KAIZEN SARANA EDUKASI
YOGYAKARTA

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: Desember 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
PENGUATAN EMPLOYABILITY DAN ENTREPRENERABILITY SISWA SMK – Agus Prianto, Winardi & Umi Nur Qomariyah – Yogyakarta
Kaizen Sarana Edukasi
x + 322 hlm. 14 cm x 21 cm.
ISBN: 978-623-92446-0-6

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sua-tu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda yang banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur, atas petunjuk, bimbingan, dan kekuatan dari Allah SWT buku ini pada akhirnya dapat hadir di hadapan para pembaca. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian tentang berbagai faktor diterminan yang memengaruhi kesiapan bekerja dan minat berwirausaha para lulusan SMK rumpun Bisnis dan Manajemen. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan penelitian ini. Penghargaan yang tinggi juga penulis sampaikan kepada segenap unsur Pimpinan STKIP PGRI Jombang, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang telah memberikan dukungan penuh untuk terlaksanakannya kegiatan penelitian ini. Penulis juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung ikut terlibat sampai dengan terbitnya buku ini, khususnya kepada Pimpinan SMK beserta segenap dewan guru dan para lulusan tahun 2019 yang telah berkenan memberikan data-data sangat bernilai untuk kegiatan penelitian ini.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa SMK merupakan salah satu institusi pendidikan menengah yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Bentuk dukungan dari pemerintah itu tidak main-main, karena sampai harus dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang revitalisasi SMK. Sebagai tindak lanjut dari

program revitalisasi SMK maka dibentuk nota kesepahaman lintas kementerian, yang meliputi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kemeterian Ketenagakerjaan. Nota kesepahaman lintas kementerian ini dibentuk untuk mendukung penguatan revitalisasi SMK, dengan harapan kegiatan pendidikan di SMK akan berjalan lebih efektif dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dan siap berwirausaha.

Pemerintah sangat menyadari bahwa keberadaan SMK yang berkualitas dan mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi akan berkontribusi besar bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional. Berbagai kajian membuktikan bahwa berbagai negara maju dengan tingkat perkembangan ekonomi yang kuat selalu didukung oleh keberadaan pendidikan vokasi yang kuat dan bermutu. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang efektivitas program revitalisasi yang diikuti oleh SMK.

Laporan BPS yang menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berlatar belakang lulusan SMK selalu menduduki posisi tertinggi. Secara khusus, melalui buku yang berjudul "Strategi Implementasi Revitalisasi SMK" yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) mengungkapkan bahwa jumlah lulusan SMK rumpun Bisnis Manajemen tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan permintaan tenaga tenaga kerja untuk lulusan pada rumpun yang sama. Maka, perhatian banyak pihak kemudian tertuju pada SMK rumpun Bisnis dan Manajemen yang dianggap sebagai penyumbang terbesar TPT. Hal ini

kemudian memunculkan isu tentang kebijakan moratorium untuk program studi tertentu karena dinilai kurang memiliki relevansi dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja.

Ada sepuluh langkah yang sudah ditetapkan pemerintah dalam menjalankan program revitalisasi SMK, salah satunya adalah pengembangan pembelajaran berbasis *teaching factory* (TF) sebagai strategi pembelajaran di SMK. Dengan adanya fakta tentang adanya kesenjangan yang besar antara sisi *supply* dan sisi *demand* pada lulusan SMK rumpun Bisnis Manajemen, maka dalam kajian ini penulis berupaya menggali informasi dari para lulusan SMK tahun 2019 untuk rumpun tersebut. Informasi dari para lulusan ini lebih berkaitan dengan bagaimana pandangan mereka tentang kegiatan Pembelajaran Berbasis TF yang sudah mereka ikuti sejak sekolah tempat mereka belajar mengikuti program revitalisasi. Model pembelajaran apakah yang dipersepsikan para lulusan memiliki kontribusi besar dalam membentuk kesiapan bekerja dan memperkuat minat berwirausaha. Suara lulusan dari sekolah yang pertama mengikuti program revitalisasi ini perlu didengarkan, karena sesungguhnya para lulusan yang siap kerja dan berminat untuk berwirausaha inilah yang pada akhirnya menjadi subjek dan sasaran utama dari program revitalisasi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pertama-tama penulis memaparkan tentang pendidikan di SMK dengan berbagai karakteristik yang menyertainya. Kemudian, penulis juga mengidentifikasi strategi pembelajaran berbasis *Teaching Factory* (TF) yang menurut pandangan lulusan dapat menumbuhkan minat wirausaha dan memperkuat kesiapan bekerja. Hal ini sekaligus untuk mengevaluasi langkah kelima dari kegiatan implementasi revitalisasi SMK, yaitu penerapan pembelajaran berbasis TF di SMK peserta program

revitalisasi. Selain itu, penulis juga telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kesiapan bekerja dan minat berwirausaha sebagaimana dipaparkan dalam bagian buku ini.

Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan dalam pengembangan SMK, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pembelajaran Berbasis TF pada SMK rumpun Bisnis dan Manajemen yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam berkait dengan adanya data kesenjangan antara sisi *suppy* dan sisi *demand*. Kesenjangan yang lebar antara sisi *supply* dan *demand* seharusnya dapat dijadikan momentum bagi SMK rumpun Bisnis dan Manajemen untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih memperkuat minat untuk berwirausaha para lulusannya.

Semoga kehadiran buku ini dapat memperkuat pandangan para pimpinan sekolah, para guru, para orang tua, warga masyarakat, pihak dunia usaha dan industri, dan khususnya para siswa SMK rumpun Bisnis dan Manajemen untuk terus mengasah kemampuan belajar secara tuntas guna memperkuat kesiapan bekerja dan minat berwirausaha. Sehingga, suatu saat akan dapat dihasilkan para lulusan SMK, terutama dari rumpun Bisnis dan Manajemen yang siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif sebagaimana menjadi *tagline* SMK pada saat ini. Dan, kelak kita semua berharap dari sana akan kita dengar suara keras dari para lulusan SMK: "SMK BISA-HEBAT!!"

Jombang, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PENDIDIKAN SMK 10

A. Memperkuat Efektivitas Pendidikan SMK . 12

B. Berbagai Permasalahan Laten di SMK 27

C. Meluruskan Mitos Tentang SMK 37

D. Pentingnya Belajar Tuntas Dalam Pembelajaran di SMK 40

E. Peran SMK Dalam Memperkuat Perkembagan Ekonomi 44

BAB III PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DI SMK 49

A. Pentingnya Pendidikan Kewirausahaan 49

B. Penguatan Iklim Kewirausahaan 56

C. Peran Dukungan Lingkungan keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Dalam Memperkuat Minat Berwirausaha 60

BAB IV ISU PENGANGGURAN, PENGUATAN KOMPETENSI DAN MINAT WIRAUSAHA 75

A. Problem Lulusan SMK: Isu Pengangguran dan Kewirausahaan 75

B. Memperkuat Kesiapan Bekerja Lulusan SMK... 77

C. Memperkuat Kompetensi Kewirausahaan Lulusan SMK..... 85
D. Berbagai Aktivitas yang Memicu Tumbuhnya Kompetensi Kewirausahaan .. 91
E. Memperkuat Minat Berwirausaha Lulusan SMK..... 93

BAB V PENGUATAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SMK 102
A. Pendidikan Kewirausahaan di SMK 102
B. Perdebatan tentang Pendidikan Kewirausahaan 105
C. Mengapa Pendidikan Kewirausahaan Relevan Untuk Dikembangkan?..... 109
D. Kreteria Keberhasilan Pendidikan KWU di SMK..... 119
E. Pentingnya Pembelajaran Aktif di SMK..... 122
F. Peran Guru Berjiwa Wirausaha Dalam Memperkuat Karakter Kewirausahaan..... 124
G. Indikator Ketercapaian Pembelajaran KWU di SMK..... 131

BAB VI MEMPERKUAT PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MEMBENTUK PERILAKU KEWIRAUSAHAAN 136
A. Memperkuat Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan 136
B. Desain Pendidikan Kewirausahaan Dalam Mem bentuk Perilaku Kewirausahaan..... 138

C. Apa Yang Diajarkan Dalam Pendidikan Kewirausahaan? 145
D. Pembelajaran Kewirausahaan Yang Memperkuat Pengalaman Berwirausaha... 149

BAB VII BERBAGAI KECAKAPAN PENUNJANG KESIAPAN KERJA 159
A. Kecakapan Penunjang Kesiapan Bekerja 159
B. Berbagai Hambatan Yang Dihadapi Para Lulusan Dalam Bursa Kerja..... 171
C. Pendekatan Pembelajaran Yang Memperkuat Kesiapan Bekerja 172
D. Apakah kecakapan siap kerja para siswa bisa dinilai? 173

BAB VIII BERBAGAI FENOMENA GLOBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBELAJARAN DI SMK 183
A. Fenomena Otomatisasi 184
B. Fenomena Globalisasi 195
C. Perubahan Lingkungan Kerja..... 199
D. Penguatan Literasi Global Kepada Siswa SMK 204

BAB IX PEMBELAJARAN AKTIF DAN BERBASIS KERJA DI SMK..... 208
A. Berbagai Model Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Kewirausahaan..... 209

B. Pentingnya Penerapan WBL Pada Sekolah Kejuruan 219
C. Berbagai Manfaat Penerapan WBL Bagi Siswa, Dunia Usaha dan Industri, Sekolah, dan Masyarakat 221
D. Model Pembelajaran WBL..... 233
E. Teaching Factory (TF)..... 238

BAB X PENGUATAN KESIAPAN BEKERJA, KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN DAN MINAT BERWIRAUSAHA: Suara Dari Para Lulusan SMK Rumpun Bis-Ma . 247
A. Kompetensi Kewirausahaan..... 248
B. Minat Berwirausaha 250
C. Kesiapan Bekerja 252
D. Keterlibatan Siswa Dalam Pembelajaran Berbasis TF..... 254
E. Kesiapan Bekerja Para Lulusan Sesuai Model Pembelajaran Yang Diikuti..... 258
F. Berbagai Model Pembelajaran Berbasis TF Dalam Memperkuat Kompetensi Kewirausahaan 269
G. Berbagai Model Pembelajaran Berbasis TF Dalam Memperkuat Minat Berwirausaha 271

DAFTAR PUSTAKA..... 275
INDEKS..... 316
BIODATA PENULIS..... 320

BAB I

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kesiapan untuk bekerja, berjiwa wirausaha, cerdas, memiliki daya saing agar dapat berkompetisi dalam pasar global. Pendidikan kejuruan dapat menjadi tulang punggung perbaikan ekonomi negara dalam jangka panjang yang lebih futuristik jika kompetensi lulusannya diarahkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan bisnis (Mulyati, et al., 2014). Kesuksesan kegiatan pendidikan pada sekolah kejuruan akan dinilai dari seberapa besar lulusannya dapat terserap di dunia kerja atau berwirausaha. Pengalaman dari berbagai negara maju, seperti di Uni Eropa; pendidikan kejuruan dan pelatihan berkontribusi besar untuk penyiapan tenaga kerja dengan kualifikasi level menengah (European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2011).

UU Nomor 20/2003 pasal 15 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara spesifik menyebutkan tujuan khusus SMK yaitu menyiapkan siswa supaya menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri

sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Hal senada dikatakan oleh Clarke & Winch (2007) yang menyatakan bahwa pendidikan vokasional bermaksud untuk mengembangkan ketenagakerjaan, pemeliharaan, percepatan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas kegiatan pendidikan di SMK adalah dengan menilai sejauh mana kesiapan bekerja para siswa dan para lulusannya.

Untuk merespon tujuan dan harapan terhadap keberadaan SMK, maka kurikulum dan kegiatan pembelajaran di SMK dirancang untuk mempersiapkan para siswa agar benar-benar memiliki keahlian baik dari aspek *soft skills* maupun *hard skills*. Secara lebih rinci, kurikulum pendidikan SMK bertujuan untuk: (a) menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, (b) meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan budaya dan alam sekitarnya, (c) meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (d) menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap professional (Munadi et al, 2018).

Pemerintah menaruh harapan yang besar agar SMK dapat menjadi institusi pendidikan yang unggul dan mampu menjawab tuntutan dunia kerja. Untuk itu pemerintah bertekad untuk terus menambah jumlah sekolah kejuruan (SMK), sehingga mulai tahun ajaran 2014/2015 jumlah SMK

lebih banyak dibandingkan dengan sekolah menengah umum (SMA) (Mulyatiningsih & Soegiyono, 2014). Penambahan jumlah SMK diharapkan juga diikuti dengan ketersediaan guru dengan jumlah dan kompetensi yang memadai. SMK sangat membutuhkan guru dengan kemampuan mengajar yang berbeda dengan guru SMA, terutama dikaitkan dengan tujuan utama SMK yang memang mempersiapkan para siswa untuk bekerja atau berwirausaha. Guna mewujudkan tujuan utama SMK, maka kegiatan pembelajaran di SMK seyogyanya lebih banyak dilaksanakan dengan kegiatan praktek. Pemahaman siswa tentang teori akan dibangun dari bawah melalui kegiatan praktek (*grounded theory*) (Cornford, 2005)

Perhatian yang besar dari pemerintah kepada SMK, diharapkan dapat menarik para siswa berpotensi unggul untuk menempuh studi pada sekolah kejuruan. Pengalaman dari negara maju mengungkapkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi selalu didukung oleh keberadaan pendidikan vokasional yang berkualitas (Cedefop, 2011). Efektivitas pendidikan kejuruan dinilai dari seberapa besar lulusannya dapat terserap di dunia kerja atau berwirausaha. Untuk menjadi lembaga yang unggul, SMK diharapkan mampu menyiapkan siswanya agar memiliki kompetensi kerja sesuai tuntutan dunia industri atau memberi berbagai macam bekal pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi seorang wirausaha (*entrepreneur*).

Hingga saat ini, harapan kepada SMK untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan dunia kerja masih menghadapi tantangan yang besar. Setidaknya, hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK yang dalam beberapa tahun

terakhir selalu menempati posisi tertinggi. Berdasarkan data BPS antara tahun 2016, jumlah pengangguran per Februari 2016 sebanyak 7 juta orang, dengan porsi TPT lulusan SMK sebanyak 9,84% (Berita Resmi Statistik, 2016). Kemudian, data BPS per Agustus 2017 menunjukkan TPT lulusan SMK sebanyak 11,41%. Sedangkan, data BPS per Agustus 2018 menunjukkan TPT lulusan SMK sebanyak 11,24% (Berita Resmi Statistik, 2018).

Data-data statistik tersebut seolah-olah hendak menunjukkan bahwa keberadaan SMK belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Kualifikasi pengetahuan, kecakapan, dan keahlian lulusan SMK dianggap belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan dunia kerja. Dengan kata lain, ada kesenjangan (*gap*) antara pengetahuan dan ketrampilan para lulusan SMK dengan spesifikasi keahlian yang diminta oleh dunia kerja. Kesenjangan antara sisi *supply* dengan sisi *demand* ini terutama terjadi pada SMK rumpun Bisnis dan Manajemen (Bis-Ma). Hadam, et al (2017) dalam buku "Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK)" yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mengungkapkan adanya kesenjangan itu terutama untuk rumpun Bis-Ma. Jumlah lulusan SMK rumpun Bis-Ma pada tahun 2016 tercatat sebanyak 348.954 lulusan, sedangkan peluang kebutuhan tenaga kerja lulusan tercatat sebanyak 119.255 orang. Dengan demikian terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja lulusan SMK untuk rumpun Bis-Ma sebanyak 229.699 orang.

Data sebagaimana diungkapkan oleh Hadam, et al (2017) menunjukkan bahwa kelebihan lulusan hanya terjadi pada SMK rumpun Bis-Ma. Hal ini menyebabkan SMK rumpun

Bis-Ma mendapatkan sorotan tajam, dan memunculkan kebijakan pembatasan pendirian SMK rumpun Bis-Ma, terutama untuk program studi tertentu seperti TKJ dan Administrasi Perkantoran. Seiring dengan berkembangnya teknologi, yang berdampak munculnya otomatisasi di berbagai bidang pekerjaan, maka potensi kesenjangan antara sisi *supply* dan *demand* pada SMK rumpun Bis-Ma berpotensi akan terus membesar. Jika ini yang terjadi, maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK masih akan terus mendominasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMK, terutama pada rumpun Bis-Ma sudah sepenuhnya adaptif dan sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan dunia kerja.

Apakah kegiatan pembelajaran sudah diarahkan untuk menyiapkan lulusan agar memiliki kesiapan untuk mengikuti perubahan dalam dunia kerja dan memiliki kemampuan untuk terus memperbaharui pengetahuan dan kecakapan terbaru sebagaimana yang diminta oleh dunia kerja. Singkatnya, kesenjangan antara sisi supply dan demand juga mengindikasikan belum kuatnya *employability* para lulusan. Para lulusan yang memiliki *employability* kuat tidak sekedar ditunjukkan dengan diterimanya mereka dalam dunia kerja. Kemampuan dan kesadaran dari dalam diri para lulusan untuk terus meng-*update* pengetahuan, ketrampilan teknis, dan berbagai kecakapan *soft skills* yang dibutuhkan oleh dunia kerja akan menjadi parameter penting yang menunjukkan derajat *employability* lulusan SMK.

Tingginya TPT lulusan SMK juga mengindikasikan minat para lulusan SMK untuk menjadi pewirausaha belum terlalu kuat, sehingga ketergantungan mereka dengan permintaan tenaga kerja menjadi sangat besar. Hal ini juga menjadi

tantangan SMK untuk mewujudkan *tagline* SMK untuk mengantarkan para siswa menjadi lulusan yang "siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif". Kecenderungan ini tampak sejalan dengan data terbaru yang dikeluarkan oleh Global Entrepreneurship Index, GEI (2018) yang menempatkan peringkat GEI Indonesia (94) berada dibawah negara tetangga, seperti Vietnam (87), Philipina (84), Thailand (71), Malaysia (58), Brunei Darusalam (53), dan Singapura (27). Dengan kata lain, masih diperlukan upaya yang keras untuk menjadikan SMK sebagai institusi pendidikan yang mampu mengantarkan para lulusan untuk siap kerja dan siap berwirausaha.

Hanafi (2012) menyatakan beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terserapnya lulusan SMK, yaitu: (a) dunia industri pada umumnya mencari pekerja yang sudah berpengalaman dalam bidang keahliannya, (b) dunia industri selalu mengeluhkan lulusan SMK dianggap tidak memiliki ketrampilan yang sesuai, kurang mampu *survive* sesuai dengan perubahan situasi yang terjadi di dunia kerja. Hal senada dikatakan oleh Sasmito, et al (2015) yang mensinyalir lulusan SMK kurang siap untuk memasuki dunia kerja karena pengalaman kerja yang masih kurang, dan kesiapan bekerja para lulusan dinilai masih rendah.

Berdasarkan kajian Hanafi (2012) dan Sasmito et al (2015), maka yang menjadi tantangan bagi pendidikan di SMK adalah bagaimana kegiatan pembelajaran mampu memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman belajar yang yang selaras dengan apa yang ada dalam dunia usaha dan dunia industri. Pengalaman kerja hanya dapat diperoleh jika para siswa terlibat intensif dalam kegiatan praktek kerja dengan peralatan, suasana,

dan standar kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada pada dunia usaha dan industri, atau terlibat langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau industri. Pada saat yang sama, keselaraan pengetahuan dan kecakapan yang dipelajari para siswa dengan dunia usaha dan industri akan lebih efektif bisa diwujudkan jika dunia usaha dan industri terlibat dalam kegiatan pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua kajian tersebut juga memunculkan pertanyaan, apakah kegiatan pembelajaran di SMK selama ini sudah efektif untuk membangkitkan minat para siswa untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan karir utama setelah mereka lulus. Untuk menjawab dua permasalahan tersebut maka SMK diwajibkan memiliki unit kegiatan praktek dan usaha yang dapat berbentuk bengkel, bisnis center, unit usaha produksi, atau tekno park. Unit kegiatan praktek ini diharapkan menjadi kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, lembaga keuangan dalam satu lokasi di sekolah yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi berjalan dengan efisien.

Dalam rangka menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan dan penguatan budaya wirausaha maka pengembangan SMK ditujukan untuk memenuhi 3 sasaran pokok, yaitu: peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan, peningkatakan kemampuan entrepreneurship lulusan dan peningkatan kerja sama dengan pengguna lulusan (dunia usaha dan dunia industri) (Mulyatiningsih & Soegiyono, 2014). SMK perlu terus memperkuat hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, agar kegiatan pembelajaran di SMK yang berbasis kegiatan produktif dan

kewirausahaan, *teaching factory,* dan kegiatan praktek atau magang di dunia industri dapat berjalan dengan optimal.

Tanpa kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, maka kegiatan pembelajaran di SMK dikawatirkan tidak akan sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan dunia kerja. Dukungan kepada SMK untuk melaksanakan pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja juga terlihat dari adanya kesepahaman lima menteri, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri BUMN; yang merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 9/2016 tentang revitalisasi SMK. Dengan dukungan yang sedemikian besar, maka semua stakeholder menunggu peran nyata SMK dalam menghasilkan lulusan yang mandiri dan kompetitif, memiliki kesiapan dini untuk bekerja dan berwirausaha.

Dengan berbagai kebijakan dan dukungan penuh dari pemerintah, maka SMK diharapkan mulai mampu memberikan jawaban dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran kewirausahaan yang optimal guna menghasilkan lulusan yang lebih memiliki kesiapan untuk bekerja dan berwirausaha. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah program revitalisasi sudah berdampak signifikan pada penguatan kultur di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang secara penuh diarahkan untuk memperkuat minat berwirausaha dan kesiapan bekerja para siswa.

Sebagai tindak lanjut dari program revitalisasi, maka berbagai SMK di Jawa Timur melaksanakan pembelajaran berbasis kegiatan usaha produktif, kreatif, dan kewirausahaan (PKK). SMK juga terus berusaha memperkuat unit bisnis

center, *techno park*, bengkel kerja, dan mendirikan berbagai unit usaha produksi sesuai dengan karakteristik sekolah dan keunggulan sumber daya yang dimilikinya. Beberapa unit usaha produksi yang ada SMK antara lain adalah hotel pendidikan (EdHotel), usaha layanan jasa, usaha perdagangan atau pertokoan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Keberadaan unit produksi oleh sekolah difungsikan sebagai tempat para siswa belajar menjalankan kegiatan usaha produktif, mengasah kemamuan berwirausaha, dan memperkuat kecakapan bekerja. Berdasarkan data-data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya pihak sekolah sudah menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri sebagai tempat para siswa melaksanakan kegiatan magang kerja dan magang usaha. Dengan memperhatikan kegiatan pembelajaran yang didukung oleh berbagai berbagai unit usaha dan produksi, maka terlihat adanya upaya untuk mengintensifkan kegiatan pembelajaran berbasis berbasis praktek usaha dan praktek kerja.

Dengan memperhatikan data-data yang menunjukkan tentang masih besarnya angka pengangguran lulusan SMK; maka diperlukan kajian tentang pendekatan pembelajaran di SMK yang secara spesifik dinilai mampu meningkatkan *employability* dan *entreprenerability* lulusan SMK. Pembahasan dan kajian tentang isu ini diharapkan dapat menjawab tuntutan rivitalisasi SMK sebagaimana yang diamanatkan oleh Inpres Nomor 9 Tahun 2016.

BAB II

PENDIDIKAN SMK

Pendidikan bidang kejuruan di Indonesia dilaksanakan melalui sekolah menengah kejuruan (SMK). SMK diselenggarakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam upaya mengembangkan bakat dan keahlian dalam bidang tertentu. Undang Undang Nomor 20/2003 pasal 3 dan penjelasan pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja di bidang tertentu. Dengan demikian kegiatan pembelajaran di SMK harus lebih menekankan pada aspek aplikatif, fokus pada bidang tertentu, dan ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan pekerjaan tertentu, seperti dalam bidang teknologi dan industri, bisnis manajemen, pariwisata, dan bidang lainnya (Khurniawan dan Haryani, 2016).

Corson (1985) memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan menyatakan bahwa pendidikan kejuruan dimaksudkan untuk mendidik siswa agar siap bekerja. Kesiapan bekerja tidak hanya ditunjukkan dengan kemampuan bekerja sesuai dengan spesifikasi kecakapan yang diminta oleh dunia kerja. Tetapi lebih dari itu, para

siswa kelak diharapkan juga bisa menjadi pekerja yang terdidik, yang ditandai dengan kemampuan untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Kemampuan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kecakapan bekerja inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari kajian tentang *employability*.

Untuk memiliki *employability skills* maka sejak dini para siswa harus diajarkan untuk membelajarkan diri sendiri, mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif; yang semuanya ini merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking*). Oleh karena itu, semua pihak, baik kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa harus memiliki pemahaman yang kuat bahwa kegiatan pembelajaran di SMK sesungguhnya menuntut kemampuan belajar level yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pembelajaran pada sekolah menengah lainnya. Sejak awal hal ini perlu ditekankan mengingat masih ada anggapan yang kurang tepat dari berbagai pihak yang menganggap pembelajaran di SMK tidak memerlukan kemampuan berpikir level tinggi, karena lebih mengutamakan kegiatan praktek. Hal ini kemudian memunculkan stigma yang kurang bagus: untuk belajar di SMK tidak mesyaratkan siswa dengan kemampuan akademik yang bagus. Hal inilah yang menyebabkan para siswa dengan kemampuan akademik terbaik hingga saat ini nyaris tidak pernah tertarik untuk menempuh pendidikan di SMK.

Sekolah kejuruan yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tuntas, yang menggabungkan antara penuasaan konsep, aplikasi, dan pengembangan nilai-nilai sikap berperan besar untuk memperkuat *employability* para lulusannya. *Employability* melekat pada para pekerja yang

terdidik, yaitu mereka yang tidak sekedar siap bekerja, tetapi juga siap untuk terus memperbaharui kecakapan kerjanya, mengembangkan dan meng-*update* pengetahuan, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Berbagai kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh dunia kerja dan dunia usaha, Dengan demikian *employability* sesungguhnya tidak hanya digunakan untuk mengukur kesiapan bekerja, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan untuk menjadi pekerja yang mandiri atau menjadi pewirausaha.

Organisasi buruh internasional (ILO) mendefinisikan *employability skills* sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi yang memberikan peluang yang besar kepada seseorang untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, mampu mengembangkan potensi dirinya di tempat kerja, sigap menghadapi perubahan, dan bila keluar dari tempat kerja yang lama ia mampu dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dalam waktu yang relatif cepat (Brewer, 2013). Kajian penelitian terdahulu, sebagaimana dilakukan oleh Cleary, et al (2007) dan Sermsuk, et al (2014) mengungkapkan penguatan *employability skills* dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran berbasis pemberian tugas, praktek kerja, pembelajaran berbasis industri, dan berbagai model pembelajaran kooperatif yang diintegrasikan dengan pekerjaan tertentu.

A. Memperkuat Efektivitas Pendidikan SMK

Efektivitas pelaksanaan pendidikan kejuruan tergantung pada kualitas kegiatan pembelajaran, ketersediaan sarana

bengkel kerja (workshop) yang mendukung kegiatan pembelajaran, dan sarana laboratorium. Disamping itu, juga diperlukan keberadaan guru yang berkualifikasi dan kompeten, tenaga teknisi, pelatih, atau tutor, kurikulum pendidikan, peserta didik yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan berbagai prasarana yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran.

Hal paling esensi dalam pendidikan kejuruan adalah berkaitan dengan keterlibatan aktif para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan (Lucas, et al, 2012). Tugas utama guru dalam pendidikan kejuruan adalah memastikan bahwa kegiatan pembelajaran yang dikembangkannya benar-benar membangun keterlibatan aktif semua peserta didik untuk melaksanakan berbagai aktifitas pembelajaran yang sedang berlangsung. Lucas, et al (2012) menyatakan bahwa salah satu persoalan serius yang terjadi pada pendidikan kejuruan adalah para siswa kurang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pihak guru dan sekolah dinilai mengabaikan hal ini; dan hal inilah yang menjadi penyebab utama kegagalan pendidikan kejuruan menghasilan lulusan yang kompeten.

Persoalan lain yang menjadi masalah serius pendidikan kejuruan adalah adanya kesenjangan kompetensi antara yang diajarkan dan dilatihkan kepada para peserta didik di sekolah dan di bengkel dengan yang diharapkan oleh dunia kerja (Lucas, et al, 2012). Para penyedia kerja sering mengeluhkan bahwa kegiatan pendidikan di sekolah kejuruan dinilai belum menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang selaras dengan tuntutan pekerjaan (Prianto, 2017). Oleh karena itu, pendidikan kejuruan akan selalu

menghadapi dua tantangan. *Pertama*, kegiatan pembelajaran dalam pendidikan kejuruan benar-benar membutuhkan keberadaan guru yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang harus selaras dengan dunia kerja. Pada sekolah menengah kejuruan di Indonesia, guru dalam kategori ini disebut sebagai *guru produktif* (Khurniawan dan Haryani, 2016).

Seiring dengan dunia kerja yang terus berkembang dan berubah dengan sangat cepat, maka guru produktif dituntut untuk selalu *update* pengetahuan dan kecakapan sebagaimana yang dibutuhkan dunia kerja. *Kedua*, pendidikan kejuruan harus mampu melibatkan para pekerja sebagai tenaga pelatih atau teknisi yang mampu menyampaikan berbagai keahlian yang dibutuhkan dunia kerja kepada para siswa. Atau, pendidikan kejuruan harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mensyaratkan bidang keahlian tertentu yang relevan dengan bidang keahlian yang diajarkan di sekolah.

Agar pendidikan kejuruan mampu membekali pengetahuan dan kecakapan yang sejalan dengan tuntutan dunia kerja dalam abad 21, OECD (2012) telah mempublikasikan berbagai strategi untuk memperkuat berbagai pengetahuan dan kecakapan, yaitu:

1. Pengetahuan dan kecakapan yang diajarkan kepada peserta didik harus selaras dengan tuntutan dunia kerja, ada keseimbangan antara kajian konsep teoritik di kelas dan kegiatan praktek melalui kegiatan praktek kegiatan produksi atau kegiatan magang.
2. Kegiatan pembelajaran pada pendidikan kejuruan harus berorientasi pada pengembangan

kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking*), seperti: pengembangan kreatifitas, berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan berkolaborasi.

3. Kegiatan pembelajaran harus beorientasi untuk pengembangan sikap dan karakter positip, baik yang berkaitan dengan aspek performa, yang meliputi: kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, gigih-pantang menyerah, bermental tangguh-tahan uji; maupun berkaitan dengan aspek moral, yang meliputi: integritas, menjunjung tinggi nilai keadilan, sikap etik, dan perilaku etik. Berbagai sikap dan karakter positip ini dapat diperkuat melalui kegiatan pembelajaran di sekolah maupun melalui kegiatan praktek atau magang di dunia usaha dan industri. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan akan dapat dilahirkan generasi yang bertanggung jawab.
4. Kegiatan pembelajaran pada pendidikan kejuruan juga diharapkan dapat memperkuat berbagai kecakapan pendukung, seperti kecakapan untuk membelajarkan diri sendiri, dorongan untuk terus mengasah kemampuan dan keahlian, dorongan untuk terus mengembangkan kreatifitas, dan terus mempelajari berbagai bidang yang mendukung produktifitas dirinya.

Dengan memperhatikan tujuan pembelajaran dan berbagai strategi pembelajaran yang disarankan oleh OECD (2012), maka terlihat bahwa aktifitas pembelajaran pada pendidikan kejuruan membutuhkan keberadaan guru dan

peserta didik yang benar-benar mumpuni, baik dari sisi mental dan intelektual. Pendidikan kejuruan tidak sekedar membutuhkan aktifitas fisik saja, misalnya dalam bentuk praktek bekerja. Tetapi bersamaan dengan itu juga diikuti dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian diikuti dengan aktifitas praktek diikuti dengan kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang lebih baru. Oleh karena itu, para guru pada pendidikan kejuruan dituntut tidak sekedar pintar secara teori, tetapi juga berpengalaman secara praktis. Demikian halnya dengan para siswa yang dituntut untuk mempelajari teori dan menjalankan kegiatan praktek secara bersamaan, yang diikuti dengan kebiasaan untuk menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pimpinan sekolah kejuruan juga dituntut untuk mampu menciptakan iklim belajar yang memungkinkan berkembangnya kegiatan belajar secara holistik: penguasaan kosep atau teori, aplikasi teori dalam kehidupan nyata, dan pengembangan sikap dan karakter.

Pembelajaran pada pendidikan kejuruan harus selalu berorientasi pada konsep pembelajaran tuntas: siswa mengerti atau memahami apa yang dipelajari, mampu menjalani apa yang dimengerti, dan mampu menunjukkan perilaku baik dalam proses menjalani. Untuk menuju ketuntasan dalam belajar, kegiatan pembelajaran pada maka pendidikan kejuruan menggunakan saluran pembelajaran melalui meteri-benda fisik, kumpulan orang, dan berbagai simbol, angka-angka, dan gambar (Lucas, et al, 2012).

Saluran pembelajaran yang berupa *material atau benda fisik*, misalnya bagi siswa program studi teknik melaksanakan kegiatan pemasangan instalasi listrik, perbaikan mesin, pemasangan batu, pemasangan pipa saluran air; bagi siswa

jurusan tata rias melaksanakan kegiatan penataan rambut, dan rias wajah. Saluran pembelajaran yang berupa *kelompok orang*, misalnya bagi siswa program studi bisnis manajemen melaksanakan jasa layanan keuangan, layanan bisnis retail; bagi siswa program studi keperawatan melaksanakan kegiatan perawatan orang yang sakit; bagi siswa program studi perhotelan melaksanakan layanan jasa perhotelan, penyiapan kamar hotel, penyediaan makanan, dan berbagai kebutuhan tamu hotel. Saluran pembelajaran yang berupa *berbagai simbol, angka-angka, atau gambar*; sebagaimana yang dilaksanakan oleh para siswa program studi akuntansi, jurnalistik, komputer, desain grafis, dan pengembangan perangkat lunak.

Dengan demikian para guru dan sekolah dapat mengembangkan konsep metode pembelajaran sesuai dengan program studi dengan memperhatikan saluran pembelajaran yang digunakan. Misalnya, bagi guru dan sekolah kejuruan bidang teknik, jasa boga, dan tata rias dapat menggunakan model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan imitasi dan reproduksi, uji coba, kegiatan praktek, dan pembelajaran pemecahan masalah berbasis berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Guru dan sekolah kejuruan bidang bisnis manajemen, perhotelah, dan perawatan yang lebih banyak berinteraksi dengan orang dapat menggunakan model pembelajaran bermain peran, simulasi bisnis atau usaha, dan kegiatan praktek bisnis atau usaha. Sedangkan bagi guru dan sekolah yang menggunakan saluran pembelajaran berupa symbol, angka, dan gambar dapat menggunakan model pembelajaran yang memperkuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif, atau dengan belajar praktek di laboratorium.

Apa pun model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru dan sekolah, para siswa yang menempuh studi pada pendidikan kejuruan harus mengikuti prinsip belajar tuntas, dengan indikator ketuntasan sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman tentang konsep atau teori, sesuai dengan standar pemahaman yang ditentukan.
2. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan, menerapkan, atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang apa yang sudah dipahami.
3. Mampu menunjukkan sikap dan perilaku baik selama melaksanakan kegiatan aplikasi, penerapan, atau pun praktek kegiatan.

Menurut Whittington dan McLean (2001), apa yang diketahui dan dipahami oleh siswa, serta dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan jauh lebih penting dibandingkan dengan bagaimana dan dimana siswa mengembangkan kemampuan dan kecakapannya. Dengan kata lain, ketuntasan belajar merupakan standar mutlak yang harus dikembangkan oleh semua sekolah kejuruan.

Jauh hari sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang revitalisasi SMK, Charles A. Prosser yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Kejuruan di USA mengemukakan 16 prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah kejuruan. Ke-16 prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut (www.morgancc.edu):

1. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan efektif jika lingkungan sekolah tempat siswa belajar merupakan replika dari lingkungan dunia usaha

dan industri. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pembelajaran di sekolah mampu memberikan bekal komptensi dan kecakapan kerja yang selaras dengan apa yang ada di dunia kerja. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan, mengembangkan berbagai kecakapan soft skills sebagaimana yang dibutuhkan di tempat kerja.

2. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika memiliki tempat praktek kerja yang didukung dengan berbagai peralatan sebagai pendukung kegiatan praktek yang sama dengan yang ada di tempat kerja. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kecakapan kerja dan kemampuan menggunakan berbagai peralatan kerja kepada para siswa sebagaimana yang juga digunakan di tempat kerja. Menghadirkan peralatan kerja sebagaimana yang ada dalam dunia usaha dan industry tentu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terlebih jika jumlah peralatan haus sebanding dengan jumlah siswa, maka pengadaan peralatan praktek seperti ini akan sangat sulit untuk bisa dipenuhi oleh sekolah. Solusinya tentu sekolah harus menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Adanya MoU lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perindustrian harus bisa dijadikan payung hokum bagi sekolah untuk menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja. Dunia usaha dan industri seharusnya juga melihat hal ini dari sisi positip jika

melalui pembelajaran yang didukung peralatan *up to date* kelak dapat dihasilkan lulusan yang trampil dan selerasan dengan kebutuhan kerja. Dunia usaha dan industri akan dapat menghemat biaya penyiapan kerja yang lazim dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pra kerja untuk kegiatan rekrutmen pekerja yang baru.

3. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika melalui kegiatan pembelajarannya para siswa dibiasakan untuk berpikir dan beraktifitas sebagaimana yang dilakukan oleh para pekerja dalam dunia kerja. Untuk memperkuat kebiasaan para siswa untuk berpikir dan beraktifitas sebagaimana yang ada dalam dunia kerja tentu dibutuhkan keberadaan guru yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman dalam dunia industri yang memadai. Hal ini menjadi hambatan besar dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia, mengingat sebanyak 78% guru pada sekolah kejuruan merupakan guru normatif-adaptif. Guru produktif yang diasumsikan memiliki pengalaman dalam kegiatan usaha dan industri hanya ada sebanyak 22% (Direktorat PSMK, 2016).
4. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika melalui kegiatan pembelajarannya para siswa dapat memperkuat minat, pengetahuan, dan ketrampilan pada tingkat yang tinggi. Hal ini berarti pada tahap yang paling awal, yaitu saat penerimaan siswa baru pihak sekolah harus benar-benar mempertimbangkan kesesuaian minat siswa

dengan bidang ilmu dan kecakapan yang akan dipelajari. Minat siswa dalam bidang yang akan dipelajari di sekolah menjadi variabel penting dalam menerima siswa baru. Dengan kata lain, seharusnya semua SMK harus standar penerimaan siswa baru yang baku dan ketat. Calon siswa yang tidak memenuhi standar baku yang ditetapkan, termasuk berkaitan dengan hasil tes minat, maka seyogyanya mereka tidak diterima sebagai siswa SMK. Hal ini tampaknya masih merupakan cita-cita ideal, mengingat pada saat ini kebanyakan SMK justru menerima semua siswa, termasuk bagi mereka yang tidak diterima di sekolah menengah umum. Untuk lebih jelasnya bahasan tentang hal ini dapat dilihat pada bahasan tentang mitos SMK sebagaimana dijelaskan pada sub bab 3.

5. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika hanya diikuti oleh mereka yang benar-benar ingin menekuni suatu profesi atau pekerjaan yang mensyaratkan pengetahuan dan kecakapan sebagaimana yang akan dipelajari di sekolah kejuruan. Sebagaimana dijelaskan dalam poin ke 4 di atas, seharusnya pihak sekolah benar-benar menyeleksi calon siswa untuk memastikan bahwa ia benar-benar ingin mengembangkan karir dan bekerja dalam bidang yang akan dipelajarinya.
6. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan pada level yang tinggi sehingga dihasilkan adanya kemahiran

dalam menjalankan pekerjaan. Untuk itu, para siswa harus mendapatkan kesempatan yang cukup untuk terus terlibat dalam kegiatan praktek secara intensif, dilaksanakan secara berulang-ulang sehingga terbentuk kebiasaan sikap dan perilaku kerja serta kebiasaan berpikir sebagaimana yang dibutuhkan di tempat kerja. Dengan kata lain, kegiatan pendidikan pada sekolah kejuruan harus padat dengan kegiatan praktek kerja. Kegiatan praktek tidak boleh diposisikan sebagai kegiatan pelengkap dalam kegiatan belajar, sebagaimana yang menjadi mitos selama ini.

7. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika didukung oleh guru dan tenaga laboran yang memiliki pengalaman memadai untuk menerapkan pengetahuan ke dalam aktifitas praktek kerja. Singkatnya, sekolah kejuruan membutuhkan keberadaan guru yang tidak Cuma pandai berteori, tetapi pada saat yang sama ia juga harus piawai mengaplikasikan teori dalam kegiatan praktek kerja. Masalahnya tetap sama sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa hampir sebagian besar guru pada sekolah kejuruan berlatar belakang guru adaptif-normatif. Solusinya, sekolah harus mampu membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan dunia usaha dan industri, terutama untuk saat-saat tertentu dari para professional yang ada dalam dunia usaha dapat hadir di sekolah sebagai guru tamu.
8. Setiap pos pekerjaan membutuhkan pengetahuan dan kecakapan khusus. Oleh karena itu, para siswa

pada sekolah kejuruan harus dibekali dengan pengetahuan dan kecakapan atau kompetensi khusus sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi minatnya. Untuk itu, ke depan pihak sekolah seyogyanya mulai mengembangkan bidang peminatan yang wajib dipilih oleh para siswa. Dan para siswa yang sudah menentukan bidang peminatannya akan diberikan kesempatan untuk mendalami pengetahuan dan kecakapan sebagaimana yang dibutuhkan.

9. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika berorientasi untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar. Untuk itu kegiatan pembelajaran yang dikembangkan di sekolah harus membekali para siswa dengan berbagai pengetahuan dan kecakapan, termasuk kemampuan dalam membaca peluang dan berbagai kecenderungan atau *trend* yang terjadi dalam dunia kerja.
10. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika para siswa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan praktek kerja dalam kontek dunia kerja yang nyata dengan kegiatan evaluasi dan penilaian berbasis portofolio. Hal ini dimaksudkan untuk sejak awal memperkenalkan para siswa tentang situasi dalam dunia kerja yang riil.
11. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika sekolah dapat mendatangkan nara sumber atau guru tamu dari para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya. Melalui para

profesional yang berpengalaman mumpuni maka sekolah, guru, dan para siswa akan mendapatkan pengatahuan yang lebih riil tentang dunia kerja yang akan dihadapi, sehingga dapat lebih mampu memilih pengetahuan dan ketrampilan yang harus diajarkan dan dikuasai oleh para siswa.

12. Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang berbeda-beda antara bidang pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika sekolah mampu memfasilitasi para siswa untuk mempelajari pengetahuan dan mengembangkan ketrampilan sesuai dengan peminatannya. Disinilah pentingnya pengembangan kompetensi dan sub kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu.
13. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika mampu melayani para siswa atau masyarakat secara umum dengan berbagai kegiatan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Singkatnya, pendidikan kejuruan diharapkan dapat selalu hadir setiap saat untuk memenuhi harapan masyarakat, terutama berkait dengan penyediaan pengetahuan dan ketrampilan terbaru yang dibutuhkan dunia kerja.
14. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika sekolah dan guru memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-

masing siswa. Oleh karena itu, idealnya kegiatan pendidikan pada sekolah kejuruan harus memperhatikan keunikan masing-masing siswa. Melayani kebutuhan masing-masing siswa dalam jumlah siswa yang besar tentu tidak mudah. Hal ini dapat disiasati oleh sekolah kejuruan dengan mengembangkan program peminatan. Para siswa yang memiliki kemampuan, minat, dan bakat yang relatif sama dapat belajar bersama-sama sesuai dengan bidang peminatannya.

15. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan berjalan efektif jika dilaksanakan dengan luwes dan fleksibel, dan tidak harus menggunakan standar pembelajaran dan standar kurikulum yang bersifat baku. Sekolah kejuruan harus memiliki keleluasaan untuk cepat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pendidikannya sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi dalam dunia kerja. Para guru pada sekolah kejuruan otomatis juga dituntut untuk terus memperbaharui pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam dunia kerja.
16. Harus dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan kejuruan membutuhkan biaya yang sangat mahal, karena pelaksanaan pembelajarannya yang mengutamakan pendekatan belajar tuntas, yang berorientasi pada penguasaan teori, penerapan dalam tataran praktis, dan pengembangan sikap positip yang ditunjukkan oleh pengembangan sikap kerja yang baik. Hal ini membutuhkan dukungan peralatan praktek yang menjadi bernilai

mahal, karena sekolah harus melayani siswa dalam jumlah tertentu (tidak bisa masal) pada saat mereka melaksanakan kegiatan praktek. Ketidakmampuan sekolah untuk memenuhi standar operasional sekolah kejuruan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan yang tidak optimal, yang akhirnya berdampak pada kualitas lulusan yang tidak optimal pula.

Memperhatikan karakteristik sekolah kejuruan sebagaimana diuraiakan di atas terlihat jelas bahwa sekolah kejuruan sesungguhnya memiliki standar capaian pembelajaran yang tinggi. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran pada sekolah kejuruan juga harus dilaksanakan dan berorientasi pada pembelajaran aktif, yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan kognisi, tetapi juga berorientasi pada kegiatan praktek atau aplikasi; yang dari kedua domain itu diarahkan untuk memperkuat sikap dan perilaku positip siswa. Untuk memenuhi hal tersebut, pimpinan sekolah kejuruan harus memiliki wawasan yang luas agar dapat memfasilitasi para guru dalam mengembangkan memilih pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mewujudkan ketuntasan belajar siswa. Akhirnya, para siswa yang menempuh studi pada sekolah kejuruan juga harus memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk mengikuti kegiatan pendidikan dengan mengembangkan kemampuan belajar yang holistik melalui kemampuan berpikir tingkat tinggi.

B. Berbagai Permasalahan Laten di SMK

Meskipun pendidikan kejuruan menuntut aktifitas pembelajaran pada level tinggi, namun anggapan umum yang berkembang di masyarakat belum mendudukkan sekolah kejuruan sebagai pilihan utama. Dalam kenyataannya, hingga saat ini para siswa yang berkemampuan akademik tinggi cenderung tidak memilih sekolah menengah kejuruan. Sekolah kejuruan masih dipersepsikan oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai tempat belajar para siswa yang berkemampuan akademik tidak terlalu bagus. Kelompok siswa ini masuk pada sekolah kejuruan, karena beranggapan hanya berorientasi pada pengembangan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Para orang tua juga *idem ditto*, merasa *grade*-nya turun jika putra putrinya menempuh studi pada sekolah kejuruan. Bahkan banyak ditemui fakta-fakta di lapangan, para orang tua melakukan protes kepada guru dan sekolah ketika putra putrinya mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Mereka menyatakan keberatan kepada para guru dan sekolah, karena di sekolah putra putrinya melaksanakan kegiatan praktek produksi atau praktek menjual. Masih ada orang tua yang menyampaikan kepada sekolah agar putra putrinya fokus belajar, dan tidak terlalu banyak dilibatkan dengan kegiatan praktek. Keterlibatan siswa dalam kegiatan produksi atau praktek dipersepsikan oleh sebagian orang tua siswa bukan sebagai aktifitas belajar.

Dalam sebuah kegiatan penelitian lapangan di salah satu sekolah kejuruan, penulis bahkan mendapatkan pengakuan yang sangat mengejutkan dari beberapa guru pengampu mata pelajaran kewirausahaan, yang menyatakan bahwa tidak semua guru mendukung kegiatan pembelajaran

berbasis praktek kewirausahaan. Kegiatan praktek dinilai menciptakan kesemrawutan dan menimbulkan suasana ketidateraturan di lingkungan sekolah. Sebagian guru pada sekolah kejuruan lebih menyukai kegiatan pembelajaran yang menekankan aspek akademis dibandingkan dengan kegiatan praktis. Ketika penulis melakukan konfirmasi terkait informasi ini, beberapa guru juga menyatakan bahwa beberapa orang tua siswa merasa keberatan putra putrinya terlibat dalam kegiatan praktek kewirausahaan, dan lebih menghendaki agar lebih mengejar aspek akademis agar mendapatkan nilai yang bagus.

Pada kesempatan yang lain, juga ada pengakuan dari guru yang mendapatkan komplain dari orang tua siswa yang mengharapkan agar putra putrinya tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan produksi dan praktek, tetapi lebih fokus pada kegiatan akademik agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Meski belum pasti mewakili suara keseluruhan orang tua siswa, kegiatan praktek pada sekolah kejuruan oleh beberapa pihak seolah-olah masih dianggap sebagai kegiatan yang kurang bermakna.

Nilai raport yang bagus masih dijadikan acuan keberhasilan belajar oleh para orang tua. Para orang tua juga memiliki orientasi kerja untuk putra putrinya agar suatu saat bisa sebagai pegawai, bekerja di kantor, terutama sebagai pegawai negeri. Orientasi pemikiran yang demikian secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang para orang tua, warga masyarakat, dan bahkan mungkin bagi para guru sendiri terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah kejuruan.

Anggapan bernada minir tentang sekolah kejuruan sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara maju seperti di Inggris pun pendidikan kejuruan

dipersepsikan hampir serupa dengan pendidikan kejuruan di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Lucas, et al (2012), pendidikan kejuruan dianggap sebagai pendidikan yang rendah jika dilihat dari sisi akademik. Selanjutnya dinyatakan oleh Lucas, et al (2012), bahwa munculnya anggapan bernada minir terhadap pendidikan kejuruan adalah tidak lepas dari sejarah perkembangan sistem pendidikan yang -- dengan ungkapan "nakal" oleh Robinson (2006) -- dimaksudkan untuk menghasilkan kaum cerdik pandai, calon professor! Di Indonesia, anggapan bahwa sekolah kejuruan beriorientasi mempersiapkan siswa untuk bekerja kemudian juga memunculkan anggapan bahwa siswa sekolah kejuruan (SMK) secara akademik berada di bawah sekolah umum, yang para siswanya dinilai memiliki kemampuan akademik yang mumpuni, sebagai bekal melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; dan kelak bukan tidak mungkin dari sana diantara para siswa ada yang juga menjadi profesor; sebagaimana dinyatakan oleh Robinson (2006).

Siswa sekolah kejuruan dipersepsikan sebagai calon pekerja terampil, sedangkan siswa pada sekolah umum dipersepsikan sebagai calon pemikir, ilmuwan, atau sebagai calon profesor. Anggapan yang berkembang di masyarakat berikutnya adalah, bahwa untuk menjadi pekerja terampil tidak harus dibutuhkan siswa yang pintar. Sedangkan untuk menjadi pemikir, ilmuwan, dan profesor dibutuhkan siswa yang pintar dan jenius. Anggapan inilah yang kemudian memunculkan stigma *grade* sekolah kejuruan (SMK) yang secara akademik dianggap berada di bawah sekolah umum (SMA). Hal ini terkonfirmasi dari capaian nilai rata-rata ujian siswa SMK secara nasional tahun 2013/2014

adalah 6.35 (skala maksimal 10). Bahkan secaran nilai rata-rata ujian siswa SMK per provinsi juga dinilai kurang menggembirakan, karena dari 34 provisi, hanya 2 provisi, yaitu Bali dan Sumatara Utara yang nilai rata-ratanya di atas 7,00 (Khurniawan dan Haryani, 2016).

Sekolah umum dianggap lebih bergengsi dibandingkan dengan sekolah kejuruan. Bisa jadi, hal inilah yang menyebabkan, pada beberapa tahun yang lalu; jumlah sekolah kejuruan lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah umum. Hal ini tampaknya juga tidak terlepas dari stigma minir sekolah kejuruan dibandingkan dengan sekolah umum, sehingga pemerintah melalui berbagai kementeriannya, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; harus turun tangan dengan membuat iklan layanan masyarakat, dengan *tagline*-nya yang sangat popular: SMK BISA!! Hingga saat ini belum ada "pembelaan" dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada institusi pendidikan yang sedemikian besar, kecuali "pembelaan" kepada sekolah kejuruan.

Sebagai gambaran angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah (sekolah umum dan kejuruan) secara nasional pada tahun 2014/2015 mencapai 75,53%. Pada tahun yang sama, APK sekolah kejuruan mencapai 31,78%; APK sekolah umum mencapai 43,75% dengan perbandingkan jumlah institusi sekolah menengah kejuruan sebesar 49,87% sedangkan sekolah menengah umum sebesar 50,13% (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Dengan demikian sacara perhitungan kasar dapat dikatakan bahwa secara nasional sekolah kejuruan baru terisi 63,7% dari kapasitas maksimalnya, sedangkan sekolah umum sudah terisi 87,3%.

APK sekolah kejuruan tertinggi berada di DIY. Sebagai gambaran, APK sekolah menengah di DIY sebesar 91,40%, dengan rincian APK sekolah kejuruan sebesar 49.84%, sedangkan APK sekolah umum sebesar 41,56% dengan perbandingan jumlah antara sekolah kejuruan dan sekolah umum adalah 62,59 berbanding 38,41 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif sekolah kejuruan di DIY baru terisi 79,6% dari kapasitas maksimalnya. Sedangkan untuk sekolah menengah umum di DIY terisi 108% dari kapasitas maksimalnya. APK sekolah menengah di DIY tahun 2016/2017 mencapai 98,80%. Pada periode yang sama, APK sekolah kejuruan mencapai 53,83%, sedangkan APK sekolah menengah umum mencapai 44,97%. APK sekolah menengah DIY tahun 2018/2019 naik menjadi 103,84%. Pada periode yang sama, APK sekolah kejuruan mencapai 55,43%, sedangkan APK sekolah menengah umum mencapai 48,41% (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,2017; 2018, 2019).

Dukungan yang besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah kejuruan berdampak pada terciptanya keseimbangan jumlah institusi pendidikan sekolah kejuruan dengan sekolah umum. Bahkan mulai tahun 2017/2018 jumlah sekolah menengah kejuruan lebih banyak dibandingkan dengan sekolah menengah umum. Data terbaru untuk tahun 2017/2018 jumlah sekolah menengah secara keseluruhan sebanyak 27.205 unit, terdiri dari sekolah menengah umum sebanyak 13.495 unit dan sekolah kejuruan sebanyak 13.710 unit. Dengan demikian secara proporsi sekolah umum sebesar 49,6%, sedangkan jumlah sekolah kejuruan mencapai 50,4%. (Pusat Data dan

Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,2017; 2019).

APK sekolah menengah secara nasional tahun 2016/2017 mencapai 81,95%. Pada periode yang sama, APK sekolah kejuruan mencapai 35,27%, sedangkan APK sekolah menengah umum mencapai 46,68%. APK sekolah menengah secara nasional tahun 2018/2019 naik menjadi 88,55%. Pada periode yang sama, APK sekolah kejuruan mencapai 37,49%, sedangkan APK sekolah menengah umum mencapai 51,06%. Dengan demikian secara nasional telah terjadi peningkatan APK sekolah kejuruan masing-masing sebesar: 31,78% (2014/2015), 35,27% (2016/2017), dan 37,49% (2018/2019). Pada periode yang sama APK sekolah menengah umum juga meningkat masing-masing sebesar: 43,75% (2014/2015), 46,68% (2016/2017), dan 51,06% (2018/2019) (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,2017; 2018, 2019).

Bila digunakan data proporsi jumlah sekolah kejuruan dan sekolah umum tahun 2017/2018 dan data APK sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah umum tahun 2018/2019; maka dapat digambarkan secara kuantitatif sekolah menengah kejuruan terisi 74,38% dari kapasitas maksimalnya, sedangkan sekolah menengah umum terisi 103% dari kapasitas maksimalnya. Gambaran data ini jelas menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap sekolah umum tetap masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum, meskipun secara kuantitas sekolah kejuruan lebih besar dibandingkan dengan sekolah umum.

Cara yang efektif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan adalah dengan meningkatkan relevansi lulusan sekolah kejuruan dengan spesifikasi kecakapan yang diminta oleh dunia kerja. Sebagaimana

diungkapkan oleh Khurniawan dan Haryani (2016), kualitas lulusan sekolah kejuruan sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan pendidikan dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kualitas layanan pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang rendah akan berdampak signifikan pada kualitas tenaga kerja, yang dapat dilihat dari kesiapan bekerja para lulusan dan sejauh mana kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan spesifikasi kecakapan yang diminta oleh dunia kerja.

Apakah sekolah kejuruan sudah mampu memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar, hal ini secara umum dapat dilihat dari status akreditasinya. Kegiatan akreditasi antara lain akan menilai sejuah mana kelengkapan sarana prasarana, kegiatan pembelajaran, ketersediaan tenaga guru, dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Artinya, sekolah kejuruan yang terakreditasi baik dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajarannya sudah memenuhi standar yang ditetapkan, dan dari sana diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten selaras dengan tuntutan dunia kerja.

Data dari BAN SM tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 39% sekolah kejuruan terakreditasi A, 46% terakreditasi B, 13% terakreditasi C, dan 2% tidak terakreditasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa baru ada 39% dari total sekolah kejuruan di Indonesia yang mampu memberikan layanan pendidikan sangat bagus. Dalam iklim persaingan global yang sangat ketat, dan dengan memperhatikan perubahan tuntutan dunia kerja yang sangat cepat, tentu dibutuhkan layanan sekolah kejuruan yang sangat prima. Artinya, masih ada tantangan yang berat untuk menjadikan sekolah kejuruan berkualifikasi sangat

bagus untuk bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dan dari sanalah kelak diharapkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan akan dapat terus diperkuat.

Rasio guru dengan murid pada sekolah keujuruan juga perlu mendapat perhatian yang serius. Mengingat pendekatan pembelajaran pada sekolah kejuruan yang harus berorientasi pada konsep belajar tuntas (*mastery leraning*), maka Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 menetapkan *rasio minimal* jumlah siswa terhadap guru adalah 15:1. Peraturan ini belum menjelaskan berapa rasio maksimal jumlah siswa terhadap guru. Untuk tujuan efektifitas pembelajaran yang mengacu pada konsep belajar tuntas, idealnya harus ditetapkan rasio maksimal jumlah murid terhadap guru pada masing-masing satuan pendidikan. Hal ini untuk menjamin terciptanya layanan pendidikan dan pembelajaran yang optimal pada setiap sekolah kejuruan.

Data dari Direktorat PTK Pendidikan Menengah tahun 2013 mengungkapkan bahwa hampir semua program studi atau bidang keahlian pada sekolah kejuruan di Indonesia masih kekurangan guru produktif. Kekurangan guru produktif terbesar ada pada bidang teknologi & rekayasa, serta bidang bisnis dan manajemen (Khurniawan dan Haryani, 2016). Sampai dengan tahun 2016, Indonesia masih kekurangan guru produktif untuk SMK sebanyak 91.861 guru, dengan rincian 41.861 guru SMK negeri dan 50.000 guru SMK swasta (Tribunnews.com, 30/9/2017). Keberadaan para guru produktif sangat penting, karena mereka inilah yang dinilai kompeten mengajar siswa sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih. Keberadaan guru produktif sangat penting terutama untuk membekali siswa dengan berbagai

kecakapan praktis dan memperkuat kegiatan pembelajaran praktek yang selalu melekat pada kegiatan pembelajaran di sekolah kejuruan. Keberadaan guru produktif inilah yang juga menjadi pembeda utama antara sekolah kejuruan dengan sekolah umum.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa sekolah menengah kejuruan memiliki karakteristik yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan sekolah menengah lainnya. Khurniawan dan Haryani (2016) menjelaskan karakteristik sekolah kejuruan yang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Orientasi pendidikan kejuruan yang diarahkan untuk mempersiapkan lulusan yang siap bekerja. Ukuran utama keberhasilan lulusan sekolah kejuruan adalah sejauh mana para lulusannya bisa terserap dalam lapangan kerja.
2. Pengembagan sekolah kejuruan memerlukan persyaratan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan sekolah yang lain. Pada sekolah kejuruan, keberadaan sarana bengkel dan laboratorium menjadi persyaratan utama yang harus selalu ada. Hal inilah yang membuat sekolah kejuruan memerlukan biaya operasional yang sangat besar, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sekolah menengah lainnya.
3. Terkait kurikulum, ada pandangan yang kurang tepat dari masyarakat bahwa kurikulum pendidikan pada sekolah kejuruan hanya menekankan pada aspek perkembangan psikomotorik, dan dianggap kurang menyentuh aspek kognitif dan aspek afektif. Hampir sebagian besar warga masyarakat

memiliki pandangan tersebut. Tentu hal itu menjadi pandangan yang kurang tepat, karena untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan produktif diperlukan kemampuan pemahaman konsep teoritik yang memadai, kemampuan mengaplikasikan konsep teoritik yang sudah dipahami, dan kemampuan menampilkan sikap, perilaku, dan berbagai karakter positip.

4. Kriteria keberhasilan pada sekolah kejuruan bisanya menggunakan ukuran ganda, yaitu keberhasilan para siswa dalam menempuh studi di sekolah dan keberhasilan untuk segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya setelah mereka dinyatakan lulus.
5. Sekolah kejuruan harus memiliki kepekaan yang sangat tinggi dengan berbagai berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, dan perubahan tuntutan dalam dunia kerja. Berbagai hal ini wajib direspon dengan cermat oleh sekolah kejuruan, agar keberadaannya selalu relevan aau selaras dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan dunia kerja.
6. Sekolah kejuruan harus mampu menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat, khususnya dari kalangan dunia usaha dan dunia industri. Sekolah kejuruan memerlukan dukungan dari dunia usaha dan dunia industri, agar kurikulum pendidikan yang dikembangkan di sekolah kejuruan selalu selaras dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Keterlibatan dunia

usaha dan dunia industri yang intensif akan ikut menentukan kualitas lulusan dari sekolah kejuruan. Lulusan yang berkualitas dari sekolah kejuruan akan sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan produktifitas dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian harus tercipta adanya hubungan interdependensi antara sekolah kejuruan dengan masyarakat, khususnya dari kalangan dunia usaha dan dunia industri. Tanpa hubungan yang erat antara sekolah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri, maka praktek penyelenggaraan sekolah kejuruan tidak akan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal, dan akhirnya kurang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.

C. Meluruskan Mitos Tentang SMK

Anggapan umum dari berbagai kalangan yang masih memposisikan pendidikan kejuruan agak inferior dibandingkan dengan sekolah menengah umum sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Untuk mengangkat pamor SMK, tidak kurang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah hampir satu dasawarsa silam membuat *tagline*: "SMK BISA-HEBAT!!". *Tagline* ini secara intensif dipromosikan oleh pihak kementerian dengan tujuan untuk meyakinkan publik, baik orang tua, para siswa, dan pihak dunia usaha dan dunia industri; terhadap keberadaan SMK yang diharapkan dapat berkontribusi optimal untuk pembangunan ekonomi bangsa.

Problem SMK sebagai lembaga pendidikan menengah yang diposisikan agak inferior sebenarnya juga terjadi di

negara-negara maju. Di negara maju seperti Inggris pun muncul adanya mitos yang kurang tepat, yang dialamatkan kepada pendidikan kejuruan. Lucas, et al (2012) menyebut 8 mitos, yang seolah-olah hendak menggambarkan bahwa pendidikan kejuruan tidak memerlukan aktifitas pembelajaran yang komplek, dianggap hanya berbasis praktek kerja yang tidak memerlukan kemampuan intelegensi yang memadai, dan dianggap tidak memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajarannya.

Ke-8 mitos tentang pendidikan kejuruan yang dimaksudkan oleh Lucas, et al (2012), meliputi:

1. Pembelajaran berbasis praktek dianggap sebagai kegiatan belajar yang hanya membutuhkan kemampuan berpikir sederhana.
2. Orang-orang pintar akan tumbuh dari kegiatan pembelajaran diluar kegiatan praktek.
3. Seseorang dianggap sudah bisa memahami sesuatu, meskipun belum belajar melakukan dan mempraktekkan sesuatu. Pemahaman bisa diperoleh tidak harus melalui praktek.
4. Orang-orang yang pandai tidak beraktifitas pada tempat-tempat praktek yang kotor.
5. Orang-orang pandai tidak bekerja dengan menggunakan tangan, tetapi menggunakan otak yang menggambarkan tingkat kemampuan berpikir.
6. Pendidikan berbasis praktek hanya untuk mereka yang berkemampuan akademik rendah.
7. Pembelajaran berbasis praktek hanya membutuhkan kemampuan berpikir level rendah (berpikir sederhana).

8. Pembelajaran berbasis praktek dianggap sebagai aktifitas pembelajaran pelengkap, aktifitas pembelajaran praktek dianggap berada di bawah kegiatan pembelajaran yang menggunakan kemampuan berpikir.

Ke-8 mitos tentang pendidikan kejuruan sebagaimana diungkapkan dalam beberapa aspek ada kesamaan dengan anggapan umum sebagian warga masyasarakat di Indonesia, yang seolah-olah masih mendudukkan sekolah kejuruan di bawah bayang-bayang sekolah umum. Sekolah kejuruan dianggap hanya menghasilkan siswa yang cakap dan trampil sesuai bidang yang dipalajari, tetapi dianggap "kalah pintar" dibandingkan dengan siswa pada sekolah umum. Sebagian besar warga masyarakat, mungkin termasuk oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan; menyatakan bahwa bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi maka merekomendasikan siswa untuk menempun pendidikan di sekolah umum. Tetapi bagi siswa yang ingin bekerja, direkomendasikan untuk menempun pendidikan pada sekolah kejuruan. Itulah sebabnya, hingga saat ini siswa sekolah menengah kejuruan rata-rata berasal dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah, dengan kemampuan akademik level menengah ke bawah. Hal ini sejalan dengan tingkat kemampuan para orang tua kelompok sosial ekonomi menengah kebawah dalam membiayai pendidikan putra-putrinya. Mereka merasa hanya mampu membiayai pendidikan sampai level sekolah menengah, dan mengharapkan putra-putrinya segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari sekolah.

Dalam bukunya, "Does Education Matter?", Wolf (2002) melakukan kritik tajam terhadap kegiatan pendidikan yang hanya condong mengukur keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan hanya dilihat dari nilai akademik. Kemampuan akademik inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah para siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan pada level yang lebih tinggi. Kepemilikan kemampuan dan kecakapan yang relevan dengan dunia kerja kurang dijadikan penilaian keberhasilan dalam mengikuti pendidikan. Kritik Wolf (2002) sebenarnya juga relevan dengan sistem penilaian pembelajaran di Indonesia, yang juga lebih menekankan aspek akademis, dan menilai keberhasilan belajar dilihat dari angka raport atau raihan nilai indeks prestasi.

D. Pentingnya Belajar Tuntas Dalam Pembelajaran di SMK

Ada satu hal utama yang harus menjadi pedoman para penyelenggara pembelajaran di SMK, yaitu pentingnya mengimplementasikan konsep belajar tuntas (*mastery learning)*. Jika menggunakan konsep belajar tuntas, maka sebenarnya tidak perlu ada perdebatan tentang pembelajaran berbasis teori dan pembelajaran praktek. Sebagaimana anggapan umum yang berkembang selama ini bahwa pendidikan di SMK dinilai lebih menekankan praktek, sedangkan pendidikan di sekolah menengah umum dianggap mengutamakan pembelajaran berbasis akademik atau teori.

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kejuruan, kajian teoritik dan kegiatan praktek ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pembahasan teori yang

mendalam tanpa diikuti dengan kegiatan penerapan teori (praktek) sesungguhnya hanya akan menghasilkan para lulusan dengan tingkat pemahaman yang semu (*pseudo of understanding*). Mereka mungkin memahami tentang sesuatu hal, tetapi tidak mampu berperilaku atau bekerja sesuai bidang ilmu yang sudah dipahaminya. Sebaliknya, melaksanakan kegiatan praktek tanpa dilandasi pengetahuan yang memadai tentang apa yang akan dipraktekkan juga berpotensi akan menghasilkan berkelas *pekerja-tukang*, menciptakan pemborosan dan menghasilkan ouput yang tidak maksimal. Gabungan antara penguasaan konsep teoritik yang diikuti dengan kemampuan mengaplikasikan teori akan menghasilkan tingkat pemahaman yang mendalam (*profound of understanding*) dan menciptakan efisiensi, dan berharap bisa dihasilkan lulusan berstandar *employability*. Gabungan antara penguasaan aspek teoritik dan kemampuan mengaplikasikan konsep teoritik inilah yang disebut dengan konsep belajar tuntas (*mastery learning)*. Konsep belajar tuntas harus diterapkan di sekolah kejuruan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Apa keuntungan yang didapatkan jika sekolah kejuruan melaksanakan konsep belajar tuntas dengan sungguh-sungguh? Dengan memperhatikan konsep belajar tuntas sebagaimana diuraiakan di atas, maka setidaknya dapat diidentifikasi ada 6 performa lulusan sekolah kejuruan, yaitu:

1. Dihasilkannya lulusan yang trampil dalam melaksanakan pekerjaan rutin sesuai dengan bidang keahliannya, yang ditandai dengan kepemilikan pemahaman dan ketrampilan dalam pemanfaatan material, peralatan, perilaku kerja yang harus dijalankan, kemampuan menggunakan dan

merawat perlengkapan kerja, dan penguasaan konsep dan ketrampilan yang mendukung kinerja.

2. Dihasilkannya lulusan yang memiliki kemampuan menggunakan akal atau pikiran secara optimal dalam menjalankan pekerjaan, yang ditandai dengan prinsip bekerja tuntas, yaitu melaksanakan bidang pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sampai tuntas dengan hasil yang memuaskan. Pentingnya kepemilikan akal juga tampak ketika seseorang menghadapi jalan buntu dalam sebuah proses kerja. Dalam keadaan darurat, seseorang yang memiliki akal biasanya akan mampu menggunakan insting atau kecakapan tersembunyi untuk mengurai permasalahan yang nyaris tidak bisa dipecahkan. Kemampuan akal seperti ini sesungguhnya semacam gerakan reflek, dan ia tidak tiba-tiba bisa dimiliki oleh seseorang. Gerak reflek ini merupakan buah dari kemahiran, karena seseorang secara terus menerus melakukan praktek kerja dalam bidang tertentu. Seseorang yang mahir dalam bidang tertentu biasanya mampu membaca tanda-tanda atau sinyal yang dikirimkan oleh lingkungan pekerjaannya, dan sinyal itu digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan cepat dalam kondisi darurat.
3. Dihasilkannya lulusan yang memiliki bekal literasi fungsional, baik yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi, kepemilikan berbagai kecakapan fungsional, kemampuan numerasi, dan kemampuan mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

4. Dihasilkannya lulusan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, yang ditandai dengan kepekaan dan kemampuan memecahkan permasalahan pekerjaan yang bersifat teknis; sehingga setiap ada gangguan yang bersifat teknis mereka bisa menyelesaikannya tanpa menunggu perintah, dimilikinya dorongan untuk selalu bekerja yang terbaik, dan merasa bangga apabila mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
5. Dihasilkannya lulusan yang memiliki sikap dan kepekaan dalam bidang bisnis, perdagangan, orientasi kewirausahaan, memiliki kemampuan mengelola keuangan, dan memiliki kepekaan sosial. Hal ini antara lain ditandai dengan berbagai sikap dan perilaku: tepat waktu, memberikan pelayanan dengan sikap disiplin, bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk sebuah urusan yang sudah disepakati dengan rekanan, memberikan layanan prima dan berusaha untuk melampaui apa yang menjadi harapan pelanggan.
6. Dihasilkannya lulusan yang termasuk dalam kategori pekerja terdidik (*employability*), yang ditandai dengan kesiapan untuk bekerja, kesiapan untuk meningkatkan kecakapan kerja sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia kerja, dan memiliki dorongan untuk terus belajar dan memperbaharui kecakapan kerja.

E. Peran SMK Dalam Memperkuat Perkembagan Ekonomi

Pendidikan kejuruan dapat menjadi tulang punggung perbaikan ekonomi negara dalam jangka panjang yang lebih futuristik jika kompetensi lulusannya diarahkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan bisnis (Mulyati, Soegiyono, & Purwanti,2014). Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pencari kerja dengan latar belakang lulusan sekolah kejuruan juga menduduki porsi yang tinggi. Sebagai gambaran, porsi pencari kerja berlatar belakang lulusan sekolah kejuruan pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 17% dan 18,4% dari total pencari kerja (Khurniawan dan Haryani,2016). Kesuksesan kegiatan pendidikan pada sekolah kejuruan akan dinilai dari seberapa besar lulusannya dapat terserap di dunia kerja atau berwirausaha. Untuk menjadi lembaga yang unggul, SMK diharapkan mampu menyiapkan siswanya agar memiliki kompetensi kerja sesuai tuntutan dunia industri atau memberi berbagai macam bekal pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi seorang wirausaha (*entrepreneur*).

Berbagai negara maju memberikan perhatian yang besar pada pendidikan kejuruan yang dianggap berkontribusi sangat signifikan bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara Uni Eropa menyatakan bahwa pendidikan kejuruan dan pelatihan akan terus memegang peran penting dalam mengiringi perubahan aktifitas dan kehidupan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara Uni Eropa juga meyakini bahwa pada tahun 2020 hampir setengah dari semua jenis profesi atau pekerjaan mensyaratkan kualifikasi kecakapan level menengah. Pendidikan kejuruan dan

pelatihan akan berkontribusi besar untuk penyiapan tenaga kerja dengan kualifikasi level menengah (European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop),2011).

Pendidikan kejuruan memang dirancang dan fokus pada kegiatan pembelajaran yang diarahkan untuk mempersiapkan siswa untuk siap bekerja atau mempelajari kecakapan kerja tertentu. Dengan demikian pendidikan kejuruan berperan penting untuk meningkatkan tingkat produktifitas dan daya saing. Oleh karena itu, beberapa literatur menyatakan bahwa pendidikan kejuruan memang tidak dimaksudkan untuk membekali kemampuan siswa yang bersifat akademik. Pendidikan kejuruan lebih fokus pada kegiatan pembelajaran yang bersifat praktek (Cornford,2005). Hal ini tidak jauh berbeda dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia yang diarahkan untuk mempersiapkan para siswa agar setelah lulus memiliki kesiapan untuk bekerja dan berwirausaha (Mulyati, Soegiyono, & Purwanti,2014).

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (2011) yang mengutip pendapat Grubb & Ryan (1999) menjelaskan pelaksanaan pendidikan kejuruan dan pelatihan yang ada di uni Eropa, dan dikelompokkan menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

Pertama, pendidikan kejuruan dan pelatihan untuk tahap *Pre-employment*, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan para lulusannya memasuki dunia kerja. Pada berbagai negara di dunia, dikenal dengan pendidikan kejuruan dan pelatihan, atau kalau di Indonesia disebut dengan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang secara teknis kegiatan operasionalnya dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah dalam

format klasikal, di bengkel kerja, bisnis center, dan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri (prakerin).

Kedua. Pendidikan kejuruan dan pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan kecakapan kerja (*upgrading training*), yang diselenggarakan untuk memberikan pelatihan tambahan bagi seseorang yang sudah bekerja. Kegiatan ini diselenggarakan untuk merespon perubahan tuntutan kecakapan yang diminta oleh dunia kerja, perkembangan industri atau tempat kerja yang melaju pesat, perubahan teknologi, dan perubahan dunia yang semakin komplek.

Ketiga, pendidikan kejuruan dan pelatihan yang ditujukan untuk *retraining*, yaitu memberikan pelatihan kepada seseorang yang kehilangan pekerjaan karena ketidaksesuaian antara pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan yang baru. *Retraining* dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka yang kehilangan pekerjaan agar dapat memasuki dunia kerja yang baru. Kegiatan ini juga bisa ditujukan bagi mereka yang mendapatkan promosi pekerjaan yang baru dan mensyaratkan kecakapan atau keahlian tertentu.

Keempat, pendidikan kejuruan dan pelatihan yang dikemas dalam format remedial. Kegiatan pendidikan ditujukan untuk melayani mereka yang lama belum mendapatkan pekerjaan, atau belum memiliki pengelaman kerja sama sekali. Kegiatan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan kecakapan kerja terbaru, sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh dunia kerja.

Di Indonesia, kategori pertama lazim dilaksanakan oleh berbagai sekolah menengah kejuruan (SMK), sebagai bagian dari pendidikan formal yang dalam pelaksanaan dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan untuk kategori kedua sampai dengan kategori keempat banyak dilaksanakan oleh berbagai lembaga kursus yang merupakan bagian dari pendidikan non formal dan berbagai balai latihan kerja yang operasionalisasinya di bawah naungan departemen atau kementerian tenaga kerja.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan kejuran dan pelatihan yang dapat berjalan optimal akan banyak memberikan manfaat bagi peserta didik, dunia usaha atau industri, masyarakat, dan kualitas perekonomian nasional. Menurut Cedefop (2011), ada dua keuntungan utama dari kegiatan pendidikan kejuruan dan pelatihan yang beroperasi dengan baik, yaitu: keuntungan ekonomi dan keuntungan sosial. Baik keuntungan ekonomi maupun sosial kemudian dapat dianalisis dari sudut pandang mikro, meso, dan makro.

Keuntungan ekonomi yang didapat dari pendidikan kejuruan dan pelatihan dari sudut pandang: (a) mikro meliputi: kepemilikan status pekerjaan dan jaminan karir, peningkatan pendapatan, dan peluang kerja; (b) meso, meliputi: peningkatan produktifitas pekerja dan peningkatan kinerja perusahaan; (c) makro, meliputi: ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi yang diminta dunia kerja dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai negara di dunia melaporkan bahwa kegiatan pendidikan kejuruan yang berfungsi optimal akan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan dunia kerja, menekan angka pengangguran, dan memberikan peluang jaminan karir. Pendidikan kejuruan pada akhirnya berkontribusi besar bagi kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas individu.

Keuntungan sosial yang didapat dari pendidikan kejuruan dan pelatihan dari sudut pandang: (a) mikro, meliputi:

motivasi, semangat kerja, dan kepuasan hidup; (b) meso, meliputi: terbukanya peluang kerja bagi kelompok warga yang terpinggirkan dan kurang beruntung, misalnya bagi kaum difabilitas; (c) makro, meliputi: jaminan berjalannya proses peralihan estafet antar generasi, kesehatan, kohesi sosial, dan meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Dari dimensi sosial, pendidikan kejuruan yang berfungsi optimal akan ikut memperkuat kualitas kehidupan sosial yang ditandai dengan adanya dukungan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, merasa berharga, dan terciptanya tertib lingkungan.

Di Indonesia, keuntungan dari kegiatan pendidikan kejuruan dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) bagi siswa: peningkatan kualitas diri, peningkatan penghasilan, penyiapan bekal pendidikan untuk studi lanjut, penyiapan diri agar berguna bagi masyarakat dan bangsa; (b) bagi dunia kerja: meyiapkan tenaga kerja berkualitas tinggi, dapat meringankan biaya usaha, dan membantu mengembangkan dunia usaha; (c) bagi masyarakat: dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktifitas nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan negara, mengurangi tingkat pengangguran (Direktorat PSMK, 2017).

BAB III

PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DI SMK

A. Pentingnya Pendidikan Kewirausahaan

Semua negara di dunia mengakui bahwa kewirausahaan adalah merupakan kunci dari tumbuhnya inovasi, berkontribusi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan stabilitas politik suatu negara. Pada prinsipnya, kewirausahaan adalah merupakan manifestasi dari penggunaan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola, memproduksi, melayani, mengkreasikan produk atau jasa, dan menciptakan peluang pasar. Kewirausahaanlah yang membuat aktifitas ekonomi menjadi lebih kompetitif, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Acs, et al (2018) menyatakan pewirausaha berperan besar dalam menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi, meingkatkan kualitas kehidupan dengan ikut menciptakan lapangan kerja, memberikan solusi atas munculnya berbagai persalahan kehidupan masyarakat, mengkreasikan teknologi

atau cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, dan saling mempertukarkan berbagai ide gagasan dalam kehidupan masyarakat global. Selanjutnya dijelaskan oleh Acs, et al (2018) dalam laporan GEI 2018 bahwa berbagai kondisi yang mendukung tumbuh kembangkan kewirausahaan, secara otomatis juga akan menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Gerakan yang diarahkan untuk mendukung tumbuh suburnya kegiatan kewirausahaan dipastikan akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Berdasarkan pandangan GEI, maka pengembangan kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa sudah semestinya ditempatkan pada prioritas utama.

GEI secara rutin menerbitkan laporan peringkat kewirausahaan dari negara di seluruh dunia. Laporan GEI dari tahun ke tahun selalu mendudukkan negara-negara yang memiliki peringkat kewirausahaan unggul adalah negara-negara yang kehidupan sosial ekonominya maju dan berkembang pesat. Dengan kata lain, laporan GEI membuktikan bahwa cara yang dinilai efektif untuk membangun keunggulan sebuah bangsa dapat dilakukan dengan memperkuat program kewirausahaan, khususnya bagi para generasi muda.

Indeks kewirausahaan global (GEI) mengukur berbagai indikator yang menjelaskan sejauh mana negara bisa menghadirkan situasi dan kondisi lingkungan yang mendukung tumbuh suburnya aktifitas kewirausahaan. GEI mengidentifikasi empat belas komponen yang diyakini berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan berkembangnya kegiatan kewirausahaan, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Komponen Pembentuk Lingkungan Yang Kondusif Bagi Aktivitas Wirausaha

No	Pilar	Sub Indek	Cara Pengukuran
1	Persepsi tentang ketersediaan peluang	Sikap, berkait pandangan umum penduduk terhadap pewirausaha dan aktifitas kewirausahaan	Apakah semua penduduk mampu mengidentifikasi peluang untuk memulai kegiatan usaha, dan apakah institusi pemerintah menciptakan kemudahan bagi penduduk untuk mendirikan kegiatan usaha sesuai dengan peluang yang sudah diidentifikasi.
2	Kecakapan untuk memulai usaha		Apakah semua penduduk memiliki berbagai kecakapan yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha sesuai dengan bidang usaha yang diminatinya, dan apakah tersedia pendidikan lanjutan sampai jenjang pendidikan tinggi yang menekankan kajian pada pengembangan usaha.
3	Penerimaan terhadap resiko		Apakah para individu mau dan sanggup menanggung resiko dengan menjalankan kegiatan usaha. Apakah lingkungan cenderung mendukung kegiatan usaha, atau apakah instansi pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan pendirian usaha justru dinilai menimbulkan resiko usaha.
4	Jejaring		Apakah para pewirausaha mengetahui aktifitas usaha satu sama lain, dan secara geografis seberapa terkosentrasi jaringan mereka.
5	Dukungan budaya		Bagaimana negara memandang aktifitas wirausaha? Apakah mudah untuk menjadi pewirausaha, atau apakah perilaku koruptif dan kolutif justru mempersulit aktifitas wirausaha dibandingkan dengan aktifitas lainnya?

No	Pilar	Sub Indek	Cara Pengukuran
6	Persepsi tentang peluang untuk menjadi pewirausaha	Aspek kemampuan, menggambarkan berbagai karakteristik pewirausaha dan berbagai aktifitas bisnisnya	Apakah pewirausaha lebih termotivasi menjadi pewirausaha karena kemudahan yang dipersepsikan lebih kuat dibandingkan karena kebutuhan untuk menjadi pewirausaha? Apakah pemerintahan memberikan jaminan kemudahan untuk menjadi pewirausaha?
7	Alih teknologi		Apakah sektor teknologi berkembang pesat dan para pelaku usaha bisnis dengan mudah dapat menggunakan teknologi untuk menopang kegiatan usahanya?
8	Modal manusia		Apakah para pewirausaha terdidik dengan baik, terlatih dalam menjalankan aktifitas bisnis, dan memiliki daya tawar yang memadai dalam pasar tenaga kerja?
9	Kemampuan berkompetisi		Apakah para pewirausaha menghasilkan barang dan jasa yang unik dan mampu menjual barang dan jasa tersebut ke dalam pasar?

No	Pilar	Sub Indek	Cara Pengukuran
10	Inovasi produk	Aspek aspirasi, menggambarkan aspek kualitas dari para pelaku usaha bisnis baru.	Apakah negara mampu mengembangkan produk baru dan memanfaatkan teknologi baru untuk pengembangan produk?
11	Proses inovasi		Apakah para pelaku usaha bisnis menggunakan teknologi baru dan apakah mereka mampu merekrut sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung usaha mereka?
12	Pertumbuhan yang tinggi		Apakah para pelaku usaha bisnis berniat untuk menumbuhkembangkan usaha dan memiliki kemampuan dan strategis untuk menciptakan pertumbuhan usaha?
13	Internasionalisasi		Apakah para pelaku usaha memiliki keinginan yang kuat untuk memasuki pasar global, dan apakah kegiatan ekonomi memberikan stimulus yang kuat untuk terus menghasilkan ide yang bernilai dalam pasar global
14	Resiko modal		Apakah modal cukup tersedia baik dari sektor individu maupun dari para investor?

Hampir semua pilar (pilar 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, dan 13) sebagaimana dijelaskan di atas berkaitan dengan kaulitas sumber daya manusia apakah didukung dengan metal wirausaha yang kuat atau tidak, sedangkan yang lain (pilar 5, 6, 10, dan 14) berkait dengan dimensi lingkungan sosial budaya, kebijakan pemerintah, dan sektor permodalan apakah mendukung tumbuh suburnya kegiatan wirausaha atau tidak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya

penguatan pendidikan kewirausahaan bagi para generasi muda. Pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan secara intensif di berbagai jenjang, baik dalam format pendidikan formal non formal, maupun informal diharapkan akan memperkuat berbagai pilar sebagaimana disebutkan di atas. Jika berbagai pilar yang berkaitan dengan sumber daya manusia cukup kuat, maka pilar lingkungan sosial budaya kebijakan pemerintah dan permodalan akan mengikutinya. Tabel berikut menunjukkan peringkat GEI Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara Asean.

Tabel 3.2 Peringkat GEI Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Asean

No	Negara	Peringkat GEI	Skor GEI
1	Indonesia	94	21%
2	Singapura	27	53%
3	Malaysia	58	33%
4	Thailand	71	27%
5	Brunai Darusalam	53	34%
6	Philipina	84	24%
7	Vietnam	87	23%
8	Myanmar	127	14%
9	Kamboja	113	18%

Sumber: GEI (2018)

Karena pentingnya kewirausahaan bagi kemajuan perekonomian suatu negara, di berbagai negara maju telah memasukkan pendidikan kewirausahaan sebagai kurikulum wajib pada berbagai jenjang pendidikan. Berbagai negara di Eropa, misalnya; telah menjadikan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan berbasis kegiatan usaha

sebagai sebuah gerakan nasional yang harus diikuti oleh semua warga negara (Brunila, 2012; Eurydice, 2016). Dengan menjadikan sebauah gerakan nasional, maka berbagai negara maju memberikan dorongan dan perhatian besar agar pelaksanaan kegiatan pendidikan kewirausahaan benar-benar berjalan dengan optimal.

Negara-negara maju berkepentingan agar kewirausahaan benar-benar menjadi bagian dari budaya setiap warga negara. Negara memberikan berbagai fasilitas dan kebijakan yang mendukung berkembangnya kegiatan kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan pilar kelima dari GEI. Dengan menjadikannya sebagai sebuah gerakan nasional kewirausahaan, maka semua aktifitas pendidikan akan dijalankan dengan diwarnai dengan nilai-nilai kewirausahaan. Negara-negara maju seperti di Eropa mejadikan kewirausahaan sebagai kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh setiap warga negara (Minna et al, 2018).

Kewirausahaan diharapkan bisa menjadi sebuah kecakapan yang dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Artinya setiap gerak, langkah, dan aktifitas warga negara di Eropa diharapkan selalu diwarnai dengan nilai-nilai kewirausahaan. Dengan memiliki budaya wirausaha, setiap warga negara diharapkan menjadi pribadi yang mampu bertindak dan bertanggung jawab, aktif, kreatif, inovatif, terbuka dan peka terhadap perubahan lingkungan, mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada, mampu memperhitungkan resiko dari setiap aktifitasnya, dan mampu merencanakan dan mengelola setiap kegiatannya dengan cermat. Negara-negara maju sangat menyadari dan mengharapkan bahwa setiap warga negaranya mampu menjadi warga yang produktif, sehingga keberadaannya

memberikan kontribusi riil bagi perkembangan ekonomi negaranya (Minna et al, 2018).

B. Penguatan Iklim Kewirausahaan

Oleh karena itu, semua negara di dunia dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha sendiri bisa tampil dalam bentuk dan ukuran yang sangat beragam, mulai dari kegiatan usaha kaki lima di pinggiran jalan dan di pusat keramaian, sampai dengan kegiatan usaha menengah dan usaha besar. Tetapi terlepas dari berbagai bentuk dan ukuran kegiatan usaha, faktor lingkungan dimana kegiatan wirausaha itu dijalankan memegang peranan penting yang sangat menentukan keberlanjutan dan tumbuh kembangnya kegiatan usaha. Itulah sebabnya dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah dan pimpinan berbagai organisasi sosial ekonomi dan lembaga pendidikan untuk menciptakan iklim atau kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya kegiatan kewirausahaan.

Wirausaha sejatinya melekat pada setiap manusia yang tampil di dalam kehidupan dunia dalam keadaan belum final. Untuk bisa hidup di dunia dengan lebih manusiawi, setiap manusia dituntut untuk mengkreasikan berbagai kebutuhan hidupnya. Maka setiap manusia sesungguhnya dituntut untuk mampu memerankan diri sebagi pencipta barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Dari aktifitas usaha seperti inilah yang kemudian membuat kehidupan manusia di dunia semakin hari kian gemerlap, mudah, dan nyaman. Inilah yang hendak terus dikatakan bahwa sesungguhnya kegiatan wirausaha akan terus bersentuhan dengan upaya

untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup manusia.

Wirausaha adalah hak sekaligus kewajiban setiap orang. Sebagai makhluk yang belum final, setiap orang wajib untuk berkreasi dan berinovasi untuk hadirnya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkannya. Pada saat yang sama, setiap orang juga berhak untuk menikmati kesejahteraan hidup; yang antara lain dapat diukur dari sampai sejauh mana ia dapat menikmati barang dan jasa yang mendukung kebutuhan hidupnya. Bila upaya pemenuhan kesejahteraan adalah merupakan hak setiap orang, maka berwirausaha sesungguhnya juga menjadi hak setiap orang. Tidak boleh ada klaim atau pengakuan bahwa wirausaha adalah profesi kelompok orang atau etnis tertentu. Sekali lagi, semua orang berhak dan wajib untuk menjadi pewirausaha sesuai dengan level dan kapasitas kewirausahaannya masing-masing.

Tidak menjadi masalah jika aktifitas kewirausahaan seseorang hanya sampai pada level memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, misalnya; menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang dikonsumsi pada hari itu. Dalam level yang paling sederhana, memasak untuk kebutuhan makan dan minum pada hari itu juga harus diakui sebagai aktifitas wirausaha, karena tentu tidak manusiawi jika ada orang yang makan bahan mentah. Tetapi jika ada orang yang berkreasi dan berinovasi dengan membuat makan cepat saji untuk melayani para pekerja yang tidak sempat memasak, tentu ia akan mendapatkan bonus ekonomi yang lebih banyak dari para konsumennya. Pada akhirnya, setiap orang akan mencari celah dan peluang untuk menentukan aktifitas wirausaha apa yang dinilai paling menguntungkan dan menyejahterakan bagi dirinya. Itulah esensi hak dan kewajiban berwirausaha bagi setiap orang.

Dukungan konsisten dari semua pihak untuk memastikan bahwa spirit berwirausaha dapat tumbuh dan berkembang pada setiap orang harus terus mengalir tanpa putus. Pilar penting yang dinilai berperan besar untuk mendukung tumbuhnya spirit wirausaha adalah lingkungan yang mendukung kegiatan kewirausahaan, peraturan atau perundang-undangan yang dilaksanakan dengan konsisten untuk terciptanya kepastian hukum, dan sistem pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk memperkuat spirit kewirausahaan. Iklim kewirausahaan yang kondusif membutuhkan dukungan budaya wirausaha yang kuat dari setiap warga negara. Lingkungan yang kondusif pada akhirnya akan dapat menumbuhkan minat berwirausaha, dan puncaknya dapat meyakinkan setiap orang untuk benar-benar menjadi pewirausaha. Demikian halnya, cerita kesuksesan para pewirausaha dalam menjalankan kegiatan usaha juga akan dapat mendorong lahirnya generasi baru yang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan usaha. Setidaknya, hal itu akan menarik minat para calon pewirausaha baru untuk ikut berburu kesuksesan dalam kegiatan wirausaha. Minat untuk berwirausaha dari para generasi muda merupakan modal utama dari suatu negara untuk suatu saat bisa mencapai kualitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Litan, 2014).

Kegiatan kewirausahaan di kalangan generasi muda akan berkembang dengan baik apabila ada dukungan institusional yang memberikan insentif dan kesempatan kepada mereka untuk terus berkreasi dan mengambil resiko. Ada penghargaan yang memadai dari institusi kepada mereka yang berkarya, dan pada saat yang sama; ada permakluman yang cukup apabila karya yang dihasilkan belum bisa memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Bagi generasi

muda yang sedang menempuh studi, dukungan institusi bisa datang dari sekolah atau lembaga pendidikan dimana ia sedang belajar. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kegiatan wirausaha, faktor lingkungan yang kondusif dan dukungan institusi dinilai berperan lebih besar dibandingkan dengan unsur-unsur lain, seperti perkembangan teknologi dan ketersediaan sumber dana (de Soto, 2014).

Daniel Isenberg, pendiri "The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project" menyampaikan ada enam pilar lingkungan yang dinilai sangat mendukung berkembangnya kegiatan kewirausahaan, meliputi: (a) berbagai kebijakan dan kepemimpinan yang mendukung kegiatan wirausaha, (b) faktor budaya yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan wirausaha, (c) dukungan ketersediaan sumber pembiayaan, (d) kualitas modal manusia, (e) ketersediaan pasar bagi produk yang dihasilkan pewirausaha, dan (f) adanya dukungan institusional dan infrastruktur yang memadai (Nadgrodkiewicz, 2014). Enam pilar ini dapat diadopsi oleh sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya minat kewirausahaan para siswa. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah untuk mengambil kebijakan yang memberikan ruang yang besar bagi kegiatan pembelajaran dalam bidang kewirausahaan.

Swiercz & Lydon (2002) menyatakan bahwa salah satu faktor fundamental yang berpengaruh besar terhadap berkembangnya budaya wirausaha di masyarakat adalah kaum muda yang diberikan pendidikan kewirausahaan dan dipersiapkan untuk berwirausaha. Proses pembudayaan wirausaha tentu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Seyogyanya kegiatan itu harus dilaksanakan secara konsisten, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan

tinggi. Para orang tua, anggota keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, para pendidik, staf adminsitrasi, lembaga pemerintahan, dan para pejabat yang membuat kebijakan harus memiliki komitmen yang sama dan satu suara tentang pentingnya penguatan budaya wirausaha di kalangan siswa dan semua generasi. Kegiatan pembelajaran di sekolah harus diwarnai dengan nilai-nilai kewirausahaan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan kewirausahaan di sekolah harus mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Ketersediaan lembaga pendidikan yang memberikan perhatian besar bagi kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh para siswa merupakan faktor utama yang ikut memperkuat iklim kewirausahaan (Vina et al, 2014)

C. Peran Dukungan Lingkungan keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Dalam Memperkuat Minat Berwirausaha

Penguatan minat berwirausaha bagi para siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah yang kondusif, dukungan para guru, dan faktor kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung tumbuhnya perilaku wirausaha dari para siswa. Kepemimpinan yang dilandasi semangat kewirausahaan akan berkontribusi besar dalam menciptakan suasana lingkungan yang mendukung tumbuhnya spirit kewirausahaan, terbuka terhadap ide dan cara kerja baru yang lebih baik, toleran terhadap perbedaan cara pandang, berani mengambil resiko, melahirkan perilaku kreatif dan inovatif; dan puncaknya akan memperkuat daya saing (Swiercz & Lydon, 2002; Bagheri & Pihie, 2010; Ireland & Hitt, 1999).

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, kepemimpinan yang dilandasi spirit kewirausahaan akan ditandai dengan perilaku dan karakter pemimpin, sebagai berikut.

1. Berani mengambil resiko (Kuratko, 2007; Currie et al, 2008; Strubler & Redekopp, 2010; Kempster & Cope, 2010; Bagheri & Pihie, 2010). Hampir semua pemimpin yang berjiwa wirausaha memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil resiko yang lebih kuat dibandingkan dengan para pemimpin lainnya (Stewart & Roth, 2004). Ia berani membuat keputusan, mengambil tindakan, atau membuat kebijakan, meski dampak dari keputusan, tindakan, dan kebijakannya itu belum tentu memberikan dampak yang menguntungkan. Ia akan bertanggung jawab terhadap apa pun dampak yang ditimbulkan oleh keputusan, tindakan, dan kebijakan yang sudah dijalankan (Chen, 2007). Ada perbedaan besar antara pemimpin berjiwa wirausaha dengan pemimpin berlevel manajer. Pemimpin berjiwa wirausaha selalu mampu menampilkan tindakan kreatif, dan selama menjalankan tugas kepemimpinan akan terus menerus mencari dan memanfaatkan peluang yang dinilai bermanfaat untuk kemajuan organisasi. Sedangkan, manajer cenderung menjalankan tugas yang bersifat rutin dan fokus pada pencapaian tujuan. Pemimpin berjiwa wirausaha fokus pada pencarian cara kerja baru yang dinilai lebih efisien untuk mencapai tujuan, sedangkan manajer cenderung hanya berorientasi pada tujuan, meskipun kadang dengan cara kerja lama yang

tidak sesuai dengan tuntutan perubahan. European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (2014) membeberkan karakteristik pemimpin berjiwa wirausaha dengan pemimpin berperilaku layaknya manajer. Perilaku pemimpin berjiwa wirausaha dalam menjalankan tugas kepemimpinan lebih digerakkan oleh kekuatan dari dalam dirinya, sehingga daya inisiatif, kreatifitas, sikap proaktif, dan dorongan untuk selalu mencari cara kerja terbaik akan selalu mewarnai perilaku kepemimpinannya. Sedangkan pemimpin berkategori manajer perilaku kepemimpinannya lebih banyak digerakkan oleh kekuatan di luar dirinya. Kekuatan di luar diri manajer antara lain adalah peraturan yang ditetapkan oleh atasan dan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Pemimpin berjiwa manajer cenderung menjalankan tugas rutin, sedangkan pemimpin berjiwa wirausaha cenderung mencari terobosan baru.

2. Proaktif (Swiercz & Lydon, 2002; Kuratko, 2007; Surie & Ashley, 2007; Bagheri & Pihie, 2010). Menurut Okudan (2004), sikap proaktif ditunjukkan oleh perilaku yang diarahkan untuk mengantisipasi permasalahan yang diprediksi akan muncul pada masa yang akan datang. Untuk itu, ia akan aktif mengkreasikan nilai-nilai baru da mencari cara kerja baru yang dinilai lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Ia berusaha menjemput dunia yang terus akan berubah, sehingga tidak sampai tergilas oleh perubahan. Ia lebih memiliki kesiapan dini untuk

menghadapi perubahan yang sewaktu-waktu menghampiri dirinya. Kuratko (2007) dan Chen (2007) menyatakan bahwa sikap proaktif, inovatif, keberanian mengambil resiko merupakan tiga kecakapan utama dari para pemimpin berjiwa wirausaha yang akan sukses mengembangkan organisasi dimana ia berada. Pemimpin dengan sikap proaktif yang kuat lazimnya akan mampu mengembangkan kreativitas dan ketekunan dalam mewujudkan visi lembaganya, dan puncaknya akan berminat kuat untuk terus mewarnai setiap perilaku kepemimpinannya dengan nilai-nilai kewirausahaan.

3. Visioner (Surie & Ashley, 2007; Strubler, 2010; Kempster & Cope, 2010). Semua pemimpin harus memiliki visi, yaitu sesuatu yang diimpikan dapat diwujudkan oleh organisasi. Seseorang yang pikirannya terkait dengan visi organisasi, maka ia akan memiliki komitmen kuat untuk mengupayakan dengan segenap daya dan upaya agar apa yang diimpikan oleh organisasi bisa menjadi kenyataan (Gupta et al, 2004). Kepemilikan visi yang kuat akan menumbuhkan kreativitas dan akhirnya dapat menstimuli munculnya perilaku kewirausahaan. Kesuksesan pelaksanaan kepemimpinan kewirausahaan berawal dari kesungguhan mewujudkan visi. Kesungguhan mewujudkan visi akan dapat menumbuhkan komitmen dan spirit kewirausahaan dan akhirnya dapat memicu perilaku kewirausahaan (Kyrgidou & Hughes, 2010).

4. Inovatif (Surie & Ashley, 2007; Kuratko, 2007; Kempster & Cope, 2010; Bagheri & Pihie, 2010). Kepemimpinan yang dilandasi nilai kewirausahaan akan cenderung menyuburkan inovasi (European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2014), karena aktivitas kewirausahaan seringkali dikaitkan dengan inovasi. Menurut Cedefop (2014) menyatakan bahwa perilaku inovatif merupakan kemampuan dari para pemimpin berjiwa wirausaha yang didasarkan atas kemampuan berpikir kreatif, mengembangkan cara kerja baru atau pemecahan masalah yang lebih efisien daya. Sedangkan menurut Chen (2007), perilaku inovatif dari para pemimpin berjiwa wirausaha ditunjukkan dengan kemampuan menciptakan produk atau cara kerja baru, lebih bernilai, dan berbeda dengan yang sebelumnya sudah ada. Inovasi merupakan buah utama dari cara pandang seseorang yang berjiwa wirausaha. Dengan demikian para pemimpin berjiwa wirausaha akan selalu mampu melahirkan cara kerja yang selalu selaras dengan tuntutan perkembangan jaman.
5. Keberanian untuk mencoba cara kerja baru (Prabhu, 1999; Gupta et al, 2004). Para pemimpinan berjiwa wirausaha adalah mereka yang selalu berani untuk terus mencoba dan mencoba berbagai terbobosan atau cara kerja sampai ditemukan formula yang dinilai paling efektif dan efisien. Mereka juga akan terus memberikan ide dan kesempatan kepada para bawahannya untuk melakukan hal yang sama:

mencoba untuk menemukan cara kerja terbaik (Gupta et al, 2004). Sehingga berbagai ide baru akan terus bermunculan dalam organisasi. Semua warga organisasi akan memiliki kesempatan untuk menguji berbagai produk atau cara kerja yang ditawarkan, sampai ditemukan formula yang paling baik. Iklim kerja seperti ini tidak mungkin dapat tumbuh subur jika tidak ada toleransi yang memadai terhadap semua pihak yang gagal melakukan uji coba terhadap hal-hal yang baru. Maka kepemimpinan kewirausahaan lazimnya ditandai dengan adanya sikap toleran terhadap kesalahan yang ditimbulkan adanya kegagalan dalam menerapkan cara kerja yang baru.

6. Memiliki karisma (Cunningham et al, 1991; Vecchio, 2003). Semua pemimpin bertugas untuk menggerakkan orang lain. Oleh karena itu, semua pemimpin harus memahami dan bisa memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang dipimpin, terutama kebutuhan untuk beraktualisasi diri dan kebutuhan untuk berprestasi. Kemampuan pemimpin untuk mengakomodasi kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinan akan menghasilkan kewibawaan dari para pemimpin. Pemimpin yang berwibawa akan dapat menggerakkan orang secara lebih efektif. Kepemimpinan yang dilandasi nilai kewirausahaan akan memberikan keleluasaan bagi semua orang untuk mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan ide-ide yang dimilikinya. Dengan kata lain, motivasi berprestasi akan mendapat tempat yang luas untuk tumbuh dan berkembang;

dan semuanya itu akan semakin memperkuat kewibawaan dari para pemimpin. Dengan demikian ada hubungan yang saling mempengaruhi antara penerapan kepemimpinan kewirausahaan, kesempatan warga organisasi untuk berekspresi dan berprestasi, dan kewibawaan para pemimpin.

7. Kreatif (Gupta et al, 2004; Surie & Ashley, 2007; Kuratko, 2007). Kreativitas warga organisasi juga merupakan buah utama dari kepemimpinan kewirausahaan. Kreativitas adalah kemampuan menampilkan cara kerja baru yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Kreatifitas warga organisasi juga hanya akan bisa tumbuh subur jika mereka mendapatkan keleluasaan untuk mencoba dan mencoba, bereskpresi, dan menyalurkan motif berprestasi. Hal ini hanya akan bisa muncul jika dalam organisasi tersedia cukup toleransi terhadap datangnya ide baru, termasuk toleransi terhadap ketidaksempurnaan cara kerja yang baru ditawarkan. Kreativitas warga organisasi akan kian menguat jika mereka semua tidak rasa takut ketika menghadapi permasalahan dengan apa yang dikreasikan (Amabile et al, 1996).

Dengan demikian semua pemimpin dikatakan memiliki spirit kewirausahaan dalam menjalankan kepemimpinannya, jika (1) memiliki kreatifitas kerja dan keinginan untuk berprestasi yang tinggi, (2) memiliki semangat kerja yang tidak pernah padam, (3) mampu bertindak cepat dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada, (4) selalu ingin bergerak ke depan dan berubah untuk menjadi lebih baik,

(5) visioner, (6) menghindari cara kerja yang birokratis dan tidak efisien, dan (7) selalu bersikap antusias dan kreatif dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal.

Berbagai kajian penelitian telah mengungkapkan bahwa para guru dan kepala sekolah yang sudah terlatih di bidang kewirausahaan akan memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya nilai-nilai kewirausahaan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pemahaman para guru dan kepala sekolah yang baik tentang kewirausahaan sangat akan sangat mempengaruhi efektifitas pelaksanakan pendidikan kewirausahaan di sekolah (Sanchez, 2013; Johansen & Schanke, 2013; Ruskovaara, 2016). Kepala sekolah diharapkan mampu membangun kerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kewirausahaan.

Dalam kontek pendidikan di Indonesia, sudah ada kesepahaman lintas kementerian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Tenaga Kerja) dalam upaya untuk memperkuat keterlibatan dunia usaha dan industri dalam penguatan pendidikan kewirausahaan. Kebijakan ini diharapkan akan memperkuat peran kepala sekolah dalam menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga akan lebih memahami tentang peran dan hal-hal teknis dari aktifitas bisnis. Pemahaman yang lebih kuat dari kepala sekolah tentang aktifitas bisnis akan mendukung pelaksanakan kegiatan pendidikan kewirausahaan di sekolah (Penaluna et al, 2012).

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (2014) menyebut atribut keberanian

mengambil resiko, kreatifitas, sikap proaktif, visioner, dan inovatif merupakan dimensi utama dari perilaku kepemimpinan yang dilandasi nilai-nilai kewirausahaan. Jika pimpinan organiasasi memiliki karakter tersebut maka anggota organisasi juga akan terdorong menampilkan perilaku kewirausahaan dengan maksimal. Kuratko & Hodgetts (2007) menjelaskan bahwa pemimpin berjiwa wirausaha akan terus memberikan kontribusi yang besar untuk terwujudnya pertumbuhan melalui perilaku kepemimpinan yang efektif, kemampuan berinovasi, penelitian dan pengembangan yang terus menerus, penciptaan cara kerja baru untuk meningkatkan daya saing dan produkftifitas.

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk mendorong para siswa agar terus tergerak untuk mengembangkan minatnya dalam bidang wirausaha, maka kepemimpinan kepala sekolah yang dilandasi oleh nilai-nilai kewirausahaan menjadi sangat vital. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan dilandasi nilai-nilai kewirausahaan diyakini akan mampu menggerakkan semua staf administratif dan dewan guru untuk menjalankan tugas yang juga dilandasi oleh spirit kewirausahaan. Bila tahapan ini dapat diwujudkan, maka tidak lama akan dapat diciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, yang dapat membangkitkan minat berwirausaha para siswanya.

Pengembangan minat berwirausaha bagi para siswa memegang peran penting, mengingat kelak setelah menjadi manusia dewasa mereka akan hidup dalam dunia yang akan terus berubah dengan iklim persaingan yang semakin ketat. Untuk menghadapi situasi kehidupan yang demikian, maka kegiatan pendidikan harus dilaksanakan dengan dilandasi oleh nilai-nilai kewirausahaan. Para siswa harus memiliki

kesiapan dini untuk memperkuat spirit kewirausahaan, karena hal itu merupakan faktor utama yang sangat menentukan apakah kelak akan mampu menghadapi persaingan dan berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks inilah maka penguatan pendidikan kewirausahaan di berbagai jenjang pendidikan menjadi sangat krusial. Pendidikan kewirausahaan bagi para siswa terutama diarahkan untuk memperkuat spirit kewirausahaan, yang ditandi dengan adanya kebiasaan untuk berpikir dan berperilaku kreatif, mengasah kemampuan dalam menangkap danmemanfaat peluang, meningkatkan daya tahan dalam kehidupan yang kian kompetitif.

Para pewirausaha terbukti berperan penting dalam kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Dari dulu hingga sekarang, kualitas kehidupan masyarakat akan sangat ditentukan oleh peran para pewirausaha. Merekalah yang menyediakan berbagai barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Maka tanpa kehadiran mereka, kehidupan masyarakat bisa saja akan mengalami *chaos* atau krisis. Bahkan secara ekstrem bisa dikatakan, kehidupan akan tetap bisa berjalan meski tidak ada pemerintahan. Tetapi, tanpa kehadiran pewirausaha, hampir bisa dipastikan kehidupan masyarakat akan berhenti.

Untuk menjamin kehidupan masyarakat akan terus berlanjut dengan kualitas yang lebih baik, maka penguatan pendidikan kewirausahaan bagi para siswa sebagai bagian dari generasi masa depan merupakan *condition sine qua non*! Pendidikan kewirauahaan diakui berperan sangat strategis dalam mempersiapkan generasi muda untuk mengembangkan kecakapan kewirausahaan, nilai-nilai, sikap, perilaku, dan kesadaran tentang pentingnya kegiatan

usaha guna mewujudkan wirausaha sebagai pilihan karir yang utama (Bhat & Khan, 2014).

Namun harus diakui bahwa sebagiaan besar warga masyarakat di Indonesia belum mendudukkan wirausaha sebagai pilihan karir yang utama. Masih banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya kelak setelah selesai menempuh pendidikan akan bekerja sebagai pekerja kantoran atau pegawai negeri. Oleh karena itulah, hingga saat ini setiap ada rekrutmen calon pegawai negeri dipastikan akan ada jutaan pelamar yang mengikutinya. Proses rekrutmen pegawai selalu tampil dengan penuh gebyar. Bandingkan dengan even penobatan wirausaha mandiri yang nyaris tidak pernah menjadi isu atau berita besar di tanah air.

Gerakan kewirausahaan nasional (GKN) yang sudah dimulai sejak tahun 2011 gaungnya nyaris tidak terdengar. Hal ini menggambarkan bahwa wirausaha belum menjadi pilihan karir yang utama di kalangan generasi muda. Dengan kata lain nilai, sikap, dan perilaku kewirausahaan belum menjadi sebuah norma bagi sebagian warga. Maka untuk menjadikan kewirausahaan sebagai sebuah budaya masih harus memerlukan ikhtiar yang sangat panjang. Untuk itulah maka pendidikan kewirausahaan harus dilaksanakan dengan lebih intensif di berbagai jenjang pendidikan.

Sejak dideklarasikannya Pendidikan Untuk Semua dan disepakatinya Millennium Goals untuk menekan angka kemiskinan di dunia, maka telah disepakati bahwa kegiatan pendidikan bukan sekedar untuk memberikan pengetahuan akademis kepada siswa. Pendidikan pada jenjang sekolah menengah justru diharapkan bisa memberikan peran lebih, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk bekerja, berwirausaha, dan hidup dalam masyarakat (Bahri &

Haftendorn, 2006). Dalam kaitan inilah maka perlu upaya terus menerus untuk menciptakan iklim belajar di sekolah yang dapat menstimuli tumbuhnya minat berwirausaha dari para siswa.

Kepala sekolah dan para guru diharapkan memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya kewirausahaan bagi peningkatan kualitas kehidupan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian kepala sekolah dapat menciptakan iklim belajar di lingkungan sekolah yang dapat menstimuli tumbuhnya nilai-nilai, sikap, dan perilaku kewirausahaan dari semua warga sekolah. Para guru juga diharapkan dapat menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan melalui aktifitas pembelajaran.

Para siswa di sekolah menengah harus segera mempersiapkan diri untuk berperan sebagai bagian manusia dewasa dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus dipersiapkan sedini mungkin agar lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Untuk maksud inilah maka berbagai lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi kemudian memberikan materi pelajaran tentang kewirausahaan (Edelman et al, 2015).

Selain lingkungan sekolah yang kondusif, dukungan sosial dari keluarga juga memegang peranan penting bagi tumbuhnya minat berwirausaha para siswa. Dukungan sosial adalah berkaitan dengan adanya persepsi atau pengalaman bahwa aktifitas kewirausahaan yang dilakukan siswa diperhatikan, dihargai, diapresiasi, dan didukung baik oleh lingkungan keluarga maupun oleh lingkungan sosial masyarakat (Taylor, 2011). Lingkungan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan emosional dan dorongan yang

kuat agar para siswa kelak memiliki keyakinan yang kuat pula untuk berwirausaha.

Dukungan emosional dari keluarga antara lain meliputi kesediaan keluarga untuk mendengar dan member rasa empati terhadap upaya siswa untuk belajar berwirausaha (Adam et al, 1996), dukungan materiil dan finansial, dan bantuan untuk ikut memecahkan masalah jika selama dalam proses belajar para siswa menemui adanya hambatan (Beehr & McGrath, 1992). Selain dukungan yang bersifat *intangible* sebagaimana telah disebutkan, lingkungan keluarga seharusnya juga memberikan dorongan materiil (*instrumental*) ketika para siswa mulai belajar berwirausaha (Eddleston et al, 2008). Berbagai kajian membuktikan bahwa dukungan sosial yang dirasakan memadai akan mempengaruhi kesungguhan para generasi muda untuk berwirausaha.

Lazimnya seseorang yang memasuki dunia yang baru, para siswa yang baru belajar berwirausaha juga akan menghadapi tekanan dan kebingungan dan akhirnya bisa berujung pada stress. Dalam kaitan inilah maka dukungan emosional dan instrumental dari keluarga berperan besar untuk meredam perasaan stres yang sering menghinggapi orang yang memulai belajar menjalankan kegiatan usaha. Perasaan stress bila dibiarkan berlanjut akan bisa menimbulkan sikap apatis, dan ujung-ujungnya akan berpengaruh negatif dengan minat siswa untuk berwirausaha. Karena hal inilah, maka pada tahap awal belajar berwirausaha dukungan sosial menjadi sangat penting, terutama dukungan dari pihak keluarga (Aldrich & Cliff, 2003).

Dukungan anggota keluarga, selain orang tua; juga sangat mempengaruhi kepercayaan diri para siswa dalam

belajar berwirausaha. Para siswa yang sedang belajar berwirausaha tentu berbeda dengan para pelaku usaha lain yang sudah berpengalaman menjalankan kegiatan usaha (Edelman et al, 2015). Mereka hampir tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan aktifitas usaha. Mereka juga tidak memiliki jaringan bisnis yang sangat dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan usaha (Nielsen & Lassen, 2012). Lebih dari itu, mereka juga nyaris tidak memiliki modal sama sekali untuk mendukung kegiatan usaha yang baru dipelajarinya. Mereka tidak memiliki jaminan yang bisa diagunkan kepada pemilik modal, karena semua siswa masih termasuk kategori anak-anak yang mulai tumbuh dewasa, tetapi masih manjadi tanggungan keluarganya (Evans & Jovanovic, 1989). Oleh karena itu, dukungan dari anggota keluarga juga sangat menentukan bagi keberlanjutan siswa dalam belajar berwirausaha.

Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa umumnya seseorang benar-benar mulai menekuni kegiatan usaha bisnis pada usia antara 25 tahun sampai 34 tahun (Edelman et al, 2015; Levesque & Minniti, 2006). Artinya, tidak lama setelah para siswa menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah dan diantara mereka mungkin ada yang melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi, maka pada saat itulah mereka akan benar-benar menjadi pebisnis. Edelman et al (2015) yang mengutip hasil kajian dari beberapa ahli mengungkapkan bahwa dukungan keluarga berperan penting bagi para pelaku usaha baru. Pada tahap awal, keluarga merupakan sumber pembiayaan yang utama, sumber informasi untuk tempat bertanya, sumber dukungan moral, dan seringkali juga berperan sebagai tempat pencakokan

usaha, sampai seseorang benar-benar bisa berperan sebagai pelaku usaha yang mandiri.

Dalam kontek persekolahan, perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang selalu mencari terobosan baru, mengidentifikasi, menciptakan peluang, dan mengoptimalkan peluang untuk tujuan yang lebih baik tentu akan ikut mewarnai perilaku wirausaha dari seluruh warga sekolah, mulai dari para staf administrasi, guru, dan siswa (Cuuri et al., 2008). Dengan kata lain, model kepemimpinan kepala sekolah yang dilandasi oleh semangat kewirausahaan akan ikut mempengaruhi tumbuhnya budaya wirausaha di lingkungan sekolah dan akhirnya menjadi pemicu tumbuhnya minat berwirausaha dari para siswa, mendorong semua warga sekolah untuk mengembangkan perilaku kreatif, inovatif, dan kompetitif. Dukungan orang tua, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat yang memberikan penghargaan besar pada aktivitas wirausaha juga berpengaruh besar bagi tumbuhnya minat berwirausaha (Prianto, 2017).

BAB IV

ISU PENGANGGURAN, PENGUATAN KOMPETENSI DAN MINAT WIRAUSAHA

A. Problem Lulusan SMK: Isu Pengangguran dan Kewirausahaan

Data ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2018, sebagaimana dilaporkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penduduk usia kerja sebanyak 194,78 juta orang. Penduduk yang berkategori sebagai angkatan kerja sebanyak 131,01 juta orang, yang bekerja sebanyak 124,01 juta orang; sehingga penduduk yang menganggur tercatat sebanyak 7 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,24 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar

kerja. Selengkapnya TPT dilihat dari latar belakang jenjang pendidikan tampak sebagaimana gambar berikut.

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Latar Belakang Pendidikan

Sumber: Berita Resmi Statistik (Agustus 2018)

Tingginya TPT, khususnya lulusan SMK; menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan kecakapan antara apa yang dipelajari siswa selama di sekolah dengan apa yang menjadi tuntutan dunia kerja. Hal ini juga menunjukkan belum adanya keselarasan antara sekolah dengan dunia kerja. Selain itu, TPT yang tinggi juga mengindikasikan adanya ketidaksiapan lulusan untuk berwirausaha. Data-data ini menjadi tantangan para guru dan pengelola SMK yang memang diharapkan mampu menyiapkan para lulusannya untuk siap bekerja atau berwirausaha.

Tingkat pengangguran yang besar dari kelompok usia muda sebenarnya bukan hanya menjadi masalah di Indonesia. Berbagai negara Eropa juga menghadapi problem serupa. Tingkat pengangguran kelompok usia muda di Eropa selalu

lebih dari dua kali lipat angka pengangguran kelompok usia dewasa. Sebagaimana di Indonesia, negara-negara Eropa juga menghadapi problem ketenagakerjaan dari kelompok usia muda (Manolova et al, 2014). Untuk mengatasi hal ini, maka penguatan minat wirausaha bagi kelompok usia muda harus dilaksanakan dengan intensif melalui pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan yang dilasanakan dengan intensif terbukti dapat membantu individu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan menjadi mesin pencipta lapangan kerja bagi pihak lain (Manolova et al, 2014).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan mampu membentuk karakter lulusannya supaya menjadi seorang *entrepreneur.* Untuk mewujudkan hal tersebut maka SMK juga diharapkan mampu memberi contoh pengembangan usaha kreatif dan inovatif yang berpotensi menambah income dana pendidikan. Lembaga pendidikan yang mengembangkan usaha kreatif dan inovatif pada sektor pendidikan diberi nama `EduPreneur` atau pendidikan berbasis wirausaha (Mulyati, Soegiyono, & Purwanti,2014). Salah satu indikator SMK unggul adalah memiliki banyak sumberdana penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari usaha kreatif dan inovatifnya dan bukan sumberdana dari iuran peserta didiknya. *Teaching factory, bussines center,* unit produksi merupakan bentuk usaha yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh SMK untuk menambah sumberdana dan melatih kewirausahaan bagi para siswanya.

B. Memperkuat Kesiapan Bekerja Lulusan SMK

Perubahan yang cepat menuntut organisasi bisnis, para pekerja, dan calon pekerja untuk membiasakan diri

memperbaharui cara kerja dan kecakapan baru selaras dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Hal ini menuntut para calon pekerja benar-benar memiliki kesiapan kerja yang tinggi, yang ditandai dengan perilaku aktif-proaktif, kreatif, dan inovatif. Dengan memiliki kemampuan tersebut, maka baik organisasi maupun para pekerja akan eksis dalam kancah persaingan yang semakin ketat (Gunn, 2009).

Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang digunakan untuk menilai kesiapan bekerja. Brady (2010) telah mengkaji beberapa atribut kepribadian yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan untuk bekerja. Kajian ini kemudian diperluas dan diperdalam oleh Caballero, Walker, Tyszkiewicz (2011). Mengacu kajian yang dilakukan oleh Brady (2010), ada enam indikator yang menjadi penanda kesiapan individu untuk bekerja, yaitu: (a) sikap bertanggung jawab, (b) kemampuan berpikir dan bertindak luwes, (c) memiliki berbagai kecakapan hidup, (d) kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis, (e) kemampuan melakukan evaluasi diri, dan (f) kesadaran akan kesehatan diri dan keselamatan kerja.

Sikap bertanggung jawab akan ditunjukkan dari perilaku para pekerja untuk datang ke tempat kerja tepat waktu dan akan terus menjalankan aktifitas kerja hingga selesai sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan. Mereka memiliki kepedulian yang tinggi dengan berbagai peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bekerja, memiliki standar kualitas kerja, dan memahami keuntungan dan kerugian atas berbagai perilaku kerja yang hendak diambil. Mereka memiliki kesadaran penuh bahwa kesuksesan dan jenjang karir di tempat kerja akan dipengaruhi oleh prestasi

kerjanya sendiri (Reynolds & Ceranic, 2007). Pekerja yang bertanggung jawab selalu ditandai dengan adanya integritas pribadi, kejujuran, dan dapat dipercaya (Gardner, Csikszentmihalyi, & Damon, 2001).

Hasil kajian Gardner, Csikszentmihalyi, & Damon, (2001) menyatakan bahwa lebih dari dua per tiga karyawan menilai sikap bertanggung jawab di tempat kerja sebagai atribut kepribadian yang sangat penting. Hal ini bukan hanya sikap bertanggung jawab untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga sikap bertanggung jawab terhadap sesama karyawan dan organisasi. Akhirnya, sikap bertanggung jawab ini juga diabdikan untuk kemajuan organisasi dimana ia bekerja (Gardner, 2007). Oleh karena itu, Parker (2008) menyatakan bahwa sikap bertanggung jawab merupakan salah satu atribut kepribadian utama yang harus dimiliki oleh para pekerja dan calon pekerja dalam Abad 21.

Kemampuan berpikir dan bertindak luwes ditunjukkan dari kemampuan para pekerja untuk terus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di tempat kerja (Moorhouse & Caltabiano, 2007). Mereka menyadari bahwa berbagai kecenderungan baru akan datang dengan sangat cepat. Situasi ini menuntut adanya kemampuan untuk cepat menyesuakan diri dengan pola kerja dan kecakapan kerja baru sesuai dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kemampuan menyesuaikan diri selaras dengan tuntutan kecakapan dan keahlian yang baru merupakan bagian dari kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh para pekerja dan calon pekerja dalam Abad 21.

Dalam bukunya yang berjudul *The Wolrd is Flat*, Friedman (2005) menyatakan bahwa dimilikinya berbagai kecakapan

hidup (*soft skills*), modal intelektual, dan berbagai keahlian merupakan faktor penting yang akan menggerakkan kegiatan ekonomi. Yang dimaksud kecakapan hidup disini adalah bukan hanya berkaitan dengan kecakapan melaksanakan tugas sesuai bidangnya, tetapi juga mencakup kecakapan untuk memperbaharui pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi dimana ia bekerja. Parker (2008) menyebut hal itu sebagai kecakapan pekerja untuk membelajarkan diri sendiri sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Para pekerja yang mampu membelajarkan diri sendiri akan mendorong mereka untuk terus berusaha menguasai berbagai pengetahuan dan ketrampilan baru. Keterlibatan mereka dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan benar-benar disadari sebagai bagian dari kebutuhan, dan bukan karena tuntutan atau tekanan dari pihak organisasi (Brady, 2010). Dengan demikian para pekerja yang memiliki kebutuhan untuk terus memperbaharui pengetahuan, kecakapan, dan keahlian akan lebih memiliki kesiapan untuk bekerja.

Kemampuan berkomunikasi yang baik dari para pekerja, baik secara lisan maupun tertulis; sangat mendukung demi terciptanya suasana kerja yang kondusif. Berbagai permasalahan kerja seringkali terjadi karena adanya problem komunikasi, baik komunikasi antar sesama pekerja, komunikasi dengan organisasi, maupun komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian kemampuan berkomunikasi dari para pekerja akan dinilai para penyedia kerja sebagai faktor yang menentukan kesiapan bekerja dan kinerja (Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011; Porath & Bateman, 2006; Brady, 2010).

Kesiapan individu untuk bekerja juga dapat diidentifikasi dari kemampuan mereka untuk melakukan evaluasi diri.

Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan para pekerja untuk menyadari bagaimana posisi dirinya di dalam kehidupan organisasi di mana mereka bekerja, sehingga mereka memahami apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemampuan evaluasi diri memungkinkan para pekerja mudah untuk menerima umpan balik, mendorong mereka untuk terus belajar, dan memperluas wawasan yang berdampak pada munculnya rasa percaya diri. Para pekerja dengan rasa percaya diri yang kuat akan berpengaruh pada kinerjanya (Betz, 2004). Dengan demikian kesediaan para pekerja untuk melakukan evaluasi diri juga mencerminkan kematangan pribadi, dan hal ini berpengaruh terhadap kesiapan untuk bekerja (Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011).

Kesadaran para pekerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja juga mencerminkan kesiapan mereka untuk bekerja. Para pekerja yang sehat secara jasmani dan rohani berdampak pada jiwa yang kuat. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan sikap percaya diri, optimis, menjaga komitmen dan semangat kerja, mudah bekerja sama dalam tim, hormat terhadap sesama pekerja, menerima adanya keberagaman, dan memiliki kebanggaan dengan korp (Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011). Kesehatan jiwa para pekerja akan memicu terciptanya ketenangan dalam bekerja, dan selanjutnya akan mempengaruhi keselamatan kerja. Pemahaman para pencari kerja yang baik tentang hal ini menunjukkan adanya kesiapan untuk bekerja.

Berdasarkan kajian sebagaimana dipaparkan terlihat bahwa kesiapan bekerja lebih dipengaruhi oleh dimensi *soft skills*. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Wagner (2006) yang memapaparkan ada 14 faktor yang

membuat para pencari kerja tidak diterima sebagai pekerja. Dua faktor pertama berkaitan dengan kemampuan akademik (*hard skills*), sedangkan 12 sisanya berkaitan dengan kemampuan non akademik (*soft skills*). Ke-14 faktor tersebut meliputi: ketidaksesuaian keahlian dan kecakapan, prestasi akademik kurang memadai, sikap kepribadian lemah, kurang percaya diri, motivasi kurang kuat, dorongan dan antusiasme rendah, jiwa kepemimpinan lemah, tidak siap menghadapi presentasi wawancara, mengutamakan keuntungan sesaat, tuntutan gaji yang tidak realistis, persiapan untuk bekerja kurang, kegiatan ekstra kurikuler selama belajar sangat minim, kecakapan dasar kurang, dan kurang siap untuk bekerja.

Memperhatikan hasil kajian Wagner (2006), maka para pencari kerja tidak cukup hanya mengandalkan kepemilikan ijasah untuk berkompetisi dalam pasar kerja. Ada banyak atribut *soft skills* yang harus disiapkan oleh para pencari kerja untuk bisa diterima di pasar kerja. Di berbagai negara, umumnya proses seleksi terhadap para pencari kerja didasarkan atas aplikasi lamaran kerja, ijasah, prestasi akademik sebagaimana ditunjukkan oleh besaran indeks prestasi akademik, dan tes potensi akademik (Carles, 2007). Prestasi akademik diyakini dapat menjelaskan kapasitas keahlian, kemampuan belajar, dan motivasi untuk mencapai tujuan. Tetapi ternyata kualifikasi akademik tidak cukup memadai untuk menggambarkan kesiapan individu untuk berkarya. Dalam kaitan inilah diperlukan adanya kecakapan non akademik yang memungkinkan seseorang dapat berhasil dalam bekerja (Hager & Holland, 2006).

Kajian yang dilakukan Prianto (2013) telah mengidentifikasi berbagai atribut yang diharapkan pada penyedia

kerja untuk dimiliki oleh para pencari kerja, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Berbagai Atribut Yang Diekspektasikan Para Penyedia Kerja Dimiliki Para Pencari Kerja

Nomor	Faktor	Atribut
1	Motivasi	Kesungguhan dalam bekerja, dorongan bekerja keras, tahan banting, konsisten, condong bekerja dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, tidak mudah mengeluh.
2	Kematan-gan Pribadi	Tahan menghadapi cobaan, Tidak emosional ketika dikritik, Bersifat terbuka, Percaya diri, Bertanggung jawab.
3	Kematan-gan sosial	Mampu berkomunikasi, Mampu bekerja sama dalam tim kerja, Mampu membangun jejaring, Mampu berinteraksi dengan pelanggan, Berperilaku luwes dan fleksibel.
4	Sikap kerja	Sikap hormat, Cermat, Tanggap, Realistis dan praktis, sopan santun dalam berperilaku, rendah hati, sabar.

Nomor	Faktor	Atribut
5	Cakap dalam bekerja	Memiliki pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan bidang pekerjaan, Mampu membuat analisis terhadap permasalahan, Mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan bidang pekerjaannya, Mampu mencari cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, Berani membuat keputusan, Cepat mengadopsi cara kerja baru.

Sumber: Prianto (2013)

Council of Chief State School Officers (2011:11) mengidentifikasi pengetahuan, kecakapan, dan sifat kepribadin yang menentukan seseorang memiliki kesiapan bersaing dalam dunia kerja sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel: 4.2 Berbagai Kecakapan Sebagai Indikator Kecakapan Bersaing dalam Dunia Kerja

Dimensi		
Pengetahuan	**Kecakapan**	**Sifat dan Kepribadian**
Menguasai pengetahuan dengan mendalam, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata dengan mudah tanpa hambatan berarti.	Memiliki kapasitas untuk berpikir pada level yang komplek, mampu membuat perencanaan yang bernilai untuk masa depan.	Memiliki berbagai kecakapan sosial emosional atau berbagai perilaku yang mendukung kesuksesan dalam studi, karir, dan sebagai warga masyarakat.

Dimensi		
Pengetahuan	**Kecakapan**	**Sifat dan Kepribadian**
Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam era sekarang. Memiliki bekal pendidikan yang mendukung kegiatan teknis dan menunjang jenjang karir. Menguasai bidang lain yang relevan dan penting. Memiliki kecakapan hidup dalam lingkup global. Mampu menerapkan pengetahuan.	Berpikir kritis. Pemecahan masalah. Bekerja dalam tim. Mampu melakukan tindakan reflektif dan kesadaran pada kemampuan diri sendiri. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk terus belajar. Manajemen waktu. Kreativitas dan inovasi.	Penghargaan pada kemampuan sendiri. Inisiatif. Ketekunan. Kemampuan menyesuaikan diri. Kepemimpinan. Perilaku etik dan bertanggung jawab. Kesadaran sosial dan sikap empati. Kemampuan mengendalikan diri.

Sumber: Council of Chief State School Officers (2011:11)

C. Memperkuat Kompetensi Kewirausahaan Lulusan SMK

Kompetensi adalah sebuah istilah yang secara luas banyak digunakan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, dan lazim digunakan untuk mengukur kinerja seseorang. Seseorang yang memiliki kompetensi ditandai dengan kepemilikan pengetahuan, semangat dan hasrat, sikap positip, dan kecakapan sesuai dengan bidang pekerjaan. Kompetensi berkaitan dengan kinerja, sesuai dengan standar kerja, dan dapat terus ditingkatkan

melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Singkatnya, kompetensi berkaitan dengan berbagai perilaku seseorang yang mendukung kesuksesan mereka dalam pekerjaan (Moore, et.al., 2002).

Mengacu kreteria sebagaimana dikemukakan oleh Johannisson (1991), seseorang yang memiliki kompetensi bidang kewirausahaan apabila ia memiliki: (1) *know-what*, pengetahuan bidang kewirausahaan, (2) *know-when*, wawasan bidang kewirausahaan, (3) *know-who*, memiliki kecakapan sosial, (4) *know-how*, memiliki berbagai kecakapan bidang kewirausahaan, (5) *know-why*, memiliki sikap, nilai-nilai, dan motivasi berkait dengan aktivitas wirausaha.

Kajian ini mengidentifikasi kompetensi kewirausahaan, dengan mengacu pendapat Lackeus (2013) dan para ahli lainnya; yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi pengetahuan (*knowledge*,K) (Kraiger, et.al., 1993), (2) kecakapan (*skills*, S) (Fisher, et.al., 2008), dan (3) sikap (*Attitude*, A) (Fisher, et.al., 2008; Krueger, 2007; Murnieks, 2007; Markman, et.al., 2005). yang secara keseluruhan mencakup 15 indikator. Dimensi pengetahuan (K) dilihat dari: (K1) kepemilikan pengetahuan bidang kewirausahaan, (K2) mental sebagai pewirausaha, dan (K3) wawasan kewirausahaan. Dimensi kecakapan (S) dilihat dari: (S4) kecakapan bidang pemasaran, (S5) kecakapan melihat peluang usaha, (S6) pemanfaatan sumber daya, (S7) kecakapan menjalin hubungan atau relasi usaha, (S8) kecakapan untuk belajar dalam bidang kewirausahaan, dan (S9) kecakapan untuk membuat strategi usaha. Sedangkan dimensi sikap (A) dilihat dari: (A10) semangat untuk berwirausaha, (A11) sikap percaya diri dan yakin

pada kemampuan diri sendiri, (A12) proaktif, (A13) berani menghadapi situasi yang tidak pasti, (A14) inovatif, dan (A15) memiliki ketekunan.

Tujuan utama dari pendidikan kewirausahaan adalah untuk mengembangkan berbagai level kompetensi kewirausahaan. Tabel berikut ini memuat uraian kerangka kerja beberapa kompetensi yang sering dianggap mencerminkan kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan didefinisikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang mempengaruhi keinginan dan kemampuan untuk mewujudkan kegiatan usaha baru. Uraian tentang kompetensi kewirausahaan ini selaras dengan berbagai kajian literature tentang kompetensi kewirausahaan sebagaimana dikemukakan oleh Sanchez (2011) dan Fisher et al (2008). Kompetensi kewirausahaan dikategorikan dari domain kognitif dan non kognitif (Lackeus, 2015). Farrington, et al (2012) mengemukakan komptensi kewirausahaan dari dimensi non kognitif yang meliputi sikap: ketekunan, keyakinan pada diri sendiri, kecakapan belajar, dan kecakapan sosial. Sedangkan, kompetensi kewirausahaan dari dimensi kognitif berkaitan dengan kepemilikan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan. Moberg (2014a) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi kewirausahaan dimensi kognitif dianggap lebih mudah untuk diajarkan dan dievaluasi, sedangkan pengembangkan kompetensi kewirausahaan non kognitif memerlukan kegiatan pembelajaran yang lebih komplek dan kegiatan evaluasi pembelajaran yang lebih rumit.

Tabel 4.3 Kompetensi Kewirausahaan Menurut Lackeus (2014)

Dimensi	Manifestasi	Interpretasi	Sumber
Pengetahuan	Model mental	Pengetahuan bagaimana dapat menyelesaikan tugas meski dengan sumber daya yang terbatas, pengetahuan tentang resiko, dan berbagai kemungkinan cara penyelesaian tugas.	Kraiger, et al, 2003
	Pengetahuan deklaratif	Dasar-dasar kewirausahaan, penciptaan nilai-nilai, menghasilkan ide, kemampuan melihat berbagai peluang, akuntansi, keuangan, teknologi, dan pemasaran.	Kraiger, et al, 2003
	Wawasan diri	Kemantapan dan kecocokan diri dengan profesi kewirausahaan	Kraiger, et al, 2003
Ketrampilan	Kecakapan pemasaran	Melakukan riset pasar, mengevaluasi situasi pasar, pemasaran produk dan jasa, kemampuan mempersuasi orang lain, mampu menyampaikan ide secara menarik, menjalin hubungan dengan pelanggan, kemampuan menjelaskan visi.	Fisher, et al, 2008
	Kecakapan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya	Mengembangkan rencana bisnis, membuat rencana keuangan, penggalian dana, akses terhadap sumber daya.	Fisher, et al, 2008
	Kecakapan melihat berbagai peluang	Mengidentifikasi dan mengenali berbagai peluang bisnis dan berbagai peluang lain yang dapat dikembangkan baik dalam hal produk, jasa, layanan, dan pengembangan usaha.	Fisher, et al, 2008

Dimensi	Manifestasi	Interpretasi	Sumber
	Kecakapan interpersonal	Kepemimpinan, kemampuan memotivasi pihak lain, kemampuan mengatur orang lain, kemampuan mendengarkan prndapat orang lain, resolusi konflik, dan sosialisasi.	Fisher, et al, 2008
	Kecakapan belajar	Menjadi pembelajar aktif, kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru, kemampuan untuk mengatasi situasi ketidakpastian.	Fisher, et al, 2008
	Kecakapan mengatur strategi	Kemampuan membuat skala prioritas dan fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan, kemampuan menjelaskan visi, mengembangkan strategi, kemampuan mengidentifikasi rekanan kerja yang bisa diajak untuk bekerja sama.	Fisher, et al, 2008
Sikap	Semangat berwirausaha	"Saya ingin": Keinginan untuk berprestasi	Fisher, et al, 2008
	Percaya pada diri sendiri	"Saya bisa": Keyakinan pada kemampuannya untuk mewujudkan impiannya dengan berhasil	Fisher, et al, 2008
	Identitas kewirausahaan	"Saya memiliki nilai-nilai": Keyakinan yang mendalam, kemampuan memberikan penghargaan terhadap nilai dan cara kerja baru.	Krueger, 2005 Krueger, 2007
	Proaktif	"Saya berbuat sesuatu": Inisiator, sikap proaktif, lebih berorientasi pada tindakan daripada sekedar retorika.	Sanchez, 2011 Murnieks, 2007

Dimensi	Manifestasi	Interpretasi	Sumber
	Toleran terhadap ketidakpastian	"Saya berani menghadapi situasi": Merasa nyaman dan mampu menikmati dengan situasi ketidakpastian, mudah menyesuakan diri, dan selalu bersikap terbuka dengan hal baru yang datang tidak terduga.	Sanchez, 2011 Murnieks, 2007
	Sikap inovatif	"Saya bisa mengkreasikan": Kemampuan mengkreasikan, pikiran dan tindakan yang orisini, berani membuat terobosan baru, visioner, kreatif, dan inovatif.	Krueger, 2005 Murnieks, 2007
	Ketekunan	"Saya bisa mengatasi": tekun dan gigih meski dalam kondisi yang tidak menguntungkan	Markman,et al, 2005 Cotton, 1991

Kajian yang dilakukan oleh Lackeus (2015) menjelaskan bahwa kompetensi kewirausahaan non kognitif yang ditunjukkan oleh domain sikap kewirausahaan kurang dikembangkan secara sistematis dalam kegiatan pendidikan kewirausahaan. Artinya, pendidikan kewirausahaan hingga saat ini lebih fokus pada pembahasan pada pengetahuan tentang kewirausahaan dan praktek berwirausaha.

Diantara para peneliti yang membahas tentang pendidikan kewirausahaan, Rosendahl Huber, et al (2012) dan Moberg (2014b) merupakan peneliti yang secara spesifik mengkaji tentang pendidikan kewirausahaan yang memfokuskan pada pengembangan sikap kewirausahaan. Lackeus (2015) menjelaskan bahwa pengembangan sikap kewirausahaan pada siswa akan dapat meningkatkan prestasi

akademik. Sikap kewirausahaan yang dimanifestasikan oleh ketekunan, misalnya, tentu akan sangat mempengaruhi prestasi akademik siswa. Siswa yang tekun lazimnya akan berhasil dalam studinya. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan kewirausahaan yang efektif sangat mendukung keberhasilkan belajar siswa secara keseluruhan.

Para pewirausaha tangguh adalah juga merupakan inventor, para pemegang hak paten, para kreator nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Mereka mampu mengalahkan rasa takut, mau bersahabat dengan ketidakpastian, dan pada masa mudanya ternyata juga berprestasi secara akademik. Fakta-fakta ini sudah dituliskan oleh Kasali (2010) dalam bukunya "Wirausaha Mandiri: Kisah Inspiratif Anak Muda Mengalahkan Rasa Takut dan Bersahabat dengan Ketidakpastian. Menjadi Wirausaha Tangguh".

D. Berbagai Aktivitas yang Memicu Tumbuhnya Kompetensi Kewirausahaan

Banyak ahli yang berpendapat bahwa cara belajar terbaik untuk menjadi pewirausaha adalah belajar melalui pengalaman (Lackeus, 2015), dan untuk memperoleh pengalaman yang maksimal dapat dilakukan dengan pendekatan belajar sambil bertindak (*learning by doing*) atau dengan melakukan pengamatan lapangan untuk mengetahui bagaimana para pewirausaha menjalankan kegiatan usahanya (Cope, 2005). Lackeus (2013) juga menjelaskan bahwa belajar sambil bertindak merupakan pendekatan pembelajaran yang dinilai efektif untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan para siswa.

Guru dapat memberikan tugas kepada para siswa untuk menghasilkan karya atau produk sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang sudah dilakukannya dan dinilai bermanfaat untuk masyarakat. Tugas-tugas penciptaan produk yang juga melibatkan masyarakat sebagai pihak pengguna perlu terus dilakukan siswa secara berulang-ulang. Dalam menjalankan tugas seperti ini para siswa mungkin akan mengalami situasi ketidakpastian dan kebingungan. Situasi seperti ini harus dinilai sebagai hal yang positip, sebagai konsekuensi logis dari aktifitas belajar yang mendalam yang telah dilakukan para siswa.

Belajar kewirausahaan yang diarahkan untuk membekali para siswa bermental wirausaha tidak cukup hanya dilakukan dengan model-model dedaktis yang dipenuhi dengan kegiatan ceramah tentang kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan yang ditujukan untuk membentuk siswa bermental dan berjiwa wirausaha harus dilakukan dengan aktivitas belajar yang bermakna dan mendalam, melalui kegiatan praktik langsung supaya para siswa memperoleh kesempatan untuk mengalami situasi nyata. Melalui aktivitas belajar yang demikian inilah para siswa akan memperoleh pengalaman nyata.

Mengingat tugas-tugas berat yang harus dilakukan para siswa dalam kegiatan belajar, maka para guru dapat menggunakan format tugas kelompok. Tugas kelompok dalam pembelajaran kewirausahaan sangat berguna untuk membelajarkan siswa agar terbiasa dengan pola bekerja tim, mengingat aktivitas usaha tidak mungkin dilakukan secara individu. Para siswa juga perlu diberikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas belajar yang mendalam seperti ini, sehingga mungkin memerlukan waktu beberapa minggu atau bulan, bahkan mungkin bisa dalam satu semester.

Penilaian tugas lebih ditekankan pada aktivitas siswa dalam berproses mengerjakan tugas, bagaimana siswa berinteraksi dengan pihak eksternal, bagaimana siswa menawarkan ide-ide kreatif dan mewujudkan dalam sebuah produk atau karya. Para guru seyogyanya terus mendorong para siswa agar terus berproses dan berinteraksi dengan pihak eksternal. Penilaian berbasis proses ini jauh lebih bernilai daripada sekedar menilai atribut kewirausahaan, karena atribut kewirausahaan sesungguhnya akan muncul setelah siswa berproses dalam aktivitas yang melibatkan masyarakat dan pihak lain di luar dirinya. Dengan demikian implementasi model pendidikan kewirausahaan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.1 Model Pendidikan Kewirausahaan dan Dampaknya Menurut Lackeus (2015)

E. Memperkuat Minat Berwirausaha Lulusan SMK

Pembelajaran kewirausahaan yang efektif akan ditandai dengan tumbuhnya ketertarikan, keinginan, minat, dan dorongan dari dalam peserta didik untuk menjalankan kegiatan usaha. Penguatan budaya wirausaha harus dilakukan dengan mengkaji tentang berbagai faktor yang

dapat mendorong tumbuhnya minat berwirausaha (Krueger, Reilly, & Carsrud, 2000).

Minat untuk berwirausaha berkaitan dengan dimensi psikologis. Krueger et al. (2000) menyatakan bahwa minat merupakan faktor utama dari berbagai perilaku yang direncanakan. Dengan demikian jika saat ini seseorang belum terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, dan ia berminat untuk terlibat didalamnya; maka aktifitas kewirausahaan bagi orang tersebut termasuk dalam kategori perilaku yang direncanakan. Ajzen (1991) merupakan pengkaji pertama tentang perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*, TPB). Melalui TPB, kita mendapatkan penjelasan bagaimana mengubah perilaku seseorang. Perhatian utama dari TPB adalah minat, yang bisa berupa semangat dan harapan yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu. Dengan demikian bila seseorang memiliki minat yang kuat terhadap hal tertentu, maka hal itu akan memberikan dorongan yang kuat kepada seseorang untuk beraktivitas pada bidang tersebut.

Ajzen (1991) menjelaskan tiga faktor penting yang akan mengubah minat menjadi perilaku actual. *Pertama*, keyakinan dan sikap seseorang yang akan mendorongnya untuk berperilaku tertentu. Krueger et al. (2000) memberikan contoh seorang peserta didik yang memiliki sikap positip terhadap kewirausahaan karena kedua orang tuanya berprofesi sebagai pewirausaha. *Kedua*, faktor sosial dalam kontek norma subjektif yang dikembangkan individu. Faktor ini merujuk pada tekanan yang harus dihadapi individu dari lingkungan sosialnya untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Misalnya, apabila seseorang memiliki pengalaman dan pandangan negatif tentang kewirausahaan

maka ia akan memberikan larangan kepada keluarganya untuk tidak terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Sebaliknya, bila seseorang memiliki pandangan yang positif tentang kewirausahaan maka ia akan memberikan dukungan untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. *Ketiga*, faktor pengendalian perilaku. Seseorang akan menyadari bahwa perilakunya tentang kewirausahaan tidak hanya digerakkan oleh minat, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana penilian dirinya tentang berbagai hambatan yang harus dihadapi untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan.

Kajian yang dilakukan oleh Steward, *et.al* (1998) mengungkapkan bahwa dorongan seseorang untuk berwirausaha dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan faktor kontekstual. Nishanta (2008), Krueger et al., (2000), dan Bird & Jelinek (1988) menjelaskan beberapa faktor internal yang terbukti mempengaruhi dorongan berwirausaha meliputi: kemampuan individu, karakter individu, persepsi tentang kewirausahaan, kemandirian, faktor sosial ekonomi dan demografi yang mencakup usia, jenis kelamin, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan latar belakang keluarga. Sedangkan faktor ekternal dan kontekstual yang mempengaruhi minat wirausaha adalah dukungan kebijakan pemerintah, peluang pasar, dukungan lingkungan usaha, penghargaan sosial, pengalaman usaha, dan kegiatan pendidikan dan latihan bidang kewirausahaan (Gorman, *et.al*., 1997; Rasheed, 2000; Gerry, *et.al*., 2008; Gurbuz & Aykol, 2008).

Dengan demikian minat berwirausaha yang kuat dari para lulusan SMK dapat dilihat dari kemunculan berbagai atribut dalam diri peserta didik, yang mencakup: (M1) cita-cita, (M2) ketertarikan, (M3) upaya, (M4) menyiapkan

diri, (M5) keinginan, (M6) harapan, (M7) dorongan untuk berwirausaha, (M8) segera mewujudkan setelah lulus, dan (M9) menetapkan profesi wirausaha sebagai pilihan utama.

Sikap positip dan minat berwirausaha merupakan merupakan variabel yang sangat penting yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk memulai kegiatan usaha (Valliere, 2015). Studi tentang minat berwirausaha antara lain telah diungkapkan oleh Baron (2004) dan Shaver & Scott (1991). Dalam kajiannya, minat akan memperkuat wawasan yang akan mendorong seseorang untuk terlibat dalam kegiatan usaha.

Berbagai kajian lain mengungkapkan adanya keterkaitan antara variabel nilai-nilai, sifat, dan karakter positip, serta variabel demografi dengan perilaku kewirausahaan. Tetapi menurut Reynolds (1997) variabel nilai-nilai, sifat, dan karakter positip, serta variabel demografi kurang dapat digunakan untuk memprediksi mulculnya perilaku kewirausahaan. Oleh karena itu, beberapa peneliti kemudian banyak yang mempertanyakan bagaimana variabel tersebut dapat membentuk perilaku kewirausahaan.

Kajian yang dilakukan oleh Kruger et al (2000) menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk menjadi pewirausaha didasarkan atas pertimbangan: (a) sebagai pilihan setelah tidak mendapatkan pekerjaan (volunteer), dan (b) kesadaran sejak awal untuk menjadi pewirausaha. Peneliti lain, seperti Gartner et al (1994) dan Kyro & Carrier (2005) menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pewirausaha seiring dengan berjalannya waktu. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana dan variabel apa yang melatarbelakangi seseorang untuk memutuskan menjadi pewirausaha? Lee & Wong (2005) menyatakan bahwa

minat untuk menjadi pewirausaha merupakan variabel awal yang membetuk perilaku kewirausahaan. Minat merupakan titik awal yang menjadi pemicu dan variabel penting yang menentukan perilaku kewirausahaan (Fayolle & Gaille, 2004). Peneliti lain, yaitu Ajzen (1991) dan Ajzen (2001), mengungkapkan peran penting variabel minat sebagai faktor utama dalam membentuk perilaku kewirausahaan.

Niat untuk melakukan suatu aktivitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: faktor kebutuhan, keinginan, kebiasaan, dan keyakinan (Lee & Wong, 2004). Ajzen (1991) menyatakan berbagai variabel konitif sebagai variabel anteseden yang memengaruhi minat seseorang untuk berperilaku. Beberapa variabel anteseden tersebut adalah: nilai-nilai dan sikap, normal sosial yang dianut, dan berbagai aktivitas dan perilaku baik yang dirasakan. Seseorang akan tumbuh minatnya untuk menjadi pewirausaha jika ia merasakan bahwa aktivitas kewirausahaan yang dijalankan seseorang dinilai baik. Normal sosial yang memberikan kedudukan terhormat kepada pewirausaha juga dapat menjadi pemicu tumbuhnya minat berwirausaha. Demikian halnya nilai-nilai dan sikap positif terhadap kewirausahaan juga dapat memperkuat minat berwirausaha.

Variabel lain yang juga dinilai berpengaruh kuat terhadap minat berwirausaha adalah berbagai faktor situasional (Ajzen, 1987; Boyd & Vozikis, 1994). Dorongan dari pihak lain, faktor kesulitan hidup, dan berbagai kendala yang dialami dalam menjalankan pekerjaan termasuk dalam kategori faktor situasional. Seringkali dijumpai seseorang berminat untuk berwirausaha ketika ia mendapatkan dorongan dari pihak lain, mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, atau kesulitan ekonomi, atau ketika ia mendapatkan kendala

dalam menjalankan tugas di tempat kerja. Berbagai kesulitan hidup ini yang kemudian memicu tumbuhnya minat untuk berwirausaha.

Kajian yang sudah dilakukan para ahli mengungkapkan bahwa minat merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku. Jika dikaitkan dengan aktivitas kewirausahaan, maka minat menjadi pemicu bagi seseorang untuk berwirausaha (Linan, 2004). Ajzen (1991) mengemukakan tiga faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu:

a. ketertarikan pribadi (*personal attraction, PA*) merujuk pada derajat pandangan seseorang, apakah negatif atau positip terhadap aktifitas kewirausahaan (Ajzen, 2002). Hal ini tidak sekedar berkaitan dengan dimensi afeksi (perasaan senang, nyaman, merasa menjadi lebih baik); tetapi juga berkaitan dengan dimensi evaluatif (menjadi pewirausaha dianggap terhormat, lebih memberikan kesejahteraan).
b. Norma sosial yang dirasakan, yang mengukur tekanan, dorongan, atau dukungan sosial yang dirasakan jika seseorang menjadi pewirausaha. Hal ini merujuk pada persepsi tentang ada tidaknya dukungan dari lingkungan sosial kepada seseorang untuk menjadi pewirausaha (Ajzen, 2001).
c. Hal-hal yang dirasakan ketika seseorang menjalani aktifitas kewirausahaan, yaitu berkaitan dengan penilaian seseorang tentang kesulitan atau kemudahan yang dirasakan ketika menjalani aktifitas wirausaha. Hal ini berkaitan dengan derajat perasaan dari diri seseorang sejauh mana ia mampu menjalani aktivitas kewirausahaan dengan

baik (Ajzen, 2002). Jauh sebelum kajian Ajzen (2002), Shapero & Sokol (1982) memberikan istilah adanya anggapan dari seseorang tentang kemungkinan kegiatan kewirausahaan bisa dijalankan (*feasibility*) atau tidak.

Dengan demikian model minat berwirausaha berpandangan bahwa keputusan seseorang untuk menjalankan kegiatan usaha akan ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: (a) ketertarikan individu terhadap kewirausaha, (b) dukungan norma sosial yang dirasakan jika seseorang memilih karir sebagai pewirausaha, dan (c) berkait dengan penilaian seseorang tentang tingkat kesulitan dan kemudahan yang dirasakan jika menjalani aktifitas kewirausahaan (Linan, 2004).

Brenner et al (1991) mengungkap seseorang berminat untuk berwirausaha karena adanya berbagai harapan yang dapat diraih, yang meliputi: (a) berwirausaha memberikan kebebasan untuk beraktivitas sesuai dengan keinginan, (b) perasaan puas dengan kegiatan usaha sendiri, (c) stimuli intelektual, (d) kesempatan untuk beraktivitas di berbagai bidang, (e) dihormati oleh pihak lain, (f) kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, (h) adanya penghargaan atas prestasi kerjanya, (i) kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama orang yang sukses.

Kepemilikan berbagai sumber daya dan dukungan keluarga merupakan variabel pendukung (instrumental) bagi terbentuknya minat berwirausaha (Valliere, 2015). Faktor lain yang mempengaruhi terbentuknya minat berwirausaha adalah berkait dengan penilaian seseorang sejauh mana kegiatan kewirausahaan dapat dijalankan (Kristiansen & Indarti, 2004). Faktor pendidikan kewiraurausahaan dan

pengalaman keluarga berkait dengan kegiatan kewirausahaan berpengaruh kuat bagi terbentuknya sikap kewirausahaan (Carr & Sequeira, 2007).

Secara operasional, minat kewirausahaan dapat dilihat sebagai orientasi karir, cita-cita untuk menjalankan kegiatan usaha, pandangan tentang menjadi pribadi yang mandiri, dan harapan untuk memiliki kegiatan usaha bisnis (Thompson, 2009). Dalam kajian terbaru, minat kewirausahaan diukur dari berbagai sikap, keyakinan, norma yang dianut, harapan individu, dan tindakan nyata untuk berwirausaha (Valliere, 2015). Berikut ini adalah beberapa ahli yang mengukur minat berwirausaha, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Definisi Operasional Minat Wirausaha Menurut Para Ahli

Kajian	Operasionalisasi minat berwirausaha
Autio, Keeley et al (2001)	Ekspektasi atau harapan individu
Brenner, Pringle et al (1991)	Sikap dan harapan, pilihan karir yang disukai
Chen, Greene et al (1998)	Sikap, ketertarikan untuk memulai usaha bisnis Minat, adanya upaya yang keras untuk mencoba kegiatan usaha Harapan, seberapa cepat keputusan untuk menjalankan usaha Perilaku kewirausahaan Perilaku yang ditunjukkan adanya upaya-upaya untuk menjalankan kegiatan usaha Perilaku yang ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang direncanakan

Kajian	Operasionalisasi minat berwirausaha
Engle, Dimitriadi et al (2010)	Harapan Perilaku yang berkaitan dengan aktifitas kewirausahaan Perilaku kegiatan usaha yang direncanakan
Franke & Luthje (2004)	Minat, sudah pernah mencoba kegiatan usaha Harapan, sudah pernah memulai dan menjalankan kegiatan usaha
Hmieleski & Corbett (2006)	Sikap, ketertarikan untuk memulai usaha bisnis Minat, adanya upaya yang keras untuk mencoba kegiatan usaha Harapan, seberapa cepat keputusan untuk menjalankan usaha Perilaku kewirausahaan Perilaku yang ditunjukkan adanya upaya-upaya untuk menjalankan kegiatan usaha Perilaku yang ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang direncanakan
Linan & Chen (2009)	Sikap, kesiapan untuk menjalankan kegiatan usaha apa pun Minat, tujuan untuk menjadi pewirausaha Minat, mencoba dengan sungguh-sungguh untuk mencoba menjalankan kegiatan usaha Minat, pernah menjalankan kegiatan usaha Minat, pernah memulai kegiatan usaha Perilaku kewirausahaan
Souitaris, Zerbinati et al (2007)	Sikap, lebih suka menjadi orang yang mandiri Harapan, kemungkinan untuk mewujudkan cita-cita sebagai orang yang mandiri

BAB V

PENGUATAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SMK

A. Pendidikan Kewirausahaan di SMK

Pendidikan kewirausahaan di Indonesia dianggap masih kurang mendapatkan perhatian optimal. Banyak pendidik yang dinilai kurang optimal dalam mengembangkan kemampuan wirausaha para peserta didik, baik di sekolah kejuruan maupun pendidikan professional. Orientasi utama lembaga pendidikan umumnya hanya untuk menyiapkan peserta didik sebagai lulusan yang siap kerja. Untuk itu, perlu dikembangkan model pembelajaran yang dapat membekali peserta didik sebagai lulusan yang berkarakter dan mampu berwirausaha.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan adalah terletak pada implementasi yang baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai kewirausahaan; dan belum menyentuh pada usaha tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ada tuntutan agar lembaga pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter dan

kemampuan berwirausaha. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran yang efektif, yang dapat memperkuat karakter dan kemampuan berwirausaha para peserta didik. Untuk itu perlu dikembangkan model pendidikan kewirausahaan yang mampu menumbuhkan karakter dan perilaku wirausaha para peserta didik.

Kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pendidikan Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (2010) diperoleh informasi bahwa pendidikan kewirausahaan mampu menghasilkan persepsi positip terhadap profesi sebagai pewirausaha. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri. Pendidikan pada setiap jenjang diharapkan untuk memperkuat sikap dan ketrampilan berwirausaha.

Pendidikan kewirausahaan yang efektif diharapkan akan dapat mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan yang melekat pada peserta didik, yang meliputi: (1) kemandirian, yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas, (2) kreatif, yang ditunjukkan oleh kemampuan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang berbeda dari produk atau jasa yang sudah ada, (3) berani mengambil resiko, yang ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani dan mampu mengambil resiko kerja, (4) berorientasi pada tindakan, yang ditunjukkan oleh kemampuan berinisiatif,

bertindak, dan bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki terjadi, (5) kepemimpinan, yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan mampu mengorganisir dan mengarahkan orang lain; (6) kerja keras, yang ditunjukkan oleh perilaku yang menunjukkan adanya upaya yang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan, (7) jujur, yang ditunjukkan oleh perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan; (8) disiplin, yang ditunjukkan oleh tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, (9) inovatif, yang ditunjukkan oleh kemampuan untuk menerapkan kreatifitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan; (10) tanggung jawab, yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku seseorang yang mau dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; (11) kerja sama, yang ditunjukkan oleh perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya mamou menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan tindakan dan pekerjaan; (12) pantang menyerah, yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku seseorang yang tidak menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif tindakan; (13) komitmen, yang ditunjukkan oleh kemampuan membuat dan melaksanakan kesepakatan mengenai suatu hal yang telah dibuat; (14) realistis, yang ditunjukkan oleh kemampuan menggunakan fakta sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan; (15) rasa ingin tau, yang ditunjukkan oleh sikap dan tindakan

yang selalu berupaya untuk mengetahui secara mendalam dan luas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar; (16) komunikatif, yang ditunjukkan oleh tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbagul dan bekerja sama dengan orang lain; dan (17) motivasi kuat untuk sukses, yang ditunjukkan oleh sikap dan tindakan untuk selalu mencari solusi yang terbaik.

B. Perdebatan tentang Pendidikan Kewirausahaan

Perdebatan tentang cara pandang terhadap kegiatan pendidikan kewirausahaan melahirkan dua sisi pendekatan pembelajaran kewirausahaan. Sisi pertama memunculkan pendekatan pembelajaran tradisional, untuk menggambarkan pendekatan pembelajaran kewirausahaan yang hanya fokus mengajarkan pemahaman *tentang* kewirausahaan. Sisi kedua memunculkan pendekatan pembelajaran berbasis nilai-nilai wirausaha (*entrepreneurial education*) (Lackeus, 2015). Pendekatan pembelajaran berbasis nilai-nilai kewirausahaan ini sudah jauh hari dikaji oleh Cotton (1991), Gibb (1993), Johnson (1998), Kirby (2004), Kyro (2005), Lobler (2006), dan Cuban (2007). Intinya, pendekatan tradisional yang ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang terstandar, berfokus pada materi pelajaran, seringkali ditandai dengan siswa yang pasif, dan mendudukkan mata pelajaran kewirausahaan yang terpisah dengan materi palajaran lainnya; dikontraskan dengan kegiatan pembelajaran berbasis pengembangan minat individu, menuntut keaktifan siswa, berbasis proses belajar, berbasis proyek kegiatan, mengutamakan kolabirasi dalam kegiatan belajar, menggunakan pendekatan pembelajaran

untuk memupuk dan memperkuat pengalaman belajar dan bersifat multidisiplin ilmu yang menutut adanya kolaborasi pembelajaran antar bidang studi.

Kekuatan pendidikan berbasis nilai-nilai wirausaha (*entrepreneurial education*). *Entrepreneurial education* dalam prakteknya sejalan dengan pendekatan pembelajaran berbasis konstruktifistik (Lobler, 2006) yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para siswa untuk membangun pemahaman dan mengumpulkan pengalaman secara mandiri melalui kegiatan praktek lapangan. Lackeus (2015) mengemukakan beberapa pendekatan pembelajaran yang mirip dengan pembelajaran berbasis nilai-nilai wirausaha antara lain adalah pembelajaran berbasiswa pengalaman, *experiential learning* (Kolb,1984), pembelajaran berbasis kegiatan layanan, *service learning* (Meyer, 1999), dan pembelajaran berbasis masalah atau proyek, *problem/ project based learning* (Helle, et al, 2006).

Selama ini, pendekatan tradisional lebih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan di sekolah lebih dari satu abad yang lampau (Lackeus, 2015). Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecenderungan ini menurut Labaree (2005) adalah pendekatan behavioristik yang banyak digunakan pada lembaga pendidikan formal yang mengukur keberhasilan belajar dengan ukuran kuantitatif hasil tes tertulis, dan pendidikan kewirausahaan dianggap sekedar sebagai mata pelajaran pilihan (Kyro, 2005). Kecenderungan ini menurut kajian Lackeus (2015) belum menunjukkan tanda-tanda yang kuat untuk berubah dalam kegiatan pendidikan formal yang sangat berorientasi pada hasil belajar yang berupa ukuran skor tes yang bersifat performatif. Tetapi dengan memperhatikan data-data tentang

ketidaksiapan lulusan pendidikan formal untuk bekerja dan berwirausaha, dan juga memperhatikan rendahnya rasio kewirausahaan di Indonesia (Prianto, 2017; 2018); maka institusi pendidikan formal perlu membuat terobosan dalam menggunakan pendekatan pembelajaran, khususnya pada pendidikan kewirusahaan.

Lackeus, et al (2013) telah membuat ikhtisar kajian tentang perdebatan pendidikan kewirausahaan dilihat dari sisi filosofi, kajian pendidikan, dan kajian kewirausahaan dengan membandingkan dalam dua pandangan:

Tabel 5.1 Perdebatan Kajian Pendidikan Kewirausahaan Dari Sisi Filosofi, Paham Pendidikan, dan Kewirausahaan Menurut Lackeus, et al. (2013)

Paham Positivisme **Pendekatan Pendidikan Tradisional** **Pendekatan Pendidikan Tradisional** **Metode saintifik**	**Paham Interpretivisme** **Pendeketan progresif konstruktivistik** **Pendekatan Pendidikan** **Metode kewirausahaan**
Simpel	**Kompleks**
Ilmu dilihat sebagai...kajian yang terpisah	Ilmu dilihat sebagai...kajian secara holistic
Pembelajaran sebagai aktifitas terstandar	Pembelajaran berpusat pada minat dan keunikan siswa
Pendidikan kewirausahaan sebagai subjek pelajaran yang terpisah dengan pelajaran lainnya.	Pendidikan kewirausahaan sebagai subjek pelajaran yang terkait dengan pelajaran lainnya (multidisiplin).
Metode pembelajaran tinggal memanfaatkan apa yang sudah ada dan sama untuk semua pelajaran	Metode pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar

Individual	**Sosial**
Belajar untuk memahami struktur bangunan sosial	Belajar untuk mengkontruksi bangunan sosial
Belajar sebagai aktifitas individu	Belajar sebagai interaksi sosial dan berbagai pengalaman
Pendidikan kewirausahaan untuk mengetahui dan memahami tentang ilmu kewirausahaan	Pendidikan kewirausahaan untuk memahami sifat, nilai, dan karakter orang yang berjiwa wirausaha dan memahami bagaimana menjadi pewirausaha
Metode pembelajaran sebagai tujuan dan tinggal dijalankan	Metode pembelajaran sebagai hal yang dikaji, diperbaharui, dan dikembangkan
Konten	**Proses**
Proses pencarian dan pemahaman ilmu bersifat linear dan final	Proses pencarian dan pemahaman ilmu bersifat interatif, siklikal, dan berulang-ulang
Aktifitas belajar berorientasi pada hasil	Aktifitas belajar berorientasi pada proses
Pendidikan kewirausahaan dilihat sebagai konten	Pendidikan kewirausahaan dilihat sebagai proses
Metode pembelajaran bersifat linear	Metode pembelajaran bersifat siklikal dan berulang
Terpisah	**Terkait**
Ilmu dilihat sebagai objek dan realitas sosial	Ilmu dilihat sebagai pengalaman hidup
Pembelajaran fokus pada pencarian pengetahuan yang diyakini	Pembelajaran fokus pada pencarian pengalaman melalui kegiatan praktek
Pendidikan kewirausahaan menekankan pada kajian teori	Pendidikan kewirausahaan menekankan proses penciptaan
Metode pembelajaran menekankan pada kegiatan observasi, menguji, dan menemukan hokum	Metode pembelajaran menekankan pada proses aksi dan pendampingan dalam proses penciptaan

Perubahan paradigma pendidikan di sekolah dari pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centre learning*) ke sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centre learning*) dapat dilihat dari banyaknya metode dan model pembelajaran yang dapat menjadi alternatif pilihan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Ada beberapa pendekatan pembelajaran yang dianggap dapat diterapkan dalam pendidikan kewirausahaan adalah pembelajaran berdasarkan masalah atau dikenal dengan PBL (*Problem Based Learning*), dalam beberapa referensi sering juga disebut PBI (*Problem Based Instructions*) (Tan & Ng, 2006), pembelajaran berbasis proyek (Jones & English, 2004), dan pembelajaran berbasis kegiatan pelayanan (Desplaces,et al, 2009). Lackeus (2015) menjelaskan ada kesamaan roh pada pendidikan kewirausahaan dengan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis kegiatan layanan. Kesamaan itu terlatak pada fokus utama kegiatan pembelajaran yang berpusat pada masalah dan bersifat otentik, aktifitas pembelajaran yang disesuaikan dengan realita lapangan, dan mengutamakan kerja kelompok.

C. Mengapa Pendidikan Kewirausahaan Relevan Untuk Dikembangkan?

Pendidikan Kewirausahaan dalam beberapa tahun terakhir telah diajarkan pada lembaga pendidikan tinggi di berbagai negara (Kuratko, 2005; Lackeus, 2015). Pada berbagai negara di dunia, Pendidikan Kewirausahaan menjadi bagian penting baik bagi pendidikan formal maupun dunia usaha (Hytti & O'Gorman, 2004; Lackeus, 2015). Alasan

utama untuk memosisikan Pendidikan Kewirausahaan sebagai hal yang penting untuk diajarkan adalah karena adanya keyakinan bahwa kewirausahaan dilihat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Wong, et.al, 2005; Lackeus, 2015). Pendidikan Kewirausahaan juga diperlukan untuk menjawab tantangan globalisasi, ketidakpastian, dan perubahan dunia yang semakin cepat dan komplek. Perubahan yang cepat memerlukan kehadiran orang dan organisasi yang memiliki kecakapan kewirausahaan (Gibb, 2002; Lackeus, 2015).

Pendidikan Kewirausahaan juga diyakini akan dapat mendorong para siswa untuk lebih terlibat aktif dan memiliki motivasi belajar yang lebih kuat (Surlemont, 2007), menumbuhkan banyak minat, menghadirkan kegiatan belajar yang menyenangkan, meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, membangun kreatifitas para siswa (Johannisson, 2010; Lackeus, 2013), serta memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja (Amabile & Kramer, 2011). Puncaknya, Pendidikan Kewirausahaan juga akan ikut mengawal terjadinya perubahan sosial di masyarakat menuju tatanan kehidupan yang lebih baik (Rae, 2010), dan akhirnya mendudukkannya sebagai sarana untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam meningkakan kualitas hidup melalui penyediaan barang dan jasa serta sistem nilai-nilai baru yang lebih baik (Volkmann, et.al, 2009; Lackeus, 2015).

Pada lembaga pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan kewirausahaan telah diposisikan sebagai mata pelajaran utama dan diyakini sebagai prasyarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mempersiapkan para lulusannya untuk berwirausaha dan memasuki

dunia kerja (Lackeus, 2015). Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewirausahaan di sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan harus menjadi kepedulian dari semua pihak, baik dari sekolah, para orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Kewirausahaanlah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli, dan secara otomatis akan memperkuat dunia usaha dan dunia industri. Berikut ini adalah ringkasan tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan.

Tabel 5.2 Ikhtisar Pentingnya Pendidikan Kewirausahaan

	Level Individu	**Level Organisasi**	**Level Sosial**	**Referensi**
Menjadi alasan umum tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan, tetapi sekolah dianggap kurang efektif dalam mengambil peran				
Menciptakan lapangan kerja	Semakin banyak orang yang mampu menciptakan lapangan kerja	Semakin banyak organisasi yang mampu menyediakan lapangan kerja	Kewirausahaan dan inovasi merupakan faktor utama penggerak pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja	mes & Iredale,2010 Hindle,2007 Kuratko,2005 Volkmann,et. al,2009
Penguatan ekonomi	Kewirausahaan akan memberikan kesmepatan kepada seseorang untuk memiliki posisi ekonomi yang kuat.	Organisasi selalu mampu tampil *up to date* menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan dalam jangka panjang.	Proses pembaharuan terus menerus yang menjadi budaya masyarakat akan menjadi kekuatan ekonomi dalam jangka panjang.	Kuratko,2005 Gorman,et.al, 1997 O'Connor,2008 Volkmann,et. al,2009

	Level Individu	Level Organisasi	Level Sosial	Referensi
Globalisasi, inovasi, dan pembaharuan	Seseorang memerlukan kecakapan kewirausahaan untuk menghadapi dunia yang terus berubah.	Budaya wirausaha dalam organisasi memegang peranan penting dalam menghadapi tuntutan pasar yang terus berubah.	Pasar yang semakin terbuka membutuhkan kehadiran warga masyarakat yang memiliki kecakapan dalam level yang tinggi.	Hytti & O'Gorman,2004 Henry,et. al,2005 Kuratko,2005 Jones & Iredale,2010
Menjadi alasan yang jarang diungkapkan tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan, tetapi sekolah berpeluang untuk mengambil peran dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan				
Kegiatan yang menyenangkan, memperkuat keterlibatan siswa dalam belajar, membangun kreatifitas	Mengembangkan kemampuan berkreasi, mengkreasikan nilai-nilai dan caa kerja baru, kreatifitas merupakan sumber utama dari kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan membangkitkan rasa bangga pada siswa yang belajar karena mampu menghasilkan karya.	Pekerja yang kreatif dan bekerja dengan dilandasi rasa senang merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja organisasi, baik organisasi yang baru maupun organisasi yang sudah ada sebelumnya.	Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu bangsa berhubungan positip dengan tingkat kebahagiaan warga	Amabile & Khaire,2008 Amabile & Kramer,2011 Goss,2005 Diener & Suh,2003

	Level Individu	Level Organisasi	Level Sosial	Referensi
Berbagai tantangan dalam masyarakat	Seseorang dapat menampilkan cara kerja baru yang berbeda dari yang sudah berkembang di masyarakat, dan dapat meraih kesuksesan dalam bidang ekonomi	Berbagai lembaga bisnis dapat menjalin kolaborasi dengan kumpulan orang yang memiliki semangat berwirausaha, dan pusat-pusat pengembangan kewirausahaan yang ada di masyarakat untuk mengkreasikan nilai-nilai sosial yang baru.	Kumpulan orang yang berjiwa wirausaha kuat, dan budaya wirausaha yang berkembang di masyarakat dapat mengatasi permasalahan yang gagal dipecahkan oleh institusi bisnis yang ada di pasar.	Volkmann, et.al, 2009 Kuratko,2005 Rae, 2010

Lackeus (2015) mengemukakan tiga pendekatan pembelajaran yang memiliki kemiripan dengan pendidikan kewirausahaan, yaitu pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*), dan pembelajaran berbasis layanan (*service learning*). Lackeus (2015) merangkum berbagai persamaan dan perbedaan antara pendidikan kewirausahaan dan tiga pendekatan pembelajaran tersebut, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Perbandingan Berbagai Pendekatan Pembelejaran Dengan Pendidikan Kewirausahaan

Fokus Utama Pada....	Pendidikan Kewirausahaan	Pembelajaran Berbasis Masalah	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis Layanan
...berbagai masalah	√	√	√	√
...berbagai peluang	√			
...otentik, orisinalitas	√	√	√	√
...proses penciptaan	√		√	
...proses eksperimen secara terus menerus	√			
...berinteraksi dengan dunia nyata	√			√
...mengkreasikan nilai-nilai dan cara kerja baru untuk masyarakat luas	√			√
...mengutamakan kerja tim	√	√	√	
...berorientasi pada proses kerja yang melintasi waktu yang panjang	√		√	√

Fokus Utama Pada....	Pendidikan Kewirausahaan	Pembelajaran Berbasis Masalah	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis Layanan
...berorientasi pada penciptaan hal-hal yang baru	√			
...toleran dengan resiko kegagalan	√			

Lackeus (2015) juga membuat kreteria tentang pendekatan pendidikan kewirausahaan yang berbasis aksi dan pendidikan kewirausahaan yang tidak berbasis aksi. Pendidikan kewirausahaan yang tidak berbasis aksi terlihat dari kegiatan pembelajaran dalam bentuk ceramah di kelas, mendatangkan nara sumber tamu, diskusi kelompok, kunjungan lapangan, studi literatur. Sedangkan pendidikan berbasis aksi dapat berbentuk: (a) proses kreasi, baik dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Kegiatan pembelajaran antara lain dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan rencana kegiatan usaha, pemetaan peluang usaha, pembelajaran berbasis proyek, dan simulasi usaha; (b) proses penciptaan nilai-nilai baru, cara kerja baru dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, budaya kerja baru, dan nilai ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Kegiatan pembelajaran antara lain dalam bentuk penciptaan model usaha, menawarkan cara kerja baru kepada masyarakat, menjalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk menciptakan cara kerja baru, magang, berlatih menjalankan

kegiatan usaha; (c) proses penciptaan dan memulai kegiatan usaha bisnis. Kegiatan pembelajaran antara lain dalam bentuk penulisan rencana kegiatan usaha bisnis yang siap dijalankan, penyusunan kegiatan usaha dalam skala mikro, belajar membuat usaha bisnis, dan pembelajaran berbasis kolaborasi dengan masyarakat untuk pegembangan kegiatan usaha; (d) proses penciptaan kegiatan usaha berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk program-program pengembangan kegiatan usaha bisnis.

Lackeus (2015) merangkum kegiatan pendidikan berwirausaha dan pendidikan kewirausahaan sebagaimana tampak pada gambar berikut.

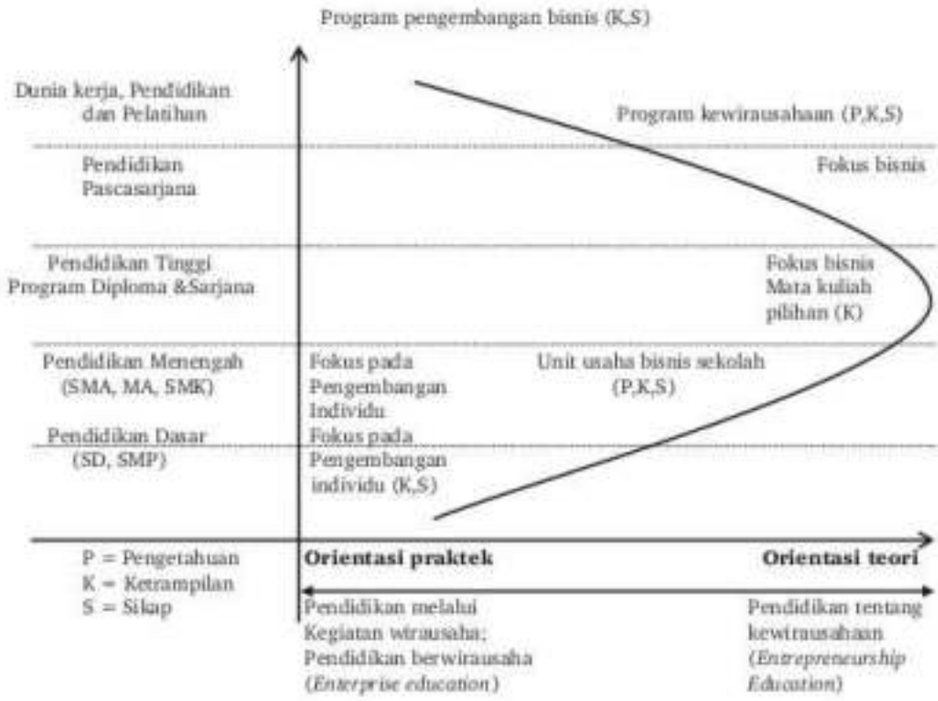

Gambar 5.1 Model Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan

Munculnya tiga pendekatan pendidikan kewirausahaan, yaitu pendidikan untuk berwirausaha, pendidikan melalui kegiatan wirausaha dan pendidikan tentang kewirausahaan kemudian memunculkan pandangan pendidikan kewirausahaan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, kewirausahaan adalah berkaitan dengan aktifitas identifikasi peluang usaha, pengembangan bisnis, menciptakan lapangan usaha sendiri, menciptakan dan mengembangkan kegiatan usaha atau menjadi pewirausaha (Fayolle & Gaylly, 2008; Mahieu, 2006). Dengan demikian dalam arti sempit kewirausahaan lebih diarahkan pada kegiatan usaha bisnis (*hard skills*). Dalam arti luas, kewirausahaan berkaitan dengan aktifitas pengembangan diri, kreativitas, membangun kepercayaan diri, pengembilan inisiatif, bekerja sama dalam tim dengan latar belakang yang berbeda, orientasi pada aktivitas yang mengarah untuk menjadi pewirausaha yang tangguh. Dengan demikian, dalam luas kewirausahaan lebih berkaitan dengan pengembangan kepribadian wirausaha (*soft skills*). Kajian penelitian terbaru menunjukkan bahwa berkembangnya kegiatan usaha lebih dipicu oleh terbangunnya team kerja yang kuat, dan bukan sekedar ditentukan oleh seorang pewirausaha saja. Maka kemampuan bekerja sama dalam team juga merupakan dari kewirausahaan dalam arti luas (Klotz et al, 2014).

Perspektif tentang pendidikan kewirausahaan, apakah dilihat dalam arti sempit atau luas akan mempengaruhi penetapan tujuan pendidikan, target siswa, materi pelajaran, model pembelajaran yang digunakan, dan prosedur penilaian hasil belajar yang digunakan (Lackeus, 2015). Dengan demikian kegiatan pembelajaran kewirausahaan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan,

yaitu (1) pembelajaran *tentang* kewirausahaan, (2) pembelajaran *untuk* berwirausaha, dan (3) pembelajaran *melalui* kegiatan usaha atau terlibat dalam kegiatan usaha. Kegiatan pembelajaran hanya akan terjadi jika (a) ada guru yang mengajar dengan pendekatan pembelajaran yang dipilih, (b) materi yang diajarkan sesuai dengan target siswa yang ditentukan, dan (c) siswa yang belajar. Kegiatan pembelajaran akan berhasil jika guru mengajar dengan pendekatan pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat menggerakkan siswa untuk belajar secara efektif dan didapatkan hasil belajar yang optimal.

Pembelajaran *tentang* kewirausahaan biasanya sangat padat dengan teori tentang kewirausahaan, dan para siswa diharapkan mendapatkan pemahaman secara umum tentang apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Pendekatan inilah yang sering terlihat dalam pembelajaran kewirausahaan yang sangat padat dengan kajian teori kewirausahaan (Lackeus, 2015). Pembelajaran untuk berwirausaha berorientasi pada pemerolehan pekerjaan atau membekali siswa dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat mengantarkan siswa sebagai pewirausaha pemula.

Pembelajaran *untuk* berwirausaha berorientasi pada pembahasan tentang kegiatan usaha tertentu yang menjadi minat siswa. Dengan demikian pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari siswa berkaitan dengan kegiatan usaha yang diminati siswa. Oleh karena itu, pihak sekolah bisa mendatangkan para praktisi bisnis yang sudah berpengalaman menjalankan kegiatan usaha sebagai guru bidang kewirausahaan. Sedangkan pembelajaran *melalui* kegiatan usaha adalah proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman nyata kepada

para siswa tentang bagaimana menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, para siswa akan terlibat langsung dalam kegiatan bisnis (Kyro, 2005).

D. Kreteria Keberhasilan Pendidikan KWU di SMK

Ada pun kreteria keberhasilan pendidikan kewirausahaan menurut kajian Pusat Kurikulum dapat diketahui melalui pencapaian kreteria oleh peserta didik, suasana kelas, dan aktifitas guru. Dari sisi peserta didik, pendidikan kewirausahaan dinilai berhasil jika para peserta didik: (1) memiliki kemandirian, (2) memiliki kreativitas yang tinggi, (3) memiliki keberanian untuk mengambil resiko, (4) berorientasi pada tindakan, (5) memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, (6) memiliki kemauan untuk bekerja keras, (7) memiliki pemahaman tentang konsep kewirausahaan, (8) memiliki skill kewirausahaan.

Dari sisi suasana kelas, pendidikan kewirausahaan dinilai berhasil jika: (1) lingkungan kelas dihiasi dengan hasil kreatifitas siswa, (2) pembelajaran ditandai dengan keaktifan siswa, (3) lingkungan kelas mampu memicu tumbuhnya kebiasaan dan perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai kewirausahaan yang diimplementasikan.

Dari sisi guru, pendidikan kewirausahaan akan berhasil jika: (1) guru mampu memberikan keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai kewirausahaan, (2) guru mampu merancang pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan, (3) guru memahami konsep-konsep kewirausahaan, (4) guru memiliki ketrampilan kewirausahaan, (5) kepala sekolah mampu menciptakan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan

sekolah, (6) kepala sekolah bekerja keras mewujudkan pembelajaran yang efektif, (7) kepala sekolah memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam menjalan tugas pokoknya, (8) kepala sekolah pantang menyerah dalam menghadapi masalah dengan selalu mencari solusi terbaik, (9) kepala sekolah memiliki naluri kewirausahaan sebagai sumber belajar bagi peserta didik, (10) kepala sekolah menjadi teladan bagi guru dan peserta didik, (11) Lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang dilandai nilai-nilai kewirausahaan yang diimplementasikan.

Pendidikan kewirausahaan memerlukan sebuah proses pembelajaran yang sangat komplek, dengan menggunakan berbagai metode dan teori belajar mengajar. Banyak peneliti, para ahli, dan praktisi bisnis yang mengakji tentang metode pembelajaran yang dinilai paling efektif dapat mewujudkan tujuan pendidikan kewirausahaan. Berbagai kajian itu kemudian memunculkan dua kategori metode pembelajaran dilihat dari keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu pembelajaran aktif dan pembelajaran pasif; dan oleh para ahli seringkali disebut sebagai metode pembelajaran tradisional dan metode pembelajaran aktif dan inovatif (Ruskyte & Navickas, 2017).

Sebagai sebuah proses pembelajaran yang sangat komplek, maka pendidikan kewirausahaan harus dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran aktif agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif (tepat sasaran atau tujuan) dan efisien (dengan mengoptimalkan sumber daya dan waktu) (Ruskyte & Navickas, 2017). Penerapan metode pembelajaran aktif dalam pendidikan kewirausahaan dimaksudkan untuk menghadirkan aktifitas kewirausahaan dalam situasi yang

riil sehingga dapat mengkondisikan siswa lebih aktif dan terdorong untuk mendalami kewirausahaan secara mandiri.

Dasar pijakan teori dari pembelajaran aktif adalah teori belajar dengan pendekatan konstruktitistik, yang mengharapkan para siswa dapat membangun pemahaman dan mengembangkan ketrampilan, mengkaitkan ide-ide dan gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki guna membangun dan mengembangkan pemahaman yang lebih baru (Bransford, et al, 1999). Prinsip dasar pembelajaran aktif adalah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengkonstruksi pemahaman dan pengetahuan secara mandiri. Para siswa didorong untuk memikirkan apa yang sudah dipelajarinya, dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Bonwell dan Eison (1991) menjelaskan pembelajaran aktif merujuk pada berbagai aktivitas pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan yang intensif dari para siswa dalam mengerjakan tugas-tugas, membaca dan menganalisis berbagai permasalahan, mendiskusikan kasus, atau mengerjakan suatu proyek kegiatan; serta memikirkan dan mengevaluasi atas kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pendekatan pembelajaran aktif mengajarkan para siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking*).

Dalam pembelajaran aktif, para siswa akan lebih banyak terlibat dalam sebuah proyek kegiatan, dan bukan sekedar mendengar, mencatat, atau mengikuti petunjuk dari guru kelas. Para siswa akan lebih banyak terlibat dalam kegiatan, dan dari aktivitas itu mereka akan membangun pemahaman, mengembangkan kecakapan berpikir

ilmiah, dan mengembangkan ketrampilan secara mandiri Pendekatan pembelajaran aktif akan lebih diarahkan untuk mengembangkan dan memperkuat berbagai ketrampilan, dan bukan sekedar berupa kegiatan penyampaian informasi kepada para siswa. Pembelajaran aktif juga memungkinkan para siswa untuk mengembangkan berbagai sikap, nilai, dan karakter (Handelsman, et al, 2007).

E. Pentingnya Pembelajaran Aktif di SMK

Pembelajaran aktif memungkinkan para siswa lebih banyak terlibat dalam kegiatan pembelajaran melalui berbagai kegiatan atau diskusi di kelas. Hal ini merupakan kebalikan dari pembelajaran pasif, dimana para siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Oleh karena itu, pembelajaran aktif akan membiasakan para siswa untuk berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan membaca dan mengamati secara aktif, menganalisis, mensistensis, mengevaluasi dan membuat keputusan berdasarkan data dan fakta yang dimilikinya. Oleh karena itu, pembelajaran aktif akan selalu melibatkan siswa dalam kegiatan kerja kelompok. Hal ini sekaligus akan membelajarkan siswa untuk membangun pengetahuan secara mandiri (Carr, et al, 2015) dan belajar bekerja sama atau berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu masalah (Handelsman, et al, 2007).

Para siswa dinyatakan sudah terlibat dalam pembelajaran aktif, yang akan dilihat melalui berbagai indikator aktivitas sebagai berikut: (1) Antar siswa saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu proyek kegiatan di dalam kelas, (2) para siswa mempresentasikan hasil kegiatan belajar atau proyek yang sudah dikerjakan, (3) para siswa terlibat aktif dalam

menjawab pertanyaan dalam kegiatan diskusi di kelas, (4) para siswa berpartisipasi aktif dalam sebuah proyek berbasis komunitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pembelajaran di kelas, (5) para siswa memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan siswa lain di luar kelasnya dalam menyelesaikan sutau tugas atau proyek, dan (6) para siswa mendiskusikan idea atau gagasan yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran dengan pihak lain di luar kelas, seperti dengan orang tuanya, atau dengan pihak lain yang dianggap memahami ide atau gagasan tersebut.

Berbagai pendekatan dan terminologi yang berkaitan dengan pembelajaran aktif meliputi: (1) pembelajaran berbasis siswa (*student centered*), dimana para siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan motivator yang menggerakan siswa untuk aktif belajar; (2) pembelajaran berbasis kegiatan pencarian, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran berbasis penemuan. Para siswa belajar berdasarkan permasalahan yang diajukan, mengumpulkan data, menganalisis data dengan landasan pengetahuan awal yang dimilikinya, membuat kesimpulan, dan melakukan refeleksi atas temuan yang didapatkannya; (3) pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), di mana siswa belajar dengan terlibat langsung dalam sebuah aktifitas, atau mengalami suatu peristiwa; guna mendapatkan pengalaman nyata secara langsung. Prinsip dasarnya adalah para siswa hanya akan mendapatkan pengalaman jika mereka terlibat dan mengalami dalam suatu kegiatan. Pengalaman belajar tidak akan didapatkan melalui cerita atau ceramah di dalam kelas.

Pembelajaran aktif dinilai mampu meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa selama proses kegiatan belajar mengajar. Penerapan metode pembelajaran aktif juga dinilai mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada level yang lebih tinggi, memperkuat sikap dan keyakinan diri para siswa. Ruskyte & Navickas (2017) mengungkapkan bahwa pembelajaran aktif akan membuat siswa lebih mampu membangun pemahaman yang lebih baik dan lebih lama melekat dalam pikiran. Pembelajaran aktif juga mampu mendorong siswa menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan rasa percaya pada diri sendiri.

F. Peran Guru Berjiwa Wirausaha Dalam Memperkuat Karakter Kewirausahaan

Pembelajaran aktif membutuhkan para guru yang berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurial teachers*). Menurut European Commission (2014), para guru berjiwa wirausaha adalah mereka yang selalu bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, inspiratif, berpikir terbuka dan percaya diri, bersikap luwes dan bertanggung jawab, pendengar yang baik, selalu bersikap hangat dan kaya ide, mampu bekerja bersama dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Para guru berjiwa wirausaha adalah mereka yang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selalu berorientasi pada aksi, sehingga materi pelajaran yang didiskusikan bersama dengan siswa akan selalu dilaksanakan bersama-sama dengan siswa. Selain itu, mereka selalu terus mengembangkan diri dan membuat terobosan baru yang ditujukan untuk terciptanya kegiatan pembelajaran kewirausahaan yang efektif dan efisien. Singkatnya, para guru

berjiwa wirausaha adalah mereka yang mampu memerankan diri sebagai bagian dari tim kerja bersama dengan siswa dan memiliki naluri untuk membangun jejaring.

Melalui kegiatan pembelajarannya, guru berjiwa wirausaha dapat mengambil peran untuk menutup celah kesenjangan antara apa yang ada pada aktifitas pendidikan dengan tuntutan ekonomi yang ada di masyarakat. Maka guru yang berjiwa wirausaha akan mampu melaksanakan pembelajaran yang bermakna karena mampu menghadirkan relevansi dengan dunia nyata. Guru berjiwa wirausaha lebih suka menghadirkan topik aktual dalam kegiatan pembelajarannya. Guru berjiwa wirausaha akan terus terdorong untuk melaksanakan metode pembelajaran aktif, dengan mengkaitkan topik pembelajaran dengan isu-isu yang terjadi pada dunia nyata. Dengan demikian guru berjiwa wirausaha akan lebih banyak memerankan dirinya sebagai pendamping siswa dalam kegiatan belajar.

Menurut pandangan European Commission (2014), para guru tidak mungkin mampu mengajarkan kewirausahaan kepada para siswa, jika diri mereka sendiri belum memiliki spirit kewirausahaan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena pendidikan kewirausahaan bukan sekedar ditujukan untuk membekali siswa untuk menjalankan kegiatan usaha. Lebih dari itu, pendidikan kewirausahaan adalah dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkuat sikap kewirausahaan, kecakapan dan pengetahuan; yang dengan semua itu para siswa diharapkan dapat mewujudkan suatu ide menjadi sebuah aksi nyata. Dengan demikian para guru dan sekolah tidak akan mungkin mampu mewujudkan tujuan pendidikan kewirausahaan jika tidak bekerja sama dan menjalin hubungan kemitraan

dengan institusi bisnis, orang tua dan masyarakat, serta stakeholder lainnya.

Pendidikan kewirausahaan dinilai sangat penting dalam mendampingi dan mempersiapkan para siswa untuk mengembangkan berbagai kecakapan kewirausahaan, sikap, perilaku, kesadaran untuk berwirausaha, dan menjadikan wirausaha sebagai pilihan karir setelah mereka lulus (Bat & Khan, 2014; European Commission, 2014). Pendidikan kewirausahaan juga dinilai akan terus menumbuhkan pengalaman belajar kepada para siswa selama mereka mengikuti kegiatan belajar. Berbagai pengalaman ini akan membentuk pandangan, prinsip-prinsip dalam menjalani aktifitas hidup, dan berbagai keputusan yang diambil kelak pada saat ia menjalani kehidupan di masyarakat.

Chigunta (2002) menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan yang efektif yang memberikan banyak manfaat, terutama berkaitan dengan upaya penciptaan lapangan kerja, mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya pengangguran terutama yang dialami oleh kaum muda, dihasilkannya berbagai cara kerja dan nilai-nilai kehidupan baru yang lebih efisien, mendorong lahirnya produk-produk kreatif dan inovatif, memperkuat komunitas lokal, dan mempersiapkan generasi dalam merespon perkembangan kegiatan ekonomi yang baru.

Pada tahap awal, Schoof (2006) menyarankan agar kegiatan pendidikan kewirausahaan lebih diarahkan untuk memberikan bekal kecakapan kewirausahaan, sikap dan perilaku yang ditujukan untuk memperkuat tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kegiatan berwirausaha, yang sasaran akhirnya adalah ditujukan untuk menguatkan siswa tentang kewirausahaan yang sebagai pilihan karir.

Psilos & Galloway (2018) dan Schoof (2006) menyarankan pentingnya pendidikan kewirausahaan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah, bahkan mulai pada jenjang pendidikan dasar. Kegiatan pembelajaran yang diwarnai dengan nilai-nilai kewirausahaan akan tampak dari dikembangkannya kebiasaan berpikir kritis, objektif, logis, analitis, dan diikuti dengan pembiasaan berpikir empatik, imajinatif, dan intuitif.

Atas dasar pandangan ini, maka ada keyakinan yang semakin meningkat bahwa pendidikan kewirausahaan harus diintegrasikan pada semua mata pelajaran dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan; apabila memimpikan hadirnya generasi yang berjiwa wirausaha (Bat & Khan, 2014). Selain itu, sekolah diharapkan untuk membuat program pendidikan kewirausahaan yang dirancang untuk: (a) meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kewirausahaan bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup, (b) mendorong siswa agar menetapkan pilihan wirausaha sebagai profesi pilihan, (c) membiasakan siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif, (d) memberikan pengetahuan atau kecakapan kepada siswa dalam mengidentifikasi peluang usaha, (e) memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai aspek yang harus dikuasai dalam mengelola kegiatan usaha, (f) membelajarkan siswa untuk mengembangkan rencana usaha di bawah bimbingan para praktisi (pelaku usaha), (g) membelajarkan siswa untuk membangun jejaring dengan pelaku usaha, pemiliki modal, dan lembaga keuangan, (h) memberikan pemahaman tentang kelengkapan legal formal yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha, (i) merancang pusat inkubasi sebagai pusat kegiatan belajar

para siswa dalam memulai kegiatan usaha baru mulai dari skala kecil (*start up*), dan melakukan analisis apakah usaha baru yang dirancang memiliki prospek untuk dikembangkan lebih lanjut (Bat & Khan, 2014; Heinonen & Poikkijoki, 2006: Schoof, 2006).

Bat & Khan (2014) menyatakan pendidikan kewirausahaan yang dirancang untuk tujuan sebagaimana diungkapkan di atas adalah dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya budaya wirausaha. Sebagaimana diungkapkan oleh Bat & Khan (2014), negara-negara maju yang masyarakatnya lebih dulu memiliki budaya wirausaha yang kuat melaksanakan kegiatan pendidikan kewirausahaan melalui penciptaan lingkungan belajar yang berorientasi pada kegiatan kewirausahaan, dengan ciri-ciri kegiatan pendidikan sebagaimana diungkapkan di atas.

Wirausahawan adalah orang yang mampu melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dan mengambil tindakan yang tepat, menemukan peluang, memberikan nilai tambah, mampu mewujudkan gagasan inovatif dan kreatif dalam tindakan nyata (Scarborough & Zimmerer, 1998). Karakter dan perilaku wiruasaha menurut Suryana (1996) tertera dalam tabel berikut.

Tabel 5.4 Karakter dan Perilaku Kewirausahaan Menurut Suryana (1996)

Karakter Wirausaha	Perilaku Wirausaha
Percaya diri	1. Bekerja dengan penuh keyakinan 2. Tidak memiliki ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan

Karakter Wirausaha	Perilaku Wirausaha
Berorientasi pada tugas dan hasil	1. Kebutuhan untuk beprestasi 2. Orientasi pada hasil yang optimal 3. Tekun 4. Tabah 5. Kerja keras 6. Memiliki inisiatif
Berani mengambil resiko	1. Berani mengambil resiko kerja 2. Menyukai pekerjaan yang menantang
Berjiwa kepemimpinan	1. Berperilaku sebagai pemimpin 2. Terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun 3. Mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain
Berpikir kearah hasil	1. Kreatif 2. Inovatif 3. Luwes dalam menjalankan pekerjaan 4. Memiliki banyak sumber daya 5. Memiliki keingintahuan akan banyak hal 6. Berpengetahuan luas
Orisinil	1. Mampu menyampaikan ide yang baru dan berbeda 2. Berorientasi ke depan 3. Memiliki perspektif yang luas

Keberhasilan pendidikan kewirausahaan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep tri pusat pendidikan, yaitu pendidikan di dalam lingkungan keluarga,

pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Selama ini aktifitas pendidikan lebih di-jadikan pusat kegiatan belajar siswa. Karena pendidikan kewirausahaan juga mengembangkan sikap, nilai-nilai, dan karakter kewirausahaan; maka untuk mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan pihak sekolah seyogyanya melibatkan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Sekolah, orang tua, dan masyarakat harus satu hati dalam mengembangkan sikap, nilai-nilai, dan karakter ke-wirausahaan. Dengan demikian evaluasi hasil belajar siswa untuk mata pelajaran kewirausahaan seyogyanya perlu melibatkan orang tua dan masyarakat. Para guru dapat mempertimbangkan pendapat orang tua dan masyarakat tentang perkembangan sikap, nilai-nilai, dan karakter kewirausahaan para siswa setelah siswa mengikuti pendidikan kewirausahaan. Hal ini sekaligus untuk memperkuat gerakan kewirausahan yang sudah seharusnya menjadi program bersama antara sekolah, orang tua, masyarakat, termasuk dari kalangan dunia usaha dan industri.

Penguatan sikap, nilai, dan karakter kewirausahaan tidak akan berjalan efektif apabila hanya dilaksanakan secara parsial melalui pendidikan di sekolah; sementara dari lingkungan keluarga, masyarakat, dunia usaha dan industri tidak memberikan dukungan yang signifikan.Harus ada kesadaran bersama dari berbagai pihak bahwa pengautan kewirausahaan di kalangan siswa adalah menjadi merupakan kebutuhan yang mendesak. Semua pihak harus memahami dan memiliki keyakinan yang sama, bahwa kewirausahaan sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan generasi masa depan dalam menghadapi tantangan kehidupan, sosial dan ekonomi. Atas dasar hal inilah maka sangat penting dan

mendesak bagi sekolah untuk membangun keterlibatan secara aktif dari kalangan orang tua, masyarakat, termasuk dari kalangan dunia usaha dan industri.

G. Indikator Ketercapaian Pembelajaran KWU di SMK

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh, meliputi: (1) pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam silabus dan RPP untuk semua bidang studi, (2) meningkatkan peran sekolah dalam mempersiapkan siswa berkarakter wirausaha, (3) pembenahan dan pengorganisasi proses pembelajaran yang mampu memperkuat sikap, nilai-nilai, karakter, dan kecakapan wirausaha. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran di sekolah, di rumah, dan di masyarakat (dunia usaha), (3) peningkatan kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan pembelajaran. Indikator ketercapaian nilai-nilai kewirausahaan jenjang SMK:

Tabel 5.5 Indikator Ketercapaian Nilai-Nilai Kewirausahaan

Nilai Kewirausahaan	Indikator Ketercapaian		
	Individu	Kelas	Sekolah
Mandiri	Melakukan sendiri tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak tergantung dengan pihak lain	Menciptakan suasana kelas yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja mandiri.	Menciptakan situasi sekolah yang membangun kemandirian para peserta didik.

Nilai Kewirausahaan	Indikator Ketercapaian		
	Individu	Kelas	Sekolah
Kreatif	Mengajukan pendapat yang berkaitan dengan tugas pokoknya. Mengemukakan gagasan baru, Mendeskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri.	Menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir dan bertindak kreatif. Pemberian tugas yang menantang munculnya karya baru, baik yang autentik maupun pengembangan produk yang sudah ada.	Menciptakan situasi yang menumbuhkan daya berpikir dan bertindak kreatif.
Berani mengambil resiko	Menyukai tugas yang menantang. Berani menerima akibat dari keputusan yang dibuat.	Memberikan tugas yang menantang.	Memberikan peluang agar peserta didik mengembangkan kemampuan untuk mengambil inisiatif.
Berorientasi pada tindakan	Mewujudkan gagasan dengan tindakan. Senang mengerjakan sesuatu	Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan gagasannya.	Memberikan layanan prima kepada peserta didik untuk mengembangkan gagasan.
Kepemimpinan	Terbuka terhadap saran dan kritik. Bersikap sebagai pemimpin dalam kelompok. Membagi tugas dalam kelompok.	Menciptakan situasi bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat kepemimpinan.	Menciptakan suasana sekolah yang demokratis.

Nilai Kewirausahaan	Indikator Ketercapaian		
	Individu	Kelas	Sekolah
Kerja keras	Mengerjakan tugas pada waktu yang telah ditentukan. Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar. Fokus pada pekerjaan	Menciptakan situasi agar peserta didik mencari sumber informasi.	Memfasilitasi warga sekolah untuk melakukan kegiatan belajar.
Konsep	Memahami konsep dasar kewirausahaan	Menciptakan suasana belajar yang kondusif agar memudahkan siswa memahami konsep kewirausahaan.	Memfasilitasi warga sekolah agar siswa menerapkan konsep yang dipahami.
Skill/ ketrampilan	Mampu mengidentifikasi peluang usaha. Mampu menganalisis secara sederhana peluang beserta resikonya. Mampu merumuskan dan merancang usaha bisnis. Mampu berlatih membuka usaha baru secara individu dengan berorientasi pada profit.	Menciptakan suasana kelas yang memberikan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian ketrampilan tertentu.	Membudayakan sekolah untuk melakukan kegiatan kewirausahaan.

Penguatan pendidikan kewirausahaan telah dilakukan di berbagai negara, karena pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan dengan intensif terbukti memberikan sumbangan yang signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas ketahanan

sosial, peningkatan kualitas individu, dan meningkatkan keterlibatan institusi pendidikan dalam menciptakan keadilan sosial (Lackeus, 2015). Apakah pendidikan kewirausahaan itu, mengapa pendidikan kewirausahaan relevan untuk kehidupan masyarakat, kapan pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan di sekolah, dan bagaimana melaksanakan praktek pendidikan kewirauasahaan?

Pertanyaan tentang apakah pendidikan kewirausahaan itu memiliki perspektif yang beragam. Ada yang menyatakan pendidikan kewirausahaan diarahkan untuk mendorong dan memperkuat siswa untuk membuka usaha baru. Pandangan ini menghasilkan definisi kewirausahaan sebagai kegiatan untuk memulai usaha. Pandangan lain menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan bukan sekedar dilihat sebagai kegiatan membuka usaha baru, tetapi lebih dari itu, pendidikan kewirausahaan diharapkan mampu membekali siswa untuk menjadi lebih kreatif, mampu menemukan peluang, bersikap proaktif dan inovatif. Kata kunci utama dari pendidikan kewirausahaan adalah bagaimana para siswa dapat dan harus dikembangkan kemampuan dan keinginannya untuk menghasilkan produk dan cara kerja baru yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang dapat dinikmati oleh semua orang.

Mengapa pendidikan kewirausahaan penting untuk diikuti oleh para siswa? Alasan utama yang selama ini sering disampaikan oleh para ahli adalah berkaitan dengan dimensi ekonomi. Pandangan ini dinilai sangat tepat bila diimplementasikan dalam pendidikan tinggi, yang memang bermaksud untuk mempersiapkan para lulusannya untuk bekerja dan mampu menjalankan kegiatan usaha. Tetapi mengkaitkan pendidikan kewirausahaan dengan

dimensi ekonomi dianggap kurang tepat sasaranbila diimplementasikan dalam pendidikan dasar dan menengah, karena para lulusanya belum termasuk kategori usia kerja.

Pada pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kewirausahaan lebih diarahkan untuk meningkatkan motivasi, memperkuat keterlibatan siswa dalam meningkatkan nilai tambah, dan mengkreasikan produk dan cara kerja baru berdasarkan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Dengan mengikuti pendidikan kewirausahaan, maka diharapkan para siswa akan memiliki minat yang kuat untuk mengkreasikan cara kerja baru yang lebih efektif, yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di masa depan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan bagi siswa pendidikan dasar dan menengah yang memang dirancang untuk mempersiapkan generasi masa depan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing dalam era global.

BAB VI

MEMPERKUAT PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MEMBENTUK PERILAKU KEWIRAUSAHAAN

A. Memperkuat Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan

Melalui kegiatan pendidikan kewirausahaan cepat atau lambat diharapkan para siswa kelak akan mampu menciptakan kegiatan usaha yang akan terus tumbuh, berkembang, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan (Lackeus, 2015). Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya tentang peran pendidikan kewirausahaan dalam memperkuat kegiatan ekonomi.

Hampir semua kajian menyatakan bahwa peran pendidikan kewirausahaan didasarkan atas asumsi bahwa menjadi pewirausaha adalah sebuah proses perubahan sikap dan perilaku yang direncanakan. Berkaitan dengan domain sikap, minat dan perilaku kewirausahaan dapat dikembangkan dengan didasarkan pada teori pengembangan

perilaku yang direncanakan (*Theory of planned behavior*, TPB) (Bandura, 1997; Krueger et al., 2000). Asumsinya adalah jika pendidikan kewirausahaan berkorelasi positip dengan kewirausahaan, maka minat untuk berwirausaha juga akan berubah positip, dan akhirnya akan memengaruhi perilaku kewirausahaan. Asumsi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

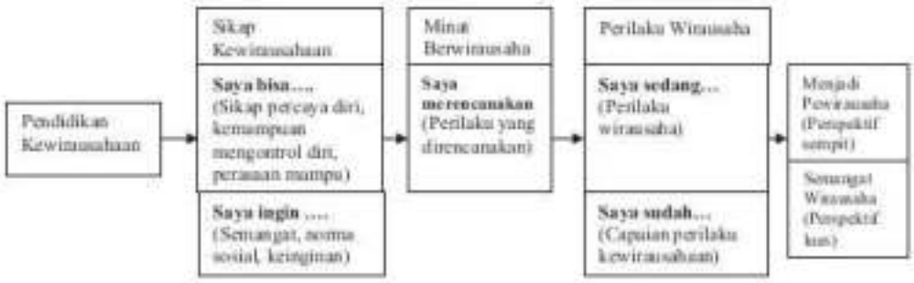

Gambar 6.1 Pengembangan Sikap, Minat, dan Perilaku Kewirausahaan dengan Mengacu Pada TPB

Lackeus (2014) menjelaskan konsep desain pendidikan yang dapat memicu berbagai suasana perasaan dan emosional yang kemudian dapat menumbuhkan berbagai kompetensi kewirausahaan. Konsep yang diajukan Lackeus (2014) dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengevaluasi aktivitas belajar yang dapat membangkitkan perasaan emosional yang dirasakan siswa setelah mengikuti pendidikan kewirausahaan. Pendekatan evaluasi yang diajukan Lackeus (2014) sama dengan evaluasi formatif yang dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan sikap kewirausahaan. Penilaian formatif adalah proses umpan balik untuk mengetahui apa yang didapatkan siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar (Black & Wiliam, 2009).

B. Desain Pendidikan Kewirausahaan Dalam Mem bentuk Perilaku Kewirausahaan

Berikut ini adalah kerangka konsep bagaimana desain pendidikan diharapkan mampu memicu tumbuhnya perasaan dan emosional siswa dalam mengikuti pembelajaran kewirausahaan, yang akhirnya dapat meningkatkan kompetensi kewirausahaan.

Gambar 6.2 Desain Pendidikan KWU Dalam Membentuk Perilaku Kewirausahaan

Strategi lain yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana dampak pendidikan kewirausahaan adalah dengan melihat sejauh mana ikhtiar nyata dari para peserta didik untuk menjadi pewirausaha beberapa tahun setelah mengikuti pendidikan kewirausahaan. Intinya, dibutuhkan waktu yang cukup untuk membuktikan apakah pendidikan kewirausahaan berdampak positif terhadap munculnya

perilaku kewirausahaan dari peserta didik. Dengan kata lain, pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap perilaku kewirausahaan tidak bisa langsung dibuktikan sesaat setelah pendidikan kewirausahaan selesai diikuti oleh para peserta didik (Lackeus, 2015).

Dengan memperhatikan desain pendidikan kewirausahaan sebagaimana digambarkan di atas, maka para peneliti telah melakukan kajian bagaimana sikap dan minat berwirausaha para siswa sebelum dan sesudah mendapatkan pendidikan kewirausahaan. Dengan demikian fokus penilaian pendidikan kewirausahaan saat ini yang didasarkan pada teori perilaku yang direncanakan (TPB) dapat dilakukan dengan menggali pengalaman siswa sebelum, selama, sesaat, dan sesudah mengikuti pendidikan kewirausahaan (Lackeus, 2015), dengan format sebagaimana disajikan berikut ini.

Tabel 6.1 Format Penilaian Pendidikan Kewirausahaan Menurut Lackeus (2015)

Fokus Utama Strategi Penilaian	Sebelum Kegiatan Pendidikan	Selama Kegiatan Pendidikan Pendidikan	Sesaat Setelah Kegiatan Pendidikan	Beberapa Tahun Setelah Kegiatan Pendidikan
Pola pikir	TPB	Ungkapan pengalaman	TPB, Studi Kasus	Studi Kasus
Aksi	-	Ungkapan pengalaman	-	Hasil kegiatan kewirausahaan
Emosi	-	Ungkapan pengalaman	-	-

Mengkreasikan kegiatan usaha tentu tidak bisa serta merta dalam waktu singkat bisa diwujudkan, dan hal

inilah yang menyebabkan pengukuran dampak pendidikan kewirausahaan terhadap perilaku kewirausahaan dan kesuksesan dalam menjalankan kegiatan usaha sulit untuk dilakukan (Fayolle et al., 2006). Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa peserta didik yang mengikuti pendidikan kewirausahaan terbukti lebih mampu menunjukkan perilaku kewirausahaan (Menzies & Paradi, 2002; Charney & Libecap, 2000). Hal ini sejalan dengan pernyataan Hindle (2007), tidak dapat dibantah bahwa pendidikan berperan utama dalam mempersiapkan peserta didik untuk menjadi para praktisi, seperti dokter, insinyur, lawyer, dan profesi lainnya; termasuk tentu saja sebagai pewirausaha.

Berbagai konsep tentang belajar memegang peranan penting terhadap perilaku belajar siswa. Sebagaimana diungkapkan oleh Lachman (1997) bahwa semua buku teks memberikan definisi tentang belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku sebagai dampak dari didapatkannya pengalaman. Aktifitas belajar dipandang sebagai fungsi yang memetakan pengalaman dan akan mempengaruhi perilaku seseorang. Untk mendapatkan pengalaman yang mendalam dan membekas dalam diri, tentu saja para siswa harus lebih banyak mengalami suatu peristiwa. Dengan demikian kegiatan belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam sebuah kegiatan dinilai efektif untuk mewujudkan tujuan pembelajaran.

Dari perspektif teori psikologi, belajar adalah proses adaptasi dari individu selama hidupnya dengan lingkungan dimana ia berada. Dengan demikian belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku seseorang sebagai dampak dari penyesuaian diri dengan tuntutan lingkungan.

Kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan akan mempengaruhi kualitas belajar seseorang. Untuk mengubah perilaku siswa sebagaimana yang ditetapkan, maka kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa dan lebih banyak melibatkan siswa dalam kegiatan, baik melalui proses penciptaan atau melalui kegiatan praktik (Hindle, 2007).

Pendidikan kewirausahaan memegang peran penting, tidak hanya berkaitan dengan upaya untuk membekali para lulusan dengan kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha, tetapi juga dimaksudkan untuk membekali para lulusan dengan berbagai karakter dan sikap kewirausahaan seperti ketekunan dan keuletan, sikap percaya pada diri sendiri, sikap kreatif dan inovatif, toleran dengan situasi ketidakpastian, dan keberanian untuk mengambil resiko; yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Untuk itu, Lackeus (2015) menyatakan bahwa seyogyanya pendidikan kewirausahaan diajarkan kepada semua siswa pada semua jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Lackeus (2015) juga merekomendasikan hendaknya kewirusahaan diintegrasikan pada kurikulum pendidikan sehingga kegiatan pembelajaran pada semua jenjang dan semua mata pelajaran akan memperkuat spirit kewirausahaan semua siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Pendidikan kewirausahaan yang efektif akan mampu membangkitkan keberanian para siswa setelah lulus untuk *segera* memulai usaha (*enterprise*). Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan menerapkan berbagai ide kreatif dan inovatif dalam kegiatan usaha bisnis. Hal ini mencakup aktifitas yang meliputi gabungan kreatifitas, pengembangan

ide, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan mengkomunikasikan ide dalam sebuah tindakan nyata. Pendidikan yang diarahkan untuk membangun keberanian peserta didik untuk memulai kegiatan usaha (*enterprise education*) dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki orientasi wirausaha, memiliki ketrampilan untuk menghasilkan ide kreatif dalam merespon tuntutan kebutuhan, mampu melihat peluang usaha, dan mampu menjawab mewujudkan peluang yang ada dalam bentuk kegiatan usaha bisnis.

Pendidikan kewirausahaan yang efektif juga akan dapat meningkatkan kecakapan berusaha (*enterprising skills*) meliputi kemampuan untuk mengambil inisiatif, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menggunakan intuisi dalam melihat permasalahan dan peluang usaha dan mampu mewujudkan ide dalam tindakan nyata untuk menjawab permasalahan dan peluang yang ada, mampu membangun jejaring usaha, mampu mengidentifikasi peluang usaha, mampu membuat terobosan kreatif dalam memecahkan masalah, mampu berpikir strategis dan berperilaku efektif. Dengan demikian seseorang yang memiliki kecakapan berusaha adalah mereka yang tidak sekedar menguasai pengetahuan saja, tetapi juga didukung dengan kematangan emosional, intelektual, sosial, dan kemampuan mewujudkan ide dalam tindakan nyata (*practical skills*).

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) merupakan penerapan kecakapan berusaha, khususnya dalam membangun institusi bisnis guna memanfaatkan peluang usaha yang sudah berhasil diidentifikasi. Pendidikan kewirausahaan bermaksud untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan

usaha, menjalankan dan memperkuat kegiatan usaha yang sudah dijalankan, dan merancang kegiatan bisnis yang baru. Dengan demikian tujuan pendidikan kewirausahaan adalah untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi peluang usaha, kemampuan merancang dan mengembangkan kegiatan usaha baru, atau mengembangkan dan menumbuhkan kegiatan usaha yang sudah ada. Gabungan antara kecakapan berusaha dan pendidikan kewirausahaan akan dapat dihasilkan lulusan dengan berbagai perilaku, sikap, dan kecakapan yang secara bersama-sama akan menumbuhkembangkan cara pandang sebagai pewirausaha (*entrepreneurial mindset*), yang puncaknya dapat memperkuat budaya wirausaha.

Drucker (1985) merupakan salah seorang ahli yang memperdebatkan, apakah kewirausahaan bisa diajarkan? Ada yang menyatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, semacam bakat. Seseorang yang dianggap memiliki bakat wirausaha, maka ia akan lebih memiliki kesempatan untuk menjadi pewirausaha yang sukses. Dengan demikian anak yang memiliki orang tua sebagai pewirausaha akan dianggap memiliki potensi untuk menjadi pewirausaha yang sukses, karena bakat kewirausahaan yang diturunkan dari orang tuanya. Tetapi apakah selalu demikian yang terjadi di lapangan? Jawabnya tentu saja tidak. Disadari atau tidak, seseorang akan belajar dari lingkungan terdekatnya.

Keluarga adalah lingkungan terdekat tempat seseorang belajar. Dengan demikian apabila ada keluarga yang menjalankan kegiatan usaha, maka dapat dipahami jika seorang anak akan belajar bagaimana menjalankan kegiatan usaha; sehingga perilaku, sikap, dan ketrampilan usaha akan

lebih mudah tumbuh dan berkembang (Uhryn, 2013). Artinya, kewirusahaan sesungguhnya tidak secara otomatis melekat pada anak sejak ia lahir. Sesungguhnya kewirausahaan akan tumbuh dan berkembang pada diri seseorang melalui proses pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Psilos & Galloway (2018) bahwa kewirausahaan dapat dibentuk melalui proses belajar, dan karena itu kewirausahaan dapat diajarkan kepada siapa saja yang memiliki minat untuk menjadi pewirausaha. Proses belajar dalam bidang kewirausahaan itu bisa saja terjadi di dalam lingkungan keluarga (Uhryn, 2013), di sekolah (Lackeus, 2013; Lackeus, 2015), atau pun di lingkungan sosial dimana siswa bertempat tinggal (Psilos & Galloway, 2018). Dengan demikian, idealnya; pendidikan kewirausahaan yang efektif harus melibat sekolah, orang tua, masyarakat; termasuk dunia usaha dan industri.

Hal senada dinyatakan oleh Timmons & Spinelli (2004) bahwa berbagai atribut sikap dan perilaku kewirausahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan *know-how* adalah dapat diajarkan. Selanjutnya Timmons (1999) memberikan penekanan bahwa tidak ada yang bisa menjamin melalui pendidikan kewirausahaan akan dihasilkan pewirausaha yang handal. Tetapi Timmons meyakini bahwa dari siswa yang penuh semangat dan berdedikasi dalam belajar kewirausahaan kelak akan bisa dihasilkan pewirausaha yang handal. Singkatnya, pengetahuan kewirausahaan dan hal-hal praktis yang dihadapi para pewirausaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bisa diajarkan kepada pihak lain. Karena itulah, Kuratko (2005) menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan bidang ilmu yang dapat diajarkan.

C. Apa Yang Diajarkan Dalam Pendidikan Kewirausahaan?

Berbagai topik berikut ini yang lazim diajarkan dalam pendidikan kewirausahaan, yaitu: siapakah yang bisa disebut sebagai pewirausaha? Identifikasi peluang usaha, proses mendirikan usaha, dan dampak kewirausahaan terhadap perekonomian. Secara umum materi pendidikan kewirausahaan menurut Haase & Lautenschlager (2011) meliputi: (a) *know-what,* tau apa; yang mencakup berbagai kecakapan dalam menjalankan fungsi manajemen, seperti pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pemasaran; (b) *know-why,* tahu mengapa; yang lebih menekankan pada aspek motivasional, yang diarahkan untuk mengembangkan berbagai sikap positip terhadap kewirausahaan; dan (c) *know-how*, tau bagaimana, yang menekankan pada aspek *soft skill* seperti pengembangan kreatifitas, membangun jejaring, kemampuan bernegoisasi, dan penjualan.

Gibb (1993) berpendapat bahwa pendidikan kewirausahaan yang ditunjukkan untuk menumbuhkan semangat berusaha bagi peserta didik harus difokuskan pada upaya membangun perilaku wirausaha. Hal ini mensyaratkan berkembangnya sikap dan kecakapan kewirausahaan. Dengan demikian hasil yang diharapkan dapat diwujudkan oleh peserta didik setelah mengikuti pendidikan kewirausahaan dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 6.2 Perilaku, Sikap, dan Kecakapan Kewirausahaan

Perilaku Kewirausahaan	Sikap Kewirausahaan	Kecakapan Kewirausahaan
Mencari dan menggambarkan berbagai peluang usaha	Berorientasi pada hasil dan penuh ambisi	Mampu memecahkan masalah secara kreatif
Berinisiatif untuk mewujudkan sesuatu	Percaya diri dan yakin pada kekuatan diri sendiri	Mampu mengajak orang lain
Memecahkan masalah dengan cara yang kreatif	Tekun	Mampu bernegoisasi
Mengatur sikap kemandirian	Otonom	Mampu menjual
Mengambil peran dan tanggung jawab	Berorientasi pada aksi nyata	Berani dan mampu mengajukan ide
Membangun jejaring secara efektif	Terbiasa untuk terus belajar sambil melakukan sesuatu	Mampu berpikir dan bertindak dengan dilandasi oleh pertimbangan yang holistik
Menyusun berbagai hal secara kreatif	Pekerja keras	Berpikir strategis dan mampu mengambil keputusan berdasarkan intuisi ketika menghadapi ketidakpastian
Membuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang terukur	Memiliki ketetapan hati dan kreatif	Mampu membangun jejaring

Dengan tuntutan hasil yang diharapkan sebagaimana disampaikan oleh Gibb (1993), maka pendidikan kewirausahaan tidak bisa dilaksanakan dengan model pembelajaran yang bersifat didaktis, yang hanya banyak diisi dengan kegiatan ceramah (Haase & Lautenschlager, 2011). Pendidikan kewirausahaan harus dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik secara aktif agar mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kuat. Untuk mendapatkan pengalaman belajar, maka peserta didik harus mengalami dan terlibat langsung dalam kegiatan kewirausahaan (Rae & Carswell, 2000).

Pendidikan kewirausahaan tidak cukup hanya untuk memahami, mengetahui, dan membicarakan tentang kewirausahaan; tetapi harus jauh melampaui hal tersebut, dan menyentuh pada tindakan dan aksi nyata, mengalami, sehingga dapat memperoleh pengalaman. Menurut Haase & Lautenschlager (2011), pendekatan pembelajaran yang dapat dipilih untuk mendapatkan pengalaman belajar yang memadai dalam pendidikan kewirausahaan adalah *learning by doing* atau *experiential learning*. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung terlaksananya pendidikan kewirausahaan. Lingkungan belajar yang seharusnya ada dalam pendidikan kewirausahaan menurut Gibb (1993) adalah: tercipta suasana yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berekspresi, lingkungan belajar atau kelas yang fleksibel, toleran dengan kesalahan, bersifat informal, terbiasa dengan suasana tidak pasti, memberikan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat dan mengalami.

Jones (2011) menekankan kegiatan pendidikan kewirausahaan dengan aktifitas menjual yang dinilai sebagai kecakapan dasar dalam menjalankan kegiatan usaha bisnis. Melalui kegiatan menjual peserta didik akan mendapat pengalaman bagaimana menyakinkan konsumen, berkomunikasi yang efektif, bekerja sama dengan pihak lain, bagaimana memahami aspirasi konsumen, dan bagaimana seseorang harus bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu. Jones (2011) menyatakan bahwa pewirausaha yang tidak bisa menjual bisa dikategorikan sebagai pewirausahan yang belum bisa menjalankan proses kewirausahaan dengan sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk memperkuat efektivitas pendidikan kewirausahaan, maka perlu diciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk belajar mengembangkan kemampuan menjual.

Menurut Gibb (1993), pelaksanaan pendidikan kewirausahaan akan berjalan dengan efektif jika kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengalami dan terlibat aktif dalam kegiatan nyata, baik yang dilaksanakan di sekolah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan harus dilaksanakan dengan pembelajaran aktif (*active learning*), belajar sambil bertindak, belajar dari pengalaman, pertukaran informasi dengan teman sebaya, kegiatan eksperimentasi, kegiatan uji coba (*trial and error*), pemecahan masalah secara kreatif, dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian kegiatan pembelajaran dalam pendidikan kewirausahaan juga mengubah cara mengajar oleh guru. Guru tidak lagi sebagai aktor utama yang mengantarkan kegiatan pembelajaran. Guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan manajer yang

bertugas untuk memilihkan berbagai aktivitas belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata bagi siswa (*experiential learning*).

D. Pembelajaran Kewirausahaan Yang Memperkuat Pengalaman Berwirausaha

Pembelajaran kewirausahaan yang ditujukan untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa harus dirancang dengan berbagai aktifitas belajar yang sesuai dengan kegiatan kewirausahaan dalam arti yang sesungguhnya (Haase & Lautenschlager, 2011). Bagaimana operasionalisasi kegiatan usaha bisnis dalam arti yang sesungguhnya harus bisa ***dihadirkan*** di sekolah. Contoh pembelajaran yang memperkuat pengalaman nyata adalah dengan melibatkan kelompok siswa dalam pengelolaan unit usaha bisnis yang disediakan sekolah dibawah bimbingan konsultan bisnis atau pewirausaha yang berpengalaman menjalankan kegiatan usaha bisnis (Cooper et.al., 2004).

Untuk menunjang efektivitas kegiatan maka sekolah perlu menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok dunia usaha atau dunia industri (DUDI). Dalam periode tertentu, kelompok siswa dapat melakukan kunjungan ke lembaga bisnis sejenis untuk melakukan kegiatan studi banding atau konsultansi dengan para pengelola bisnis. Dari kegiatan studi banding atau kunjungan lapangan para siswa kemudian diminta untuk melakukan refleksi tentang pengelolaan kegiatan usaha yang sudah dijalaninya. Kegiatan refleksi oleh para siswa ini sekaligus dapat digunakan guru sebagai kegiatan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian hasil evaluasi pembelajaran dapat berupa laporan perkembangan

kewirausahaan para siswa yang meliputi: perkembangan kematangan siswa dalam kegiatan bisnis, ketajaman intuisi, kecakapan dan kompetensi siswa dalam bidang bisnis.

Model pembelajaran lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewirausahaan adalah melalui kegiatan magang. Kegiatan dilakukan dengan menempatkan siswa dalam institusi bisnis selama periode tertentu. Para siswa dilibatkan dalam proyek kegiatan usaha yang dijalankan oleh institusi bisnis (Cooper et.al, 2009). Kegiatan magang ini dapat disetarakan dengan kegiatan belajar untuk berbagai mata pelajaran serumpun, misalnya manajemen keuangan dan pemasaran, perencanaan dan pengembangan produk, dan mata pelajaran lain yang dapat ditentukan oleh sekolah. Agar dapat berjalan dengan efektif dan dapat meningkatkan kualitas kewirausahaan para siswa, maka pihak sekolah harus menjalin kesepahaman dengan DUDI yang dijadikan tempat magang. Kesepahaman itu perlu dibangun agar DUDI juga memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dari kegiatan magang, dan target pembelajaran yang harus dicapai oleh para siswa. Seyogyanya evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau sekolah juga melibatkan DUDI. DUDI dapat membuat laporan atau catatan tentang prestasi siswa selama menjalani kegiatan magang. DUDI bahkan juga bisa memberikan masukan kepada sekolah tentang pengetahuan dan berbagai kecakapan yang harus dikembangkan dan dipelajari para siswa di sekolah.

Selain magang, model pembelajaran lainnya yang dinilai dapat meningkatkan kompetensi kewirausahaan secara efektif adalah melalui kegiatan simulasi bisnis (Hindle,2002). Untuk memperkuat kegiatan simulasi bisnis, maka pihak

sekolah disarankan mendatangkan para praktisi bisnis yang sudah kompeten. Praktisi bisnis dan guru pembimbing dapat berkolaborasi dalam melakukan arahan kepada siswa dalam melaksanakan simulasi bisnis. Para siswa diminta untuk memerankan diri sebagai pemilik usaha bisnis, mengelola modal dan keuangan untuk mengembangkan usaha bisnis, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama kegiatan simulasi. Kegiatan simulasi bisnis dapat dilaksanakan di unit-unit usaha bisnis, atau koperasi sekolah.

Pada akhir kegiatan simulasi, para siswa diminta untuk membuat laporan tentang bagaimana menjalankan kegiatan bisnis. Umpan balik dari kegiatan simulasi dilakukan oleh guru bersama-sama dengan para praktisi bisnis untuk menjawab berbagai daftar pertanyaan dan permasalahan yang diajukan oleh siswa selama kegiatan simulasi. Berbagai pertanyaan atau permasalahan itu misalnya berkaitan dengan kegiatan pemesanan dan penjualan barang dan perkembangan arus keuangan. Kegiatan simulasi mencakup kegiatan awal pembukaan kegiatan usaha sampai dengan kegiatan usaha beroperasi penuh, dengan periode waktu yang ditentukan oleh sekolah. Hindle (2002) memberikan durasi waktu simulasi selama 3 tahun yang dapat dibagi dalam beberapa termin bulan, misalnya setiap termin simulasi dalam durasi waktu 3 bulan. Dengan demikian dalam durasi waktu 3 tahun terdapat 12 termin simulasi yang melibatkan siswa dari berbagai jenjang kelas.

Setelah terlibat dalam kegiatan simulasi, model pembelajaran kewirausahaan yang dinilai efektif adalah meminta siswa untuk menjalankan kegiatan bisnis. Di berbagai sekolah, model pembelajaran ini sering disebut sebagai praktek kewirausahaan, setelah para siswa dianggap

sudah cukup memahami teori tentang kewirausahaan. Menurut Mason & Arshed (2013), kegiatan praktek kewirausahaan ini bisa dibebankan kepada siswa tingkat akhir. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata kepada para siswa tentang bagaimana menjadi seorang pewirausaha, memberikan wawasan kepada siswa berkaitan dengan proses dan kegiatan kewirausahaan.

Melalui kegiatan praktek, para siswa akan mendapatkan wawasan dan pengalaman nyata bagaimana memulai kegiatan usaha, bagaimana membuat strategi penentuan harga barang, bagaimana menjalin interaksi dengan rekanan bisnis, melakukan negosiasi, memahami berbagai peraturan, dan bagaimana meyakinkan diri sendiri untuk terus bersemangat dalam menjalankan kegiatan usaha. Melalui kegiatan praktek usaha ini para siswa tingkat akhir kemudian diminta untuk membuat refleksi yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian seperti kepercayaan pada diri sendiri, keberanian membuat keputusan, manajemen waktu, dan bagaimana mengembangkan kegiatan usaha. Menurut Pittaway & Cope (2007), melalui kegiatan refleksi merupakan cara yang efektif untuk mengukur kegiatan praktik yang dilakukan para siswa. Kegiatan refleksi oleh siswa merupakan hal yang sangat penting karena dari kegiatan inilah siswa akan memperoleh pengetahuan melalui kegiatan di lapangan. Kegiatan praktek akan memungkinkan siswa membangun pemahaman dan memperoleh pengetahuan dari lapangan (*grounded theory*). Dengan demikian melalui kegiatan praktek kewirausahaan akan memupuk wawasan siswa, dan memungkinkan siswa untuk belajar secara mendalam (*deep learning*) tentang kewirausahaan.

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan kewirausahaan yang efektif dapat dilaksanakan melalui penguatan kurikulum kewirausahaan yang dikembangkan di sekolah. Hal ini dapat ditempuh para siswa melalui kegiatan mata pelajaran kewirausahaan yang bertujuan untuk membekali siswa agar memahami tentang kewirausahaan. Pelajaran kewirausahaan juga berperan untuk pengembangan dan penyiapan kemampuan kerja melalui berbagai tugas-tugas pelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran tentang kewirausahaan dan kesiapan untuk bekerja. Target yang ingin dicapai adalah untuk terbangunnya kesadaran para siswa tentang pentingnya kewirausahaan dan memahami arti penting kewirausahaan bagi dirinya setelah lulus.

Pendidikan kewirausahaan yang ditujukan untuk membekali siswa siap berwirausaha, memperkuat kemampuan untuk melihat peluang usaha, dan kemampuan memecahkan masalah secara kreatif; akan sangat berpengaruh terhadap terbangunnya cara pandang (*mindset*) siswa terhadap kegiatan kewirausahaan. Pandangan siswa yang positip tentang kewirausahaan akan berpengaruh terhadap keterlibatan siswa dalam pendidikan kewirausahaan (Prianto, et al, 2018). Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran terbukti memperkuat sikap positip siswa tentang profesi wirausaha (Prianto, 2016; Prianto, et al, 2018).

Pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis proyek, perencanaan kegiatan usaha, inovasi produk, praktek kerja atau praktek kewirausahaan, dan berbagai model pembalajaran berbasis pengalaman

dinilai mampu mengembangkan sikap kewirausahaan, meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan kegiatan usaha, dan memperkaya wawasan dan pengalaman dalam bidang kewirausahaan. Untuk itu sekolah dapat mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler dan membentuk pusat-pusat kegiatan kewirausahaan dalam mendukung terlaksananya pendidikan kewirausahaan secara efektif.

Lackeus (2013) telah membuat klasifikasi tentang pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah, yang dikelompokkan dalam 2 level, yaitu:

a. **level 1 (pendidikan kewirausahaan tidak berbasis aksi)**. Model pembelajaran kewirausahaan yang termasuk dalam level ini adalah: ceramah dalam format klasikal, mendatangkan nara sumber dari luar sebagai guru tamu, diskusi kelompok, kunjungan lapangan, dan studi literatur. Hasil belajar biasanya diukur dengan menggunakan tes tertulis.

b. **level 2 (pendidikan kewirausahaan berbasis aksi)**, secara berurutan mulai dari level rendah sampai dengan level tinggi; yaitu: (i) *proses kreasi*, baik dalam dimensi sosial, kultural, dan ekonomi. Model pembelajaran yang lazim digunakan dalam level ini, antara lain: penulisan rencana bisnis, pemetaan peluang, keterlibatan dalam proyek kerja, simulasi bisnis, dan bermain peran. Dalam level ini hasil karya siswa belum dinilai oleh pihak luar sekolah. Karya siswa sepenuhnya dinilai oleh guru di sekolah; (ii) *Penciptaan nilai-nilai* melalui produk atau jasa sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, termasuk kalangan dunia

usaha dan industri. Model pembelajaran yang bisa digunakan dalam level ini antara lain: membuat model usaha bisnis, menjual produk atau jasa kepada pihak luar, menciptakan produk atau jasa melalui proyek bekerja sama dengan pihak luar, penguatan pelanggan, dan magang. Penilaian hasil belajar dalam bentuk portofolio. (iii) *Menciptakan kegiatan usaha*, dalam kegiatan ini para siswa diharapkan mengelola kegiatan usaha. Model pembelajaran yang bisa digunakan meliputi: menulis rencana bisnis sesuai dengan peluang usaha yang ditemukan, membuat program kegiatan bisnis dalam skala kecil, kursus penciptaan usaha bisnis, dan kegiatan usaha kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, (iv) *Memperkuat kegiatan usaha yang sudah diciptakan*, dalam kegiatan ini dimaksudkan agar para siswa mempertahankan kegiatan usaha yang telah diciptakan, dan terus mengembangkannya setelah mereka lulus sekolah. Bentuk pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah dengan menciptakan kegiatan usaha bisnis.

Lackeus (2013) telah merangkum berbagai kajian yang sudah dilakukan para ahli dengan menunjukkan berbagai alat, model, dan teori yang dapat digunakan guru untuk mengajarkan kewirausahaan kepada siswa, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 6.3. Pedekatan Pembelajaran Kewirausahaan Menurut Para Ahli

Pendekatan	Penciptaan Nilai	Interaksi Dengan Dunia Luar	Kerja Sama	Tindakan
Penyelenggaraan even (Read, et al, 2011)	Mulai dari permasalahan sederhana yang sudah diidentifikasi dan ditemukan solusi pemecahan yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang sederhana dan menyenangkan	Berinteraksi dengan orang-orang yang telah sukses melakukan perubahan hidup: siapa yang Anda ketahui, apa yang Anda ketahui; siapa diri Anda?	Memilih orang-orang yang dinilai bisa diajak bergabung dalam kegiatan usaha, sampai akhirnya emutuskan jenis kegiatan usaha apa yang akan didirikan	Analisis tindakan nyata, terus menemukan ide-ide yang dinilai memiliki prospek untuk berhasil, dan terus fokus pada kegiatan tersebut
Model penulisan rencana bisnis (Osterwalder & Pigneur, 2010)	Model bisnis didiskripsikan dengan analisis yang rasional, bagaimana kegiatan usaha itu dirancang dan dijalankan	Apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan para pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan melihat, mendengar, berpikir, dan merasakan. … Tuliskan dan kerjakan apa yang menjadi keluhan pelanggan.	Model pembelajaran dengan menuliskan rencana bisnis dinilai efektif jika dicetak dalam format yang bisa dibaca dengan mudah oleh kelompok, sehingga setiap anggota kelompok dapat ikut berkontribusi untuk memikirkan rencana bisnis yang dibuat.	Konsep atau ide bisnis yang sudah dituangkan dalam tulisan menjadi titik awal untuk berjalannya proses diskusi atau pembahasan diantara anggota kelompok.

Pengembangan pelanggan mulai dari usaha-usaha sederhana (Blank & Dorf, 2012)	Permasalahan sederhana yang dihadapi pelanggan, dan diperkirakan pelanggan mau membayar untuk hal tersebut. Prinsip dasar: Usaha bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana	Permasalahan pelanggan hanya ada di luar kelas, karena itu siswa harus keluar kelas untuk menemui dan berbicara dengan mereka untuk menemukan permasalahan sederhana yang mereka alami.	Diskusi atau pembahasan bersama kelompok siswa.	Lakukan berbagai uji coba untuk mengembangkan produk atau jasa yang diperkirakan bisa memecahkan masalah yang dialami pelanggan.
Apresiasi penyelidikan (Bushe & Kassam, 2005)	Kegiatan bukan hanya fokus pada penentuan masalah yang perlu dipecahkan; tetapi lebih fokus pada pencarian solusi yang terbaik	Kegiatan penyelidikan dimaksudkan untuk melakukan intervensi berbagai persoalan kehidupan dan berusaha mengubah keadaan menuju yang lebih baik.	Munculnya berbagai perasaan seperti adanya harapan, rasa gembira, inspirasi, persahabatan, dan kegembiraan merupakan inti dari proses perubahan.	Proses penyelidikan diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan, model, gambaran yang dapat menarik anggota kelompok dan mendorong berbagai pihak untuk mengambil tindakan.
Pembelajaran berbasis layanan (Kenwot-U'Ren, et al, 2006)	Menghasilkan berbagai manfaat, baik yang nyata maupun tidak nyata bagi semua siswa yang terlibat	Para siswa terlibat dalam kegiatan nyata yang dibutuhkan masyarakat untuk memperkuat pengalaman.	Sekolah dan pihak-pihak terkait yang ada di masyarakat terlibat bersama dalam proses kegiatan yang dilaksanakan siswa.	Berpikir dan bertindak merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan.

Proses merancang (Dunne & Martin, 2006)	Menggambarkan dan mengimajinaikan sesuatu yang belum ada, dan suatu saat dibutuhkan masyarakat	Siswa terjun ke masyarakat untuk memahami apa yang menjadi masalah dan dibutuhkan melalui proses pemikiran, pengamatan dan penyelidikan untuk menentukan jenis produk yang bisa dikreasikan.	Kolaborasi dengan teman dan pihak lain yang relevan dalam merancang sebuah produk.	Proses pengembangan dan pembaharuan kompetensi secara berkelanjutan.

BAB VII

BERBAGAI KECAKAPAN PENUNJANG KESIAPAN KERJA

A. Kecakapan Penunjang Kesiapan Bekerja

Sampai saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang mendesak untuk dipecahkan. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan itu terutama berkaitan dengan kualifikasi pendidikan dan kecakapan para pencari kerja di Indonesia yang belum terlalu kompetitif dibandingkan dengan berbagai negara tetangga di kawasan, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 7.1 Kondisi Pasar Tenaga Kerja ASEAN

Negara	Ease of finding skilled employees (7=easiest, 1=hardest)	Rata-rata upah per bulan ($)	Worker in vulnerable employment (%)	Incidence of child labor (%)
Kamboja	3.4	121	64	18.3
Indonesia	4.3	174	36	6.9
Laos	3.1	119	83	10.1
Malaysia	5.3	609	22	-
Myanmar	2.4	-	89	-
Philipina	4.4	206	42	11.1

Negara	Ease of finding skilled employees (7=easiest, 1=hardest)	Rata-rata upah per bulan ($)	Worker in vulnerable employment (%)	Incidence of child labor (%)
Singapura	4.8	3547	9	-
Thailand	3.8	357	56	8.3
Vietnam	3.4	181	63	6.9

Sumber: Regional Community Briefing World Economic Forum.2016. Human Capital Outlook ASEAN. Kuala Lumpur 1-2 June 2016

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, Myanmar, Vietnam, Kamboja didominasi lulusan sekolah menengah ke bawah dengan kecakapan kerja level menengah ke bawah. Tenaga kerja dengan kecakapan level tinggi ada di negara Singapura (55%), Malaysia (25%), Philipina (24%), Thailand (14%), Vietnam (10%), Indonesia (9%), Myanmar (7%), laos (6%), dan Kamboja (4%).

Kusus untuk Indonesia, data tahun 2016 menunjukkan bahwa dari pendaftar tenaga kerja lulusan sekolah menengah ada sebanyak 76%, dengan 43% diantaranya adalah dari sekolah menengah kejuruan (SMK); Thailand = 79% (35%), Malaysia = 69% (31%), Singapura pendaftar lulusan sekolah menengah kejuruan sebanyak 11%, kamboja = 38% (7%), dan Laos = 45% (4%).

Jumlah pendaftar lulusan pendidikan tinggi dalam periode 3 – 6 tahun terakhir: Indonesia = 6.233.984; Philipina = 2.625.385, Thailand = 2.497.323; Vietnam = 2.261.204; Malayisa = 1.076.675; Singapura = 243.546; Kamboja = 223.222; Laos = 126.314. Sedangkan lulusan perguruan tinggi terbaru pada tahun 2016: Indonesia =867.822; Philipina = 469.654; Thailand = 443.648;

Vietnam = 406.068; Myanmar = 295.941; Malaysia = 261.819; laos = 37.384; Kamboja = 32.177.

Kualitas pendidikan yang dirasakan oleh para pelaku bisnis dilihat dari segi pendidikan dasar, sistem pendidikan, pelatihan staf, pendidikan matematika dan sains (Skor 1 -7) masing-masing sebagai berikut: Indonesia, Philipina, dan Thailand memiliki skor antara 4-5; sedangkan Malaysia dan Singapura memiliki skor > 5; Vietnam, laos, dan Kamboja memiliki skor antara 3 -4, sedangkan Myanmar memiliki skor antara 2 -3.

Saat ini semakin banyak pencari kerja yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Penduduk usia muda, termasuk bagi mereka yang baru lulus sekolah memiliki potensi untuk menjadi penganggur 5 kali lebih besar dibandingkan dengan penduduk dewasa. Satu dari empat penduduk usia muda dalam status tidak bekerja, oleh karena itu; angka pengangguran tertinggi ada pada kelompok penduduk usia muda. (*10 Years of Work on Youth Employment in Indonesia, ILO,dalam https://www.ilo.org>publication>wcms_177872*).

Dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, saat ini penduduk usia muda di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan dan ketrampilan yang lebih baik, namun mereka tetap menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, mereka kemudian akan menerima pekerjaan apa pun meski tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa kaum muda mau bekerja dengan jumlah jam kerja yang melebihi batas, dengan gaji di bawah standar, dan tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai. Tantangan utama yang dihadapi oleh kaum muda, lulusan sekolah menengah yang berusia pada kisaran 18 tahun; adalah mereka sudah

mulai berpikir tentang kerja. Namun mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan (*10 Years of Work on Youth Employment in Indonesia, ILO, dalam https://www.ilo.org>publication>wcms_177872*).

Oleh karena itu, kajian *ILO* menekankan agar kegiatan pendidikan untuk kaum muda harus lebih banyak menekankan pada kegiatan yang bersifat praktis daripada pembelajaran teoritik, memperkuat kreatifitas, dan memperkuat keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu, untuk mengatasi problem ketenagakerjaan bagi penduduk usia muda dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat kecakapan wirauaha,
2. memperkuat kecakapan untuk membuat keputusan,
3. cakap mencari informasi terbaru tentang berbagai kecakapan yang diminta oleh dunia kerja,
4. kecakapan untuk mencari informasi tentang lapangan pekerjaan,
5. penguatan karakter dan kecakapan hidup, dan
6. memperkuat kepercayaan diri para penduduk usia muda.

Bila penduduk usia muda diberikan pendidikan yag memperkuat berbagai kecakapan tersebut, maka mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi calon pewirausaha atau sebagai calon pekerja yang professional (*10 Years of Work on Youth Employment in Indonesia, ILO, dalam https://www.ilo.org>publication>wcms_177872*).

Kecakapan menghadapi tahapan kehidupan baru:

1. Mengelola berbagai aktifitas yang menunjang kehidupan baru yang diinginkan dan merancang

jadwal kegiatan untuk memperkuat kesiapan menuju era baru.

2. Memahami bagaimana mengembangkan berbagai kecakapan diri dan mampu memilih pendidikan dan pelatihan yang mendukung kecakapan yang diminatinya.
3. Menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengarahkan diri pada kegiatan yang positip dan produktif.
4. Memiliki pandangan dan sikap positip tentang aktifitas kerja.
5. Menyimpan dan mempersiapkan dokumen pribadi yang penting yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.
6. Memahami hal-hal yang dibutuhkan harus disiapkan dan sikap tanggung jawab bila sewaktu-waktu mendapatkan penawaran untuk bekerja.
7. Mampu bertransaksi dengan lembaga perbankan.
8. Memahami dan mampu mengakses berbagai sumber daya yang ada di masyarakat.
9. Memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan di masyarakat secara mandiri.

Kecakapan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kecakapannya:

1. Mengidentifikasi berbagai pilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kecakapannya.
2. Menggunakan informasi dari pasar bursa kerja untuk menetapkan jenis pekerjaan yang diminatinya.

3. Mampu mengakses berbagai sumber informasi untuk mencari lowongan kerja.
4. Mampu membuat lamaran kerja dengan tepat
5. Memiliki kesiapan jika sewaktu-waktu menghadapi interview
6. Memahami undang undang dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk hak dan kewajiban sebagai pekerja.

Kecakapan setelah mendapatkan pekerjaan:

1. Memahami apa yang menjadi harapan penyedia kerja berkait dengan kedisiplinan dalam bekerja.
2. Memahami apa yang menjadi target kerja
3. Mampu bekerja tanpa diawasi
4. Memiliki sikap dan etika kerja positip
5. Mampu mengelola berbagai bidang tugas lain selain yang menjadi tugas pokoknya.

Kecakapan berpikir:

1. Memahami dan mengetahui ada berbagai permasalahan dalam pekerjaan, mampu mengidentifikasi penyebab timbulnya masalah, dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah.
2. Memahami dan mampu menerapkan berbagai pengetahuan dan kecakapan baru yang dibutuhkan dalam bekerja
3. Mampu berpikir komplek, berpikir pada level yang tinggi dan mendalam.
4. Mampu membuat keputusan
5. Memilah-milah target kerja, membuat berbagai pilihan tindakan untuk mencapai target kerja yang

ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai reskio atas berbagai pilihan yang dibuat.

Kecakapan di bidang teknologi dan bekerja dalam sistem:

1. Mengikuti berbagai standar operasional prosedur ketika menggunakan berbagai perlengakapan kerja.
2. Mengikuti berbagai prosedur penunjang keselamatan kerja.
3. Mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi permasalahan di tempat kerja.
4. Mampu memilih perlengkapan kerja sesuai dengan jenis pekerjaan
5. Merawat dengan penuh tanggung jawab terhadap perlengkapan kerja

Kecakapan interpersonal dan komunikasi:

1. Mudah bergaul, gampang menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan selalu bersikap sopan di lingkungan kerjanya.
2. Mampu menyampaikan berbagai ide ketika bekerja dengan kelompok kerjanya
3. Memiliki kemampuan berbicara dengan baik, mampu menjadi pendengar yang baik, dan memiliki berbagai kecakapan sosial yang diperlukan dalam lingkungan kerjanya.
4. Mampu mengkomunikasikan apa yang dipikirkan, memiliki intuisi yang tajam yang diperlukan untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat.
5. Mampu memberikan umpan balik.

6. Mampu berinteraksi dengan pimpinan perusahaan
7. Bersikap professional terhadap sesama pekerja
8. Memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap apa yang menjadi permintaan pelanggan.
9. Tidak banyak bicara ketika bekerja, dan hanya berbicara jika diperlukan, apa yang dibicarakan selalu bernilai positip bagi lingkungan kerjanya.
10. Mampu memilih kata-kata, ungkapan, dan kalimat yang tepat ketika berinteraksi dengan lingkungan kerjanya.
11. Menyelesaikan konflik di tempat kerja dengan tepat.
12. Memahami dampak hasil pekerjaannya bagi pihak lain

Kecakapan mengakses informasi:

1. Mampu memilih sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mampu membaca dan memahami perintah kerja
3. Mampu menyampaikan pendapat berbasis fakta dalam menghadapi berbagai situasi atau isu tertentu.
4. Mampu memberikan jawaban dengan tepat untuk mengklarifikasi berbagai pertanyaan yang diajukan pihak lain kepada perusahaan dimana ia bekerja.
5. Merespon perintah kerja dengan tepat.

Kualitas individu:

1. Mampu menampilkan ikhtiar dan usaha dengan sungguh-sungguh yang dilandasi sikap tekun.

2. Terus mencari informasi terbaru yang dibutuhkan untuk mengembangkan kecakapan kerja
3. Berusaha kuat untuk menjaga kata-kata dan terus mengembangkan sikap positip.
4. Selalu berusaha mengawali aktifitas di tempat kerja
5. Penuh percaya diri.
6. Terus berusaha untuk membangun citra diri yang positip.
7. Fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai situasi.
8. Berintegritas tinggi dan rendah hati
9. Mampu mengendalikan diri ketika merespon berbagai tuntutan dari pelanggan
10. Menjaga kepercayaan yang diberikan perusahaan dan pelanggan
11. Memahami apa yang menjadi resiko jika ia melanggar aturan organisasi
12. Tetap bersikap tenang ketika harus membuat keputusan yang sangat kritis
13. Memilih busana yang bersih dan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, menjaga kebersihan dan kesehatan diri,
14. Tetap menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari berbagai kecakapan yang oleh para peyedia kerja dianggap memperkuat kesiapan bekerja.

Tabel 7.2 Kecakapan Kesiapan kerja yang dianggap sangat penting oleh penyedia kerja

Kecakapan kesiapan kerja	Pengetahuan dan pemahaman	Berbagai kecakapan khusus	Nilai-nilai, sikap, dan perilaku
Kemampuan menyesuaikan diri: Cepat memahami adanya perubahan dan mampu memecahkan masalah ketika permasalahan itu muncul	• Pengetahuan umum tentang perusahaan dimana ia bekerja dan cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja dalam perusahaan tersebut. • Memahami bahwa setiap perusahaan memiliki peraturan yang wajib diikuti	• Berpikir dan berperilaku luwes. • Cepat memahami adanya perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru. • Berpikir kritis dan dan mampu menggunakan akal pikirannya dengan efektif. • Mau menerima tantangan segera setelah ia dihadapkan tantangan yang ada	• Memiliki identitas kepribadian yang baik yang mendukung penguatan harga diri • Menghormati adanya perbedaan dan keberagaman • Rendah hati dan penuh integritas • Fleksibel • Bangga dengan suasana lingkungan kerja yang memiliki budaya kerja yang berkualitas tinggi. • Selalu berinisiatif dan bertanggung jawab terhadap semua tindakannya. • Memaksimalkan jam kerja
Kolaborasi: Mampu bekerja sama yang baik dengan pihak lain untuk mewujudkan target semua karyawan dari berbagai devisi dan target perusahaan secara keseluruhan	• Adanya anggota tim kerja yang berkualitas • Adanya berbagai karakteristik dan berbagai perilaku positip dari semua karyawan yang tergabung dalam tim kerja	• Bekerja sama dengan efektif untuk mewujudkan hasil kerja yang lebih baik atau menemukan solusi kerja yang baik • Mencari dan menawarkan pikiran dan pendapat • Mampu membuat anggota tim bekerja dengan kompak • Mampu mengelola dan memotivasi • Mampu membuat keputusan	

Kecakapan kesiapan kerja	Pengetahuan dan pemahaman	Berbagai kecakapan khusus	Nilai-nilai, sikap, dan perilaku
Ketekunan: Mengambil inisitaif, bekerja keras, sangat detail dan mengutamakan kualitas dalam bekerja, dan mampu mewujudkan tujuan	• Berbagai aturan tempat kerja dan berbagai harapan yang harus dipenuhi di tmpet kerja • Penuh perhatian dengan urusan-urusan detail, perhatian dengan kualitas	• Tetap bertahan untuk mewujudkan kualitas kerja meskipun sedang menghadapi kesulitan • Hanya akan meminta bantuan bila benar-benar dibutuhkan • Mengambil sikap tertanggung jawab sebagai bagian dari proses pembelajaran di tempat kerja • Penuh perhatian untuk urusan detail dan kualitas. • Terdorong untuk terus berusaha sampai batas maksimal kemampuan.	
Pemecahan masalah: Mampu mengambil langkah-langkah untuk menemukan solusi yang realistic, logis, dan efektif	Mampu mengambil langkah-langkah pemecahan masalah: Mendiagnosis dan menganalisis masalah secara tepat dan akurat, mampu menentukan solusi pemecahan masalah, mampu menguji efektifitas solusi yang sudah ditetapkan, melakukan perbaikan terhadap solusi yang sudah diuji, dan menerapkan solusi terbaik untuk memperbaiki kinerjanya.	• Pemecahan masalah dan membuat keputusan • Mengambil tindakan pemecahan masalah melalui langkah-langkah yang inovatif	

Kecakapan kesiapan kerja	Pengetahuan dan pemahaman	Berbagai kecakapan khusus	Nilai-nilai, sikap, dan perilaku
Manajemen waktu:Mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan, dan selalu hadir di tempat kerja tepat waktu	• Berbagai peraturan di tempat kerja • Langkah-langah dan proses pencapaian tujuan • Membuat jadwal kerja yang realistik	• Menggunakan jam kerja dengan efektif dan efisien • Mengubah rencana yang sudah dibuat seiring dengan adanya perubahan situasi dan kondisi • Terus mengacu pada target kerja yang sudah dirumuskan, mengambil langkah prioritas untuk pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang ditentukan.	
Komunikasi: Mampu berkomunikasi dengan jelas dan mampu menjaga kekompakan dengan sesame rekan kerja guna mewujudkan tujuan	• Komunikasi non verbal • Teknik komunikasi yang efektif • Pelayanan kepada pelanggan • Mampu menyampaikan informasi kepada berbagai macam kelompok pelanggan dengan menggunakan berbagai macam bentuk penyampaian dan media sebagai alat bantu	• Mampu berbicara dan mendengarkan dengan efektif • Mampu menyampaikan pendapat tertulis dengan efektif • Mampu mempresentasikan gagasan • Mampu berkomunikasi dengan media elektronik • Mampu memilih media yang dianggap efektif untuk penyampaian informasi	

Sekolah menengah memegang peranan penting untuk menyiapkan para siswa agar mampu menjadi calon tenaga kerja yang mampu bertindak efektif ketika harus mencari lapangan pekerjaan. Tetapi seringkali sekolah dinilai kurang memberikan latihan yang cukup untuk mempersiapkan para siswanya agar kelak mampu bertindak efektif ketika harus masuk pada bursa kerja.

B. Berbagai Hambatan Yang Dihadapi Para Lulusan Dalam Bursa Kerja

Berikut ini adalah beberapa isu yang membuat para lulusan sekolah menengah merasa kesulitan untuk bersaing dalam bursa kerja:

1. Umumnya para penyedia kerja menganggap bahwa para lulusan baru harus mengikuti program pelatihan tertentu agar mampu bekerja dengan baik
2. Umumnya para penyedia kerja menganggap bahwa para lulusan baru masih perlu mempersiapkan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat teknis, dan berbagai ketrampilan dasar seperti kemampuan komunikasi lisan dan tulisan dan kemampuan dalam mengoptimalkan penggunaan teknlogi informasi, dan berbagai kecakapan yang berkaitan dengan kesiapan bekerja.
3. Untuk bisa dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi, dibutuhkan berbagai kecakapan kerja yang sangat kuat, sedangkan para lulusan dianggap belum memiliki bekal kecakapan kerja yang memadai.
4. Umumnya para penyedia kerja menganggap bahwa para lulusan baru hanya pintar dari sisi teori, tetapi kurang mahir untuk mengaplikasikan teori dalam tataran praktek, dan dianggap kurang berpengalaman.
5. Lingkungan kerja saat ini lebih berorientasi pada layanan prima, dan para lulusan baru dianggap kurang memiliki kemampuan yang cukup untuk mendukung program layanan prima. Lulusan baru harus memiliki bekal pendidikan tambahan agar memiliki kecakapan

kerja yang lebih kuat untuk mendukung terciptanya layanan prima.

6. Lulusan baru harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan sangat cepat

Beberapa langkah praktis untuk mempersiapkan lulusan sekolah menengah agar lebih siap untuk memasuki bursa kerja:

1. Kegiatan pembelajaran di kelas harus lebih fokus pada persoalan-persoalan riil dan praktis yang berkembang di masyarakat, dan bagaimana dalam pembelajaran para siswa bisa memecahkan berbagai persoalan tersebut
2. Pembelajaran harus selalu dikaitkan dengan apa yang menjadi minat siswa, sehingga apa yang dipelajarinya di kelas relevan dengan apa yang hendak ia kerjakan pada saat berada di luar kelas
3. Pembelajaran harus memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk mengkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata yang akan dihadapi siswa

C. Pendekatan Pembelajaran Yang Memperkuat Kesiapan Bekerja

Bagaimana membangun kecakapan siap kerja didalam pembelajaran dikelas?

1. Pembelajaran harus dilaksanakan dan berpusat pada aktivitas siswa (*student centered*). Siswa harus sebagai pihak yang paling aktif didalam kegiatan pembelajaran.
2. Kegiatan belajar berbasis kerja kelompok, pembelajaran aktif, aau pembelajaran berbasis proyek dinilai sebagai

cara yang efektif untuk meningkatan kecakapan kesiapan bekerja. Ketekunan, ketahanan mental, kerja tim, kemampua menyesuaikan diri, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, dan manajemen waktu dapat dikembang dikelas melalui model pembelajaran aktif yang menekankan kerja kelompok dan pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan. Pembelajaran aktif yang diterapkan dikelas akan memperkaya pengalaman belajar dan sangat berguna untuk membekali siswa agar suatu saat siap memasuki bursa kerja.

3. Siswa akan mengembangkan kecakapan siap kerja bersamaan dengan kegiatan belajar untuk bidang pelajaran tertentu. Misalnya, pada saat siswa mempelajari materi pemasaran, maka ilmu tentang pemasaran merupakan bagian dari *hard skills* yang memang harus dikuasai para siswa. Untuk menuju kepada pemahaman tentang materi pemasaran, para siswa dapat mengembangkan berbagai kecakapan *soft skills* melalui kegiatan pembelajaran aktif, yang mensyaratkan siswa untuk mengeluarkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, menghadapkan siswa dengan berbagai permasalahan pemasaran untuk dianalisis; sehingga siswa akan dibiasakan untuk memecahkan masalah melalui kerja kelompok.

D. Apakah kecakapan siap kerja para siswa bisa dinilai?

Kecakapan siap kerja dapat dinilai dengan menggunakan rubrik sesuai dengan indicator kesiapan kerja yang ditentukan.

Misalnya, jika guru ingin menilai kecakapan kerja dalam tim, maka akan dapat diukur bagaimana keterlibatan masing-masing siswa dalam kerja kelompok. Bagaimana kontribusi masing-masing siswa, bagaimana kesunguhan siswa dalam menyelesaikan tugas, bagaimana siswa mengkomunikasikan ide atau gagasan untuk mendukung penyelesaian tugas kelompok; semuanya bisa diukur dengan menggunakan rubrik yang terlebih dahulu harus disiapkan oleh guru sebagai evaluator.

Komunikasi yang baik antara guru dengan siswa juga berkontribusi untuk memperkuat kecakapan siap kerja para siswa. Prinsipnya, para siswa akan banyak belajar dari figur guru. Ketelitian, kesungguhan, kedisiplinan, sikap apresiatif, sikap hangat dan respek para guru semuanya bisa dijadikan model oleh para siswa. Jika guru teliti menilai pekerjaan, maka para siswa secara otomatis akan terdorong untuk menyelesaikan pekerjaan dengan detail. Jika guru bersungguh-sungguh dan berdisiplin setiap kali melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka para siswa juga akan terdorong untuk menampilkan sikap serupa. Demikian halnya, jika seorang guru mampu bersikap apresiatif dan respek dengan karya siswa, maka para siswa juga akan belajar mengembangkan sikap yang serupa. Singkatnya, berbagai kecakapan *soft skills* yang sangat dibutuhkan kelak ketika siswa memasuki bursa kerja dapat dikembangkan dan terus diperkuat setiap saat melalui kegiatan interaksi pembelajaran di kelas.

Pemerintah, berbagai lembaga pendidikan, dunia bisnis, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat memiliki kesempatan dan momen yang tepat untuk ikut memecahkan

permasalahan akut yang dihadapi dunia kerja di Indonesia, yaitu rendahnya kecakapan dasar para lulusan yang memasuki dunia kerja: kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, terutama komunikasi dengan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa global, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan berpikit kritis. Banyak lulusan yang menyadari dan mereka juga berupaya kerjas untuk menguasai berbagai kecakapan dasar ini sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.

Apakah para siswa SMK sudah dipersiapkan untuk bekerja melalui kegiatan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan melalui skema kerja sama dengan dunia usaha dan industry? Apakah sekolah sudah mengidentifikasi berbagai pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, dan nilai-nilai sikap yang dibutuhkan dalam dunia kerja? Bagaimana jawaban atas berbagai pertanyaan ini akan sangat memengaruhi bagaimana kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja.

Problem kesiapan bekerja tidak hanya dialami oleh para lulusan SMK di Indonesia. Para lulusan sekolah menengah kejuruan di negara maju sekali pun juga menghadapi permasalahan serupa. Para pelaku usaha bisnis di Amerika mensinyalir hanya separoh siswa sekolah menengah yang menguasai kecakapan kerja yang paling utama seperti komunikasi lisan dan tulisan, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan berpikir kritis (Conference Board, Inc, 2006). Hasil evaluai rutin yang yang dilakukan para professional terhadap calon pekerja, baik dari lulusan sekolah menengah maupu dari lulusan perguruan tinggi memberikan data yang lebih memprihatinkan: hanya 20% dari para pekerja baru yang benar-benar memenuhi kualifikasi pada

bidang pekerjaannya, dan 80% dalam kategori cukup berkualifikasi. (A JA Education Blueprint Initiative, tt).

Kesiapan bekerja lulusan SMK yang belum kuat menyebabkan angka pengangguran terbuka lulusan SMK menempati proporsi yang paling tinggi dari total pengangguran di tingkat nasional. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius mengingat komposisi angkatan kerja di Indonesia didominasi lulusan sekolah menengah, khususnya sekolah menengah kejuruan.

Data dari *Regional Community Briefing World Economic Forum* (2016) mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar tenaga kerja lulusan sekolah menengah ada sebanyak 76%, dengan 43% di antaranya adalah dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia didominasi lulusan sekolah menengah ke bawah dengan kecakapan kerja level menengah ke bawah. Tenaga kerja di Indonesia dengan kecakapan level tinggi mencapai 9% dari total tenaga kerja. Bandingkan dengan proporsi kecakapan kerja level tinggi dari para tenaga kerja di Singapura (55%), Malaysia (25%), Philipina (24%), Thailand (14%), Vietnam (10%). Untuk hal ini, Indonesia hanya unggul dibandingkan dengan Myanmar (7%), laos (6%), dan Kamboja (4%) (*Regional Community Briefing World Economic Forum*, 2016).

Kesiapan bekerja yang belum kuat juga perlu menjadi perhatian serius mengingat pasar kerja yang semakin terbuka, sehingga memungkinkan angkatan kerja dari berbagai negara lain juga memiliki kesempatan yang setara untuk memperebutkan porsi lapangan kerja di Indonesia. Apa yang harus dipersiapkan para pencari kerja dalam persaingan yang ketat?

A JA Education Blueprint Initiative mengidentifikasi empat kecakapan soft skills dengan karakteristik atau sifat-sifat kepribadian sebagai berikut.

1. Disiplin kerja: produktifitas, kemauan bekerja keras, dan kemandirian;
2. Kerja tim: sikap toleran, kemampuan berkomunikasi dalam kelompok kerja, dan sikap positip dengan sesama anggota kelompok;
3. Orientasi pelayanan kepada pelanggan: kecakapan interpersonal, ketekunan dalam bekerja;
4. Kekuatan di bidang manajerial: kemampuan mempersuasi, antusiasme, dan kemampuan memecahkan masalah.

Kecakapan kerja yang dibutuhkan dalam abad 21 membutuhkan beberapa kompetensi kunci agar pencari kerja dapat sukses di tempat kerja, meliputi:

1. Profesionalisme,
2. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, terutama komunikasi dengan bahasa asing,
3. Kemampuan bekerja sama,
4. Kemampuan berpikir kritis,
5. Kemampuan memecahkan masalah,
6. Kemampuan membangun jejaring, dan
7. Sikap antusiasme dalam bekerja.

Para penyedia kerja dalam abad 21 membutuhkan para pekerja yang memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Sikap professional dalam bekerja,
2. Bekerja dilandasi dengan nilai-nilai etik dan sikap positip,

3. Kemampuan komunikasi baik lisan maupu tertulis,
4. Kemampuan bekerja dalam tim dan berkolaborasi,
5. Kemampuan berpikir kritis, dan
6. Kemampuan memecahkan masalah.

A JA Education Blueprint Initiative yang mengutip dari http://skillsfor21stcentury.wordpress.com/2010/03/23/eff-skills-wheel/ mengemukakan empat macam kecakapan utama yang harus dimiliki oleh para pencari kerja, meliputi:

1. Kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, yang dimanifestasikan oleh 4 kecakapan, meliputi: (a) kemampuan menggunakan perangkat IT, (b) kemampuan belajar melalui proses kajian dan penelitian, (c) kemampuan merefleksi dan mengevaluasi, (d) mengambil tanggung jawab untuk terus membelajarkan dirinya sendiri;
2. Kemampuan untuk berkomunikasi, yang dimanisfestasikan oleh 5 kecakapan, meliputi: (a) kemampuan membaca dan memahami teks dan konteks, (b) kemampuan menyampaikan ide tertulis, (c) kemampuan berbicara yang mudah dipahami pihak lain dengan jelas, (d) kemampuan mendengarkan pihak lain, (e) kemampuan melakukan pengamatan dengan dilandasi sikap kritis;
3. Kemampuan interpersonal, yang dimanisfestasikan oleh 4 kecakapan, meliputi: (a) kemampuan membimbing pihak lain, (b) kemampuan menyelesikan konflik dan bernegoisasi, (c) kemampuan memberikan pendampingan dan memberikan pengaruh dalam tim, (d) kemampuan

bekerja sama dengan pihak lain;

4. Kemampuan membuat keputusan, yang dimanifestasikan oleh 3 kecakapan, meliputi: (a) kemampuan membuat perencanaan kerja, (b) kemampuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, (c) kemampuan menggunakan data-data matematis untuk menyelesaikan masalah dan mengkomunikasikan kepada pihak lain.

Casner-Lotto & Barrington (2006) telah melakukan survey ketenagakerjaan di Amerika dan didapatkan data-data tentang pentingnya para pekerja memiliki berbagai kecakapan yang bersifat terapan/praktis sebagai lawan dari kecakapan dasar. Adapun beberapa kecakapan terapan utama yang harus dimiliki para pekerja meliputi:

1. Kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah.
2. Kemampuan komunikasi lisan
3. Kemampuan komunikasi tertulis
4. Kemampuan bekerja sama atau kolaborasi
5. Pemahaman tentang keberagaman
6. Kemampuan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (IT)
7. Kemimpinan
8. Kreatifitas dan inovasi
9. Pembelajar sepanjang hayat
10. Sikap professional dan etika kerja
11. Nilai-nilai etik dan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya Casner-Lotto & Barrington (2006) melaporkan 5 kecakapan praktis utama yang diharapkan oleh dunia kerja, meliputi: kemampuan komunikasi lisan (95,4%),

kemampuan bekerja dengan tim (94.4%), profesionalisme (93,8%), kemampuan komunikasi tertulis (93,1%), dan kemampuan berpikir kritis (92,1%).

Sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan dasar meliputi:

1. Kemampuan berbahasa inggris
2. Kemampuan memahami tulisan bahasa inggris
3. Kemampuan menulis dalam bahasa inggris
4. Matematika
5. Ilmu pengetahuan
6. Ilmu tata negara dan ekonomi
7. Ilmu sosial humaniora dan seni
8. Bahasa asing selain bahasa inggris
9. Sejarah dan geografi.

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat global. Berbagai aktifitas warga masyarakat global, baik yang tinggal di pelosok desa maupun di kota, mulai dari aktifitas rutin untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sampai dengan aktifitas yang berhubungan dengan pekerjaan dalam berbagai sektor; sangat membutuhkan dukungan perangkat TIK. Berbagai kegiatan transaksi, mulai dari transaksi dalam skala kecil sampai dengan skala besar; semuanya membutuhkan dukungan perangkat TIK. Singkatnya, dalam era sekarang seseorang dapat teralienasi dalam kehidupan masyarakat global bila kurang mampu mengoptimalkan penggunaan perangkat TIK.

Berkembangnya teknologi sudah diyakini dapat mengubah kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Pada era revolusi industri, mekanisasi telah mengubah struktur pasar tenaga kerja di berbagai negara. Mekanisasi disebut sebagai faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada tahapan berikutnya, mekanisasi juga telah memicu pengangguran yang disebabkan oleh adanya kesenjangan kecakapan kerja.

Perkembangan TIK yang pesat, yang diawali dengan berkembangnya teknologi komputer dengan berbagai variannya; telah menciptakan perubahan masyarakat global dalam skala yang sangat cepat. Tanda disadari dalam kehidupan masyarakat global kemudian muncul perlombaan untuk menciptakan keunggulan. Maka tidak mengherankan jika pada saat ini muncul varian produk baru, tetapi tidak lama setelah itu; disusul dengan kemunculan produk sejenis yang lebih mudah dioperasionalkan, murah, dan cepat. Umur kualitas barang dan jasa kemudian menjadi semakin pendek. Kualitas dan keunggulan bukan lagi untuk dipertahankan, tetapi justru untuk diruntuhkan dan diganti dengan kualitas dan keunggulan yang lebih baru.

TIK telah mengubah corak kehidupan warga masyarakat menjadi lebih egliter dan setara antara warga yang satu dengan yang lain. TIK telah mengeliminasi strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Pola komunikasi dan interaksi antar warga menjadi semakin cepat dan intensif. Puncaknya, TIK telah membuat kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih produktif dan efisien. Kecenderungan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh para ahli sejak tahun 1970an. Perkembangan teknologi yang pesat dan tren perkembangan ekonomi, demografi, sosial, dan politik telah mengubah dunia kerja

dan kehidupan sosial; yang kesemuanya itu berdampak signifikan dalam kehidupan era sekarang (Jerald,2009).

Menghadapi berbagai kecenderungan yang berkembang dalam era sekarang, maka para ahli bersepakat bahwa dunia pendidikan perlu melakukan penyesuaian kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan kehidupan masyarakat global yang terus berubah dengan sangat cepat. Jerald (2009) mengemukan, kurikulum tradisional dinilai tidak cukup mampu mempersiapkan para siswa untuk menghadapi kehidupan Abad 21. Pertanyaannya adalah, seperti apakah kurikulum tradisional itu? Sebagian ahli berpendapat bahwa kurikulum tradisional adalah kurikulum pendidikan yang hanya menekankan domain kognisi, yang menekankan pemahaman yang bersifat teoritik.

Dalam era yang berkembang dengan sangat cepat, maka kurikulum pendidikan harus dirancang untuk membekali para siswa dengan berbagai kecakapan soft skills, life skills, berbagai kecakapan utama yang dibutuhkan dalam era sekarang. Selain itu, pendidikan era sekarang juga dituntut untuk memperkuat kecakapan interpersonal, berbagai kecakapan yang berhubungan dengan dunia kerja, dan berbagai kecakapan praktis non teoritik. Untuk menguasai berbagai kecakapan seperti ini membutuhkan kegiatan pembelajaran aktif (*active learning*).

BAB VIII

BERBAGAI FENOMENA GLOBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBELAJARAN DI SMK

Menghadapi berbagai kecenderungan yang berkembang dalam era sekarang, maka para ahli bersepakat bahwa dunia pendidikan perlu melakukan penyesuaian kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan kehidupan masyarakat global yang terus berubah dengan sangat cepat. Jerald (2009) mengemukan kurikulum tradisional dinilai tidak cukup mampu mempersiapkan para siswa untuk menghadapi kehidupan Abad 21. Pertanyaannya adalah, seperti apakah kurikulum tradisional itu? Beberapa ahli berpendapat bahwa kurikulum tradisional adalah kurikulum pendidikan yang hanya menekankan domain kognisi, yang menekankan pemahaman yang bersifat teoritik (Ackerman, 2003; Har, 2011; Fallace, 2015; Coner & Bohan, 2014).

Dalam era yang berkembang dengan sangat cepat, maka kurikulum pendidikan harus dirancang untuk membekali para siswa dengan berbagai kecakapan *soft skills, life skills*, berbagai kecakapan utama yang dibutuhkan dalam era

sekarang. Kecakapan *soft skills* berkaitan dengan sikap-sikap positif, kepribadian yang tangguh, dan nilai-nilai atau pandangan hidup yang positif yang harus dikembangkan dan selaras dengan kehidupan masyarakat global. *Life skills* berkaitan dengan kepemilikan berbagai kecakapan untuk hidup dan *survive* dalam kehidupan masyarakat global, seperti literasi teknologi informasi, ekonomi, kewirausahaan, budaya, kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa global, dan pemahaman tentang etika global. Selain itu, pendidikan era sekarang juga dituntut untuk memperkuat kecakapan interpersonal, berbagai kecakapan yang berhubungan dengan dunia kerja, dan berbagai kecakapan praktis non teoritik.

Perkembangan TIK telah mengubah kehidupan masyarakat global, dan secara otomatis akan mengubah berbagai kecakapan yang diminta oleh dunia kerja. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan kehidupan masyarakat global, yang pada akhirnya memengaruhi spefisikasi kecakapan yang dibutuhkan dunia kerja? Jerald (2009) telah mengidentifikasi tiga faktor penting yang mempengaruhi perubahan masyarakat global dan pada gilirannya ikut mengubah spesifikasi kecakapan yang dibutuhkan dunia kerja, yaitu: (a) otomatisasi, (b) globalisasi, (c) perubahan struktur dan lingkungan kerja

A. Fenomena Otomatisasi

Saat ini, fenomena otomatisasi dalam berbagai sektor kehidupan di masyarakat bukan hal yang baru. Otomatisasi sudah tidak lagi hanya terjadi dalam kegiatan industri atau perusahaan, di pusat-pusat layanan jasa transportasi, di jasa

sektor keuangan, di jasa layanan publik, di perkantoran, atau pun di berbagai pusat perbelanjaan. Berbagai aktivitas sehari-hari dalam lingkungan keluarga pun sudah mulai banyak yang tersentuh dengan otomatisasi.

Berbagai kegiatan di dalam lingkungan industri atau perusahaan sudah semakin banyak pos pekerjaan yang semula menggunakan tenaga manusia kemudian digantikan dengan perangkat komputer yang tersambung dengan mesin. Berbagai kegiatan produksi sudah banyak yang menggunakan tenaga robot yang dapat diprogram melalui komputer. Di berbagai kegiatan industri berskala besar, berbagai pekerjaan dengan sistem manual yang melibatkan banyak tenaga kerja sudah mulai ditinggalkan, dan berganti digerakkan oleh tenaga mesin yang serba otomatis.

Berbagai aktifitas dalam bidang jasa transportasi dan keuangan juga tidak bisa menghindarkan diri dengan tuntutan otomatisasi. Bagi Anda yang hendak menggunakan jasa layanan transportasi udara atau kereta api, misalnya; kegiatan pembelian tiket, *check in*, dan *boarding;* sudah tidak lagi dilaksanakan secara manual yang melibatkan banyak, rumit, memakan waktu, dan berbiaya mahal. Dengan menggunakan aplikasi tertentu, berbagai aktifitas yang sebelumnya harus dilalui dengan sangat melelahkan kini sudah diringkas dalam sebuah program yang ada dalam telepon genggam Anda. Berbagai rangkaian aktifitas tadi kini dapat Anda lakukan di rumah dengan cukup menekan beberapa tombol yang ada pada aplikasi. Dalam hitungan menit, semua urusan yang berkaitan dengan rencana perjalanan Anda akan terselesaikan.

Kehadiran TIK telah menghadirkan revolusi layanan transportasi yang telah memangkas banyak biaya, waktu,

dan tenaga. Konsumen merupakan pihak yang paling diuntungkan dengan fenomena otomatisasi. Tetapi pada saat yang sama, TIK juga telah mengeliminasi berbagai pos pekerjaan. Bisa dibayangkan, bagaimana otomatisasi telah menghapus kegiatan penjualan tiket, memangkas jumlah petugas bagian *check in* dan *boarding* karena berbagai rangkaian kegiatan itu pada saat ini dapat dilaksanakan secara *online*.

Dalam bidang keuangan, TIK juga memunculkan fenomena uang virtual. Berbagai kegiatan transaksi bisnis maupun berbagai transaksi rutin yang dilakukan oleh rumah tangga saat ini sudah tidak lagi menggunakan uang *cash*. Kegiatan pembelian dan pembayaran dalam beberapa tahun terakhir mayoritas sudah dilaksanakan dengan transaksi secara online melalui perangkat kartu ATM, kartu kredit, dan sejenisnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan layanan dalam bidang jasa dan bisnis sudah tidak lagi mensyaratkan adanya pertemuan secara fisik dari para pihak yang bertransaksi. Saat ini, para orang tua di kampung juga sudah banyak yang familier dengan fasilitas sms banking ketika hendak mengirim biaya pendidikan untuk putra putrinya yang berada di kota. Semuanya itu dilakukan dengan sangat ringkas, mudah, dan cepat.

Otomatisasi juga sudah masuk dalam kegiatan rutin sehari-hari. Untuk keperluan makan, misalnya; orang-orang jaman sekarang juga sudah sangat familier dengan aplikasi *gofood*, yang dengan sekali *deal* maka makanan yang diinginkannya bisa langsung diantar ke rumah. Untuk keperluan bepergian dalam jarak pendek dan darurat, dengan aplikasi tertentu seseorang sudah bisa menghadirkan pengojek *online* datang ke rumah dan siap mengantarkan kemana pun tujuan yang

dikehendaki. Berbagai fenomena ini menunjukkan bahwa otomatisasi memang telah mengeliminasi berbagai macam pekerjaan, tetapi pada saat yang sama; fenomena otomatisasi juga mengkreasikan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah terbanyangkan.

Pada masa lampau, pengojek mungkin dianggap sebagai profesi yang tidak jelas dari sisi penghasilan. Tetapi otomatisasi tiba-tiba telah menggerakkan banyak orang untuk berprofesi sebaai pengojek online (*ojol*) karena mampu memberikan penghasilan yang cukup menjanjikan. Pada masa lampau, mungkin pengojek hanya ditekuni oleh orang yang berpendidikan terbatas. Tetapi otomatisasi telah mampu menggerakkan kaum terpelajar, para mahasiswa, baik pria maupun wanita; untuk tidak lagi merasa gengsi berprofesi sebagai pengojek *online*. Fenomena inilah yang oleh Levy dan Murnane (2004), Levy dan Murnane (2007), dan Fiedman (2005) bahwa otomatisasi yang digerakkan oleh berkembangnya TIK telah memunculkan lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, meskipun pada saat yang sama juga menghapus pekerjaan manual yang banyak melibatkan tenaga kerja. Secara spesifik Friedman (2005) menyatakan TIK telah memunculkan berbagai profesi baru, seperti pekerjaan analisis keuangan, dan programmer yang dapat dikerjakan dari rumah tetapi memberikan penghasilan yang besar. Otomatisasi kemudian menghadirkan medan persaingan dan perlombaan antar tenaga kerja untuk menampilkan ketrampilan dan kecakapan terbaru.

Pengaruh paling besar dari berkembangnya TIK ditandai dengan fenomena interkoneksi antar manusia, sehingga sekat jarak, ruang, dan waktu tidak menjadi hambatan bagi

semua orang untuk berinteraksi dan bertransaksi secara *online*. Hal ini membuka peluang yang lebar bagi siapa pun untuk membuka kegiatan usaha, menawarkan barang dan jasa.

Pada masa lampau, ketika TIK belum berkembang pesat seperti saat ini, kegiatan usaha seolah-olah menjadi *privilege* bagi mereka yang bermodal kuat. Hal ini wajar, karena pada masa itu membuka kegiatan usaha sangat identik dengan membangun gedung sebagai tempat kegiatan usaha. Kalau perlu, supaya kegiatan *bonafide*; gedung tempat usaha itu harus besar dan luas. Selain gedung, juga harus tersedia berbagai sarana prasarana pendukung yang memungkinkan kegiatan usaha itu bisa berjalan. Selama bertahun-tahun kecenderungan seperti itu seperti menjadi standar baku yang berlaku untuk siapa pun yang akan membuka usaha. Tetapi kini standar baku itu seperti sedang diruntuhkan.

Berkembangnya TIK membuat semua orang, baik tua dan muda, termasuk ibu-ibu rumah tangga; memiliki kesempatan yang besar untuk membuat kegiatan usaha dari rumah masing-masing yang ditransaksikan secara *online*. Kini sudah gampang ditemui orang-orang yang tinggal di kampung memiliki usaha kuliner tanpa harus memiliki tempat rumah makan di pinggir jalan. Semakin banyak orang yang berjualan baju tanpa harus menunggu berdirinya bangunan toko. Sistem transaksi *online* telah meruntuhkan berbagai pusat perbelanjaan atau mal yang ada di berbagai kota besar. Yang tidak kalah heboh, kita bisa melihat bagaimana Gojek atau Grab menjalankan kegiatan usaha jasa transportasi tanpa harus memiliki berderet-deret armada mobil, sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh perusahaan taksi konvesional. Dengan bantuan

perangkat aplikasi berbasis TIK, kita saksikan bagaimana gagahnya Gojek dan Grab berhadapan *head to head* untuk meruntuhkan dominasi taksi konvensional sekelas Blue Bird. Bahkan dengan lincahnya perusahaan berbasis aplikasi ini merambah ke sektor-sektor yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan: layanan antar barang dan pemesanan makanan. Maka tidak mengherankan jika warung rujak uleg pun kini sudah mulai tersambung dengan layanan transaksi berbasis aplikasi seperti *go food*.

TIK juga memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada siapa saja untuk mempromosikan berbagai produk. Hanya dengan berbekal pulsa senilai puluhan ribu rupiah, seseorang bisa mempromosikan produknya melalui perangkat media sosial, yang dalam hitungan detik bisa menyebar ke banyak orang. Satu dasawarsa yang lalu, sepertinya hanya pengusaha bermodal besar yang mampu mempromosikan produk melalui iklan di TV, baliho, poster, atau perangkat vidiotron yang berbiaya sangat mahal. Kedepan, bukan tidak mungkin iklan-iklan konvensional ini akan semakin memudar dan sirna. Spanduk dan baliho mngkin juga akan tinggal kenangan, dan jalan-jalan pun akan semakin bersih dari polusi tayangan iklan. Mesin pencetak poster akan berkurang fungsi. Singkatnya, TIK telah membuat semakin banyak aktifitas kehidupan manusia yang dapat dibuat menjadi lebih simpel, ringkas, mudah, cepat, dan murah.

Dalam era kedepan, berbagai aktitivitas atau pekerjaan yang dapat ditransformasi dalam bentuk informasi akan sangat rentan untuk tergerus dengan otomatisasi. Beberapa tahun lalu, kita masih berinteraksi dengan staf yang menyambut sapaan telepon. Kini, keberadaan staf itu sudah tergantikan

dengan mesin yang secara otomatis akan mengarahkan untuk keperluan yang kita butuhkan. Beberapa tahun yang lalu kita masih dilayani secara manual oleh petugas jalan tol ketika masuk pada sebuah *gate*. Kini keberadaan petugas itu sudah digantikan dengan dengan perangkat teknologi digital, yang hanya dengan menempelkan sebuah kartu maka segala urusan di *gate* tol langsung terselesaikan dengan cepat. Kelak, bukan tidak mungkin otomatisasi akan merambah ke pusat-pusat pertokoan konvensional. Data-data yang berkaitan dengan produk dapat didigitalisasi, sehingga pembeli dapat melakukan transaksi pembelian secara mandiri. Pusat-pusat pertokoan pun tidak lagi harus ditunggui oleh banyak petugas pelayanan penjualan. Maka hadirnya fenomena otomatisasi akan berdampak langsung dengan menghilangnya berbagai pos pekerjaan.

Kajian yang dilakukan oleh Jerald (2009) mengungkapkan bahwa berbagai pekerjaan yang bersifat rutin di bidang manufaktur dan berbagai bidang administratif rawan untuk diotomatisasikan. Berbagai jenis pekerjaan yang dapat diprogram dengan perangkat TIK dalam kenyataannya lebih berbiaya murah bila dibandingkan dengan upah yang dibayarkan kepada pekerja manual. Oleh karena itu, berbagai pekerjaan yang bersifat adminsitratif dan rutin sangat rawan untuk tereliminasi oleh fenomena otomatisasi.

Kajian yang dilakukan oleh Levy dan Murnane (2004) membuktikan bahwa dalam rentang waktu 30 tahun, antara tahun 1969-1999; komposisi pekerjaan yang termasuk dalam kategori kerah biru (*blue collar worker)*, seperti buruh pabrik, bagian administrasi, dan berbagai jenis pekerjaan area *front line* yang tidak memerlukan kecakapan khusus telah menurun drastis dari 38% (1969) menjadi25% (1999).

Demikian halnya berbagai jenis pekerjaan pendukung bidang administrasi juga berkurang, dari 18% (1969) menjadi 14% (1999). Pada saat yang sama, komposisi pekerjaan dalam kategori kerah putih (*white collar worker*) yang membutuhkan kecakapan khusus seperti dalam bidang penjualan meningat dari 8% (1969) menjadi 12 % (1999). Pekerjaan bidang teknisi, para professional, manager, dan administrator meningkat dari 22% (1969) menjadi 33% (1999). Pekerjaan bidang layanan meningkat dari 12 % (1969) menjadi 14% (1999).

Kajian yang dilakukan Levy dan Murnane (2004) mengungkapkan, dalam era sekarang, seseorang yang memiliki berbagai kecakapan pada berbagai bidang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh berbagai posisi pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Lebih lanjut Levy dan Murnane (2004) melaporkan antara tahun 1969-1999 permintaan tenaga kerja yang didukung dengan kemampuan berpikir level tinggi dan kemampuan komunikasi terus meningkat tajam. Sebaliknya, mulai tahun 1980-an permintaan tenaga kerja pada jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan berpikir level tinggi dan bersifat rutin terus menurun tajam. Trend permintaan tenaga kerja seperti ini harus benar-benar menjadi perhatian serius institusi pendidikan di berbagai jenjang. Jangan sampai institusi pendidikan terlambat menangkap kecenderungan ini yang dampaknya akan berimbas pada lulusan dengan kecakapan yang tidak selaras dengan tuntutan jaman. Oleh Jerald (2009), lulusan seperti itu disebut sebagai lulusan dengan kecakapan rendah, yang bila harus diterima di bursa kerja mereka akan dibayar dengan upah yang murah. Lebih parah lagi, permintaan terhadap calon pekerja dengan

kecakapan rendah ini memiliki trend yang menurun tajam, sehingga akan langsung berdampak pada meningkatnya pengangguran dari kalangan terdidik dengan kecakapan yang rendah.

Otomatisasi dan berkembangnya teknologi komputer memang memangkas banyak pekerjaan manual, tetapi pada saat yang sama juga dapat menciptakan berbagai ragam pekerjaan baru. Sepanjang seseorang memiliki kebiasaan untuk meng-update kecakapan dan memiliki dorongan untuk mempelajari pengetahuan dan kecakapan yang baru, maka ia memiliki kesempatan untuk beralih dari pekerjaan yang lama menuju pada pekerjaan yang baru. Untuk menjelaskan hal ini kita bisa membuka kisah perjuangan ojek online hingga saat ini hampir semua orang dapat merasakan manfaat dari kehadirannya.

Pada awal kemunculannya, banyak orang yang kaget dengan ojek berbasis aplikasi online ini. Tantangan paling keras datang dari pengojek konvensional yang merasa dirugikan dengan kehadiran ojek online. Masalah utamanya sebenarnya karena pengojek konvensional gagap teknologi (*gaptek*), tidak mau berubah; atau gabungan dari keduanya: tidak mau berubah karena gaptek. Pemerintah sendiri sebagai pihak yang berwenang membuat kebijakan dan harus bertindak sebagai wasit pada awalnya juga seperti sempat dibuat gamang dalam menentukan sikap terhadap keberadaan ojek *online*. Tetapi ketika kemudian semakin banyak orang yang merasakan betapa ojek *online* dinilai mampu menghadirkan layanan yang simpel, murah, dan terukur; maka pihak-pihak yang dulu menentang keras kini justru ikut menikmati keuntungan dari jasa layanan transportasi yang baru ini. Dan, para pengojek konvensional

pun rame-rame bergabung dalam barisan pengojek *online*. Mungkin masih ada pengojek konvensional yang bertahan, tetapi bisa dipastikan mereka adalah golongan orang yang tidak mau berubah dan mempelajari hal-hal yang baru. Dan, cepat atau lambat; tidak lama lagi mereka pasti akan tereliminasi dari usaha jasa layanan ini.

Kisah tentang kehadiran ojek *online* ini seperti hendak mengingatkan institusi pendidikan agar tidak lupa membekali para peserta didiknya dengan kecakapan di bidang TIK, kemampuan membaca *trend*, dan kesiapan untuk berubah. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Jerald (2009); institusi pendidikan dan kurikulum sekolah yang hanya mengajari siswa berpikir linear, padat dengan kegiatan menghafal teori, dan dengan model evaluasi yang meminta siswa untuk memilih jawaban tunggal; sama dengan mempersiapkan lulusan yang hanya cocok untuk mengisi pekerjaan rutin yang kini sudah mulai banyak dihandel oleh teknologi komputer. Dengan kata lain, model pembalajaran seperti ini benar-benar tidak relevan dengan tuntutan dalam era sekarang dan yang akan datang.

Levy dan Murnane (2007) menyatakan pendidikan yang membekali siswa dengan berbagai kecakapan kerja, dimana kecakapan kerja itu bisa dilaksanakan oleh teknologi komputer melalui program otomatisasi adalah sia-sia. Dalam hal kecepatan dan akurasi, teknologi komputer tidak akan bisa dikalahkan oleh tenaga manusia. Kehadiran teknologi komputer justru dimaksudkan untuk mengganti tenaga manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat rutin dan bisa diprogram. Manusia era sekarang dan yang akan datang ditantang untuk mengisi posisi pekerjaan yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan untuk

memahami perasaan, dan kemampuan untuk memahami aspirasi atau harapan pelanggan melalui pengkreasian sebuah produk yang lebih baru. Untuk tujuan inilah maka manusia era sekarang dan yang akan datang dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif.

Kajian yang dilakukan oleh O'Toole dan Lawler (2006) mengungkapkan komposisi ketenagakerjaan di Amerika pada sektor industri pengolahan turun drastis, dari 50% pada tahun 1950-an menjadi 25% pada tahun 1970-an; dan pada tahun 2006 tinggal 10%. Singkatnya, pekerjaan yang memiliki alur kegiatan rutin akan terus diambil alih oleh teknologi berbasis komputer, sehingga keberadaan kaum pekerja pada sektor tersebut akan semakin berkurang. Sebagaimana dilaporkan oleh *National Center on Education and The Economy* (2007), sekomplek apa pun sebuah pekerjaan, asalkan hal itu merupakan aktifitas yang bersifat rutin maka kemungkinan besar ia akan dapat dapat diotomatisasi.

Apa yang terjadi dinegara-negara maju seperti Amerika dipastikan juga akan terjadi pada semua negara di dunia sepanjang teknologi komputer menjadi basis utama aktifitas pada berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, struktur ketenagakerjaan di Indonesia cepat atau lambat juga akan mengalami situasi sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju. Hal ini harus menjadi perhatian serius agar aktifitas pendidikan di Indonesia dapat selalu selaras dengan berbagai kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum dan berbagai pendekatan pembelajaran harus cepat menyesuaikan diri dengan trend yang ada dalam kehidupan nyata. Jika tidak, dikawatirkan dunia pendidikan dinilai tidak mampu mengambil peran untuk mempersiapkan lulusan yang selaras dengan tuntutan dunia kerja.

Meskipun teknologi komputer mampu mengambil alih pekerjaan yang bersifat rutin, Jerald (2009) mengemukakan berbagai pekerjaan yang tidak mampu dihandel oleh kecanggihan TIK memiliki trend permintaan yang meningkat. Berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan kemampuan menjalin relasi dengan pihak lain, yang membutuhkan kemampuan untuk memahami perasaan dan aspirasi pelanggan tentu tidak mampu dihandel oleh komputer. Hal itu membutuhkan kemampuan membaca situasi atau trend dan kemampuan berkomunikasi pada level yang tinggi. Jenis pekerjaan seperti ini pada era sekarang dan yang akan datang memiliki posisi yang sangat strategis (Levy dan Murnane, 2007). Dunia pendidikan harus terus menyesuaikan diri dengan berbagai kecenderungan tersebut dengan terus memperbaharui kurikulum dan model pembelajaran agar mampu membekali para peserta didik dengan berbagai kecakapan yang relevan dengan tuntutan era sekarang dan era yang akan datang.

B. Fenomena Globalisasi

Ketika TIK mampu menciptakan interkoneksi, maka dunia seolah-olah menjadi semakin datar, yang menghilangkan batas-batas wilayah interaksi sosial, ekonomi, dan budaya dari seluruh umat manusia di dunia. Dari kecenderungan ini kemudian muncul istilah globalisasi ekonomi yang kemudian memunculkan tuntuan berbagai kecakapan baru yang harus dimiliki oleh semua orang yang hidup dalam era sekarang dan yang akan datang (Friedman, 2005). Dalam dunia yang terkoneksi, maka berbagai aktifitas manusia dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Itulah sebabnya, kini semakin

banyak aktifitas bisnis yang dilakukan oleh orang dari berbagai belahan dunia.

Kegiatan berbagai unit usaha yang ada pada sebuah industri di suatu negara bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang ada di negara lain. Tentu ini bukan pekerjaan berbasis otot, melainkan pekerjaan berbasis skill level tinggi. Inilah tantangan era otomatisasi yang harus dihadapi oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Hal ini sangat membutuhkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, dan bukan sekedar kemampuan berpikir linear yang lazim dibutuhkan untuk menjalankan aktifitas rutin.

Dalam era globalisasi, jarak geografis menjadi hal yang tidak terlalu penting. Dalam era sekarang, tiba-tiba kita menyaksikan para professional dari berbagai wilayah atau negara yang berbeda dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Era sekarang orang-orang dari berbagai penjuru dunia juga dapat saling berbagai informasi atau pengetahuan melalui perangkat internet yang tersambung melalui perangkat komputer atau telepon genggam. Kita bisa melihat, bagaimana seseorang dengan membuka aplikasi *google* bisa mengakses informasi apa pun yang dibutuhkan. Melalui aplikasi *youtube* seseorang juga dapat memperoleh informasi atau pengetahui lengkap dengan deskripsi yang lebih hidup. Globalisasi benar-benar memberikan kesempatan kepada semua orang untuk saling berbagi dan bertransaksi dengan lebih intens.

Globalisasi memunculkan fenomena *offshoring*, yaitu proses perpindahan kegiatan bisnis dari perusahaan di satu negara ke negara lain yang dinilai lebih mampu menciptakan efisiensi. Banyak perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan *offshoring* dengan menggeserkan sebagian kegiatan

usaha ke negara-negara yang memiliki kapasitas sumber daya manusia dengan kemampuan setara atau bahkan lebih baik dari sumber daya yang ada di perusahaan induk dengan pertimbangan efisiensi biaya produksi. Globalisasi benar-benar memberikan kesempatan kepada siapa pun yang memiliki kecakapan level tinggi untuk ikut menjadi bagian dari perusahaan atau kegiatan bisnis global.

Globalisasi juga memunculkan fenomena *outsourcing*. Semakin banyak rangkaian kegiatan usaha dalam perusahaan yang dapat diserahkan kepada seseorang yang ada di luar perusahaan, tetapi memiliki kecakapan memadai. Friedman (2005) dengan sangat gambling menggambarkan maraknya fenomena *outsourching*, dimana para professional dari berbagai belahan dunia mengerjakan tugas perusahaan. Para professional itu tetap dapat menjalankan tugasnya di rumahnya masing-masing, dan dengan sekali *dial-up* hasil pekerjaan mereka dalam hitungan detik dapat terkirim ke perusahaan induk. Friedman (2005) memberikan istilah adanya pergeseran pola produksi vertical menuju pola produksi horizontal.

Globalisasi akhirnya mendorong lahirnya *supply-chain* yang merupakan sebuah jaringan pemasok, perakitan, distribusi, dan pengadaan logistik yang berperan sebagai penyedia bahan, transformasi material ke dalam kegiatan produksi sampai dengan pendistribusian kepada pelanggan. Jaringan produksi ini benar-benar melampaui batas wilayah negara, sehingga memunculkan istilah perusahaan global. Di dalam perusahaan global itu terlibat banyak tenaga kerja, para teknisi, dan para professional dari berbagai negara; sehingga para pekerja di dalam perusahaan global itu dikenal sebagai manusia-manusia global. Tentu saja,

untuk bisa menjadi bagian dari manusia global; seseorang dari mana pun asalnya harus memiliki pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh perusahaan global. Dan yang tidak kalah penting, manusia-manusia global tentu harus memahami etika global dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan komunitas global.

Globalisasi dan otomatisasi hanya akan menghapus pekerjaan, sepanjang item-item aktifitas dalam pekerjaan itu bisa deprogram dengan system komputer atau dapat dialihtugaskan (*off-shore*) kepada para pekerja dari belahan dunia mana pun. Jerald (2009) yang mengutip pendapat ahli ekonomi Alan Blinder (2006) menyebut beberapa jenis pekerjaan yang memiliki peluang besar di *off-shore*, sehingga semua orang dari berbagai belahan dunia mana pun, asalkan memiliki kemampuan yang memadai dapat terlibat di dalamnya. Beberapa pekerjaan tersebut antara lain: programmer computer, tenaga pemasaran, analis sistem computer, akuntan, auditor, adjuster, praktisi komputer, pekerjaan teknik sipil, supervisor, manajer, dan operator mesin.

Aktifitas pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan membuat keputusan, dan membutuhkan berbagai kecakapan komunikasi tingkat tinggi menurut Levy dan Murnane (2007) sangat kebal dengan hadirnya globalisasi dan otomatisasi. Mereka tidak gampang tereliminasi, dan akan terus dibutuhkan oleh dunia kerja dalam era sekarang dan yang akan datang. Secara spesifik, Blinder (2006) menyatakan orang-orang terdidik, trampil, memiliki kemampuan membaca yang baik, dan memiliki kemampuan komunikasi dengan bahasa inggris

yang baik memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam jaringan perusahaan global.

Kemampuan membaca yang dibutuhkan dalam era sekarang bukan sekedar membaca teks. Tetapi lebih penting dari itu adalah membaca konteks, membaca situasi lingkungan, dan membaca berbagai fenomena dan berbagai kencenderungan yang terjadi di masyarakat. Dengan kemampuan membaca yang baik, maka seseorang akan mendapatkan informasi aktual dan berharga yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam bidang apa pun, Ini adalah pesan penting bagi dunia pendidikan di mana pun agar benar-benar mempersiapkan para peserta didiknya dengan bekal kemampuan membaca yang baik, penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa pergaulan di tingkat global. Para pekerja yang tidak memiliki kemampuan membaca dan kemampuan menggunakan bahasa global, kemampuan berbahasa inggris yang memadai, akan sangat berpotensi untuk teralienasi dari kehidupan masyarakat global (Blinder, 2006).

C. Perubahan Lingkungan Kerja

Friedman (2005) dalam bukunya yang sangat terkenal, "The World is Flat", menyatakan bahwa pada saat ini telah terjadi perubahan struktur organisasi dalam bidang apa pun, dari struktur organisasi yang bersifat hirarkhi-vertikal menuju pada kehidupan organisasi yang egaliter-horisontal. Dalam lingkungan kerja dengan struktur organisasi yang bersifat hirarkhi-vertikal, tidak semua orang dengan mudah dapat terlibat dalam kegiatan proses produksi. Tetapi seiring dengan bekembangannya TIK, maka struktur organisasi

berubah menjadi lebih egaliter, horizontal; sehingga lebih mampu memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk terlibat dalam kegiatan usaha sesuai dengan kapasitas kecakapan dan keahliannya masing-masing.

Jerald (2009) menggambarkan situasi lingkungan kerja yang baru dengan menyatakan bahwa sekarang ini semakin banyak orang dari berbagi penjuru dunia yang bisa bekerja di Amerika. Mereka tetap berada di negara masing-masing, tapi dengan adanya otomatisasi, globalisasi, dan interkoneksi; mereka sekarang terlibat dalam kegiatan produksi dari berbagai perusahaan yang ada di Amerika. Lingkungan kerja yang semakin terbuka terbukti memberikan kesempatan yang sangat besar kepada semua orang untuk terlibat dalam kegiatan produksi, terutama untuk kegiatan yang dijalankan dengan berbasis layanan teknologi informasi dan komunikasi (Apte et al, 2008).

Lingkungan kerja yang semakin egaliter, horisontal, dan terbuka membuat organisasi dalam era sekarang menjadi minim hirarkhi dan minim supervisi. Para pekerja dalam era sekarang dan yang akan datang dituntut untuk mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kecenderungan ini adalah merupakan konsekuensi dari lingkungan kerja yang minim hirarkhi, sehingga setiap pekerja akan mendapatkan limpahan wewenang dan kepercayaan yang jauh lebih besar daripada periode sebelumnya ketika struktur organisasi bersifat hirarkis. Contoh fenomenal dari kecenderungan ini terlihat dari cara kerja pengandara pada perusahaan taksi konvensional dan pengandara taksi online. Para sopir taksi kovensional akan terus diawasi kinerjanya oleh pimpinan manajemen taksi melalui berbagai perangkat elektronik

yang ada di mobil dan tersambung dengan perusahaan induk. Sedangkan pada sopir taksi online tidak ada pihak yang secara langsung mengawasinya. Para sopir taksi online memiliki kebebasan untuk bekerja atau tidak bekerja dengan konsenkuensinya masing-masing. Sopir taksi *online* lebih mandiri dan bertanggung jawab atas berbagai macam keputusan yang dibuatnya.

Lingkungan kerja dalam era sekarang dan yang akan datang sangat membutuhkan pekerja yang mampu mengambil peran dan tanggung jawab yang besar, mampu bekerja dalam bidangnya tanpa diperintah dan diawasi. Dampak ikutan berikutnya adalah kegiatan supervisi atau pengawasan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan juga menjadi jauh berkurang. Lingkungan kerja dalam era sekarang membutuhkan pekerja yang memiliki motivasi kerja dan kebutuhan untuk berprestasi pada level tertinggi. Organisasi dan perusahaan yang modern dan tangguh pada era kedepan akan lebih banyak oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk beraktualisasi, sehingga dalam dirinya akan terus terdorong untuk menampilkan kinerja yang terbaik.

Seseorang bekerja keras karena ada pihak yang mengawasi merupakan sikap kerja yang sudah tidak relevan dalam era sekarang dan yang akan datang. Kesadaran dari dalam diri para pekerja tentang konsekuensi yang akan ditanggung sebagai akibat dari kualitas kinerjanya merupakan pengawas yang paling utama. Dengan demikian, peran pengawas pada organisasi pada masa depan akan diambil oleh masing-masing pekerja. Pengawas dari setiap pekerja pada masa depan adalah dirinya sendiri, yang dimanifestasikan oleh sikap tanggung jawab dan dorongan

untuk berprestasi. Inilah tantangan bagi dunia pendidikan agar terus menanamkan nilai-nilai dan sikap seperti kemandirian, tanggung jawab, dorongan untuk berprestasi, dan bangga dengan karya sendiri. Nilai-nilai dan sikap seperti inilah yang sangat dibutuhkan ketika lingkungan kerja dalam era sekarang dan yang akan datang berubah menjadi minim hirarkhi dan minim pengawasan.

Dalam sebuah bukunya, "The New American Workplace", O'Toole & Lawler (2006) menggambarkan perubahan lingkungan kerja antara tahun 1977 dan tahun 2002, sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 8.1 Perubahan Lingkungan Kerja di Amerika Tahun 1977 dan 2002

Situasi Kerja	Prosestase		Perubahan (%)
	1977	2002	
Lingkungan kerja memberikan kebebasan kepada saya untuk mengembangkan ketrampilan dan kecakapan	28	69	146,4
Saya bertanggung jawab penuh untuk menentukan bagaimana cara saya menyelesaikan pekerjaan	32	55	71,8
Pekerjaan mengharapkan saya untuk terus mempelajari hal-hal yang baru	45	62	37,7
Pekerjaan mengharapkan saya untuk menjadi orang yang kreatif	20	45	125
Saya berpandangan bahwa pekerjaan yang saya tekuni merupakan hal yang berarti	27	66	144,4

Sumber: O'Toole & Lawler (2006)

Data-data sebagaimana diungkapkan O'Toole & Lawler (2006) menunjukkan adanya pergeseran cara pandang, nilai-nilai, dan sikap kerja yang sangat signifikan. Para pekerja dalam era kedepan dituntut untuk lebih mandiri, berorientasi pada kualitas kerja, terus mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Hal ini tidak berarti bahwa para pekerja pada masa depan akan bekerja dengan kekuatan dirinya sendiri.

Berkembangnya TIK justeru memberikan kesempatan yang besar kepada semua pekerja untuk berkolaborasi, memperkuat jejaring, dan bekerja lintas sektor (Jerad, 2009). Melalui perangkat TIK, para pekerja yang merupakan bagian dari kegiatan usaha di tingkat global bisa saling berkomunikasi dan bertransaksi bisnis. Dalam lingkungan kerja yang sangat cair seperti ini diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam melihat peluang dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Untuk itu sangat dibutuhkan orang-orang yang mampu berkolaborasi dan menjalin hubungan interpersonal yang kuat, baik melalui komunikasi lisan, tertulis, maupun kemampuan dalam membangun hubungan sosial dengan komunitas global. Singkatnya, generasi sekarang dan yang akan datang harus memiliki kesadaran yang sangat kuat sebagai bagian dari komunitas global yang ditunjukkan dengan upaya mempersiapkan diri dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja di tingkat global. Institusi pendidikan juga ditantang memperkuat literasi global dengan membekali para siswa tentang berbagai kecakapan yang dibutuhkan oleh dunia kerja di tingkat global.

D. Penguatan Literasi Global Kepada Siswa SMK

Gerakan literasi dalam era global menjadi semakin menguat. Literasi pada masa lalu dikaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Tapi dalam sekarang, literasi menjadi semakin luas maknanya; sehingga dalam era sekarang dikenal adanya istilah literasi sebagai warga global, literasi ilmu pengetahuan, literasi numerik, literasi praktek, literasi ekonomi, literasi TIK, literasi kewirausahaan, dan seterusnya. Saat ini, istilah literasi digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak sekedar *mengetahui* tentang suatu topik atau isu; tetapi juga mampu mengaplikasikan apa yang diketahuinya untuk menjawab berbagai tantangan yang terjadi dalam kehidupan.

Berbagai kecenderungan yang terjadai dalam komunitas global membawa konsekuensi pada kegiatan pembelajaran yang harus memperkuat pemahaman tentang pengetahuan, sikap, dan ketrampilan tidak sekedar pada tataran konsep saja; tetapi juga harus dilanjutkan dengan kegiatan aplikasi dari apa yang sudah dipahami. Pembelajaran dalam era sekarang harus bersifat *tuntas*: memahami apa yang sudah dipalajari, dan mampu menerapkan dalam kehidupan apa yang sudah dipahami. Institusi pendidikan harus menuju level tersebut: para siswa dinyatakan lulus jika memenuhi dua kreteria tersebut: (a) paham apa yang dipelajari, sesuai dengan level pemahaman yang ditentukan dan (b) mampu mengaplikasikan apa yang sudah dipahami untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan. Selama ini ketuntasan belajar lebih banyak diukur dari domain pemahaman tentang pengetahuan melalui kegiatan tes tertulis. Tentu kegiatan pembelajaran seperti ini tidak cukup mampu untuk

mempersiapkan lulusan yang siap menjawab tantangan kehidupan dalam era global.

Pandangan para penyedia kerja tentang pengetahuan dan ketrampilan yang dianggap paling penting dimiliki oleh para lulusan meliputi: sikap profesionalisme, etika kerja, kemampuan bekerja sama atau kolaborasi, kemampuan komunikasi lisan, kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan membaca, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa inggris, kemampuan komunikasi tertulis, kemampuan menerapkan TIK. Kecakapan yang diharapkan para penyedia kerja menjadi hal yang sangat penting meliputi: kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menggunakan perangkat TIK, kemampuan bekerja sama, dan kreatifitas. Jerald (2009) mengemukakan berbagai kecakapan yang haus dimiliki lulusan agar siap untuk bekerja, meliputi: (a) kemampuan berkomunikasi, yaitu mampu berkomunikasi sehingga pihak lain mengerti dengan jelas apa yang disampaikan, mampu bertindak sebagai pendengar yang baik dan penuh hormat, mampu membaca dan memahami dengan baik apa yang dibaca, dan mampu melakukan pengamatan yang dilandasi sikap kritid; (b) kecakapan interpersonal, yang ditunjukkan dengan kemampuan bekerja sama dengan pihak lain, mampu menyelesaikan konflik dan mampu bernegosiasi; (c) kemampuan membuat keputusan, yang ditujnjukkan dengan kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan, mampu melakukan perhitungan yang cermat sebagai dasar membuat keputusan, dan mampu mengkomunikasikan apa yang sudah diputuskan; (d) kecakapan untuk terus belajar sepanjang hayat, mampu mengarahkan dirinya untuk terus

belajar dan mampu menggunakan perangkat TIK untuk mendukung pekerjaan.

Berdasarkan berbagai kecenderungan yang terjadi dalam dunia kerja dalam era sekarang, Jerald (2009) mengemukakan beberapa kata kunci yang dapat dipedomani oleh para siswa sebelum mereka lulus dan bersaing dalam bursa kerja.

a. Siswa yang mengikuti berbagai pendidikan dan latihan akan berpeluang untuk memperoleh berbagai kemudhan, kemanfaatan, dan kemungkinan untuk berkembang di tempat kerja. Pendidikan lanjutan dan berbagai pelatihan teknis yang diikuti akan memungkinkan siswa untuk memperoleh peluang kerja dan meningkatkan jenjang karir kelak setelah bekerja. Tugas sekolah dan orang tua untuk terus mendorong para siswa agar mampu membelajarkan dirinya sendiri, menjadi pembelajar yang mandiri.
b. Siswa yang memiliki berbagai pengetahuan dan ketrampilan dasar yang berkaitan dengan ilmu matematika, kemampuan berbahasa dan seni, serta pengetahuan umum yang kuat berpotensi lebih berkembang di tempat kerja dibandingkan dengan temannya yang kurang memiliki bekal dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut. Hal ini memberikan pelajaran agar semua siswa sejak awal mempersiapkan diri untuk belajar keras dan terus memperbaharui pengetahuan yang sudah didapatkan di sekolah.
c. Siswa dituntut untuk mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya,

dan bukan sekedar memahaminya saja. Hal ini membawa konsekuensi dalam kegiatan evaluasi belajar di sekolah. Penilaian hasil belajar harus menyentuh aspek aplikasi, dan bukan sekedar reproduksi pengetahuan yang dituliskan di lembar ujian. Sekolah dapat menggunkan penilaian portofolio, dan penilaian berbasis tugas dan proyek kegiatan berkait dengan pengetahuan yang diajarkan.

d. Siswa yang mampu dan menguasai kecakapan yang lebih luas, seperti kemampuan menggunakan informasi dengan dilandasi sikap kritis, kemampuan memecahkan masalah dengan pemberian solusi yang orisinil, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, kemampuan mengkreasikan hal-hal yang baru, dan kesiapan mengikuti perubahan berpotensi akan sukses di tempat kerja. Oleh karena itu, sekolah harus memberikan bekal siswa dengan berbagai jenis kecakapan tersebut.

e. Penguatan kecakapan praktis dan berbagai kompetensi harus diajarkan kepada siswa melalui pendekatan pembelajaran berbasis kontek. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran di sekolah harus selalu dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, atau secara spesifik dikaitkan dengan hal-hal praktis yang terjadi dalam dunia kerja. Hal ini membawa pesan kepada sekolah tentang pentingnya menjalin sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk membekali ketrampilan dan kompetensi kerja.

BAB IX

PEMBELAJARAN AKTIF DAN BERBASIS KERJA DI SMK

"Ceritakan kepada saya, maka saya akan mudah lupa. Tunjukkan kepada saya, maka saya akan mudah mengingat. Libatkan saya dalam sebuah aktifitas, maka saya akan mudah mengerti". Inilah ungkapan popular dari negeri China yang menekankan pentingnya pelibatan siswa dalam kegiatan dalam setiap kegiatan pembelajaran.

OECD (2010) menyatakan bahwa daya saing per-ekonomian suatu bangsa memerlukan keberadaan pendidikan kejuruan yang berkualitas. Kualitas kegiatan pendidikan antara lain ditentukan oleh kualitas kegiatan pembelajaran yang dijalankan oleh para siswa bersama dengan guru. Berbagai unsur kegiatan yang ada dalam pembelajaran berbasis kerja dinilai sebagai aktifitas yang dapat memperkuat kesiapan bekerja. Pembelajaran yang menekankan pada kajian teoritik di dalam kelas sudah lama dinilai tidak cukup untuk mempersiapkan para siswa dalam memasuki dunia kerja. Untuk itu diperlukan

pendekatan pembelajaran yang dapat mendekatkan antara apa yang dipelajari siswa dengan tuntutan dunia kerja. Materi pelajaran yang dipelajari di dalam kelas diharapkan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dalam dunia kerja (Symonds, et al., 2011).

Kajian yang dilakukan oleh Casner-Lotto & Barrington (2006) mengungkapkan pentingnya pembelajaran aktif (*active learning*). Kajian yang dilakukan Casner-Lotto & Barrington (2006) mengungkapkan para siswa di Amerika dinilai kurang memiliki kesempatan yang memadai untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di sekolah ke dalam sebuah aktivitas pembelajaran berbasis kerja. Hal ini ditegaskan oleh hasil kajian Hoffman (2011) yang menyatakan bahwa para siswa di Amerika memiliki kesempatan yang paling sedikit untuk terlibat dalam pembelajaran berbasis dunia kerja dibandingkan dengan 12 negara lainnya. Hal ini kemudian menyebabkan anak-anak muda Amerika kurang memiliki kecakapan kerja sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pencari kerja (Casner-Lotto & Barrington, 2006).

A. Berbagai Model Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Kewirausahaan

a. Leaning by Doing

Bagaimana membuat siswa memiliki jiwa wirausaha merupakan target utama dari pendidikan kewirausahaan. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa cara yang dapat ditempuh untuk membangun jiwa wirausaha pada para siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran *learning by doing* (Lackeus, 2015). Pendekatan pembelajaran *learning by doing* sejalan dengan prinsip dasar

ajaran Confucius (450 sebelum masehi) yang menyatakan: **"Ketika saya hanya mendengar, maka saya akan mudah lupa; ketika saya melihat mungkin saya akan gampang mengingat; tetapi jika saya mengerjakan, maka saya akan lebih bisa mengerti"**. Maka pembelajaran kewirausahaan tentu tidak cukup hanya dengan diceramahkan di muka kelas, atau hanya dengan memberikan contoh-contoh orang yang sukses di bidang kegiatan usaha. Dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan, para siswa harus diajak untuk melakukan sesuatu. Belajar dan melaksanakan sesuatu dinilai dapat memperkuat beberapa atribut kewirausahaan, seperti: (a) memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam tim, (b) siswa bersama-sama dengan tim kerjanya dapat bereksplorasi dalam mengembangkan idea atau gagasan, menilai ide dan gagasan terbaik, dan mewujudkan idea tau gagasan tersebut dalam tindakan nyata, (c) Siswa bersama-sama tim kerja dapat saling mempertukarkan hasil kerja atau produk dan berbagi pengalaman dalam menghasilkan produk (Churchil, 2003; Hackathorn et al, 2011).

b. *Experiential Learning*

Berbagai peneliti juga sepakat bahwa untuk memperkuat jiwa wirausaha dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam tim dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar sekolah. Model pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada siswa (*experiential learning*) dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk mengalami dan terlibat dalam aktifitas dalam

kehidupan masyarakat, sesuai dengan bidang kegiatan atau bidang usaha yang diminatinya (Freeman & Le Rossignol, 2010). Para siswa hanya akan mendapatkan pengalaman apabila mereka terlibat dan aktif dalam kehidupan nyata (mengalami peristiwa).

c. *Enterprise Education*

Pendidikan kewirausahaan seringkali disamakan dengan pendidikan untuk menjalankan kegiatan usaha (*enterprise education*). Enterprise education pertama kali diimplementasikan di Inggris yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi, cara pandang (mindset), berbagai ketrampilan dan kemampuan; yang secara khusus dimaksudkan untuk membekali siswa agar mampu mendirikan kegiatan usaha dan mampu bekerja secara mandiri (QAA, 2012; Mahieu, 2006; Leffler & Falk-Lundqvist, 2013). Di beberapa negara Eropa Utara dan Eropa Timur dikenal istilah belajar kewirausahaan yang identik dengan *enterprise education* (Heder, et al, 2011). Sedangkan di USA hanya digunakan istilah pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship education*) (Erkkila, 2000). Sedangkan ahli lain, seperti Hannon (2005) menggunakan istilah *enterprise and entrepreneurship education*. Erkkila (2000) menggunakan istilah pendidikan kewirausahaan yang mencakup domain *enterprise* dan *entrepreneurship*. Ahli lain, seperti Seikkula-Leiono et al (2010) memperkenalkan istilah *internal entrepreneurship education* yang didentikkan dengan *enterprise education, intrapreneurship* dan *external entrepreneurship education* yang diidentikkan dengan pendidikan kewirausahaan.

Enterprise education lebih berorientasi pada

kegiatan praktek berbisnis untuk memperkuat jiwa wirausaha. Kegiatan pendidikan dilaksanakan *melalui* kegiatan usaha, mengharuskan siswa untuk terlibat dalam kegiatan usaha. Para siswa dilibatkan dalam kegiatan usaha, sehingga mendapatkan pengalaman langsung bagaimana menjalankan kegiatan usaha (*educating through entrepreneurship*). Sedangkan *entrepreneurship education* berorientasi pada teori kewirausahaan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan kepada para siswa. Hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dikaji secara teoritis, sehingga para siswa mendapatkan pemahaman pengetahuan kewirausahaan, ketrampilan-ketrampilan kewirausahaan, memahami nilai-nilai kewirausahaan, sikap, dan karakter apa yang terkandung dalam kewirausahaan.

Lackeus (2013) menjelaskan bahwa inti pendidikan kewirausahaan adalah untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar mampu mengkreasikan nilai tambah atas produk yang sudah ada dan menciptakan nilai-nilai atau cara kerja baru baru yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Model pembelajaran kewirausahaan melalui kegiatan bekreasi dan berusaha akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini akan dapat memberikan kepuasan, memunculkan perasaan sebagai orang yang berguna dan terlibat dalam membangun peradaban masyarakat (Baumeister et al, 2012). Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan melalui kegiatan-berusaha akan

memberikan kesan yang dalam dan pengalaman yang melekat kuat pada diri siswa.

O'Reilly & Tushman (2013) membangi dua kategori kegiatan penciptaan nilai, sebagaimana yang menjadi kegiatan inti dalam pendidikan kewirausahaan melalui kegiatan usaha. *Pertama*, kegiatan penciptaan nilai secara rutin; dan *kedua*, penciptaan nilai secara eksploratif. Kegiatan penciptaan nilai secara rutin terlihat pada kegiatan usaha yang didasarkan berbagai kecakapan operasional yang harus dimiliki siswa ketika sedang menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana menjalankan kegiatan bisnis, kegiatan administrasi manajemen, kegiatan penjualan, dan laporan keuangan sesuai dengan sistem kerja yang sudah ada.

Para siswa yang terlibat dalam kegiatan usaha tinggal menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tata cara kerja yang ada, sehingga mengharuskan siswa untuk menguasai kecakapan operasional. Sedangkan kegiatan penciptaan nilai secara eksploratif didasarkan pada kecakapan kewirausahaan yang dihiasi oleh nilai-nilai, sikap, karakter; sehingga untuk hal ini para siswa harus memiliki kecakapan kewirausahaan. Para siswa akan ditantang untuk mengkreasikan cara kerja baru yang lebih mudah, murah, dan efisien. Hal ini menuntut kegiatan pembelajaran yang dapat mengkondisikan siswa untuk terus menerus mengembangkan inovasi tiada henti, kreatifitas tanpa batas, tata cara atau metode kerja yang terus dikembangkan dalam rangka memberikan persembahan karya baru yang lebih bermanfaat bagi pihak lain.

Dalam jangka panjang pendidikan kewirausahaan diharapkan dapat berkontribusi untuk menyiapkan peserta didik dalam menciptakan nilai-nilai atau gaya hidup baru untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia (Bruyat & Julien's, 2001). Pendidikan kewirausahaan diharapkan juga akan memberikan pengalaman belajar dalam bidang kewirausahaan, sehingga para peserta didik akan mendapatkan mengembangkan nilai-nilai, sikap, dan karakter kewirausahaan; seperti kesungguhan dalam beraktifitas, pantang menyerah dalam mewujudkan idea tau rencana kegiatan yang sudah ditetapkan, bagaimana mengembangkan ide-ide kreatif, dan bagaimana bekerja sama dan meyakinkan orang lain.

d. Production based learning

Dengan model pendidikan kewirausahaan melalui kegiatan penciptaan produk, menawarkan nilai atau cara kerja baru kepada pihak lain; maka para siswa akan dapat membangun pemahaman dan mendapatkan pengalaman secara mandiri tentang apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Kesuksesan pendidikan kewirausahaan, menurut model pembalajaran melalui kegiatan penciptaan produk, nilai dan cara kerja baru antara lain akan dilihat dari seberapa banyak pengalaman berwirausaha dan bagaimana para siswa dapat membangun pemahaman tentang kewirausahaan yang diperoleh melalui kegiatan belajar-berusaha.

Pendidikan kewirausahaan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan dan menawarkan nilai-nilai atau cara kerja baru yang sudah

dikreasikan kepada warga masyarakat sangat berperan penting dalam membangun dan memperkuat kompetensi kewirausahaan; terlepas apakah nilai-nilai dan cara kerja baru yang ditawarkan itu diterima masyarakat atau tidak. Model pembelajaran kewirausahaan seperti inilah yang oleh Lackeus (2013) disebut dengan istilah belajar dengan menciptakan nilai-nilai dan cara kerja baru (*learning by creating value*). Pendekatan inilah yang oleh Lackeus (2015) disebut dengan model pembelajaran kewirausahaan melalui kegiatan usaha.

Karya-karya yang dihasilkan para pewirausaha, seperti produk-produk baru dalam bidang teknologi informasi tentu akan lebih mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam era sekarang kita bisa melihat bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara mudah, murah, dan cepat. Kita bisa melihat bagaimana seseorang dengan cepat dapat memesan barang dan jasa berbasis peralatan teknologi informasi, tanpa harus membuang banyak biaya, tenaga, dan waktu. Kita juga bisa melihat bagaimana seseorang memasak makanan hanya dengan cukup sekali tekan tombol listrik yang ada peralatan memasak, dan dalam waktu singkat langsung dapat dinikmati. Penggalangan dana untuk kegiatan sosial kini juga tidak harus melibatkan kehadiran orang pada suatu tempat yang luas, tetapi bisa dilakukan oleh orang-orang kreatif yang mampu mengoptimalkan peralatan teknologi informasi berbasis internet. Ini adalah contoh nilai-nilai baru yang dikembangkan oleh orang-orang yang memiliki spirit kewirausahaan.

Dalam kontek pendidikan di Indonesia, mengacu pada besarnya angka pengangguran lulusan SMK di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, maka patut diduga bahwa hal ini dipicu oleh kurang aktifnya siswa dalam mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dan kurang selarasnya antara apa yang dipelajari siswa di sekolah dengan berbagai tuntutan dan spesifikasi kecakapan dan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Hal lain yang juga patut diduga adalah berkaitan dengan aktifitas pembelajaran yang terlalu padat dengan kajian teoritik di dalam kelas, dan kurang melibatkan siswa dengan pembelajaran berbasis kerja. Untuk itu perlu ada penguatan kepada sekolah kejuruan untuk memperkuat hubungan kemitraan dengan dunia kerja dalam upaya mendukung kegiatan pembelajaran berbasis kerja. Dalam kaitan inilah maka perlu ada penguatan kepada sekolah untuk menerapkan kegiatan pembelajaran berbasis kerja.

Pembelajaran berbasis kerja (*work based learning*, WBL) merupakan pendekatan pembalajaran yang dapat digunakan sebagai strategi untuk memperkuat kesiapan bekerja siswa. Dalam kegiatan pembelajaran WBL, para siswa diberikan kesempatan untuk menerapkan dalam aktivitas dunia nyata apa yang sudah dipelajari di sekolah, melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas kerja, dan mengajarkan para siswa berbagai kecakapan kerja. Penerapan WBL akan mendorong para siswa terlibat dalam pembelajaran melalui kegiatan dalam kehidupan nyata sebagaimana layaknya di tempat kerja, memperkuat ketahanan pribadi yang dikembangkan melalui kegiatan belajar dan bekerja secara mandiri,

membiasakan mereka untuk bekerja sama dengan orang lain guna memecahkan masalah dan menentukan solusi pemecahan masalah yang paling efektif. WBL juga dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan para siswa dalam menerapkan pengetahuan ke dalam berbagai aktivitas teknis di tempat kerja, dan hal ini diyakini akan dapat meningkatkan kepercayaan diri para siswa dan memotivasi mereka untuk terus belajar. (Brown, 2003).

Kajian lain yang dilakukan oleh Halpern (2006) menjelaskan bahwa WBl dapat memperkuat kesiapan bekerja, memperkuat pengetahuan dan meningkatkan kecakapan kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, serta dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran (Hughes, et al., 2001). Para siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis kegiatan usaha merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat kesiapan bekerja, karena para siswa akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai pengetahuan, teknologi dan kecakapan terbaru serta berbagai budaya kerja yang berkembang dalam dunia kerja (Stern, et al., 1998). Berbagai kajian juga mengungkapkan bahwa penerapan WBL akan meningaktkan prestasi belajar dan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran (Linnehan, 2001).

Salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh para lulusan ketika memasuki dunia kerja adalah berkaitan dengan minimnya pengalaman kerja. Penerapan WBL diharapkan akan memberikan pengalaman kerja kepada para siswa. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Stasz & Kagonoff

(1997) yang mengungkapkan bahwa para siswa yang mengikuti WBL merasa mendapatkan pengalaman kerja yang dinilai siswa sangat bermanfaat ketika suatu saat mereka akan memasuki dunia kerja. Melalui WBL para siswa akan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan dunia kerja. Para siswa akan belajar mengembangkan sikap tanggung jawab, membiasakan diri untuk bekerja keras, belajar untuk memenuhi target kerja, dan dapat membiasakan untuk menjadi orang yang gigih. Kajian yang dilakukan oleh Kenny, et al (2010) mengungkapkan bahwa penerapan WBL akan memperkuat siswa untuk terus belajar lebih intensif, meningkatkan kualitas pemahaman dan motivasi belajar, memperluas wawasan tentang karir dan kerja, dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja. Pada akhirnya, Stasz & Kagonoff (1997) menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang penerapan WBL akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempelajari berbagai kecakapan kerja dan sikap kerja yang relevan dengan tuntutan dunia kerja.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan WBL, maka perlu ada kerja sama yang kuat antara sekolah dengan dunia kerja. Kerja sama antara sekolah dengan dunia kerja akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi sekolah, kerja sama yang kuat dengan dunia kerja akan memberikan keuntungan berupa alih pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, dan sikap kerja mutakhir yang disampaikan oleh para instruktur atau supervisor. Bagi dunia kerja, peerapan WBL akan memberikan keuntungan berupa tersedianya calon pekerja yang yang terampil dan siap bekerja. Dunia

kerja tidak perlu mengeluarkan biaya pelatihan yang besar untuk merekrut para pekerja baru (Taylor & Watt-Malcolm, 2007).

B. Pentingnya Penerapan WBL Pada Sekolah Kejuruan

WBL adalah salah satu pendekatan pembelajaran aktif (*active learning*) untuk menjembatani adanya kesenjangan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan dunia kerja. Penerapan WBL akan memungkinkan para siswa mendapatkan berbagai kecakapan yang sulit diperoleh hanya melalui pembelajaran tatap muka di kelas yang menekankan pendekatan teoritik. Dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang berubah sangat cepat, pembelajaran berbasis WBL menjadi fokus kajian dan pembahasan dari berbagai negara di dunia. WBL dinilai sebagai setrategi pembelajaran yang efektif untuk mempersiapkan lulusan agar siap untuk bekerja dan mengembangkan karir (Alfeld, et al, 2013).

Sebagai sebuah aktivitas pendidikan, pendekatan pembelajaran berbasis WBL memberikan dampak positip terkait dengan capaian pembelajaran, meliputi:

- Keterlibatan yang mendalam dalam WBL akan memungkinkan para siswa untuk bisa lebih berprestasi secara akademik, lebih memahami hal-hal teknis dan akan mengasah kemampuan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking*).
- Keterlibatan dalam pembelajaran WBL akan membuka wawasan para siswa tentang dunia kerja dan berbagai persoalan yang berkembang di

masyarakat, dan hal ini akan berdampak positip pada kematangan pribadi, mengasah kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan sosial, dan memperkuat perkembangan karir pada masa depan.

Kegiatan pembelajaran WBL diawali dengan membangun pemahaman dan kesadaran yang mendalam dari para siswa tentang dunia usaha dan industri serta berbagai pilihan karir kerja yang ada di dalamnya. Pemahaman dan kesadaran tentang hal tersebut dapat digunakan para siswa untuk mengembangkan pilihan karir kerja sesuai dengan minat, mengidentifikasi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang harus didalami dan dikuasi setelah mereka lulus. Selain itu, para melalui WBL para siswa diharapkan dapat mengembangkan berbagai kecakapan yang bersifat teknis dan praktis, mengembangkan berbagai kecakapan yang dibutuhkan dalam era yang baru, dan mengembangkan berbagai kecakapan sosial dan kecakapan *soft skills* yang dibutuhkan kelak setelah mereka bekerja.

Untuk menciptakan efektifitas pelaksanaan kegiatan WBL, maka mutlak diperlukan adanya kerja sama dan kesepahaman antara sekolah (terutama pimpinan sekolah dan para guru), orang tua, masyarakat, para pemilik usaha industri; dan tentu saja para siswa itu sendiri. Kerja sama yang kokoh antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industry, dengan dukungan dari para orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah diharapkan akan memberikan bekal pengalaman kerja, kecakapan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dengan demikian pembelajaran WBL diharapkan dapat menjadi

arena pembelajaran yang mampu mengemban mandat untuk membekali para siswa dengan berbagai pengetahuan teoritik dan pengalaman praktis. Dalam pembelajaran WBL itulah kelak akan dapat ditemukan calon tenaga kerja yang terampil sebagaimana yang menjadi tuntutan dunia kerja.

C. Berbagai Manfaat Penerapan WBL Bagi Siswa, Dunia Usaha dan Industri, Sekolah, dan Masyarakat

Pembelajaran WBL yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh memberikan kemanfaatan yang sangat besar yang dapat dinikmati oleh berbagai pihak, baik bagi siswa, sekolah, dunia usaha dan industri, dan pemerintah (Tennessee Department of Education WBL Policy Guide, 2017), sebagai berikut:

a. *Manfaat Penerapan Pembelajaran WBL Bagi Siswa*

Para siswa yang terlibat dengan sungguh-sungguh dalam pembelajaran berbasis kerja akan mendapatkan kemanfaatan:

- Dapat mengembangkan karir sejak dini, dan mewujudkan cita-cita untuk berkarir dalam bidang yang diinginkan; sebagaimana yang menjadi tujuan awal saat mereka menempuh pendidikan.
- Memungkinkan para siswa untuk lebih bisa memahami keterkaitan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan jenjang pendidikan berikutnya, termasuk dalam rangka untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya.
- Membelajarkan para siswa untuk berperilaku sebagaimana layaknya para profesional yang sudah matang dan memenuhi harapan dari para penyedia

kerja ketika para siswa mampu menunjukkan perilaku kerja yang baik.

- Mengembangkan kecakapan kepemimpinan dan sikap tanggung jawab.
- Membelajarkan para siswa untuk bekerja dalam tim kerja yang kuat guna memecahkan masalah dengan cara-cara yang kreatif.
- Memungkinkan para siswa untuk membangun jejaring sosial yang akan mendukung kegiatan belajarnya dan memperluas kesempatan mereka untuk meraih berbagai peluang usaha dan kerja.
- Memanfaatkan berbagai peluang untuk meraih kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi yang dapat berguna baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

b. Manfaat Penerapan Pembelajaran WBL Bagi Sekolah

Pembelajaran berbasis WBL yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dapat memberikan kemanfaatan positip bagi sekolah:

- Menggunakan teknik pengembangan karir sebagaimana yang digunakan dalam dunia usaha dan industri.
- Mengembangkan kerja sama secara berkelanjutan dengan dunia usaha dan industry.
- Mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap berbagai kecenderungan dan kecakapan yang diharapkan oleh dunia usaha dan industri.
- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua siswa untuk terlibat dalam pembelajaran berbasis WBL.

- Mengembangkan pengelaman belajar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kesadaran tentang karir kerja, mengidentifikasi berbagai pilihan karir kerja, dan penyiapan untuk memasuki dunia kerja.
- Memperkuat kecakapan dan ketrampilan para siswa sebagaimana yang diminta oleh dunia kerja.

c. *Manfaat Penerapan Pembelajaran WBL Bagi Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha*

Pembelajaran berbasis WBL yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dapat memberikan kemanfaatan positip bagi para pelaku usaha industri dan masyarakat luas:

- WBL dapat digunakan oleh dunia usaha dan industry sebagai saluran penerapan pengetahuan dan menemukan calon-calon pekerja yang ber-dedikasi.
- Keterlibatan dunia usaha dan industri dalam WBL dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan kesadaran masyarakat tentang eksistensi perusahaan.
- WBL dapat digunakan sebagai ajang pencarian calon pekerja yang potensial serta memperkuat peran dunia usaha dan industri dalam kehidupan masyarakat luas.
- WBL dapat digunakan dunia usaha dan industri untuk menunjukkan peran positipnya bagi masyarakat, serta memperkuat pengalaman belajar bagi para siswa.
- Keterlibatan dunia usaha dan industri dalam WBL dapat membuka peluang kerja bagi para siswa sesaat setelah mereka selesai menempuh studi.

d. *Manfaat Penerapan Pembelajaran WBL Bagi Negara*

Pembelajaran berbasis WBL yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dapat memberikan kemanfaatan positif bagi negara:

- Negara dapat melibatkan dunia usaha dan industri untuk terus terlibat dalam mempersiapkan calon pekerja yang berkualitas
- Tersedianya angkatan kerja yang berkualitas yang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara.

Bila mengacu pada *Tennessee Department of Education WBL Policy Guide* (2017), maka rangkaian dan ancangan pembelajaran WBL dapat digambarkan sebagai berikut:

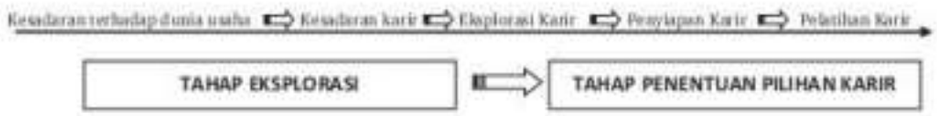

Gambar 9.1 Rangkaian dan Ancangan Tujuan Pembelajaran WBL

Kegiatan pembelajaran berbasis WBL yang ditujukan untuk membangun kesadaran terhadap dunia usaha dan kesadaran terhadap karir dapat berbentuk kegiatan mendatangkan pembicara tamu dari kalangan dunia usaha dan industri untuk menyampaikan materi tentang dunia kerja dan karir kerja. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga dapat berbentuk kunjungan lapangan ke tempat kerja dan pameran kerja atau bursa kerja. Kegiatan pembelajaran berbasis WBL yang ditujukan untuk tujuan eksplorasi karir kerja dapat berbentuk mentoring yang akan mengenalkan

berbagai hal yang berkaitan dengan dunia kerja yang menjadi minat para siswa, pencarian informasi tentang karir kerja, dan *job shadowing*, dimana para siswa selama satu atau dua hari mendampingi para professional untuk melihat langsung tentang aktifitas kerja yang dijalankan para professional. Sedangkan kegiatan pembelajaran berbasis WBL yang ditujukan untuk tujuan penyiapan karir dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dan penempatan kerja.

Berbagai pengalaman yang didapatkan para siswa dari kegiatan pembelajaran berbasis WBL dikatakan baik apabila memenuhi kreteria sebagai berikut:

- Kegiatan pembelajaran berorientasi pada tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang dapat digunakan para siswa untuk persiapan belajar pada jenjang berikutnya atau persiapan memasuki bursa kerja.
- Pengalaman belajar relevan dengan apa yang menjadi minat para siswa dan berbagai tujuan pembelaran pada umumnya.
- Pengalaman belajar berkaitan dengan kurikulum atau kegiatan pembelajaran di sekolah.
- Pengalaman belajar yang didapatkan memungkinkan para siswa untuk memahami berbagai pilihan karir.
- Pengalaman belajar yang didapatkan dapat memperkuat kecakapan kerja dan memungkinkan para siswa membangun jejaring dengan para professional.
- Memungkinkan para siswa untuk terus menjalin interaksi dengan para professional dimana

mereka pernah terlibat bersama dalam kegiatan pembelajaran berbasis WBL.

- Ada kegiatan pengawasan yang ketat baik dari para guru maupun dari pelaku usaha industri.
- Adanya kesempatan dari para siswa, guru, sekolah, dan dunia usaha untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan WBL yang sudah dijalankan.
- Penilaian kegiatan belajar diselaraskan dengan apa yang menjadi harapan dunia usaha dan industri.
- Pengalaman belajar yang didapatkan para siswa selaras dengan jenjang pendidikan berikutnya dan tuntutan dunia kerja.
- Dokumentasi kegiatan belajar harus berbasis portofolio.

Kesuksesan pelaksanaan WBL dapat diukur dari terbukanya berbagai peluang yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, berbagai pengalaman kerja yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan dunia kerja, dan dunia kerja akan terus menyampaikan spesifikasi kecakapan dan keahlian terbaru sesuai dengan kegiatan belajar, pengalaman belajar yang diharapkan dimiliki para siswa, dan capaian belajar yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan WBL sangat ditentukan oleh semua *stakeholder*. Para pihak yang memegang peran penting bagi kesuksesan pelaksanaan pembelajaran berbasis WBL, yaitu: para siswa, orang tua, sekolah, dinas pendidikan terkait, lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan, dan dunia usaha dan industri.

Para siswa merupakan agen utama dalam pembelajaran berbasis WBL. Mereka bukan sekedar sebagai pihak yang harus belajar dan menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan mendapatkan pengalaman yang ditetapkan, tetapi pada saat yang sama mereka harus bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencari dan menemukan peluang untuk mendapatkan pengalaman belajar lainnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran berbasis WBL; para siswa harus benar-benar aktif terlibat dalam kegiatan, mampu mengevaluasi diri tentang aktifitas belajarnya, mengembangkan aktifitas belajar sebagaimana yang direncanakan, menyusun ulang kegiatan belajar sesuai dengan pengalaman baru yang didapatkan, dan mampu memanfaatkan berbagai pengalaman yang didapatkan tersebut untuk memperkuat pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana yang ditetapkan.

Para orang tua diharapkan memberikan dukungan penuh kepada para siswa, terutama dari sisi pemberian dukungan finansial, dukungan semangat dan keyakinan tentang pentingnya keterlibatan siswa dalam WBL. Pihak sekolah berperan untuk menyiapkan para siswa, menginditifikasi tujuan pembelajaran, dan bersama-sama dengan dunia usaha dan industri membahas tentang pengalaman belajar yang harus dikuasai siswa. Dinas pendidikan terkiat berperan untuk mendukung terlaksanakannya pembelajaran WBL dengan ikut mendorong dan memperkuat keterlibatan dunia usaha dan industri. Dinas pendidikan dapat mensuport kebijakan yang memungkinkan pembelajaran WBL berjalan dengan baik. Berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan juga dapat terlibat dengan menjembatani sekolah dengan dunia usaha dan

industri agar dapat membangun sinergi yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya pembalajaran WBL. Dunia usaha dan industri merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar, pengetahuan dan kecakapan terbaru kepada para siswa. Dunia usaha dan industri dapat memberikan informasi dan menjadi tempat para guru mengasah ketrampilan praktis yang dapat digunakan untuk memperkuat pembelajaran di sekolah.

Stasz & Stern (1998) telah mengkaji berbagai dimensi utama dari pelaksanaan WBL, yang dapat dilihat dari: (a) lokasi, apakah di dalam lingkungan sekolah atau di luar sekolah, (b) pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan supervisi, apakah dilaksanakan oleh para guru atau oleh para pekerja professional, (c) waktu kegiatan, apakah dilaksanakan pada jam sekolah atau di luar jam sekolah, (d) kompensasi, apakah para siswa yang terlibat dalam WBL diberikan kompensasi upah kerja atau kompensasi berupa konversi hasil penilaian kegiatan pelajaran, dan (e) tingkat partisipasi, apakah kegiatan WBL dilaksanakan oleh para siswa secara individual atau dengan kelompok.

WBL dimaksudkan untuk memperkuat pengalaman siswa sekolah menengah untuk memasuki pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan karir. Mengingat pentingnya penerapan WBL, maka di negara tertentu secara spesifik telah diklasifikasikan penerapan WBL sesuai dengan jenjang kelas, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9.1 Kontinum Pelaksanaan WBL

Pengenalan karir: Untuk Siswa kelas 4 – 9	**Penyiapan karir: Untuk Siswa kelas 9 - 11**	**Pelatihan sesuai karir kerja yang diminati: Kelas 11 - 12**
Pembicara tamu dari dunia usaha dan industry	Pengembangan kegiatan usaha atau unit produksi di sekolah	Klinik kegiatan usaha, sharing pengalaman kerja
Pameran karir, kerja	*Job shadowing*	*Pre- apprenticheship*
Kunjungan ke dunia usaha dan industry	Simulasi kegiatan usaha	Pengalaman kerja dan karir
Inventarisasi minat karir	Berbagai pengalaman kerja	Mengikuti pelatihan

Sumber: *Nevada Department of Education Work Based-Learning Guide* (2018)

Penerapan WBL akan berjalan lebih efektif jika memperhatikan jenjang kelas atau pendidikan siswa. Di Amerika, pengenalan dunia kerja perlu diberikan kepada siswa sejak dini. Pengenalan karir diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasarkelas 4, dan berlanjut hingga kelas 9 (jenjang SMP) (*Nevada Department of Education Work Based-Learning Guide*, 2018). Di Indonesia, ada sebagian kecil dari sekolah yang sejak awal mengajak para siswanya untuk melakukan kunjungan ke dunia usaha atau industri. Hal ini tampaknya terkait dengan pandangan umum yang menyatakan bahwa anak-anak usaia sekolah tugasnya adalah belajar di sekolah, sehingga pengenalan dunia kerja dianggap belum waktunya untuk diberikan kepada para siswa jenjang pendidikan dasar. Padahal pengenalan dunia kerja sejak dini akan dapat membentuk pandangan yang kuat dari para siswa tentang berbagai jenis profesi pekerjaan

tertentu sesuai dengan minat siswa. Oleh karena itu, dalam jangka panjang kegiatan seperti ini akan dapat memperkuat kesiapan bekerja dari para siswa kelak setelah ia lulus dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mengenalkan dunia kerja sejak dini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas dengan mendatangkan pembicara tamu dari dunia usaha dan industri, mengikuti kegiatan pameran karir kerja, mengajak para siswa untuk menginventarisir pilihan karir, dan kegiatan kunjungan ke dunia usaha atau industri untuk mengenal berbagai macam karir kerja dan mengenal lingkungan tempat kerja. Berbagai kegiatan ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk membangun kesadaran sejak dini tentang dunia kerja.

Penyiapan karir dapat diberikan kepada siswa jenjang pendidikan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan lebih banyak memberikan pengalaman nyata kepada para siswa dalam bidang pekerjaan tertentu melalui kegiatan mendeteksi karir atau pekerjaan yang diminati, melibatkan para siswa dalam kegiatan praktek kerja pada usaha unit produksi di sekolah yang didesain sebagaimana layaknya kegiatan yang ada pada dunia kerja dan industri. Para siswa juga dapat melihat dan mengikuti kegiatan para professional atau pekerja (*job shadowing*) untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai aktifitas yang dilakukan oleh para professional di tempat kerja, simulasi kegiatan usaha, dan berbagi pengalaman kerja. Pada kegiatan ini para siswa akan diberikan kesempatan untuk mempraktekkan berbagai kecakapan kerja dan kecakapan yang bersifat teknis melalui kegiatan berbasis kerja.

Pelatihan kerja diperuntukkan bagi para siswa sekolah menengah tingkat akhir untuk menerapkan berbagai

kecakapan kerja dan kecakapan teknis dalam pembelajaran berbasis praktek kerja melalui kegiatan magang atau program pengalaman lapangan, klinik pengalaman, penguatan pengalaman kerja, dan berbagai kegiatan sejenisnya sesuai dengan yang menjadi minat siswa. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan lebih banyak di tempat kegiatan usaha, baik yang ada di dunia industri maupun kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekolah.

Pameran kerja merupakan sutau even dimana para penyedia kerja (pemilik usaha, perusahaan, dan berbagai instansi pengguna tenaga kerja), asosiasi ketenagakerjaan, dan berbagai lembaga pemerintah dan swasta yang bergerak di bidang ketenagakerjaan mengadakan kegiatan pameran ketenagakerjaan. Melalui kegiatan pameran ketenagakerjaan yang digelar di sekolah atau ditempat lain yang mudah dijangkau oleh para siswa akan diperoleh informasi tentang berbagai jenis pekerjaan lengkap dengan spesifikasi pengetahuan, kecakapan, dan keahlian yang dibutuhkan. Para siswa juga dapat memperoleh informasi tentang prospek jenjang karir dan berbagai imbalan kesejahteraan dari masing-masing jenis pekerjaan. Dengan demikian melalui kegiatan pameran ketenagakerjaan ini, para siswa dapat mempersiapkan diri untuk berkarir pada bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan minat, pengetahuan, kecakapan, dan keahliannya. Dengan mengikuti pameran ketenagakerjaan, para siswa akan terdorong untuk mendalami pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan tertentu. Dengan kata lain, pameran ketenagakerjaan juga berperan penting untuk memperkuat kesiapan bekerja dan berusaha dari para siswa. *Nevada Department of Education Work Based-Learning Guide* (2018) menyatakan bahwa pameran pendidikan merupakan

kegiatan yang tepat untuk siswa sekolah menengah pertama dan siswa sekolah menengah atas.

Sekolah juga dapat menginventarisir minat para siswa terhadap profesi atau jenis pekerjaan tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk menanyakan tentang berbagai kecakapan dan keahlian yang dimiliki dan menanyakan kepada para siswa tentang jenis pekerjaan yang diminati. Kegiatan ini lazim dilaksanakan oleh unit bimbingan karir yang seharusnya ada di setiap sekolah. Berbagai data tentang pengetahuan, kecakapan, keahlian, dan minat kemudian didiskusikan bersama antara para siswa bersama dengan guru BK atau konselor untuk menentukan jenjang pendidikan dan kegiatan pelatihan apa yang harus diikuti untuk bisa bekerja pada bidang pekerjaan sebagaimana yang diminatinya.

Sekolah juga dapat mengundang pembicara tamu dari dunia usaha dan industri untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan aktifitas yang dijalankannya. Hal ini dapat membuka pemahaman para siswa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan aktifitas kerja atau bagiamana menjalankan kegiatan usaha. Para guru dapat mengaitkan kegiatan ini dengan tema pelajaran tertentu. Untuk itu, guru dapat membuat kisi-kisi atau poin-poin penting yang dapat ditanyakan para siswa kepada pembicara tamu agar kehadirannya bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kapada para siswa.

Kegiatan kunjungan ke dunia usaha dan industri juga dianggap berkontribusi untuk memperkuat pemahaman para siswa tentang dunia kerja, dunia usaha dan industri. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengajak siswa untuk mengunjungi perusahaan tertentu yang dipilih. Para siswa

akan belajar bagaimana berbagai aktivitas yang dijalankan perusahaan dan bagaimana menjalankan kegiatan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang lebih luas. Untuk itu harus dibuat kesepakatan antara sekolah dengan perusahaan yang akan dikunjungi, agar kegiatan kunjungan dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang kegiatan usaha bisnis kepada para siswa. Kegiatan ini dianggap cocok untuk semua jenjang kelas, tetapi dianggap paling efektif untuk dilaksanakan oleh siswa sekolah menengah.

D. Model Pembelajaran WBL

Alfeld, et al. (2013) WBL mengajukan beberapa model WBL yang meliputi: (a) *internship/co-op education* atau program magang, (b) *apprenticeships* atau pelatihan, dan (c) *school-based enterprises* atau kegiatan unit usaha produksi yang dilaksanakan oleh sekolah.

a. Internship/co-op education atau program magang

Internship atau magang merupakan kelanjutan dari pembelajaran berbasis kerja yang dirancang untuk memberikan bekal pengalaman, memperkaya kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas, dan dimaksudkan untuk menunjukkan kepada para siswa bagaimana penerapan dari apa yang sudah dipelajari di dalam kelas, bagaimana menggunakan berbagai peralatan, berbagai perlengkapan kerja, dan kahlian yang seringkali tidak diajarkan dan ditemukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

Internship lebih ditujukan untuk memperkuat pengalaman kerja, dan kegiatan ini bisanya hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dalam waktu beberapa minggu

atau beberapa bulan saja. Dengan mengikuti *internship,* para siswa diharapkan akan mendapatkan pengalaman kerja dari sektor dunia usaha, industry, atau institusi tertentu. Melalui kegiatan *internship* para siswa diharapkan mulai mengenal tentang karir dan berbagai hal yang berkaitan dengan dunia kerja. *Internship* lebih menekankan aspek edukatif yang menanamkan nilai-nilai kerja seperti komitmen dengan tugas, tanggung jawab, disiplin diri, melatih sikap hormat kepada pelanggan, kemampuan berkomunikasi, dan memperkuat kemampuan untuk bekerja sama.

Kerja sama antara sekolah dengan dunia industri (*co-operative education* atau popular disebut "*co-op*") pada dasarnya sama dengan kegiatan magang. Pada kegiatan *co-op*, para siswa akan ditempatkan dalam dunia usaha dan industri yang sudah menjalin kerja sama dengan sekolah selama periode tertentu, biasanya dalam satu semester. Kegiatan dalam program *co-op* merupakan bagian dari kurikulum pendidikan, sehingga intensitas keterlibatan dalam kegiatan dan keberhasilan para siswa untuk memperoleh pengalaman dan ketrampilan kerja akan dinilai oleh pihak dunia usaha dan industry bersama-sama dengan sekolah. Dengan demikian program *co-op* pada prinsipnya sama dengan program magang kerja (Stern, et al, 1995).

b. *Apprenticeships* atau pelatihan

Apprenticeships berasal dari bahasa Perancis: *apprehender* yang artinya menangkap atau memahami isi pengetahuan yang dilakukan dengan menerapkan pengetahuan. Dalam istilah di Jepang, *Apprenticeships* popular disebut sebagai *minarai kyooiku* untuk menggabarkan aktifitas belajar melalui kegiatan pengamatan (Billet, 2019).

Keterlibatan seseorang dalam kegiatan pelatihan, yang merupakan salah satu model WBL; diposisikan sebagaimana layaknya pekerja (Stern et al, 1998). *Apprenticeships* merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada kegiatan pelatihan yang memfokuskan kegiatan belajar sambil bertindak (*learning by doing*). Kegiatan pelatihan lazimnya akan dibimbing oleh para professional yang berpengalaman dan mengharuskan para siswa untuk melakukan tugas kerja dalam bidang pekerjaan tertentu (Lerman, et al, 2009). Target utama dari kegiatan pelatihan adalah untuk menyiapkan para siswa agar memiliki kesiapan bekerja dalam bidang tertentu dengan tingkat kompetensi kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

Apprenticeship juga disebut sebagai program pelatihan bagi para pekerja yang telah memahami tentang karir yang diinginkannya. Para pekerja kemudian bersepakat untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan. Perusahaan kemudian memberikan pelatihan kepada pekerja agar menguasai kecakapan dan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kontrak kegiatan pelatihan biasanya berlangsung minimal 1 tahun. Jika perusahaan menilai para pekerja yang mengikuti pelatihan memenuhi persyaratan kecakapan yang ditetapkan maka ia akan otomatis direkrut sebagai pekerja di perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, kegiatan *apprenticeship* atau pelatihan benar-benar akan menghadapkan para siswa dengan berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, situasi, dan kondisi nyata sebagaimana yang terjadi dalam dunia usaha dan industri. Program kegiatan

mensyaratkan keterlibatan peserta pelatihan yang mendalam, karena ia harus fokus pada penguasaan bidang ketrampilan tertentu. Dengan demikian kegiatan ini hanya akan efektif diikuti oleh para siswa yang sudah menyelesaikan studi dari sekolah. Di berbagai negara maju, kegiatan pelatihan juga lazim diikuti oleh mereka yang sudah menyelesaikan studi dari sekolah. Mereka yang terlibat dalam kegiatan pelatihan rata-rata berusia antara 27-29 tahun (Lewis & Stone, 2011).

c. *School-based enterprises* atau pembelajaran pada unit usaha produksi di sekolah

School based enterprises atau kegiatan pembelajaran berbasis kegiatan unit usaha produksi di sekolah dapat berbentuk kegiatan belajar siswa pada kegiatan usaha bisnis atau unit produksi, seperti pertokoan, koperasi, atau kantin yang berada di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran ini, yang menjadi pendamping atau penasehat adalah para guru. Kegiatan pembelajaran berbasis usaha pada unit produksi dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa bagaimana mengaitkan antara materi pelajaran dengan berbagai kegiatan dalam dunia kerja.

Dalam pembelajaran berbasis kegiatan usaha produksi, para siswa akan belajar menjalankan kegiatan usaha bisnis melalui kegiatan menjual produk atau melayani kegiatan pemesanan produk oleh para pelanggan, baik pelanggan dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran ini para siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang

sudah diperoleh dengan menjalankan kegiatan usaha bisnis, menjual produk atau jasa. Kegiatan ini lazimnya dilaksanakan di unit usaha produksi yang ada di sekolah.

Para siswa juga dapat menjalankan kegiatan usaha bisnis yang dirancang sendiri sesuai dengan bidang usaha yang diminatinya, tetapi pelakanaannya tetap di bawah pengawasan dan bimbingan para guru. Hal ini dapat dikembangkan oleh para guru dalam bentuk kegiatan simulasi kerja. Kelas atau lingkungan sekolah dapat dirancang dan diubah sebagaimana lingkungan atau suasana bisnis dalam arti yang sesungguhnya. Pada tempat ini para siswa mengembangkan dan menerapkan berbagai kecakapan yang bersifat teknis dan kecakapan professional. Pihak sekolah kemudian mengundang para profesional dari dunia usaha dan industri untuk mengamati aktivitas yang dijalankan para siswa dan melakukan evaluasi untuk menentukan aktifitas siswa yang harus dikembangkan lebih lanjut. Program kegiatan usaha yang dikembangkan oleh para siswa dinilai oleh para profesional dengan menggunakan standar sebagaimana yang berlaku dalam kegiatan usaha dalam arti yang sebenarnya. Untuk menerapkan model pembelajaran ini diperlukan budaya wirausaha yang kuat dan dukungan penuh dari para guru, sekolah, perwakilan dunia industri, para orang tua, serta para siswa di sekolah secara keseluruhan.

Melalui kegiatan pembelajaran pada unit usaha produksi di sekolah, para siswa akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam aktifitas nyata, seperti kegiatan praktek kewirausahaan, aplikasi ilmu akuntansi, penganggaran,

manajemen keuangan, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengelolaan usaha bisnis pada umumnya. Melalui kegiatan pembelajaran ini, para siswa juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di tempat praktek, bagaimana menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, bagaimana memperkuat hubungan interpersonal, dan belajar untuk memperkuat berbagai kecakapan kerja pada umumnya.

Kajian yang dilakukan oleh Guy, et al. (2008) menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran berbasis usaha produksi di sekolah berkontribusi dalam memperkuat kesiapan bekerja sebesar 20%. Dalam prakteknya, kegiatan pembelajaran berbasis usaha produksi juga bisa berbentuk kegiatan usaha kecil-kecilan yang dilaksanakan oleh para siswa melalui kegiatan praktek menjual produk. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kecakapan bekerja sama (*team work*), membiasakan para siswa untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana yang ada dalam dunia kerja, dan membiasakan para siswa untuk mengatasi masalah (*problem solving*) (Stasz, et al, 1992).

E. Teaching Factory (TF)

TF merupakan pendekatan pembelajaran yang semakin popular seiring dengan adanya program revitalisasi SMK. Dorongan kepada SMK untuk mengimplementasikan TF semakin kencang mengingat masih besarnya angka pengangguran berlatar belakang lulusan SMK. TF merupakan konsep pembelajaran berbasis industri yang menghasilkan barang atau jasa melalui sinergi antara sekolah dan industri

sebagai patner untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Dengan demikian dalam pelaksanaan pembelajaran TF bisa saja akan dihasilkan keuntungan bagi sekolah, guru, atau siswa, dan mengaktifkan kegiatan ekonomi di tingkat lokal (Damarjati,2017). TF adalah konsep pembelajaran yang berbasis kegiatan produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku dalam industri, dan kegiatannya dilaksanakan dalam suasana yang terjadi dalam industri. Konsep TF merupakan bentuk pengembangan sekolah kejuruan menjadi model sekolah produksi (Siswanto, 2015).

Menurut Triatmoko (2009), munculnya model pembelajaran berbasis TF disebabkan karena sekolah menengah kejuruan mengalami kesulitan untuk menerapkan kegiatan pendidikan berbasis produksi (*production based education and training*). Untuk mengatasi kesulitan melaksanakan kegiatan pendidikan berbasis produksi, maka kemudian sekolah menengah kejuruan mendirikan unit produksi dan bisnis center sebagai tempat pembelajaran para siswa untuk melaksanakan praktik produksi barang dan jasa yang memiliki nilai jual.

Di negara-negara maju, sinergi antara dunia industri dengan sekolah kejuruan sudah berjalan dengan sangat baik. Sekolah kejuruan di Jerman, misalnya; pembelajaran teori dilaksanakan di sekolah selama dua hari per minggu, sedangkan kegiatan praktek dilaksanakan di industri (Moerwismadhi,2009). Dengan melaksanakan TF diharapkan dapat mengatasi adanya kesenjangan kompetensi, antara kompetensi yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri dengan kompetensi yang dikembangkan oleh sekolah. Dengan demikian dalam melaksanakan kegiatan

TF pihak sekolah harus melibatkan pihak dunia usaha dan dunia industri untuk ikut terlibat melakukan evaluasi capaian kompetensi dari para siswa.

Dengan melibatkan pihak dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran, maka pihak sekolah akan dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kegiatan pengelolaan kegiatan usaha. Melalui kegiatan seperti ini, maka sekolah akan lebih cepat melakukan pembaruan kurikulum, *update* kompetensi dan materi pelajaran, termasuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar selalu selaras dengan tuntutan pasar. Prinsip dasar TF adalah *factory to classroom*, yang bertujuan untuk melakukan transfer lingkungan produksi di dunia industri secara nyata ke dalam ruang praktek di sekolah. Situasi yang terjadi dalam kegiatan produksi yang nyata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pengajaran yang berbasis aktifitas nyata dari praktek industri pada setiap harinya (Khurniawan et al., 2016).

Dengan demikian TF dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar selaras dengan dunia industri. Kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis TF adalah kompetensi yang komprehensif, yang meliputi kecakapan dan keahlian (psikomotorik), sikap, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi; yang kesemuanya ini akan menghasilkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Berbagai kemampuan yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis TF ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.

Kegiatan pembelajaran berbasis TF akan memberikan kemanfaatan baik bagi sekolah maupun industri. *Bagi sekolah*, TF akan memberikan kesempatan kepada sekolah

untuk meodernisasi kegiatan pembelajarannya yang senantiasa selaras dengan perkembangan kegiatan usaha dan industri. TF memungkinkan dunia industri dapat berkontribusi untuk ikut mengembangkan sarana praktek kerja industri di sekolah, mengenalkan siswa tentang sistem kerja di industri, sehingga baik guru dan siswa memiliki pengalaman menjalankan kegiatan industri. *Bagi dunia usaha dan industri*, pelaksanaan TF akan dapat meningkatkan kinerjanya melalui ketersediaan tenaga kerja baru yang memiliki kecakapan mutakhir sebagaimana yang diharapkan oleh industri. TF juga dapat menciptakan efisiensi, karena pihak industri tidak harus mengeluarkan biaya *training* yang lazim diadakan untuk proses rekrutmen tenaga kerja baru. Melalui pembelajaran berbasis TF, sekolah dapat digunakan industri untuk melakukan simulasi pengembangan usaha.

TF juga dapat dimanfaatkan para siswa untuk berlatih menjalankan kegiatan usaha. Pembelajaran berbasis TF juga bisa dikatakan sebagai sebuah replika industri, dengan peralatan produksi yang setara dengan apa yang ada dalam industri, menerapkan standar operasional dan prosedur kerja yang sama dengan industri, sehingga produksi barang dan jasa yang dihasilkan juga sejajar dengan yang ada pada industri. Dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan antara apa yang ada dalam dunia industri dengan yang diajarkan di sekolah.

TF memadukan *competency based training* (CBT) dan *production based Education and training* (PBET). CBT merupakan pembelajaran berbasis kompetensi yang bertujuan untuk memberikan bekal ketrampilan kerja sesuai dengan tuntutan industri. Sedangkan PBET bertujuan untuk membelajarkan siswa bagaimana menghasilkan sebuah

produk yang berkualitas, layak jual dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber keuntungan oleh sekolah. Dengan demikian kegiatan pembelajaran berbasis TF dimaksudkan untuk melatih kedisiplinan siswa, memperkuat mental kerja agar mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada dalam industri, memahami sisi manajerial serta mampu menghasilkan produk yang berstandar industri (Mulyatiningsih dan Soegiyono, 2014). Tabel berikut ini menjelaskan perbedaan antara CBT, PBET dan TF.

Tabel 9.2 Perbandingan Antara CBT, PBET dan TF

Domain	CBT	PBET	TF
Hasil kegiatan praktek	Fokus pada pencapaian kompetensi	Fokus pada penciptaan produk dan jasa yang memiliki nilai kegunaan	Fokus kegiatan diarahkan pada pemenuhan standar pasar dan industri
Standar guru atau instruktur	Memiliki pengalaman standar praktek untuk mewujudkan kompetensi	Memiliki pengalaman praktek yang memadai untuk menghasilkan produk dan jasa yang bisa diterima oleh pasar	Memiliki pengalaman kerja pada industri dan menjalankan kegiatan usaha
Kualitas	Sesuai dengan standar akademik	Standar kerja fungsional	Standar kerja industri (akseptabilitas barang, efisiensi, pemasaran, dan pengelolaan usaha)

Domain	CBT	PBET	TF
Model penyampaian	Terstruktur, berbasis kompetensi, berbasis lab	Berbasis kegiatan produksi dan bersifat dinamis, sesuai dengan kencderungan pasar	Refleksi proses kegiatan produksi di dunia usaha dan industri
Budaya	Budaya akademik	Budaya produksi	Budaya perusahaan (kerja sama, orientasi pada kepuasan pelanggan, budaya mutu, orientasi pasar)

Pendekatan pembelajaran yang juga lazim diterapkan di SMK untuk mengimplementasikan TF pada dasarnya menerapkan konsep pembelajaran berbasis kerja (*work based learning*) (Ferrandez Berrueco et al, 2016). Kegiatan pembelajaran dirancang dengan menempatkan para siswa pada dunia usaha dan industri bersamaan dengan kegiatan belajar di sekolah. Para siswa akan langsung ditempatkan di dunia usaha dan industri setelah mempelajari teori di sekolah melalui kegiatan magang (*internship*) (McHug, 2017), kerja sama antara sekolah dan dunia usaha untuk penempatan kerja (*cooperative education placement*) (Howard, 2004), praktek kerja pada unit produksi (*school-based enterprise*) (Arenas, 2003) dan pembelajaran berbasis layanan (*service learning*) (Kasinath, 2013).

Magang (*internship*) adalah salah satu pendekatan pembelajaran berbasis kerja yang memberikan kesempatan

kepada para siswa untuk magang kerja di industri selama periode waktu yang ditentukan (Cooper, Bottomley & Gordon,2009; McHug, 2017). Di berbagai SMK, kegiatan ini popular disebut dengan praktek kerja industri (prakerin). Melalui kegiatan magang, para siswa diharapkan dapat menerapkan kompetensi yang sudah dipelajari di sekolah untuk dipraktikkan di dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, sekolah perlu memastikan bahwa dunia usaha yang menjadi tempat magang benar-benar mensyaratkan kompetensi sebagaimana yang sudah dipelajari dan dikuasai para siswa. Dengan demikian kegiatan magang dapat dijadikan evaluasi apakah kompetensi yang dikuasi siswa sudah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha. Dengan kata lain, para siswa yang sudah selesai mengikuti kegiatan magang seharusnya memiliki kesiapan dini untuk bekerja sesuai dengan bidang kompetensinya.

Kerja sama antara sekolah dan dunia usaha untuk penempatan kerja para siswa (*cooperative education placement*) biasanya dilakukan dengan memposisikan sekolah sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia, sedangkan industri menyediakan sumber daya dan instruktur yang diperlukan untuk kegiatan tersebut (Howard, 2004). Program ini memberikan keuntungan baik bagi pihak sekolah maupun industri. Sekolah akan mendapatkan dukungan sumber daya untuk pengembangan kompetensi siswa agar selaras dengan kebutuhan industri. Para guru juga akan mendapatkan pengetahuan dan informasi berkait dengan kompetensi yang harus diajarkan kepada para siswa. Sebaliknya, industri juga akan mendapatkan dukungan ketersediaan pekerja sesuai dengan spesifikasi kecakapan yang diinginkannya. Dengan demikian kegiatan penempatan kerja akan membuat para

siswa memiliki kesiapan dini untuk bekerja sesuai dengan bidang kompetensinya.

Praktek kerja pada unit usaha (*school-based enterprise*) dilaksanakan dalam bentuk praktek kerja pada unit produksi atau unit usaha yang ada di sekolah (Cooper, Bottomley & Gordon, 2004; Haase & Lautenschlager, 2011; Arenas, 2003). Para siswa diajarkan untuk mengorganisir kegiatan usaha yang ada di sekolah di bawah pengawasan guru, mulai dari perencanaan produk atau jasa, kegiatan produksi, penataan, promosi, penjualan, pelayanan konsumen, sampai dengan evaluasi setelah rangkaian kegiatan tersebut terlaksana. Pada beberapa SMK yang memiliki unit usaha, seperti pertokoan, bengkel produksi, perhotelan dan yang lain akan bisa memberikan pengalaman belajar kepada para siswa bagaimana mengelola kegiatan usaha, mulai dari perencanaan sampai dengan penjualan produk atau jasa. Dengan demikian keterlibatan para siswa dalam kegiatan praktik kerja pada unit usaha berperan untuk memperkuat kesiapan bekerja dan menumbuhkan minat dalam bidang kewirausahaan.

Pembelajaran berbasis layanan (*service learning*) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengorganisir kegiatan yang diarahkan untuk melayani masyarakat, ikut mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga masyarakat, baik dalam penyediaan produk maupun layanan jasa (Kasinath, 2013). Para siswa dilatih untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan kehidupan yang dialami warga masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. Berdasarkan hasil identifikasi, para siswa di bawah bimbingan guru kemudian merancang kegiatan, mengkreasikan produk atau jasa untuk ditawarkan kepada

warga masyarakat. Dengan demikian keterlibatan para siswa dalam kegiatan pembelajaran berbasis layanan berperan untuk memperkuat kesiapan bekerja dan menumbuhkan minat dalam bidang kewirausahaan.

Model TF yang dilaksanakan berbagai SMK adalah sebagai berikut: (a) Model 1: TF berbentuk lab atau bengkel yang kegiatan operasionalnya terintegrasi dengan kegiatan akademik. Para siswa melaksanakan kegiatan praktek produksi barang atau jasa di bengkel atau laboratorium, dan hasilnya langsung dijual kepada konsumen; (b) model 2: sekolah membangun pusat kegiatan industri dengan menjalin kerja sama dengan dunia industri. Lokasi pusat kegiatan industri bisa berada di dalam lingkungan sekolah atau di area industri. Pusat kegiatan industri berfungsi sebagai tempat praktek para siswa. Dalam model ini para siswa akan melaksanakan praktik pada tempat praktek dengan suasana yang setara dengan kegiatan industri yang sesungguhnya; (c) model 3: TF dilaksanakan dalam bentuk kelas kerja sama, pihak industrI memberikan fasilitas kegiatan usahanya kepada sekolah untuk dijadikan tempat praktek usaha para siswa di sekolah.

TF apabila bila dijalankan dengan optimal berpotensi untuk memperkuat kompetensi siswa, memungkinkan siswa memiliki kesiapan bekerja lebih dini, memperkuat jiwa wirausaha, menghasilkan barang dan jasa yang bisa menghasilkan keuntungan bagi sekolah, dan bisa meyakinkan dunia usaha dan idustri untuk bekerja sama dengan pihak sekolah. TF yang optimal akan bisa menjadi sumber pendapatan bagi sekolah yang dapat digunakan untuk lebih memperkuat kegiatan pembelajaran yang sudah ada.

BAB X

PENGUATAN KESIAPAN BEKERJA, KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN DAN MINAT BERWIRAUSAHA:
Suara Dari Para Lulusan SMK Rumpun Bis-Ma

Selama ini mungkin jarang didengarkan bagaimanakah persepsi para lulusan terhadap kegiatan pembelajaran di SMK. Apakah kegiatan pembelajaran yang dikembangkan di SMK dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam kegiatan pembelajaran, yang kemudian berdampak pada peningkatan kualitas kegiatan belajar mereka. Asumsi dasarnya adalah, jika para siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka hal ini akan berdampak pada hasil belajar. Hasil belajar siswa siswa SMK adalah ditunjukkan dengan kesiapan mereka untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kecakapan yang diperolehnya selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Secara spesifik, hasil belajar siswa SMK terlihat dari tingkat kesiapan bekerja, tumbuhnya kompetensi kewirausahaan, dan minat untuk berwirausaha. Dalam kaitan inilah maka perlu didengarkan bagaimana pandangan para lulusan

terhadap berbagai kegiatan pembelajaran yang telah mereka ikuti, apakah dinilai berkontribusi positip dalam membangun kesiapan bekerja dan memperkuat kompetensi serta minat berwirausaha.

Untuk mendengarkan aspirasi para lulusan tentang kegiatan pembelajaran yang telah mereka ikuti, kajian ini mengambil sampel sebanyak 163 lulusan SMK Negeri Rumpun Bisnis Manajemen dari beberapa kota di Jawa Timur, meliputi Banyuwangi, Malang, Jombang, dan Magetan. Pemelihan Sampel dilakukan secara acak. Sampel dalam kajian ini adalah para lulusan tahun 2019, yang diasumsikan merupakan produk lulusan SMK pascaprogram revitalisasi. 163 lulusan baru ini adalah mereka yang berkenan dengan sukarela untuk memberikan pandangannya tentang kegiatan pembelajaran yang selama ini mereka ikuti.

A. Kompetensi Kewirausahaan

Kompetensi adalah sebuah istilah yang secara luas banyak digunakan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, dan lazim digunakan untuk mengukur kinerja seseorang. Seseorang yang memiliki kompetensi ditandai dengan kepemilikan pengetahuan, semangat dan hasrat, sikap positip, dan kecakapan sesuai dengan bidang pekerjaan. Kompetensi berkaitan dengan kinerja, sesuai dengan standar kerja, dan dapat terus ditingkatkan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Singkatnya, kompetensi berkaitan dengan berbagai perilaku seseorang yang mendukung kesuksesan mereka dalam pekerjaan (Fisher, et.al., 2008 [460]; Krueger, 2007 [461]; Murnieks, 2007 [462]; Markman, et.al., 2005) [463].

Mengacu kreteria sebagaimana dikemukakan oleh Johannisson (1991) [464], seseorang yang memiliki kompetensi bidang kewirausahaan apabila ia memiliki: (1) *know-what*, pengetahuan bidang kewirausahaan, (2) *know-when*, wawasan bidang kewirausahaan, (3) *know-who*, memiliki kecakapan sosial, (4) *know-how*, memiliki berbagai kecakapan bidang kewirausahaan, (5) *know-why*, memiliki sikap, nilai-nilai, dan motivasi berkait dengan aktifitas wirausaha.

Kajian ini mengidentifikasi kompetensi kewirausahaan, dengan mengacu pendapat Lackeus (2013) [465] dan para ahli lainnya; ya[13] mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi pengetahuan (*knowledge*, K) (Kraiger, et.al., 1993) [466], (2) kecakapan (*skills*, S) (Fisher, et.al., 2008) [467], dan (3) sikap (*Attitude*, A) (Fisher, et.al., 2008; Krueger, 2007 [468]; Murnieks, 2007 [469]; Markman, et.al., 2005) [470] yang secara keseluruhan mencakup 15 indikator. Dimensi pengetahuan (K) dilihat dari: (K1) kepemilikan pengetahuan bidang kewirausahaan, (K2) mental sebagai pewirausaha, dan (K3) wawasan kewirausahaan. Dimensi kecakapan (S) dilihat dari: (S1) kecakapan bidang pemasaran, (S2) kecakapan melihat peluang usaha, (S3) pemanfaatan sumber daya, (S4) kecakapan menjalin hubungan atau relasi usaha, (S5) kecakapan untuk belajar dalam bidang kewirausahaan, dan (S6) kecakapan untuk membuat strategi usaha. Sedangkan dimensi sikap (A) dilihat dari: (A1) semangat untuk berwirausaha, (A2) sikap percaya diri dan yakin pada kemampuan diri sendiri, (A3) proaktif, (A4) berani menghadapi situasi yang tidak pasti, (A5) inovatif, dan (A6) memiliki ketekunan.

B. Minat Berwirausaha

Pembelajaran kewirausahaan yang efektif akan ditandai dengan tumbuhnya ketertarikan, keinginan, minat, dan dorongan dari dalam peserta didik untuk menjalankan kegiatan usaha. Penguatan budaya wirausaha harus dilakukan dengan mengkaji tentang berbagai faktor yang dapat mendorong tumbuhnya minat berwirausaha (Krueger et al, 2000) [471].

Minat untuk berwirausaha berkaitan dengan dimensi psikologis. Krueger et al. (2005) [472] menyatakan bahwa minat merupakan faktor utama dari berbagai perilaku yang direncanakan. Dengan demikian jika saat ini seseorang belum terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, dan ia berminat untuk terlibat di dalamnya; maka aktifitas kewirausahaan bagi orang tersebut termasuk dalam kategori perilaku yang direncanakan. Ajzen (1991) [473] merupakan pengkaji pertama tentang perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour,* TPB). Melalui TPB, kita mendapatkan penjelasan bagaimana mengubah perilaku seseorang. Perhatian utama dari TPB adalah minat, yang bisa berupa semangat dan harapan yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu. Dengan demikian bila seseorang memiliki minat yang kuat terhadap hal tertentu, maka hal itu akan memberikan dorongan yang kuat kepada seseorang untuk beraktivitas pada bidang tersebut.

Selanjutnya Ajzen menjelaskan tiga faktor penting yang akan mengubah minat menjadi perilaku actual. *Pertama*, keyakinan dan sikap seseorang yang akan mendorongnya untuk berperilaku tertentu. Krueger et al.(2000) [474] memberikan contoh seorang mahapeserta didik yang memiliki

sikap positip terhadap kewirausahaan karena kedua orang tuanya berprofesi sebagai pewirausaha. *Kedua*, faktor sosial dalam kontek norma subjektif yang dikembangkan individu. Faktor ini merujuk pada tekanan yang harus dihadapi individu dari lingkungan sosialnya untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Misalnya, apabila seseorang memiliki pengalaman dan pandangan negatif tentang kewirausahaan maka ia akan memberikan larangan kepada keluarganya untuk tidak terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Sebaliknya, bila seseorang memiliki pandangan yang positip tentang kewirausahaan maka ia akan memberikan dukungan untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. *Ketiga*, faktor pengendalian perilaku. Seseorang akan menyadari bahwa perilakunya tentang kewirausahaan tidak hanya digerakkan oleh minat, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana penilian dirinya tentang berbagai hambatan yang harus dihadapi untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan.

Kajian yang dilakukan oleh Steward & Roth (2004) [475] mengungkapkan bahwa dorongan seseorang untuk berwirausaha dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan faktor kontekstual. Krueger et al., (2000) [476], dan Bird (1988) [477] menjelaskan beberapa faktor internal yang terbukti mempengaruhi dorongan berwirausaha meliputi: kemampuan individu, karakter individu, persepsi tentang kewirausahaan, kemandirian, faktor sosial ekonomi dan demografi yang mencakup usia, jenis kelamin, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan latar belakang keluarga. Sedangkan faktor ekternal dan kontekstual yang mempengaruhi minat wirausaha adalah dukungan kebijakan pemerintah, peluang pasar, dukungan lingkungan usaha, penghargaan sosial, pengalaman usaha, dan kegiatan

pendidikan dan latihan bidang kewirausahaan (Gorman, *et.al.*, 1997) [478].

Dengan demikian dalam kajian ini minat berwirausaha akan dilihat dari kemunculan berbagai atribut dalam diri peserta didik, yang mencakup: (M1) cita-cita, (M2) ketertarikan, (M3) menyiapkan diri, (M4) keinginan, (M5) harapan, (M6) dorongan untuk berwirausaha, (M7) segera mewujudkan setelah lulus, dan (M8) menetapkan profesi wirausaha sebagai pilihan utama.

C. Kesiapan Bekerja

Kesiapan bekerja individu dapat diukur dari kepemilikan berbagai atribut, baik berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap selaras dengan yang diekspektasikan oleh penyedia kerja. Beberapa peneliti seperti Brady (2010) [479], Caballero, et al. (2011) [480], Reynolds & Ceranic (2007) [481], Gardner, et al. (2001) [482], Parker (2008) [483], Moorhouse & Caltabiano (2007) [484], Porath & Bateman (2006) [485], dan Prianto (2013) [486] telah mengkaji berbagai atribut yang menggambarkan kesiapan bekerja sebagaimana tampak pada tabel 10.1.

Tabel 10.1 Berbagai Atribut Penentu Kesiapan Bekerja

Nomor	Faktor	Atribut
1	Motivasi	Kesungguhan dalam bekerja, dorongan bekerja keras, tahan banting, konsisten, condong bekerja dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, tidak mudah mengeluh.

2	Kematangan Pribadi	Tahan menghadapi cobaan, Tidak emosional ketika dikritik, Bersifat terbuka, Percaya diri, Bertanggung jawab.
3	Kematangan sosial	Komunikatif, Mampu bekerja sama dalam tim kerja, Mampu membangun jejaring, Mampu berinteraksi dengan pelanggan, Berperilaku luwes dan fleksibel.
4	Sikap kerja	Sikap hormat, Cermat, Tanggap, Realistis dan praktis, sopan santun dalam berperilaku, rendah hati, sabar.
5	Cakap dalam bekerja	Memiliki pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan bidang pekerjaan, Mampu membuat analisis terhadap permasalahan, Mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan bidang pekerjaannya, Mampu mencari cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, Berani membuat keputusan, Cepat mengadopsi cara kerja baru.

Ada pun kreteria yang digunakan untuk menilai keterlibatan dalam pembelajaran, kesiapan bekerja, kompetensi dan minat berwirausaha sebagaimana dipaparkan dalam tabel 10.2.

Tabel 10.2 Bobot Keterlibatan dalam Pembelajaran, Kesiapan bekerja, Kompetensi dan Minat KWU

No	Kelas Interval	Bobot	Intensitas Keterlibatan	Kesiapan Bekerja	Kompetensi dan Minat KWU
1	1.00 – 1.8	20.0 – 36	Sangat Rendah	Sangat Tidak Siap	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.6	36.1 – 52	Rendah	Tidak Siap	Rendah

3	2.61 – 3.4	52.1 – 68	Sedang	Cukup Siap	Sedang
4	3.41 – 4.2	68.1 – 84	Tinggi	Siap	Tinggi
5	4,21 – 5.00	84.1 - 100	Sangat Tinggi	Sangat Siap	Sangat Tinggi

D. Keterlibatan Siswa Dalam Pembelajaran Berbasis TF

Tabel 10.3 memaparkan keterlibatan para siswa dalam pembelajaran berbasis TF. Ada sepuluh indikator keterlibatan yang digunakan dalam kajian ini, meliputi: (1) peran serta, (2) tingkat perhatian, (3) kerja sama dengan teman sejawat atau *team work*, (4) daya inisiatif, (5) komitmen dengan tugas, (6) dorongan untuk menjadi yang terbaik, (7) sikap bertanggung jawab, (8) bangga dengan hasil pekerjaannya, (9) berpikir optimal, dan (10) kemampuan berkomunikasi selama mengikuti pembelajaran. Ada tiga model pembelajaran yang mampu memicu para siswa untuk terlibat dalam pembelajaran dalam kategori keterlibatan "sangat tinggi", yaitu pembelajaran berbasis produksi, pembelajaran bebrbasis layanan, dan penempatan kerja. Sedangkan kegiatan magang atau praktek kerja lapangan dan praktek kerja pada unit produksi memicu keterlibatan siswa dalam kategori "tinggi".

Tabel 10.3 Rerata Proporsi Keterlibatan Responden Dalam Pembelajaran Berbasis TF

Model Pembelajaran	Rerata Keterlibatan	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Kualitas Keterlibatan
Magang (Internship)	83.9	68	100	Tinggi
Pembelajaran berbasis produksi	87.8	70	100	Sangat Tinggi
Penempatan kerja	85.9	76	100	Sangat Tinggi
Praktek kerja pada unit produksi	83.7	66	100	Tinggi
Pembelajaran berbasis layanan masyarakat	86.1	80	100	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Kegiatan praktik kerja lapangan, yang pada masa lalu juga populer disebut "prakerin" ternyata belum mampu diikuti dengan sangat maksimal oleh para siswa. Data-data di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan para siswa dalam kegiatan praktek kerja lapangan harus menjadi perhatian para guru. Untuk itu diperlukan supervisi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa para siswa benar-benar melaksanakan tugas praktek dengan optimal. Berbagai indikator yang menggambarkan keterlibatan para lulusan dalam pembelajaran berbasis TF disajikan dalam gambar 10.1.

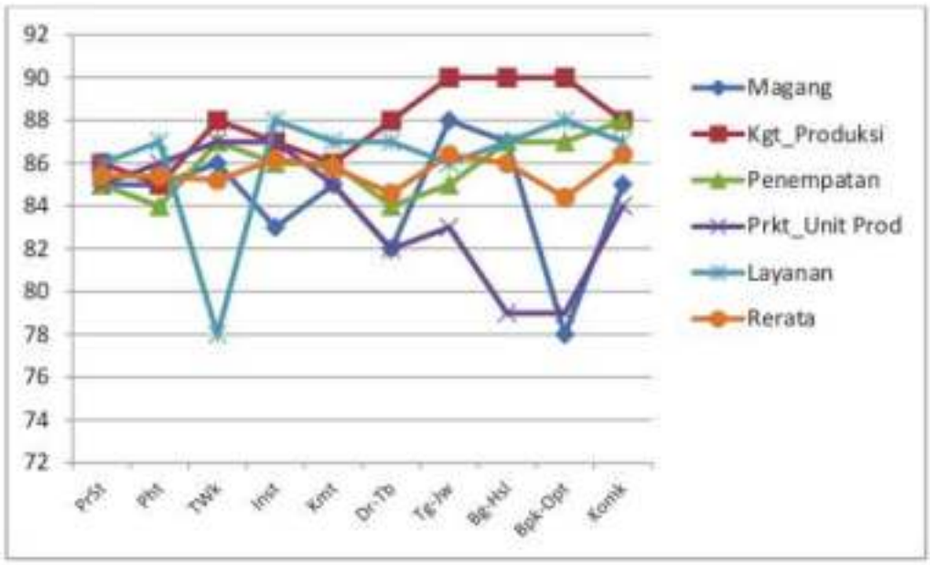

Gambar 10.1 Indikator Keterlibatan Belajar Sesuai Model Pembelajaran

Berdasarkan gambar 10.1. terungkap bahwa semua model pembelajaran berbasis TF mampu memberikan dampak keterlibatan yang seragam untuk 5 indikator, yang meliputi: peran serta, perhatian, komitmen, komunikasi, dorongan untuk menjadi yang terbaik, tanggung jawab, bangga dengan hasil pekerjaan, dan team work. Khusus untuk pembelajaran berbasis layanan dipersepsikan lulusan kurang mempu memperkuat *team work*. Kegiatan pembelajaran berbasis produksi dan layanan dipersepsikan lulusan memberikan dampak keterlibatan yang sangat kuat, terutama untuk indikator peran serta, *team work*, daya inisiatif, komitmen, dorongan menjadi yang terbaik, tanggung jawab, bangga dengan hasil pekerjaan, berpikir optimal, dan komunikasi.

Secara umum kegiatan magang yang berupa kegiatan praktik kerja lapangan dipersepsikan memberikan dampak

keterlibatan yang paling rendah inisiatif, komitmen, dorongan untuk menjadi yang terbaik, dan berpikir optimal. Demikian halnya, kegiatan praktek kerja pada unit produksi dipersepsikan memberikan dapak keterlibatan paling lemah dari beberapa indicator, yang meliputi: dorongan menjadi yang terbaik, tanggung jawab, bangga dengan hasil, dan berpikir optimal. Hal ini dapat menjadi perhatian sekolah dalam mengoptimalkan kualitas pelaksanaan pembelajaran berbasis praktek kerja pada unit produksi di sekolah dan praktek kerja lapangan. Untuk itu perlu ada penataan pengelolaan yang lebih optimal dengan memperhatikan kompetensi, minat, manajemen pelaksanaan kegiatan, dan model evaluasi kegiatan agar para siswa yang terlibat dalam pembelajaran yang dipilih dapat berjalan dengan optimal.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu belum optimalnya keterlibatan siswa dalam kegiatan praktik kerja lapangan adalah: (a) pihak dunia usaha atau institusi tempat praktik menganggap para siswa sebagai figur yang sedang dalam taraf belajar, sehingga segala bentuk aktivitasnya harus mengikuti perintah dan petunjuk institusi tempat praktek. Hal ini memicu para siswa yang berpraktek cenderung berperilaku pasif, kurang berani mengambil inisiatif, dan kurang mendapatkan kesempatan untuk membuat keputusan dalam menjalankan aktifitas di tempat praktik kerja; (b) Data-data lapangan menemukan ternyata tidak semua menjalankan praktek kerja di tempat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kompetensinya. Hal ini membuat para siswa kurang bersemangat untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja.

Data lapangan juga mengungkapkan bahwa keterlibatan para siswa dalam kegiatan praktik kerja pada unit produksi belum mampu mencapai level sangat optimal, karena bidang

kegiatan yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang menjadi minatnya, sehingga kegiatan ini dianggap oleh sebagian siswa menjadi aktivitas yang dinilai kurang tantangan dan menarik. Hal inilah yang menyebabkan keterlibatan para siswa dalam kegiatan pembelajaran menjadi tidak mampu mencapai titip sangat optimal.

Berdasarkan berbagai berbagai kecenderungan sebagaimana diuangkapkan dalam data dari lapangan maka perlu ada sinergi yang lebih kuat antara sekolah, dunia usaha dan industri, institusi tempat praktek, orang tua dan para siswa untuk menentukan kegiatan praktik sebagaimana yang diharapkan bersama antara sekolah, guru, siswa, orang tua, dan tempat praktek kerja. Di samping itu juga diperlukan kreteria kompetensi yang akan dipraktekkan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh tempat praktik. Kreteria ketuntasan kegiatan praktik harus menjadi kesepahaman bersama antara sekolah, siswa, dan tempat praktek. Kegiatan evaluasi dan refleksi juga perlu menjadi perhatian untuk menjamin keterlibatan siswa yang maksimal dalam menjalankan kegiatan praktik.

E. Kesiapan Bekerja Para Lulusan Sesuai Model Pembelajaran Yang Diikuti

Model pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan membentuk kesiapan bekerja disajikan dalam gambar 10.2. Penempatan kerja dan pembelajaran berbasis layanan merupakan dua model pembelajaran berbasis TF yang dipersikan para lulusan memberikan kontribusi sangat besar dalam membangun kesiapan bekerja. Kegiatan pembelajaran dengan penempatan kerja dipersepsikan memberikan

dampak terbesar pada indikator kematangan sosiak, sikap kerja, dan kecakapan kerja, dan kematangan pribadi. Sedangkan pembelajaran berbasis layanan dipersepsikan memberikan dampak terbesar pada indicator motivasi kerja. Pembelajaran berbasis layanan memang mengharapkan adanya dorongan dari dalam diri untuk mengkreasikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sosial. Model pembelajaran berikutnya yang dipersepsikan memperkuat kesiapan bekerja adalah pembelajaran berbasis praktek kerja pada unit produksi di sekolah, diikuti pembelajaran berbasis produksi, dan magang atau praktek kerja lapangan.

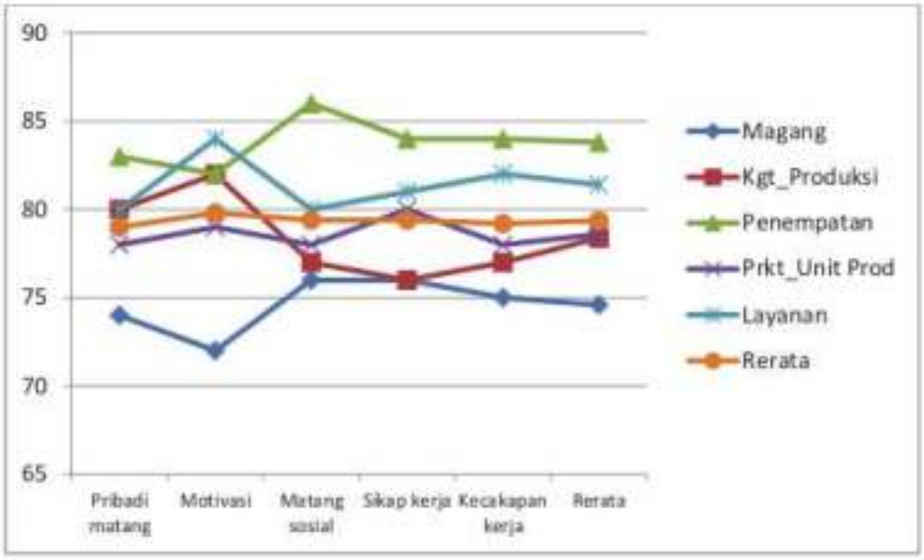

Gambar 10.2. Kesiapan Bekerja Sesuai Model Pembelajaran Yang Dipersepsikan

Paparan tentang kesiapan bekerja per indikator sesuai dengan model pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan sangat mempengaruhi kesiapannya untuk bekerja diuraiakan seperti berikut.

a. *Kecakapan Kerja Para Lulusan Sesuai Model Pembelajaran Yang Diikuti*

Tabel 10.4 memaparkan persepsi para lulusan terhadap berbagai model pembelajaran yang diikuti dalam memperkuat kecakapan kerja. Penempatan kerja dipersepsikan sebagai satu-satunya pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan mampu memperkuat kecakapan kerja dalam level "sangat tinggi". Model pembelajaran berbasis layanan menjadi model pembelajaran berikutnya yang dipersepsi mampu meningkatkan kecakapan kerja yang "tinggi". Model pembelajaran selanjutnya secara berturut-turut yang dipersepsikan mampu meningkatkan kecakapan kerja adalah pembelajaran berbasis praktik kerja pada unit porduksi, pembelajaran berbasis produksi, dan magang atau praktik kerja lapangan.

Tabel 10.4 Rerata Kecakapan Kerja Sesuai Model Pembelajaran Berbasis TF

Model Pembelajaran	Rerata	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Kualitas Kecakapan
Magang (Internship)	75	74	76	Tinggi
Pembelajaran berbasis produksi	77	76	78	Tinggi
Penempatan kerja	84	82	86	Sangat Tinggi
Praktek kerja pada unit produksi	78	76	80	Tinggi
Pembelajaran berbasis layanan masyarakat	82	80	84	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Uraian kecakapan kerja dilihat dari masing-masing indicator terlihat dalam gambar 10.3.

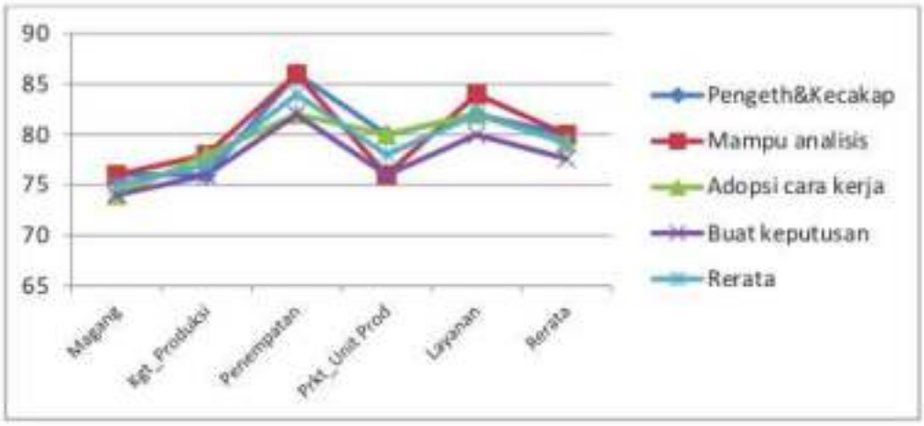

Gambar 10.3 Kesiapan bekerja lulusan dilihat dari aspek kecakapan kerja

Gambar 10.3 menjelaskan bahwa ke lima model pembelajaran berbasis TF memberikan dampak pada penguatan berbagai indicator kecakapan kerja yang mengelompok. Kegiatan penempatan kerja dan pembelajaran berbasis layanan memberikan penguatan pada indicator kecakapan kerja yang kuat, yang meliputi: pengetahuan dan kecakapan, kemampuan membuat analisis, kemampuan membuat keputusan, dan kemampuan mengadopsi cara kerja baru. Pembelajaran berbasis produksi dan praktek kerja pada unit produksi dipersepsikan memberikan dampak kecakapan kerja yang setara. Sedangkan magang atau praktek kerja lapangan dipersepsikan memberikan dampak kecakapan kerja yang paling rendah.

b. *Berbagai Model Pembelajaran Berbasis TF Dalam Memperkuat Sikap Kerja*

Tabel 10.5. memaparkan persepsi para lulusan terhadap berbagai model pembelajaran yang diikuti dalam memperkuat sikap kerja. Penempatan kerja dipersepsikan sebagai satu-satunya pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan mampu memperkuat sikap kerja dalam level "sangat tinggi". Model pembelajaran berbasis layanan menjadi model pembelajaran berikutnya yang dipersepsi mampu meningkatkan sikap kerja yang "tinggi". Model pembelajaran selanjutnya secara berturut-turut yang dipersepsikan mampu meningkatkan sikap kerja adalah: pembelajaran berbasis praktek kerja pada unit porduksi, pembelajaran berbasis produksi, dan magang atau praktek kerja lapangan.

Tabel 10.5 Rerata Sikap Kerja Sesuai Model Pembelajaran Berbasis TF

Model Pembelajaran	Rerata	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Kualitas Sikap Kerja
Magang (Internship)	76	72	80	Tinggi
Pembelajaran berbasis produksi	76	72	80	Tinggi
Penempatan kerja	84	82	86	Sangat Tinggi
Praktek kerja pada unit produksi	80	78	82	Tinggi
Pembelajaran berbasis layanan masyarakat	81	75	84	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis TF mampu membentuk sikap kerja dapat dilihat dalam gambar 10.4.

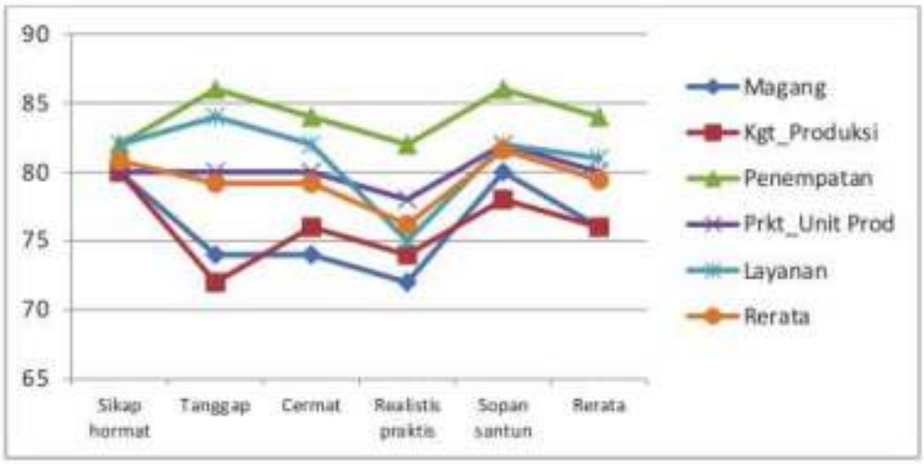

Gambar 10.4 Kesiapan bekerja lulusan dilihat dari aspek sikap kerja

Kegiatan penempatan kerja mampu memperkuat sikap kerja yang paling kuat yang meliputi indikator sikap hormat, tanggap, cermat, realistis dan praktis, dan sopan santun. Pembelajaran berbasis layanan dan praktek kerja pada unit produksi memiliki dampak kuat berikutnya, terutama untuk indikator sikap hormat, tanggap, cermat, dan sopan santun.

c. *Berbagai Model Pembelajaran Berbasis TF Dalam Memperkuat Kecakapan Sosial*

Tabel 10.6. memaparkan persepsi para lulusan terhadap berbagai model pembelajaran yang diikuti dalam memperkuat kecakapan sosial. Penempatan kerja dipersepsikan sebagai satu-satunya pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan mampu

memperkuat kecakapan sosial dalam level "sangat tinggi". Model pembelajaran berbasis layanan menjadi model pembelajaran berikutnya yang dipersepsi mampu meningkatkan kecakapan sosial yang "tinggi". Model pembelajaran selanjutnya secara berturut-turut yang dipersepsikan mampu meningkatkan kecakapan sosial adalah: pembelajaran berbasis praktek kerja pada unit porduksi, pembelajaran berbasis produksi, dan magang atau praktek kerja lapangan.

Tabel 10.6 Rerata Kecakapan Sosial Sesuai Model Pembelajaran Berbasis TF

Model Pembelajaran	Rerata	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Kualitas Sikap Kerja
Magang (Internship)	76	74	78	Tinggi
Pembelajaran berbasis produksi	77	75	78	Tinggi
Penempatan kerja	86	84	88	Sangat Tinggi
Praktek kerja pada unit produksi	78	76	80	Tinggi
Pembelajaran berbasis layanan masyarakat	80	78	82	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 10.5. memperlihatkan bahwa kegiatan penempatan kerja dipersepsikan para lulusan berkontribusi besar dalam mengasah sikap luwes dan fleksibel, membangun kemampuan berkomunikasi, dan memperkuat kebiasaan bekerja dalam tim.

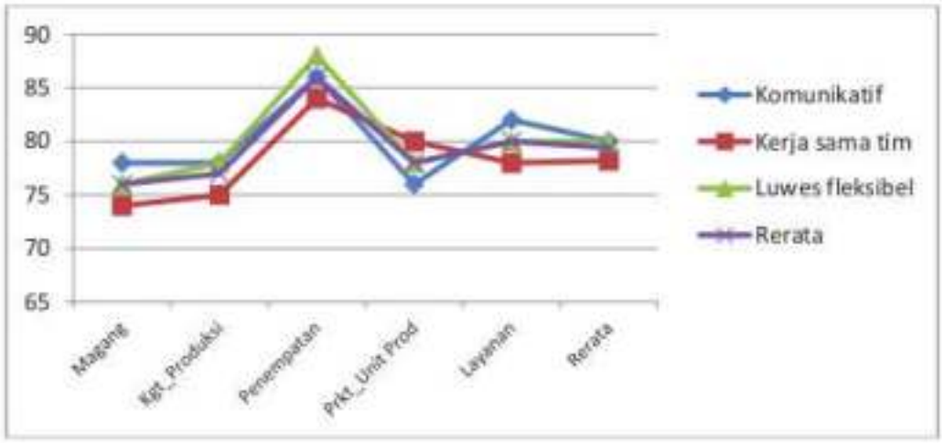

Gambar 10.5 Kesiapan bekerja lulusan dilihat dari aspek kecakapan sosial

d. *Berbagai Model Pembelajaran Berbasis TF Dalam Memperkuat Kematangan Pribadi*

Tabel 10.7 memaparkan persepsi para lulusan terhadap berbagai model pembelajaran yang diikuti dalam memperkuat kematangan pribadi. Penempatan kerja dipersepsikan sebagai satu-satunya pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan mampu memperkuat kematangan pribadi dalam level "sangat tinggi". Model pembelajaran berbasis layanan menjadi model pembelajaran berikutnya yang dipersepsi mampu meningkatkan kecakapan sosial yang "tinggi". Model pembelajaran selanjutnya secara berturut-turut yang dipersepsikan mampu meningkatkan kematangan pribadi adalah: pembelajaran berbasis praktek kerja pada unit porduksi, pembelajaran berbasis produksi, dan magang atau praktek kerja lapangan.

Tabel 10.7 Rerata Kematangan Pribadi Sesuai Model Pembelajaran Berbasis TF

Model Pembelajaran	Rerata	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Kualitas Kepribadian
Magang (Internship)	74.25	72	76	Tinggi
Pembelajaran berbasis produksi	80	78	82	Tinggi
Penempatan kerja	83	82	84	Tinggi
Praktek kerja pada unit produksi	78	76	80	Tinggi
Pembelajaran berbasis layanan masyarakat	80	78	82	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

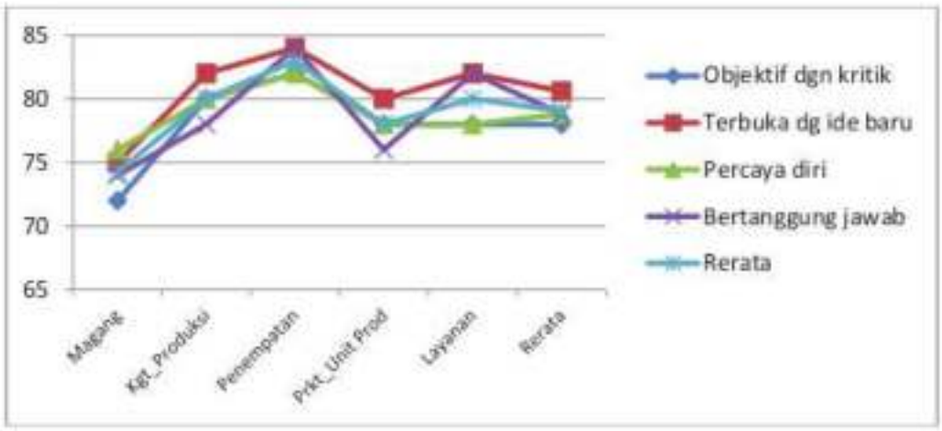

Gambar 10.6 Kesiapan bekerja lulusan dilihat dari aspek kepribadian

Gambar 10.6 mengungkapkan bahwa keempat model pembelajaran berbasis TF, yaitu: mdoel penempatan kerja,

pembelajaran berbasis produksi, pembelajaran berbasis layanan, dan praktik kerja pada unit produksi dipersepsikan mampu membentuk sikap terbuka dengan ide baru. Model penempatan kerja dipersepsikan mampu memberikan kontribusi yang dominan dalam membangun sikap obyektif terhadap kritik, terbuka dengan ide baru, percaya diri, dan bertanggung jawab.

e. *Berbagai Model Pembelajaran Berbasis TF Dalam Memperkuat Motivasi Kerja*

Tabel 10.8 memaparkan persepsi para lulusan terhadap berbagai model pembelajaran yang diikuti dalam memperkuat motivasi kerja. Pembelajaran berbasis layanan, penempatan kerja dan pembelajaran berbasis produksi dipersepsikan sebagai pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan mampu memperkuat motivasi kerja dalam level "tinggi". Model pembelajaran berbasis praktik kerja pada unit produksi dan praktik kerja lapangan menjadi model pembelajaran berikutnya yang dipersepsi mampu meningkatkan motivasi kerja yang lebih rendah meski masuk dalam kategori yang "tinggi".

Tabel 10.8 Rerata Motivasi kerja Sesuai Model Pembelajaran Berbasis TF

Model Pembelajaran	Rerata	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Kualitas Motivasi
Magang (Internship)	72	70	74	Tinggi
Pembelajaran berbasis produksi	82	80	84	Tinggi
Penempatan kerja	82	80	86	Tinggi

Model Pembelajaran	Rerata	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Kualitas Motivasi
Praktek kerja pada unit produksi	79	77	82	Tinggi
Pembelajaran berbasis layanan masyarakat	84	82	86	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

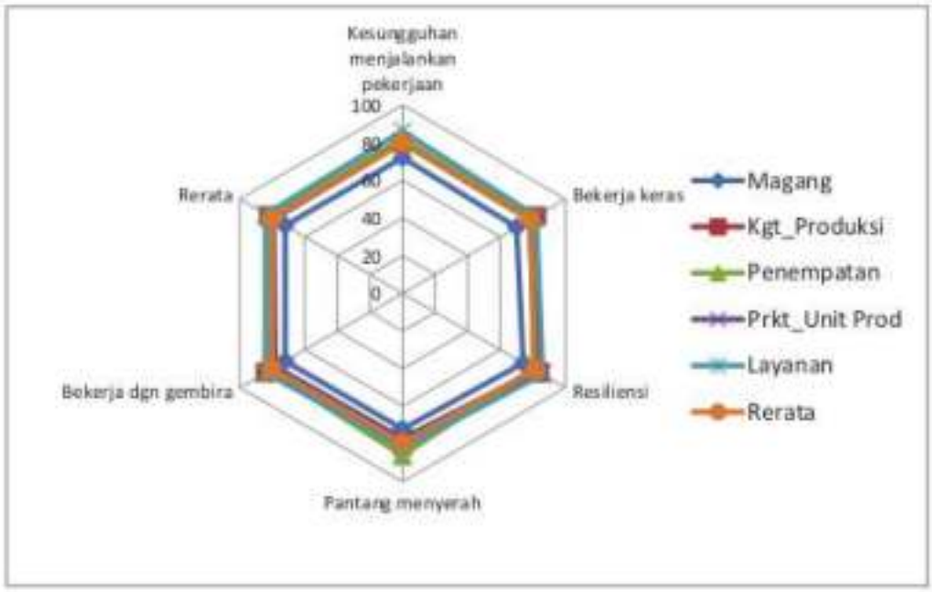

Gambar 10.7 Kesiapan bekerja lulusan dilihat dari aspek motivasi

Gambar 10.7 mengungkapkan bahwa keempat model pembelajaran berbasis TF, yaitu: penempatan kerja, pembelajaran berbasis layanan, pembelajaran berbasis produksi, dan praktek kerja pada unit produksi dipersepsikan memberikan dampak yang setara dalam membentuk kebiasaan untuk menjalankan pekerjaan

dengan sungguh-sungguh, kebiasaan bekerja keras, memperkuat resiliensi atau sikap gigih, memperkuat sikap pantang menyerah, dan membiasakan bekerja ikhlas dan gembira. Sedangkan, kegiatan magang atau praktik kerja lapangan secara keseluruhan dipersepsikan memiliki dampak yang paling rendah.

Berdasarkan paparan di atas, maka ada dua model pembelajaran berbasis TF yang secara keseluruhan dipersepsikan memberikan pengaruh kuat kesiapan bekerja, yaitu: kegiatan penempatan kerja dan pembelajaran berbasis layanan. Kemudian diikuti dengan pembelajaran berbasis praktik kerja pada unit produksi, pembelajaran berbasis produksi, dan yang dipersepsikan paling lemah oleh para lulusan adalah kegiatan magang atau praktik kerja lapangan.

F. Berbagai Model Pembelajaran Berbasis TF Dalam Memperkuat Kompetensi Kewirausahaan

Tabel 10.9 memaparkan persepsi para lulusan terhadap berbagai model pembelajaran yang diikuti dalam memperkuat kompetensi kewirausahaan. Pembelajaran berbasis produksi dan pembelajaran berbasis layanan dipersepsikan sebagai pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan mampu memperkuat kompetensi kewirausahaan dalam level "sangat tinggi". Model pembelajaran berbasis praktek kerja pada unit produksi dan penempatan kerja menjadi model pembelajaran berikutnya yang dipersepsi mampu meningkatkan kompetensi kewirausahaan dalam ketegori "tinggi". Model pembelajaran berikutnya yang dipersepsikan mampu meningkatkan kompetensi kewirausahaan paling lemah adalah magang atau praktik kerja lapangan.

Tabel 10.9 Rerata kompetensi Kewirausahaan Sesuai Model Pembelajaran Berbasis TF

Model Pembelajaran	Rerata	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Kualitas Kompetensi
Magang (Internship)	77.13	70	88	Tinggi
Pembelajaran berbasis produksi	86.7	82	90	Sangat Tinggi
Penempatan kerja	82.9	78	90	Tinggi
Praktek kerja pada unit produksi	82.4	76	86	Tinggi
Pembelajaran berbasis layanan masyarakat	84.5	80	88	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 10.8 memperlihatkan kegiatan pembelajaran berbasis produksi dipersepsikan para lulusan memberikan dampak yang paling kuat untuk hampir semua indikator kompetensi kewirausahaan, yang meliputi: pengetahuan tentang KWU, mental KWU, wawasan KWU, pemasaran, kemampuan menangkap peluang usaha, pemanfaatan sumber daya, memperkuat diri untuk terus belajar berwirausaha, memperkuat ketrampilan mengembangkan strategi berwirausaha, meningkatkan rasa percaya diri, memperkuat sikap proaktif, toleran dengan kegagalan dalam menjalankan kegiatan usaha, menumbuhkan kemampuan berinovasi, dan memperkuat resiliensi (gigih). Pengaruh kuat berikutnya diberikan oleh pembelajaran berbasis penempatan kerja, pembelajaran berbasis layanan, dan praktek kerja pada unit produksi yang dipersepsikan para lulusan memiliki dampak yang setara. Sedangkan magang atau praktik kerja lapangan dipersepsikan para lulusan memiliki dampak paling lemah dalam membentuk kompetensi kewirausahaan. Dengan

demikian penguatan kompetensi kewirausahaan bagi siswa SMK dapat dilakukan dengan memperkuat pembelajaran berbasis produksi.

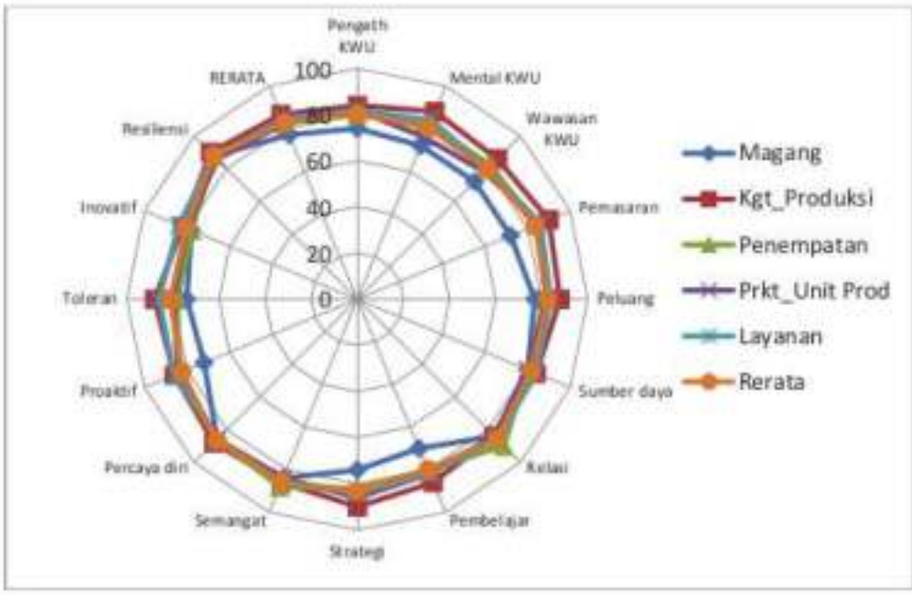

Gambar 10.8 Kompetensi Kewirausahaan Sesuai Model Pembelajaran

G. Berbagai Model Pembelajaran Berbasis TF Dalam Memperkuat Minat Berwirausaha

Tabel 10.10 memaparkan persepsi para lulusan terhadap berbagai model pembelajaran yang diikuti dalam memperkuat minat berwirausaha. Pembelajaran berbasis produksi menjadi satu-satu model pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan mampu memperkuat minat berwirausaha dalam level "sangat tinggi". Model pembelajaran berikutnya yang dipersepsikan mampu memperkuat minat berwirausaha dalam level tinggi secara beruturt-turut meliputi: pembelajaran berbasis layanan, praktik kerja pada unit produksi, dan penempatan kerja. Prak kerja lapangan menjadi model pembelajaran yang

dipersepsikan paling lemah dalam menumbuhkan minat berwirausaha.

Tabel 10.10 Rerata minat Berwirausaha Sesuai Model Pembelajaran Berbasis TF

Model Pembelajaran	Rerata	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Kualitas Minat
Magang (Internship)	72.25	70	76	Tinggi
Pembelajaran berbasis produksi	87.75	86	90	Sangat Tinggi
Penempatan kerja	81	78	84	Tinggi
Praktek kerja pada unit produksi	81.25	72	92	Tinggi
Pembelajaran berbasis layanan masyarakat	83.75	74	92	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Model pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan mempengaruhi tumbuhnya minat berwirausaha para lulusan terlihat pada gambar berikut.

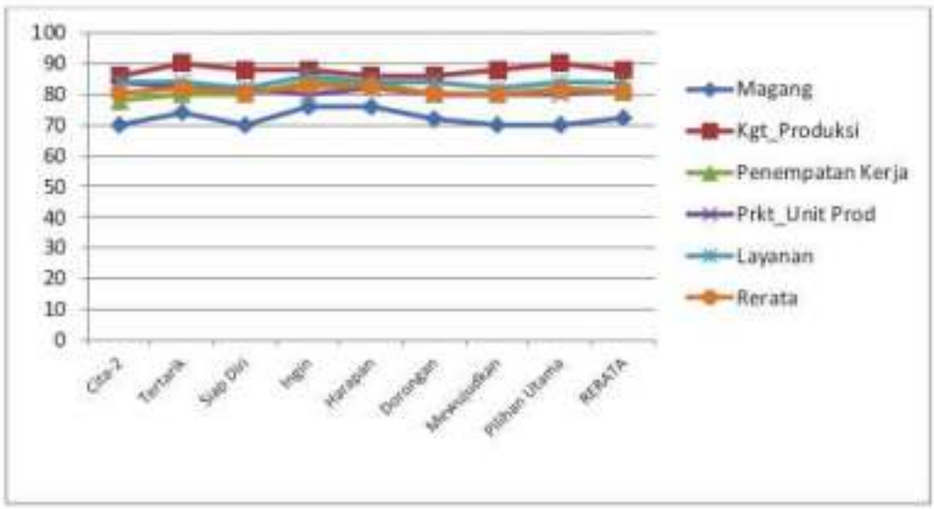

Gambar 10.9 Minat KWU Sesuai Model Pembelajaran Yang Dipersepsikan

Berdasarkangambar10.9terungkapbahwa pembelajaran berbasis produksi dipersepsikan para lulusan memberikan pengaruh paling kuat dalam membentuk minat berwirausaha, yang meliputi semua indikator, yaitu: memperkuat cita-cita untuk menjadi pewirausaha, membangkitkan ketertarikan untuk menjadi pewirausaha, penyiapan diri untuk menjadi pewirausaha segera setelah lulus, menumbuhkan keinginan yang kuat, menaruh harapan yang besar, tumbuhnya dorongan untuk berwirausaha, adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita, dan memposisikan wirausaha sebagai pilihan karir yang utama. Pengaruh kuat berikutnya ada pada pembelajaran berbasis layanan. Penempatan kerja dan pembelajaran berbasis praktek kerja pada unit produksi dipersepsikan para lulusan memiliki dampak yang setara dalam membangun minat wirausaha. Sedangkan, praktik kerja lapangan diposisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang dipersepsikan memiliki pengaruh paling lemah dalam membentuk minat wirausaha.

Data dari lapangan berhasil memetakan model-model pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan SMK tahun 2019 memengaruhi kesiapannya untuk bekerja. Ada 2 model pembelajaran yang dipersepsikan kuat mempengaruhi kesiapan bekerja, yaitu: (1) model pembelajaran berbasis penempatan kerja dan (2) model pembelaran berbasis layanan. Model pembelajaran berbasis produksi juga dipersepsikan berpengaruh sangat kuat terhadap kesiapan bekerja, terutama dari aspek kepribadian dan motivasi. Kegiatan praktek kerja pada unit produksi memiliki skor hampir sama dengan rerata kesiapan kerja para lulusan. Sedangkan kegiatan magang atau praktek

kerja industri, dipersepsikan para lulusan paling rendah pengaruhnya terhadap kesiapan bekerja.

Kajian ini juga berhasil memetakan model-model pembelajaran berbasis TF yang dipersepsikan para lulusan mempengaruhi minat berwirausaha. Ada dua model pembelajaran yang memiliki skor di atas rata-rata dan dipersepsikan kuat memengaruhi tumbuhnya minat berwirausaha, yaitu: (1) model pembelajaran berbasis produksi dan (2) model pembelajaran berbasis layanan. Kegiatan penempatan kerja dan praktek kerja pada unit produksi memiliki skor setara dengan rerata minat para lulusan untuk berwirausaha. Sedangkan, kegiatan magang aau praktik kerja industri dipersepsikan para lulusan tidak terlalu memicu tumbuhnya minat berwirausaha.

Kegiatan pembelajaran berbasis produksi juga dipersepsi kuat memengaruhi kompetensi kewirausahaan para lulusan. Pembelajaran berbasis penempatan kerja, pembelajaran berbasis produksi, dan pembelajaran berbasis layanan memiliki skor setara dengan rerata. Kegiatan magang dipersepsikan lulusan berpengaruh sangat kuat dalam membentuk kompetensi kewirausahaan.

Berbagai kecenderungan sebagaimana terungkap dalam penelitian ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kegiatan magang yang banyak diikuti oleh para siswa belum dipersepsikan berpengaruh kuat terhadap kesiapan bekerja? Untuk menjawab fenomena ini perlu ada pengujian secara lebih lanjut, sampai didapatkan data yang dapat menggambarkan kencenderungan yang konsisten tentang pengaruh penerapan berbagai model pembelajaran terhadap kesiapan bekerja, kompetensi kewirausahaan, dan minat berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

4-H Study for Positive Youth Development: *School Engagement Scale*. Dalam http://ase.tufts.edu/iaryd, Diakses 20 Juli 2015

Ackerman, D.B. 2003. Taproots for A New Century: Tapping the best of traditional and progressive education. *Phi Delta kappa*. 84. Pp. 344-349

Acs, Z.J.; Szerb, L. & Lloyd, A. 2018. *The Global Entrepreneurship Index 2018*. Washington, DC, USA: The Global Entrepreneurship and Development Institute

Adams, G.A., King, L.A., King, D.W. 1996. Relationships of job and family involvement, family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction. *Journal of Applied*

Psychology. 81 (4) pp. 411-420. http://dx.doi.org/10.1037//0021-9010.81.4.411.

Aderemi, H.O.S.; Siyanbola, W.O.; Abereijo, I.O.,.2009. An Assessment of The Choice and Performance of Women Entrepreneurs in Technological and Non- Technological Enterprises in Southwestern Nigeria. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol. V pp. 25-43

A JA Education Blueprint Initiative, tt. *Are Students Prepared for The Workplace? New Tools for A New Generation.* Dalam: https://www.juniorachievement.org . Diakses 2 Mei 2019

Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. No. 50 pp. 179-211

Aldrich, H.E., & Cliff, J.E. 2003. The pervasive effects of family on entrepreneurship: toward a family embeddedness perspective. *Journal of Business Venturing*.18. Pp. 573-596. http://dx.doi.org/10.1016//S0883-9026(03)00011-9.

Alfeld, C.; Charner, I.; Johnson, L.; Watts, E.; & FHI 360. *Work-based learning opportunities for high schools students*. National Research Centre for Career and Technical Education

Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. 1996. Assessing the work environment for creativity: Perceived leader support. *Academy of Management Journal*. 39 (5) pp. 1154-1184

Amabile, T.A. & Khaire, M. 2008. *Creativity and The Role of The Leader*. Boston, MA, Harvard Business School Publishing

Amabile, T. & Kramer, S. 2011. *The progress principle: Using small wins to ignite joy, engagement, and creativity at work*, Harvard Business Press

Apte, U.M.; Karmarkar, U.S.; & Nath, H.K. 2008 spring. Information services in The U.S. economy: value, jobs, and management implications. *California Management Review*. 50 (3) pp.12-30

Ajzen, I. 1987. "Attitudes, traits and actions: dispositional prediction of behavior in personality and social psychology", in Berkowitz, L. (Ed.) *Advances in Experimental and Social Psychology*. Academic Press. San Diego, 1-63

Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50. Pp. 179-211

Ajzen, I. 2001. Nature and operation of attitudes. *Annual Review of Psychology*. 52. Pp. 27-58

Ajzen, I. 2002. Perceived behavior control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior: a meta-analytic review. *British Journal of Social Psychology*. 40 (4) pp.471-499

Arenas, Alberto. 2003. School-based enterprise and environmental sustainability. *Journal of Vocational Education Research*. 28 (2) pp.107-124

Audretsch, D.B. dan Keilbach, M. 2005. Entrepreneurship Capital Determinants and Impact. *CEPR Discussion Paper*. CEPR Discussion Papers

Audretsch, D.B.; Thurik, A.R. 2000. Capitalism and Democracy in The 21st Century: From The Managed to The Entrepreneurial Economy. *Journal of Evolutionary Economics*. Vol.10.1 pp. 17-34

Autio, E.; Keeley, R.H.; Klofsten, M.; Parker, G.G.C.; & Hay, M. 2001. Entrepreneurial intent among students in Scandinavia and the USA. *Enterprise and Innovation Management Studies*. 2 (2) pp.145-160

Azwar, Saifuddin. 2011. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Azwar, Saifuddin.1998. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar

Bagheri, A. & Pihie, Z.A.L.2010. Entrepreneurial leadership learning: In search of missing links. *Procedia Social and Behavioral Sciences*. 7. Pp. 470-479

Bahri, Sonia & Haftendorn, Klaus (Ed.). 2006. *Towards an Entrepreneurship Culture for The Twenty-first Century. Stimulating Entrepreneurial Spirit Through Entrepreneurship Education In Secondary Schools*. Geneva: ILO & UNESCO

Bandura, A.1997. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*, W.H. Freeman

Barkema, Harry G.; Baum, Joel A.C.; Mannix, Elizabeth A. 2002. Management challenges in a new times. *Academy of Management Journal*. 45 (5) 916-930

Baron, R.A. 2004. The cognitive perspective: a valuable tool for answering entrepreneurship's basic "why" questions. *Journal of Business Venturing*. 19. Pp.221-239

Bath, Shabir & Khan, Riyaz.2014. Entrepreneurship education system: an assessment study of J&K State. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. 2 (4) pp. 1-8

Baumeister, R.F.; Vohs, K.D.; Aaker, J.L.; & Garbinsky, E.N. 2012. Some key differences between a happy life and a meaningful life. *Journal of Positive Psychology*

Beehr, T.A., McGrath, J.E. 1992. Social support, occupational stress and anxiety. *Anxiety Stress Copping*. 5. Pp. 7-19

Berne, E. 2010. *Games People Play: The Psychology of Human Relationships*. Harmondsworth: Penguin

Betz, N.E. 2004. Contribution of self-efficacy theory to carrer counseling: A personal perspective. *Career Development Quarterly*. 52. pp. 340-353

Bhat, Shabir & Khan, Riyaz.2014. Entrepreneurship education ecosystem: An Assessment study of J&K

state. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. 2 (4) pp.1-8

Billet, Stephen. 2019. Securing occupational capacities through workplace experiences: Premises, conceptions and practices. Dalam Anke Bahl & Agnes Dietzen (Eds). *Work-based learning as a pathway to competence-based education*. A UNEVOC Network Contribution, Bonn 2019

Bird, B. 1988. Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention. *Academy of Management Review*. Vol. 13 pp. 442-454

Biro Pusat Statistik. Agustus 2018. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018. *Berita Resmi Statsitik*. No.92/11/Th XXI, 05 Nopember 2018

Bird, B. 1988. Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention. *Entrepreneurship: Theory and Practice*. Vol. 17 pp. 11-20

Black, P. & Wiliam, D. 2009. Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*. 21. Pp. 5-31

Blank, S.G. & Dorf, B. 2012. *The Startup owner's manual: the step-by-step guide for building a great company*. K & S Ranch, Incorporated

Blenker, O.; Dreisler, P.; Kjeldsen, J. 2006. Entrepreneurship Education- The New Challenge Facing the Universities. *Working Paper 2006-2*, Arhus Business School, Department of Management, Arhus

Blinder, A.S. 2006. Activities that do not require physical contact or geographical proximity are most at risk. *CESifo Forum*. 2. 39-40

Bonwell, C.C. & Eison, J.A. Active learning: creating excitement in the classroom. ASH#-ERIC *Higher Education Report*. No. 1

Boyd, N.G. & Vozikis, G.s. 1994. The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. *Entrepreneurship Theory and Practice*. 18 pp. 63-77

Brady, R.P.2010. *Work Readiness Inventory (The booklet designed to accompany the Work Readiness Inventory)*. Indianapolis: JIST Publishing

Brandsford, J.D.; Brown, A.L. & Cocking, R.R. (eds). 1999. *How people learn: brain, mind, experience and school*. Washington, D.C.: National Academy Press

Brenner, O.C.; Pringle, C.D. & Greenhaus, J.H. 1991. Perceived fulfillment of organizational employment versus entrepreneurship: work values and career intentions of business college graduates. *Journal of Small Business Management*. 29 (3) pp. 62-74

Brewer, Laura. 2013. *Enhancing youth employability: what? wahy? And how? Guide to core work skills*. Geneva: International Labour Organization

Brown, A.; Bimrose, J. & Barnes, S. 2010. *Changing patterns of working, learning and career development across Europe*. Warwick: Warwick Institute for Employment Research/ University of Warwick

Brunila, K. 2012. A diminished self: Entrepreneurial and therapeutic ethos operating with common aim. *European Education Research Journal*. 11 (4) pp.477-486

Brush, C.G. 1992. Research on Women Business Owners: Past Trends, A New Perspective and Future Direnction. *Entrepreneurship Theory and Practice*.

Bruyat, C. & Julien, P.A. 2001. Defining the field of research in entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*. 16. Pp. 165-180

Bushe,G.R. & Kassam, A.F. 2005. When is appreciative inquiry trnasformational? A meta-case analysis. *The Journal of Applied Behavioral Science*. 41 pp. 161-181

Caballero, C. L., Walker, A., Fuller-Tyszkiewicz. 2011. The Work Readiness Scale (WRS): Developing a measure to assess Work Readiness in college graduates. *Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability*. 2 (2) pp. 41-54

Caballero, C.L., & Walker, A.2010. Work readiness in graduate recruitment and selection: A review of current assessment methods. *Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability*. 1(1) pp. 13-25

Carless, S.A.2007. Graduate recruitment and selection in Australia. *International Journal of Selection and Assessment*. 15 (2) pp. 153-166

Carr, J.C. & Sequera, J.M. 2007. Prior family business exposure as intergenerational influence and entrepreneurial intent: A theory of planned behavior approach. *Journal of Business Research*. 60 (10) pp.1090-1098

Carr, R.; Palmer, S. & Hagel, P. 2015. Active learning: the importance of developing a comprehensive measure. *Active Learning in Higher Education*. 16. Pp. 173-186

Casner-Lotto, J., & Barrington, L. 2006. *Are They really ready to work? Employers' perspectives on the basic*

knowladge and applied skills of new entrants to the 21st century U.S. workforce. USA: The Confference Board, Inc., the Partnershipfor 21st Century Skills, Corporate Voices for Working Families, and the Society for Human Resources Management. dalam *https://eric.ed.gov/?id=ED519465*

Charney, A. & Libecap,G.D. 2000. *The impact of entrepreneurship education: An evaluation of the Berger Entrepreneurship program at the University of Arizona.* 1985-1999

Chen, M.H. 2007. Entrepreneurial leadership and new ventures: *Creativity in Entrepreneurial Teams.* 16 (3) 239-249

Chen, C.C.; Greene, P.G.; Crick, A. 1998. Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? *Journal of Business Venturing.* 13 (4) pp. 295-316

Chigunta, F.2002. *Youth entrepreneurship: Meeting the key policy challenges*. Oxford University

Churchil, D. 2003. *Effective Design Principles for Activity Based Learning: The Crucial Role of "Learning Objectives" in Science and Engineering Education. National Institute of Education*. Singapore: Nanyang Technological University

Clark, L. & Winch, C. 2007. *Vocational education international approach, development and system*. New York: Routledge

Cleary, M.; Flynn, R.; Thomasson, S.; Alexander, R. & McDonald, B. 2007. Graduate employability skills. Dalam: *http://aces.shu.ac.uk/employability/resources/GraduateEmployabilitySkillsFINALREPORT1.pdf*

Conference Board, Inc. 2006. *Are They Really Ready to Work?* Conference Board, Inc., Partnership for 21st Century Skills, Corporate Voices for Working Families, and Society for Human Resource Management.

Connell, J.P. and Wellborn, J.G.1990. Context, self, and action: a motivational analysis of self-system processes across the life-span, In D. Cicchetti (Ed.). *The self in transition: infancy to the childhood*. Chicago: University of Chicago Press

Conner, C.J. & Bohan, C.H. 2014. The Second World War's Impact on the progressive educational movement: Assessing its role. The journal of Social Studies Research. 38. Pp 91-102

Cope, J. 2005. Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*. 29. Pp. 373-307

Cooper, S., Bottomley, C. and Gordon, J. (2009) An experiential learning approach to entrepreneurship education: a British initiative. In: Manimala, M. J., Mitra, J. and Singh, V. (eds.) *Enterprise Support Systems: An International Perspective*. Sage Publications India: New Delhi.

Cooper,S.; Bottomley,C. & Gordon, J. 2004. Stepping out of the classroom and up the ladder of learning. *Industry and Higher Education*. 18 (1) pp.11-22

Cornford, I.R.2005. Vocational education. In: English, L.M. (ed) *International Encyclopedia of Adult Education*. Palgrave Macmillan

Corson, D. 1985. Education for work: reflections toward a theory of vocational education. *International Review of Education*. 31 (3) pp. 283-302

Cotton, J. 1991. Enterprise education experience: a manual for school-based in-service training. *Education + Training*. 33. Pp. 6-12

Council of Chief State School Officers. 2011. *InTASC Model Core Teaching Standars: A Resource for State Dialogue*. Dalam www.ccsso.org/.../2011/intasc_model_core_teaching. Diakses 2 Mei 2015

Cuban, L. 2007. Hugging the middle: teaching in an era of testing and accountability, 1980-2005. *Education Policy Analysis Archives*. 15. 1-29

Cunningham,J., Barton & Lischeron, Joe. 1991. Defining entrepreneurship. *Journal of Small Business Management*. 19 (1) 45

Curri,G., Humphreys, M., Ucbasaran, D., & McManus, S.2008. Entrepreneurial leadership in The English Public Sector: Paradox or Possibility? *Public Administration*. 86 (4) pp.987-1008

Damarjati, Taufik. 2017. *Teaching Factory in Indonesia*. 3rd High Officials Meeting on SEA-TVET 23-25 May 2017 Kuala Lumpur Malaysia

Davidson, P. 1995. Culture, Structure, and Regional Levels of Entrepreneurship. *Entrepreneurship and Regional Development*. 7. Pp. 41-62

Davidson, P.; Wiklund, J. 1997. Values, Beliefs and Regional Variations in New Firm Formation Rates. *Journal of Economic Psychology*. Vol.18. 2/3 pp. 179-199

Desplaces, D.E.; Wergeles, F. & Mcguigan, P. 2009. Economic gardening through entrepreneurship education: A service learning approach. *Industry and Higher Education*. 23. Pp.473-484

Diener, E. & Suh, E.M. 2003. 22-National differences in subjective well-being. In; Kahneman, D.; Diener, E.; & Schwarz, N. (Ed.) *Well-being: the Foundations of Hedonic Psychology*

Deloitte, National Association of Manufacturers, The Manufacturing Institute. 2005. *Skills Gap Report-A Survey of The American Manufacturing Workforce*. Dalam www.themanufacturinginstitute.org/.../2005_skills. Diakses 5 Januari 2015

de Soto, Hernando.2014. How do Institutions Facilitate Entrepreneurship? In: *Creating the Environment for Entrepreneurial Success*. Washington, DC: Center for International Private Enterprise (CIPE)

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. *Indonesia Produktif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah

Drucker, P.F. 1985. *Innovation and Entrepreneurship*. New York:HarperCoollins Publishers Inc

Dunne, D. & Martin, R. 2006. Design thinking and how it will change management education: an interview and discussion. *Academy of Management Learning & Education*. 5. Pp. 512-523

Eddleston, K.A.; Otondo, R.F.; Kellermanns, F.W. Conflict, participative-decision making, and generational ownership dispersion: A multilevel analysis. *Journal of Small Business Management*. 46 (3) pp.456-484

Edelman, L.F., Monalova, T., Shirokova, G., & Tsukanova, T. 2015. The impact of family support on young entrepreneurs' start-up activities. *Journal of Business Venturing*. 31. Pp. 428-448

Engle, R.L.; Dimitriadi, J.V.; Gavidia, C.; Schlaegel, S.; Delanoe, I.; Alvarado, X.He.; Baume, S.& Wolf, B. 2010. Entrepreneurial intent: A twelve country evaluation of Ajzen's model of planned behavior. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*. 16 (1) pp. 35-57

Erkkila, K. 2000. *Entrepreneurial education: mapping the debates in the United States, the United Kingdom and Finland*. Abingdon, Taylor & Francis

Eddleston, K.A., Kellemanns, F.W., Sarathy, R. 2008. Resource configuration in family firms: linking resources, strategic planning and technological opportunities to performance. *Journal of Management Studies*. 45 (1) pp.26-50. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00717.x.

Eurydice.2016. *Entrepreneurship education at school in Europe. European Commission/EACEA*. Luxembourg: Publications Office of The European Union

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop).2011. *The Benefits of Vocational Education and Training. Luxemburg*: Publications Office of The European union

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop).2014. *The*

Benefits of Vocational Education and Training. Luxemburg: Publications Office of The European union

European Commission. 2014. *Entrepreneurship Education: A guide for educators. Entrepreneurship 2020 units Directorate-General for Enterprise and Industry*. Brussels: European Commission

Evans, D.S. & Jokovic, B. 1989. An estimated model of entrepreneurial choice under liquidity constraints. *Journal of Political Economy*. 98 (4) pp.808-827

Fallace, T.D. 2015. Race and The Origins of Progressive Eduation, 1880-1929. New York: Teachers College Press

Farrington, C.A.; Roderick, M.; Allensworth, E.; Nagaoka, J.; Keyes, T.S.; Johnson, D.W. & Beechum, N.O. 2012. *Teaching adolescents to become learners: the role of non cognitive factors in shaping school performance-A critical literature review*. ERIC

Fayolle, A. & Gaylly, B. 2008. From craft to science – teaching models and learning processes in entrepreneurship education. *Journal of European Industrial Training*. 32. 569-593

Fayolle, A. Gailly, B. & Lassas-Clerc, N. 2006. Assesing the impact of entrepreneurship education programmes: A new methodology. *Journal of European industrial Training*. 30. Pp.701-720

Ferrandez Berrueco, Reina Maria; Kekale, Tauno; Devins, David. 2016. A framework for work-based learning: basic pillars and the interactions between them. *Journal of Higher Education Skills and Work-Based Learning*. 6 (1) pp.35-54

Florida, Richard L.; Martin Prosperity Institute.2011. *Creativity and Prosperity; The Global Creativity Index*. Toronto, Ont: Martin Prosperity Institute

Fisher, S.; Graham, M. & Compeau, M. 2008. Starting from scratch: understanding the learning outcomes of undergraduate entrepreneurship education. In:

Harrison, R.T. & Leitch, C. (Eds). *Entrepreneurial learning: conceptual frameworks and applications*. New York, NY: Routledge

Franke, N. & Luthje, C. 2004. Entrepreneurial intentions of business students: a benchmarking study. *International Journal of Innovation and Technology Management*. 1 (3) pp.269-288

Fredricks, Jennifer; McColskey, Wendy; Meli, Jane; Montrosse, Bianca; Mordica, Joy; Mooney, Kathleen.2011. *Measuring student engagement in upper elementary through high school: a description of 21 instruments*. Regional Educational laboratory At Serve Centre UNC, Greensboro. REL2011-No.098

Fredricks, J.A.; Blumenfeld, P.C.; and Paris, A.2004. School engagement: potential of the concept: state of the evidence. *Review of Educational Research*. 74. 59-119

Fredricks, J.A.; Blumenfeld, P.C.; Friedel, J.; and Paris, A.2005. School engagement. In K.A. Moore and L. Lippman (Eds), *What do children need to flourish? Conceptualizing and measuring indicators of positive development*. New York: Kluwer Academic/Plenum Press

Freeman, R & LeRossignol, K. 2010. Taking Risks—experiential learning and the writing student. *Australian Journal of Adult Learning*. 50 (1) pp. 75-99

Friedman, T.L. (2005). *The world is flat: Abrief history of the the globalised world in in the twenty-first century*. New York: Farrar, Straus &Giroux

Gardner, H. 2007. *Responsibility at Work*. San Fransisco: Jossey-Bass

Gardner, H., Csikszentmihalyi, M., & Damon, W. 2001. *Good Work*. New York: Basic Books

Gartner, W.B.; Shaver, K.G.; Gatewood, E. & Katz, J.A. 1994. Finding the entrepreneur in entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*. 18. Pp. 5-9

Gibb,A.A.1993. Enterprise culture and education: Undestanding enterprise education and its links with small business. *International Small Business Journal*. 11 (3) pp.11-34

Gibb, A.A. 2002. In Pursuit of A New "enterprise" and "Entrepreneurship" Paradigm for Learning: Creative Deconstruction, New Values, New Ways of Doing Things and New Combination of Knowladge. *International Journal of Management Review*. Vol.4 pp. 233-269

Gorman, G.; Hanlon, D.; & King, W. 1997. Some research perspectives on entrepreneurship education, enterprise education and education for small business management: a ten-year literature review. *International Small business Journal*. 15, 56

Goss, D. 2005. Schumpeter's Legacy? Interaction and emotions in the sociology of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and practice*. 29. Pp. 205-218

Global Entrepreneurship Index, GEI (2018) Dalam https://thegedi.org/2018-global-entrepreneurship-index. Diakses 15 Juni 2019

Goel, Abhishek; Vohra, Neharika; Zhang, Liyan; Arora, Bhupinder. 2007. Attitudes of The Youth Towards Entrepreneurs and Entrepreneurship: A Cross-Cultural Comparison of India and China. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol. III pp. 29-62

Grubb, W.N. & Ryan, P. 1999. *The roles of evaluation for vocational education and training: Plain talk on the field of dreams*. Geneva: International Labor Office

Gunn, E. 2009 March 31. Avoid getting reorganized out of your company. *The Wall Street Journal*. 74 D6.

Gupta, V., MacMillan, I.C., & Urie, G. 2004. Entrepreneurial leadership: Developing and measuring a cross-cultural construct. *Journal of Business Venturing*.19. pp.141-160

Guy, B.A.; Sitlington, P.L.; Larsen, M.D.; & Frank, A.R. 2009. What are school offering as preparation for employment. *Career Development for Exectional Individuals*. 32 (30) 30-41

Haase, H. & Lautenschlager, A. 2011. The "teachability dilemma" of entrepreneurship. *International Entrepreneurship and Management Journal*.7. pp.55-70

Hackathorn, J.; Solomon, E.D.; Balnkmeyer, K.L. 2011. Learning by doing: an empirical study of active teaching techniques. *The Journal of Effective Teaching*. 11 (2) pp. 40-54

Hadam, S.; Rahayu, N. dan Ariyadi, A.N. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 langkah Revitalisasi SMK). Jakarta: Direktorat PSMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hager, P. & Holland, S. 2006. Introduction in P. Hager and S. Holland (Eds). *Graduates Attribute Learning and Employability*. The Netherlands: Springer

Halpern, R. 2006. After school matters in Chicago: apprenticeship as a model for youth programming. *Youth and Society*.38. 203-235

Hanafi, I. 2012. Re-orientasi ketrampilan kerja lulusan pendidikan kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*. 2 (1):107-116

Handelsman, J.; Miller, S. & Pfund, C. 2007. *Scientific Teaching*. NY: W.H. Freeman

Hall, J.C. dan Sobel, R.S. 2008. Institutions, entrepreneurship, and Regional Differences in Economic Growth. *Southern Journal of Entrepreneurship*. Vol.1 No.1 pp. 69-96

Hannon, PD. 2005. Philosophies of enterprise and entrepreneurship education and challenges for higher education in the UK. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*. 6. Pp. 105-114

Har, L.B. 2011. A reflective account of a preservice teachers's effort to implement a progressive curriculum in field practice. *Schools: Studies in Education*. 8. Pp. 22-39

Hayton,C.J.; George, G.; Zahra, S.A. 2002. National Culture and Entrepreneurship: A Review of *Behavioral Research Entrepreneurship Theory and Practice*. Vol.26. 4 pp.33-52

Heder, E.; Ljubic, M.; & Nola, L. 2011. *Entrepreneurial learning- a key competence approach*. Zagreb, Croatia: South East European Centre for Entrepreneurial Learning

Heinonen, J &Poikkijoki, S.2006. An entrepreneurial directed approach to entrepreneurship education: Mission impossible? *Journal of Management Development*. 25 (1) pp.80-94

Helle, L.; Tynjala, P.; & Olkinuora, E. 2006. Project-based learning in post-secondary education- theory, practice

and rubber sling shots. *Higher Education*. 51. Pp.287-314

Henry, C.; Hill, F.; & Leitch, C. 2005. Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I. *Education + Training*. 47. Pp. 98-111

High School Survey of Student Engegament (HSSSE). Dalam www.indiana.edu/-ceep/hssse, Diakses 20 Juli 2015

Hindle, K. 2002. A grounded theory for teaching entrepreneurship using simulated games. *Simulation and Gaming*. 13 (2) pp. 236-241

Hindle, K. 2007. Teaching entrepreneurship at university: from the wrong building to the right philosophy. In: Fayolle, A. (Ed.) *Handbook of Research in Entrepreneurship Education*. Cheltenham, UK: Edward Elgar

Hmieleski, K.M. & Corbett, A.C. 2006. Proclivity of improvisation as a predictors of entrepreneurial intentions. *Journal of Small Business Management*. 44 (1) pp 45-63

Hoffman, B.J.; Woehr, D.J.; Maldagen-Youngjohn, R.; Lyons, B.D. 2011. Great man or great myth? A quantitative review of the relationship between individual differences and leader effectiveness. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*. 84 (2) 347-381

Holcombe, R.G. 2003. Progress and Entrepreneurship. *The Quaterly Journal of Austrian Economics*. Vol.6.3 pp 3-26

Howard, A. 2004. Cooperative education and internships at the threshold of the twenty first century. In: P.L. Linn; A. howard & E. Miller. *Handbook for research*

in cooperative education and internships (pp.3-10). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum

Hughes, K.L.; Bailey, T.R. & Mechur, M.J. 2001. *School-to-work: Making a difference in education. A research report to America*. NY: Institute on Education and The Economy, Teachers College, Columbia University

Hytti, U. & O'Gorman, C. 2004. What is "enterprise education?" An analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries. *Education + Training*. 46. Pp. 11-23

Ireland, R.D. & Hitt, M.A. 1999. Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership. *Academy of Management Executive*. 13 (1) pp.43-57

Izedonmi, Prince Famous dan Okafor, Chinonye. 2010. The Effect of entrepreneurship Education on Students' Entrepreneurial Intentions. *Global Journal of Management and Business Research*. Vol.10 pp. 49-60

Jackson, J.E.; Rodkey, G.R. 1994. The Attitudinal Climate for Entrepreneurial Activity. *Public Opinion Quarterly*, 58. Pp.358-380

Jackson, D. 2010. An international profile of industry-relevant competencies and skills gaps in modern graduates. *International Journal of Management Education*. 8 (3) 29-58

Jackson, D. 2013.Business graduates employability-where are we going wrong. *Higher Education Research & Development*. 32 (5) 776-790. doi: 10.1080/07294360.2012.709832

Jeffry A. Timmons & Stephen Spinelli. 2004. *New Venture*

Creation: Entrepreneursihp for The 21st Century. Toronto: Irwin/McGraw-Hill

Jerald, Craig D. (July 2009). *Defining a 21st century education.* The Centre for Public Education

Johansen, V. & Schanke, T. 2013. Entrepreneurship education in secondary education and training. *Scandinavian Journal of Education Research*. 57 (4). Pp.357-368

Johannisson, B. 2010. The agony of the Swedish school when confronted by entrepreneurship. In: Skogen, K. & Sjovoll, J. (Eds) *Creativity and innovation, preconditions for entrepreneurial education*. Trondheim: Tapir Academic Press

Jones, B. & Iredale, N. 2010. Enterprise education as pedagogy. *Education + Training*. 52. Pp. 7-19

Jones, C. 2011. *Teaching Entrepreneurship to Undergraduates*. Chetenham: Edward Elgar

Jones,C. & English, J. 2004. A contemporary approach to entrepreneurship education. *Education + Training*. 46. Pp. 416-423

Johnson, C. 1998. Enterprise education and training. *British Journal of education and Work*. 2 pp. 61-65

Kalita, S.M. 2009, May 13. Americans see 18% of wealth vanish. *The Wall Street Journal*. 59 pp. 1,A8

Kamdar, D. & Van Dyne, L. 2007. The joint effect of personality and workplace social exchange relationships in predicting task performance and citizenship performance. *Journal of Applied Psychology*. 92. pp. 1286-1298

Kanungo, R.N. 1998. *Entrepreneurship and Innovation: Models for Development*. New Dehli: Sage Publ.

Karen, Ellis & Carolin, Williams.2011. *Maximising impact of youth entrepreneurship support in different contexts- Background report, framework and toolkit for consultation*. Overseas Development Institute. LondonSE17JD. UK

Kasali, Rhenald. 2005. *Change*. Jakarta: Gramedia

Kasali, R. 2010. *Wirausaha Mandiri: Kisah Inspiratif Anak Muda Mengalahkan Rasa Takut dan Bersahabat dengan Ketidakpastian. Menjadi Wirausaha Tangguh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kasinath, H.M. 2013. Service learning: concept, theory and practice. *International Journal of Education and Psychological Research*. 2 (2) pp. 1-7

Kayne, Joseph A.; Atman, John W. 2005. Creating Entrepreneurial Societies: The Role and Challenge for Entrepreneurship Education. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol. 1 pp. 43-53

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Pusbangprodik

Kempster,, S.J. & Cope, J.2010. Learning to lead in the entrepreneurial context. *Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*. 16 (6) pp.5-34

Kenny, M.E.; Walsh-Blair, L.Y.; Blustein, D.L.; Bempechat, J.; & Sletzer, J. 2010. Achievement motivation among urban adolescents: work hope autonomy support, and achievement related beliefs. *Journal of Vocational Behavior*. 77. 205-212

Kenwot-U'Ren, A.; Taylor, M. & Petri, A. 2006. Component of succesful service learning programs: notes from

Barbara Holland, Director of the US Service Learning Clearinghouse. *International Journal of Case Method Research and Application*. 18. Pp. 120-129

Khurniawan, Ari Wibowo dan Haryani, Tri (Eds). 2016. *Grand desain pengembangan teaching factory dan technopark di SMK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kirby, David. 2008. Higher Education, ADHD and The Creation of Student Entrepreneurs: Is There a Need to Rethink? *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.IV.4. pp. 110-122

Kirby, D.A. 2004. Entrepreneurship education: can business school meet the challenge? *Education + Training*. 46. Pp. 510-519

Klotz, A.C.; Hmieleski, K.M.; Bradley, B.H.; & Busenitz, L.W. 2014. New venture teams a review of the literature and roadmap for future research. *Journal of Management*. 40. Pp.226-255

Kolb, D.A.1984. *Experiential Learning: experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs

Kraiger, K.; Ford, J.K. & Salas, E. 2003. Application of cognitive, skill-based, and affective theories of learning outcomes to new methods of training evaluation. *Journal of Applied Psychology*. 78. Pp. 311-328

Kreft, S.F. dan Sobel, R.S. 2005. Public Policy, Entrepreneurship and Economic Freedom. *Cato Journal*. Vol 25 No. 3

Kristiansen, S & Indarti, N. 2004. Entrepreneurial intention among Indonesian and Norwegian students. *Journal of Enterprising Culture*. 12 (1) pp. 55-78

Krueger, Jr. N.F., Reilly, M.D., dan Carsrud, A.L. 2000. Competing Models of Entrepreneurial Intentions. *Journal of Business Venturing*. Vol. 15 pp. 411-432

Krueger, N.F. 1993. The Impact of Entrepreneurial Exposure on Perceptions of New Venture Feasibility and Desirability. *Entrepreneurship: Theory and Practice*. No. 18 pp. 5-21

Krueger, N.F.; Reilly, M.D.; & Carsrud, A.L. 2000. Competing model of entrepreneurial intentions. *Journal of Business Venturing*. 15 (5/6) pp. 411-432

Krueger, N.F. 2005. The cognitive psychology of entrepreneurship. In: Acs, Z.J. & Audretsch, D.B. (Eds) *Handbook of entrepreneurship research: an interdisciplinary survey and introduction*. New York: Springer

Krueger, N.F. 2007. What lies beneath? The experiential essence of entrepreneurial thinking. *Entrepreneurship Theory and Practice*. 31. Pp. 123-138

Kuratko,D.F.2007. Entrepreneurial leadership in the 21st century. *Journal of Leadership and Organizational Studies*. 13.4.

Kuratko, D.F. & Hodgetts, R.M. 2007. *Entrepreneurship: Theory, Process, Practice 7ed*. Mason OH: Thomson/ South Western Publishing

Kuratko, D.F. 2005. The emergence of entrepreneurship education: Developments, trends, and challenges. *Entrepreneurship Theory and Practice*. 29 (5) p.580

Kyrgidou, L.P. & Hughes, M. 2010. Strategic entrepreneurship: Origins, core elements and research directions. *European Business Review*. 22 (1) pp. 43-63

Kyro, P. 2005. Entrepreneurial learning in cross-cultural contex challenges previous learning paradigms. In: Kyro, P & Carrier, C. (Eds) *The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context.* Hameenlinna: University of Tempere

Labaree, D.F. 2005. Progressivism, schools and schools of education: An American romance. *Pardagogica Historica*. 41. Pp. 275-288

Lachman,S.J.(1997). Learning is a process: Toward an improve definition of learning. *Journal of Prsychology*, 131, 477-480

Lackeus, M.; Lundqvist, M. & Williams Middleton, K. 2013. How can entrepreneurship bridge between traditional and progressive education? *ECSB Entrepreneurship Education Conference*. Aarhus, Denmark, 29-31 May 2013

Lackeus, Martin. 2015. *Entrepreneurship in Education. What, Why, When, How*. OECD: European Commission

Lackeus, Martin. 2013. Developing entrepreneurial competencies an-action based-approach and classification in education. *Licentiate Thesis*. Chalmers University of Technology

Lackeus, Martin. 2014. An emotion based approach to assessing entrepreneurial education. *International Journal of Management Education*. 12. Pp. 374-396

Lee, S.H. & Wong, P.K. 2005. An exploratory study of technopreneurial intention: a career anchor perspective. *Journal of Business Venturing*. 19. Pp. 7-28

Lee, Edward Yiu-chung; Anderson, Alistair R. 2007. The Role of Guanxi in Chinese Entrepreneurship. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.III.3. pp.38-51

Lee, L. dan Wong, P.K. 2003. Attitude Towards Entrepreneurship Education and New Venture Creation. *Journal of Enterprising Culture*. No. 11 pp. 339-357

Leffler, E & Falk-Lundqvist, A. 2013. What about students' right to the "right" education? An entrepreneurial attitude to teaching and learning. *International Perspectives on Education and Society*. 23. Pp. 191-208

Lerman, R.I.; Eyster, L. & Chambers, K. 2009. *The benefits and challenges of registered apprenticeships: The sponsors' perspective*. Washington, DC: The Urban Institute

Levesque, M. & Minniti, M. 2006. The effect of aging on entrepreneurial behavior. *Journal of Business Venturing*. 21 (2) pp.177-194

Levy, F. & Murnane, R.J. (2004). *The new division of labor: How computers are creating the next job market*. Princenton, NJ: Russel Sage Foundation

Levy, F & Murnane, R.J. 2007. How Computerized Work and Globalization Shape Human Skill Demands. In Suarez-Orozco, M.M. (Ed.). *Learning in The Global Era: International perspectives on globalization and education (pp.158-176)*. Berkeley, CA: University of California Press

Lewis, M.V. & Stone, J.R.III (2011, March). Should your school offer apprentichship training? *Techniques*. 86 (3) 17-21

Linan, F. 2004. Intention-based models of entrepreneurship education. *Piccolla Impresa/ Small Business, Iss*. 3 pp. 11-35

Linan, F & Chen, Y.W. 2009. Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure

entrepreneurial intentions. *Entrepreneurship Theory & Practice*. 33 (3) pp.593-617

Linnehan, F. 2001. The relation of work based mentoring program to the academic performance and behavior of African American students. *Journal of Vocational Behavior*. 59. 310-325

Litan, Robert.2014. *Entrepreneurship and Economic Growth. Dalam Creating The Environment for Entrepreneurial Success*. Washington DC: Centre for International Private Enterprise

Lobler, H. 2006. Learning entrepreneurship from a constructivist perspective. *Technology Analysis & Strategic Management*. 18. Pp. 19-38

Lucas, Bill; Spencer, Ellen; & Claxton, Guy. 2012. *How to Teach Vocational Education: A Theory of Vocational Pedagogy*. City & Guilds. Centre for Skills Development

Manolova, T., Shirokova, G., Tsukonova, T & Edelman, L. 2014. The impact of family support on young nascent entrepreneurs's start-up activities: A family embeddedness perspective. *Working Paper*. Saint Petersbug: St. Petersburg State University Graduate School of Management

Markowitz, H. 2003. Research Group and "Quasi-Firms": The Intervention of The Entrepreneurial University. *Research Policy*, 32. Pp. 109-121

Mason, C. & Arshed, N. 2013. Teaching entrepreneurship to university students through experiential learning: A case study. *Industry and Higher Education*. 27 (6) pp. 449-463

Mahieu, R. 2006. Agents of change and policies of scale: a policy study of entrepreneurship and enterprise in education. *Doctoral thesis*. Umea universitet

Markman, G.D.; Baron, R.A. & Balkin, D.B. 2005. Are perseverance and self-efficacy costless? Assessing entrepreneurs' regretful thinking. *Journal of Organizational Behavior*. 26. Pp. 1-19

Matthews, C.H. dan Moser, S.B. 1995. Family Background and Gender: Implication for Interest in Small Firm Ownership. *Entrepreneurship and regional Development*. No. 7 pp. 365-377

Menzies, T.V. & Paradi, J.C. 2002. Encouraging technology-based ventures; entrepreneurship education and engineering graduates. *New England Journal of Entrepreneurship*.5. pp. 57-64

Meyers, S. 1999. Service learning in alternative education settings. *The Clearing House*. 73. Pp. 114-117

McHug, P.P. 2017. The impact of compensation, supervision and work design on internship efficacy: implications for educators, employers, and prospective interns. *Journal of Education and Work*. 30 (4) pp.367-382

Middle States Commission on Higher Education. 2007. *Student learning assessment options and resources (second edition)*. Philadelphia: Author. www.msche.org

Miettinen, Asko. 2008. Entrepreneurship Education Among Students in Higher Education. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.IV. 4 pp. 1-14

Miller, J.W. 2009, March 24. WTO predicts global trade will slide 9% this year. *The Wall Street Journal*. 68 p.A8

Miller, R.B.; Greene, B.A.; Montalvo, G.P; Ravindran, B.; and Nichols, J.D.1996. Engagement in academic work: the role of learning goals, future consequences, pleasing others, and perceived ability. *Contemporary Educational Psychology*. 21. 388-422

Minna, Hamalainen; Elena, Ruskovaara; Timo, Pihkala. 2018. Principals promoting entrepreneurship education: the relationships between development activities and school practices. *Journal of Entrepreneurship Education*. 21 (2) pp. 1-19

Moberg, K. 2014b. Two approaches to entrepreneurship education: the different effects of education for and through entrepreneurship at the lower secondary level. *International Journal of management Education*. 12. Pp. 512-528

Moberg, K. 2014a. Assessing the impact of entrepreneurship education – from ABC to PhD. *Doctoral Thesis*, Copenhagen Business School

Moerwismadhi.2009. Teaching factory suatu pendekatan dalam pendidikan vokasi yang memberikan pengalaman ke arah pengembangan technopreneurship. *Makalah: Disampaikan pada seminar nasional technopreneurship learning for teaching factory tanggal 15 Agustus 2009 di Malang Jawa Timur*

Motivation and Engegament Scale (MRS) Dalam www.lifelongachievement.com Diakses 28 Juli 2015

Moorhouse, A., & Caltabiano, M.L. 2007. Resilience and unemployment: Exploring risk and protective influences for the outcome variables of depression and assertive job searching. *Journal of Employment Counseling*. 44. pp. 115-125

Mulyatiningsih, Endang; Soegiyono; Purwanti, Sutriyati. 2014. *Materi Pembekalan Pengembangan Edupreneurship Sekolah Menengah Kejuruan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Mulyatiningsih, Endang dan Soegiyono. 2014. *Pengembangan Edupreneruship Sekolah Kejuruan. Materi Pembekalan*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Munadi, Sudji; Widarto; Yuniarti, Nurhening; Jerusalem, Moh. Adam; Hermansyah; dan Rahmawati, Fitri. 2008. *Employability Skills Lulusan SMK dan Relevansinya Terhadap Dunia Kerja*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Murugesan, R. 2010. A Comparative Study on the Terminal and Instrumental Value System of Entrepreneurs and Students. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.VI.2 pp.85-101

Murnieks, C.Y. 2007. Who am I? The quest for the entrepreneurial learning identity and an investigation of its relationship to entrepreneurial passion and goal setting. *Doctoral Thesis*, University of Colorado

Nadgrodkiewicz, Anna. 2014. Building entrepreneurship ecosystems. In: *Creating the Environment for Entrepreneurial Success*. Washington, DC: Center for International Private Enterprise (CIPE)

National Center on Education and The Economy. 2007. *Tough choices for tough time: The report of The New Commission on The Skills of The American Workforce*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass

Nevada Department of Education.2018. *Work Based-Learning Guide for Secondary Education.* Office of Career readiness, Adult Learning and Education Options. Carson City, NV: Nevada Department of Education

Nielsen, S.L. & Lassen, A.H. 2012. Identity in entrepreneurship effectuation theory: a supplementary framework. *International Entrepreneurship Management Journal.* 8(3) pp.373-389

OECD. 2012. *OECD Reviews of Vocational Education and Training. Key Massages and Country Summaries*. Dalam www.oecd.org/education/skills-beyond

O'Connor, G.C. 2008. Major innovation as a dynamic capability: A system approach. *Journal of Product Innovation Management*. 25. Pp. 313-330

Okudan, G.E. & Rzasa, S.E. 2004. Teaching entrepreneurial leadership: A project based approach. *34th Annual Frontiers in Education, 2004. FIE 2004*. Doi: https://doi.org/10.1109/FIE.2004.1408501

O'Reilly, C.A. & Tushman, M.L. 2013. Organizational ambidexterity: past, present, and future. *The Academy of Management Perspectives*. 27. Pp. 324-338

O'Toole, J & Lawler, E.E.III. 2006. *The New American Workplace*. New York: PalgraveMcMillan

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. 2010. *Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons

Pacific Policy Research Centre.August 2010. *21st Century Skills for Students and Teachers*. Kamehameha Schools Research & Evaluation Division. Honolulu: Kamehameha Scholls. Dalam www.ksbe.edu/spi Diakses 8 Juli 2015

Parker, P. 2008. Promoting Employability at "Flat" World. *Journal of Employment Counseling*. 45 pp.2-13.

Penaluna, K; Penaluna, A; & Jones, C. 2012. The context of enterprise education: insights into current practices. *Industry & Higher Education*. 26 (3) pp.163-175

Pittaway, L. & Cope, J. 2007. Simulating entrepreneurial learning: Integrating experiential and collaborative approaches to learning. *Management Learning*. 38 (2) pp.211-233

Piirto, J. (2011). *Creativity for 21st skills How to embed creativity into the curriculum*. Rotterdam/Boston/ Taipei: Sense Publishers

Porath, C.L. & Bateman, C.S. 2006. Self-regulation: From goal orientation to job performance. *Journal of Applied Psychology*. 91. pp. 185-192

Prabhu,G,N, 1999. Social entrepreneurial leadership. *Career Development International*. 4 (3) pp. 140-145

Prianto, A. 2013. Menakar Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Managemen Usahawan Indonesia*. 42 (1) pp. 74-97

Prianto, A. 2017. Various variables to trigger entrepreneurial intention for young entrepreneurs in East Java Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*. 32-44

Prianto, A. 2013. Berbagai variabel yang mempengaruhi kesiapan bekerja para pencari kerja. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*.42 (3) 219-247

Prianto, A. 2015. The effect of the involvement intensity in extracurricular activities and soft skills toward readiness to waork for higher education graduates in

East Java. Dalam *Proceedings International Seminar and Call for Papers Reorienting Economics & Businness in The Context of National and Global Development*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 285-302

Prianto, A; Zoebaidha, S.; Sudarto, A.; Hartati, R.S. 2018. The effectiveness of entrepreneurship learning model in growing competence and entrepreneurial intention ov vocational high school students in East Java Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*. 8 (8) pp. 199-209

Prosser's Sixteen Theorems on Vocational Education. A basic for Vocational Philosophy. Dalam: www.morgancc.edu. Diakses 20 Juli 2019

Psilos, P. & Galloway, T. 2018. *Entrepreneurship programming for youth: Evidence report*. Washington, DC USAID's Youth Power: Implementation Youth Power Action

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. *APK & APM SD, SMP, dan SM (Termasuk Madrasah dan Sederajat)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. *Statistik Sekolah Menengah Atas (SMA) 2013/2014*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. *Rangkuman Statistik Persekolahan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. *Statistik SMK 2018/2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. *Statistik SMA 2018/2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan. 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa. Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan.* Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

QAA. 2012. *Enterprise and entrepreneurship education: Guidance for UK higher education providers*. Gloucester, UK: The Quality Assurance Agency for higher Education

Rae,D. & Carswell, M.2000. Using a life story approach in researching entrepreneurial learning: The development of a conceptual model and its implications in the design of learning experiencess. *Education + Training*. 42 (5) pp.220-228

Rae, D. 2010. Universities and enterprise education: responding to the challenges of the new era. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. 17. Pp. 591-606

Ranking Web of Universities. Dalam www.webometrics.info Diakses 2 Januari 2015

Read, S.; Sarasvathy, S.; Dew, N.; Wiltbank, R. & Ohlsson, A-V. 2011. *Effectual Entrepreneurship*. Abingdo: Taylor & Francis

Regional Community Briefing World Economic Forum.2016. Human Capital Outlook ASEAN. Kuala Lumpur 1-2 June 2016

Reynold, S.J. & Ceranic, C.L. 2007. The effecft of moral judgment and moral identity on moral behavior: An empirical examination of the moral individual. *Journal of Applied Psychology*. 92. Pp.1610-1624

Rheynolds, P.D. 1997. Who start new firm?-Preliminary explorations of firm-in-gestation. *Small Business Economics*. 9 (5) pp. 449-462

Robinson, K. 2006. *Ken Robinson Says School Kill Creativity.* Talk (online). TED-Talks. Dalam: http://www.ted.com/talks/ken-robinson-syas-school-kills-creativity.html. Diakses 11 Mei 2011

Rosendahl Huber, L.; Sloof, R. & Van Praag, M. 2012. *The effect of earlyentrepreneurship education: evidence from a randomized field experiment*. Tinbergen Institute Discussion Paper.12-041/3. http://ssrn.com/abstract=2044735

Ruskovaara, E; Hamalainen, M. & Pihkala, T. 2016. HEAD teachers managing entrepreneurship education-empirical evidence from general education. *Teaching and Teacher Education*. 55. Pp. 155-164

Ruskyte, Dziuljeta & Navickas, Vytas.2017. Efficiency of teaching and learning methods for development of learner Entrepreneurship. *Pedagogika/Pedagogy*. 126 (2) pp. 168-184

Sanchez, J.C. 2011. University training for entrepreneurial competencies: its impact on intention of venture creation. *International Entrepreneurship and Management Journal*. 7. Pp. 239-254

Sanchez, J.C. 2013. The impact of an entrepreneurship Education Program on entrepreneurial competencies

and intention. *Journal of Small Business Management*. 51 (1) pp. 447-465

Sasmito, A.P, Kustono, D., & Patmanthara, S. 2015. Kesiapan memasuki dunia usaha/dunia industri (DUDI) siswa paket keahlian rekayasa perangkat lunak di SMK. *Jurnal Teknologi Kejuruan*. 38 (91): 2540. (http://journal.um.ac.id/index.php/teknologikejuruan/article/download/4597/1027)

Scharborough, N.M.; Wilson, D.; Zimmerer, T.W. 2010. *Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach 9th Edition*. Pearson Prentice Hall

Scheiner, Christian; Laspita, Stavroula; Brem, Alexander; Chlosta, Simone; Voigt, Kai-Ingo. 2008. Founding Intention: A Gender persepective. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.IV (4) pp. 15-35

Scheaffer,Richard L,; Mendenhall, William; Ott, R. Lyman & Gerow, Kenneth G.2012. *Elementary Survey Sampling 7th Edition*. Boston: Duxbury Press

Schoof, Ulrich.2006. Stimulating youth entrepreneurship: Barriers and incentives to enterprise start-ups by young people. International labour Organization. *SEED Working Paper*. No. 17

Sebora, Terrence; Li, Weixing. 2006. The Effects of Economic Transtition on Chinese Entrepreneurship. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vo,II.3 pp.26-42

Seikkula-Leiono, J.; Ruskovaara,E.; Ikavalko, M.; Mattila, J. & Rytkola, T 2010. Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher? *Education + Training*. 52. 117-127

Sermsuk, S.; Triwichitkhun, D.; & Wongwanich, S. 2014. Employment conditions and essential employability skills required by employers for secondary school graduate. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 116. Pp. 1848-1854

Singh, Raja Roy. (1991). *Education for the twenty-first century: Asia-Pacific Perspectives*. Bangkok: UNESCO

Siswanto, Ibnu.2015. Teaching factory SMK Program Keahlian Otomotif. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Otomotif UMP tanggal 23 Mei 2015*.

Shane, S. 1994. The Effect of National Culture on the Choice Between Licensing and Foreign Direct Investment. *Strategic Management Journal*. Vo. 15.8 pp.627-643

Shapero, A. & Sokol, L. 1982. Social dimensions of entrepreneurship, in Kent, C.A., Sexton, D.L., and Vesper, K.H. (Eds). *Encyclopedia of Entrepreneurship*. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ)

Shaver, K.G. & Scott, L.R. 1991. Person, process, choice: the psychology of new venture creation. *Entrepreneurship Theory and Practice*. 16 (2) pp. 23-45

Skinner, E. and Belmont,M.J.1993. Motivation in the classroom: reciprocal effects of teacher behavior and student engagement acroos the school year. *Journal of Educational Psychology*. 85.571-581

Solt, Michael E. 2007. Transforming China in The 21st Century Through Entrepreneurship. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol. III.1 pp.64-89

Souitaris, V.; Zerbinati, S. & Al-Laham, A. 2007. Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The

effect of learning, inspirations and resources. *Journal of Business Venturing*. 22 (4) pp. 566-591

Stazs, C. & Kaganoff, T. (December 1997). *Learning how to learn at work: Lessons from three high schools programs*. Berkeley, CA: National Research Center in Vocational Education

Stazs, C. & Stern, D. 1998. *Work-Based learning for students in high school and community colleges*. Berkeley, CA: National Research Center in Vocational Education

Stern, D.; Rahn, M.L. & Chung, Y.P. 1998. Design of work-based learning for students in The united States. *Youth Society*.29. 471-502

Stewart, W.H. Jr. & Roth, P.L.2004. Data quality affects meta-analytics conclusions: A response to Miner and Raju (2004) concerning entrepreneurial risk prospensity. *Journal of Applied Psychology*. 89 (1)

Strubler, D.C. & Redekopp, B.W.2010. Entrepreneurial human resource leadership: A conversation with Dwight Carlson. *Human Resource Management*. 49 (4) pp.793-804

Sullivan, John D.2014. *CIPE's Approach to Building Environments for Entrepreneurial Success. Dalam: Creating the Environment for Entrepreneurial Success*. Washington, DC: Center for International Private Enterprise (CIPE)

Surie, G. & Ashley,A. 2007. Integrating pragmatism and ethics in entrepreneurial leadership for sustainable value creation. *Journal of Business Ethics*. 81. Pp.235-246

Surlemont, B. 2007. 16 promoting enterprising: A strategic move to get schools' cooperation in the promoting of entrepreneurship. In: Fayole, A (Ed) *Handbook of research in entrepreneurship education: contextual perspectives*. Cheltenham, UK: Edward Elgar

Suryana. 1996. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Penerbit Salemba

Suyanto. 2015. Profesionalisme pendidik di era MEA. *Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogjakarta Bekerja Sama dengan ASPROPENDO tanggal 9 Mei 2015*

Symonds, M.E.; Budge, H.; Perkins, A.C.; Lomax, M.A. 2011. Adipose Tissue development – impact of the early life environment. *Progress in Biophysics and Molecular Biology*. 106 (1) 300-306

Swiercz, P.M. & Lydon, S.R. 2002. Entrepreneurial leadership in high tech firms: A field study. *Leadership & Organization Development Journal*. 23 (7) pp.380-389

Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. 2007. *Experimental Designs Using Anova 1st Edition*. Northrige: California State University

Tan, S.S. & Ng, C.K.F. 2006. A problem based learning approach to entrepreneurship education. *Education + Training*. 48. Pp. 416-428

Taylor,S.E. 2011. *Social Support: A Review. In: Friedman, M.S. (Ed). The Handbook of Health Psychology*. New York, NY: Oxford University Press.

Taylor, A. & Watt-Malcom, B. 2007. Expansive learning through high school apprenticeship: opportunities and limits. *Journal of Education and Work*. 20 (1) 27-44

Tesfom, Goitom.2006. The Role of Social Networks on the Entrepreneurial Drive of First Generation East African Origin Entrepreneurs in The Seattle Area. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol. II.3. pp. 2-25

Tennessee Department of Education. May 2017. *Work-Based Learning Policy Guide*. TN. Department of Education.

The Global Innovation Index 2014 The Human Factor in Innovation. Dalam www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf. Diakses 2 Januari 2015

Thompson, E.R. 2009. Individual entrepreneurial intent: construct clarification and development of an internationally reliable metric. *Entrepreneurship, Theory and Practice*. 33 (3) pp.669-694

Timmons, J.A. 1999. *New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century*. NY: Irwin/McGraw-Hill

Timmons, J.A. & Spinelli, S. 2004. *New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century 6th Ed*. NY: Irwin/McGraw-Hill

Triatmoko.2009. *The ATMI Story, Rainbow of Excellence*. Surakarta: Atmi Press

Uhryn, O. 2013. Psychological readiness of students to work in a professional field. Journal of Educational Culture and Society. 2. Pp. 97-107

Valliere, Dave. 2015. An effectuation measure of entrepreneurial intent. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 169. Pp.131-142

Vecchio, R.P. 2003. Entrepreneurship and leadership: Common trends and common threads. *Human Resource Management Review*. 13. Pp. 303-327

Vedder, R., Denhart, C., & Robe, J. 2013. *Why Are Recent College Graduates Underemployed?* Washington, D.C.: A Policy Paper from The Centrefor College Affordability and Productivity

Vina, Lynda de la; Darragh, Linda; Sitoula, Robin; Shamma, Rami &Bindenagel, JD.2014. Developing Young Leaders through Entrepreneurship Education. In: *Creating the Environment for Entrepreneurial Success.* Washington, DC: Center for International Private Enterprise (CIPE)

Volkmann, C.; Wilson, K.E.; Mariotti, S.; Rabuzzi, D.; Vyakarnam, S.; & Sepulveda, A. 2009. *Educating The Next Wave of Entrepreneurs – Unlocking entrepreneurial capabilities to meet the global challenges of the 21st century*. Geneva: World Ecoomic Forum

Wagiran. 2008. Butir-butir pemikiran pengembangan pendidikan vokasi secara holistic. *Makalah disampaikan dalam seminar internasional revitalisasi pendidikan kejuruan dalam pengembangan SDM nasional.* Diselenggarakan oleh Aptekindo di Universitas Negeri Padang.

Wagner, J. O. 2006. *Workreadiness skills. Youthwork Information Briefs*. Dalam: www.learningworkconnection.org. Diakses 12 Januari 2013

Wennekers, S. dan Thurik, R. 1999. Linking Entrepreneurship and Economic Growth. *Small Business Economics*. Vol 13 No.1 pp. 27-55

Whittington, D. & McLean, A. 2001. Vocational learning outside institutions: online pedagogy and de-schooling. *Studies in Continuing Education*. 23 (2) pp. 153-167

Wolf, A. 2002. *Does Education Matter?*. London: Pinguin

Wong, P.K.; Ho, Y.P; & Autio, E. 2005. Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data. *Small Business Economic*. 24. Pp. 335-350

Work Readiness Skills. Tanpa Tahun. *MekongSkills2Work Sourcebook: A Guide for Administrators and Instructors.* Dalam: www.mekongskills2work.org. Diakses 6 Juni 2019

Working Group on Teaching Evolution; Board on Science Education; Division of Behavioral and Social Sciences and Education; National Academy of Sciences. 1998. *Teaching abaout evolution and the nature of science.* Dalam www.nap.edu Diakses 20 Mei 2015.

Xavier, Siri Roland; Ismail, Ahmad Zaki; Ahmad, Syed Zamberi. 2010. Cilture and Economic Determinants of Entrepreneurial Prospensity: A Study of Multi Etnic Society in Malaysia. *Journal of Asia entrepreneurship And Sustainability*. Vol.VI.2. pp. 67-83

Zimmerer, T.W. & Scarborough, N.M. 1998. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management (2nd ed.)*. New York: Prentice Hall.

www.cfsd16.org/century/pdf

www.ccsso.org/documents.pdf

http://Pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id. Pengangguran terbuka menurut pendidikan dan lokasi tempat tinggal. Diakses 21 Maret 2013

http://merdeka.com. Permintaan tenaga kerja di Indonesia. Diakses 5 Maret 2013

http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/berita/402, Informasi Kerja Jawa Timur. Diakses 8 Maret 2013

INDEKS

A

akademik 11, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 45, 82, 91, 219, 242, 243, 246

APK 30, 31, 32, 306, 320

B

bakat 10, 24, 25, 132, 143

bangsa 37, 48, 50, 103, 112, 208

Bekerja vii, ix, x, 77, 85, 128, 159, 168, 172, 177, 252, 253, 258, 259, 312, 318, 320

Belajar vii, 40, 92, 108, 210, 256, 318, 320

bengkel 7, 9, 13, 35, 46, 245, 246

berubah 14, 62, 66, 68, 79, 106, 112, 137, 141, 182, 183, 192, 193, 200, 202, 219

C

Cermat 83, 253, 320

cita-cita 21, 95, 100, 101, 221, 252, 273

E

efektifitas 34, 67, 169, 220

Ekonomi vii, 44, 305, 306, 312, 316, 320

Employability 11, 281, 290, 303, 305, 320

Entrepreneurial 106, 277, 278, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 288, 290, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 300, 303, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 320

F

fundamental 59

G

GEI 6, 50, 54, 55, 289, 320

Globalisasi ix, 112, 195, 196, 197, 198, 320

Guru viii, 17, 20, 92, 124, 125, 148, 295, 320

I

Industri x, 221, 318, 320

Inovatif 64, 129, 320

K

Karakter viii, 124, 128, 307, 320

karir 7, 21, 47, 70, 78, 84, 85, 99, 100, 126, 206, 218, 219, 220, 221, 222, 223,

224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 273

Keahlian 310, 321

Kecakapan ix, 51, 84, 88, 89, 146, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 173, 177, 179, 184, 205, 260, 263, 264, 321

Kejuruan iv, x, 1, 4, 18, 77, 176, 219, 285, 296, 303, 309, 321

kemandirian 47, 95, 103, 119, 131, 146, 177, 202, 251

kepekaan 36, 43

Kepemimpinan 60, 64, 65, 68, 85, 89, 132, 321

Kerja ix, 67, 83, 84, 129, 133, 156, 159, 171, 177, 199, 202, 218, 220, 234, 244, 260, 262, 264, 267, 303, 315, 321

kesejahteraan 44, 47, 48, 49, 57, 98, 112, 222, 231

Kesiapan vii, ix, x, 10, 77, 80, 159, 168, 172, 176, 252, 253, 258, 259, 261, 263, 265, 266, 268, 309, 321

Ketekunan 85, 90, 169, 173, 321

Ketrampilan 88, 321

Kewirausahaan vii, viii, ix, x, 49, 55, 56, 75, 85, 88, 91, 93, 102, 105, 107, 109, 110, 111, 114, 116, 124, 128, 131, 136, 137, 138, 139, 142, 145, 146, 149, 156, 209, 248, 269, 270, 271, 307, 312, 321

Kompetensi viii, x, 85, 87, 88, 91, 240, 248, 253, 269, 270, 271, 318, 321

Kreatif 66, 129, 132, 321

Kualitas 33, 161, 166, 181, 208, 242, 255, 260, 262, 264, 266, 267, 270, 272, 305, 316, 321

Kurikulum 119, 194, 295, 307, 321

L

Literasi ix, 204, 321

Lulusan vii, viii, ix, x, 37, 75, 77, 85, 93, 171, 172, 247, 258, 260, 303, 321

M

Magang 243, 255, 260, 262, 264, 266, 267, 270, 272, 321

Masyarakat iii, vii, x, 60, 221, 223, 318, 321

Minat vii, viii, x, 21, 58, 60, 93, 94, 97, 100, 101, 137, 250, 253, 271, 272, 322

Mitos vii, 37, 322

N

Nilai-nilai 168, 179, 202, 322

O

offshoring 196, 322

online 186, 187, 188, 192, 193, 200, 201, 308, 314

Otomatisasi ix, 184, 186, 187, 192, 322

outsourcing 197, 322

P

Pasar 112, 159, 322

Pembelajaran v, vi, vii, viii, ix, x, 16, 38, 39, 40, 93, 107, 108, 114, 118, 122, 124, 131, 149, 156, 157, 172, 173, 204, 208, 209, 216, 221, 222, 223, 224, 233, 241, 245, 250, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 307, 322

Pendidikan iii, iv, vii, viii, ix, 1, 8, 10, 12, 16, 18, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 67, 69, 70, 76, 77, 92, 93, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 119, 120, 126, 136, 138, 139, 141, 142, 145, 147, 153, 206, 209, 211, 214, 285, 290, 291, 295, 296, 303, 306, 307, 310, 316, 317, 322

Pengalaman ix, 1, 3, 6, 123, 149, 225, 226, 229, 322

Pengangguran iv, vii, 75, 76, 315, 322

Perubahan ix, 77, 109, 110, 199, 202, 317, 322

pewirausaha 5, 12, 49, 51, 52, 57, 58, 59, 69, 86, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 108, 117, 118, 136, 138, 140, 143, 144, 145, 148, 149, 152, 162, 215, 249, 251, 273

Praktek 245, 255, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 322

Proaktif 62, 89, 322

produktifitas 2, 15, 37, 45, 47, 48, 177

R

Resiko 53, 322

S

Sikap 51, 78, 83, 89, 90, 91, 96, 100, 101, 137, 146, 177, 179, 253, 262, 264, 277, 322

Siswa ix, x, 29, 91, 158, 172, 173, 204, 206, 207, 210, 221, 229, 254, 322

SMK i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 27, 29, 30, 34, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 75, 76, 77, 85, 93, 95, 102, 119, 122, 131,

160, 175, 176, 183, 204, 208, 216, 238, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 271, 273, 290, 296, 303, 306, 309, 310, 322

soft skills 2, 5, 19, 80, 81, 82, 117, 173, 174, 177, 182, 183, 184, 220, 305

Sosial 108, 111, 263, 264

spesifikasi 4, 10, 32, 33, 46, 47, 184, 216, 226, 231, 244

T

Tanggap 83, 253

Teknologi iii, iv, 8, 309

terampil 29, 218, 221

TPT iv, 3, 4, 5, 75, 76

V

Visioner 63

W

Wawasan 88

WBL x, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 235

Wirausaha viii, 51, 56, 57, 91, 100, 124, 128, 295, 318

BIODATA PENULIS

AGUS PRIANTO, lahir di Kediri 21 Mei 1968. Memperoleh pendidikan S1 dari Program Studi Ekonomi Koperasi FPIPS IKIP Surabaya Tahun 1992. Menyelesaikan Program Magister, Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah dari Universitas Negeri Malang Tahun 2001. Merampung Program Doktor, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang Tahun 2006. Yang bersangkutan merupakan dosen tetap dpk pada Program S1 Pendidikan Ekonomi dan Program Magister Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang. Ia aktif melakukan kajian dan penelitian bidang pendidikan kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia. Berbagai karya hasil kajian dan penelitian telah dipublikasikan pada berbagai forum seminar nasional dan seminar internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan berbagai jurnal internasional. Yang bersangkutan sudah menghasilkan beberapa buku atau book chapter yang diterbitkan di berbagai penerbit, antara lain: Menakar Kualitas Palayanan Publik, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Analisis Data Statistik, Tantangan Pendidikan Dalam Era Ledakan Dotcom, Welcome to The Disruption Era. Beberapa karya dalam bentuk buku siap terbit juga akan mewarnai khasanah perbukuan nasional. Berbagai karya yang bersangkutan selengkapnya juga dapat diakses melalui google scholar.

WINARDI, dosen PNS Dpk di STKIP PGRI Jombang sejak 1986. Lahir di Jajag, Banyuwangi 2 Juni 1957. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember 1984. Magister Hukum diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang 2001. Tahun 2012 menyelesaikan program Doktor Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Karya ilmiah berupa buku: *Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah* (Setara Press, 2008), *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi* (Setara Press, 2011), *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Setara Press, 2016), *Politik Hukum* (Setara Press, 2019)

UMI NUR QOMARIYAH, lahir di Malang, 1 Januari 1972. Memperoleh pendidikan S1 dari Program Studi Pendidikan Matematika FPMIPA IKIP PGRI Malang tahun 1995. Menyelesaikan Program Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tahun 2006. Saat ini sedang melangsungkan Program Doktor, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Yang bersangkutan merupakan Dosen Tetap Yayasan PPLP PT PGRI Jombang pada Program S1 Pendidikan Matematika STKIP PGRI Jombang. Aktif melakukan kajian dan penelitian bidang pendidikan dan pengembangan

pembelajaran Matematika. Berbagai karya hasil kajian dan penelitian telah dipublikasikan pada berbagai Forum Seminar Nasional, Seminar Internasional, Jurnal Nasional Terakreditasi, dan Jurnal Internasional. Menjabat sebagai Kepala Bidang Pengabdian Pada Masyarakat mulai tahun 2007 sampai dengan saat ini, sehingga menghasilkan beberapa kegiatan dan artikel tentang pemberdayaan masyarakat baik sebagai pemenang hibah Dikti maupun hibah lembaga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikembangkan meliputi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Peningkatan SDM, Program Belajar Bekerja Terpadu sebagai Sarana Mahasiswa Belajar dan Bekerja, serta sebagai pemerhati kegiatan kewirausahaan mahasiswa melalui pendamping Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/ Kompetensi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) dan *surveyor* pemetaan Industri Kecil Menengah Kabupaten Jombang. Beberapa karya dalam bentuk buku siap terbit juga akan mewarnai khasanah perbukuan nasional. Berbagai karya yang bersangkutan selengkapnya juga dapat diakses melalui google scholar.

PENGUATAN EMPLOYABILITY DAN ENTEREPRENEURABILITY SISWA SMK

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	1%
2	www.vardeskapande.se Internet Source	1%
3	www.academia.edu Internet Source	1%
4	id.scribd.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
6	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
7	studylib.net Internet Source	<1%
8	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
9	ijbmi.org Internet Source	<1%
10	www.jist.com Internet Source	<1%
11	masterbiznet.com Internet Source	<1%
12	eprints.ummi.ac.id Internet Source	<1%

13	www.ijhssnet.com Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
15	dera.ioe.ac.uk Internet Source	<1%
16	theses.ncl.ac.uk Internet Source	<1%
17	www.nrccte.org Internet Source	<1%
18	doras.dcu.ie Internet Source	<1%
19	www.cfsd16.org Internet Source	<1%
20	files.eric.ed.gov Internet Source	<1%
21	acereconference.com Internet Source	<1%
22	www.eurojournals.com Internet Source	<1%
23	fexdoc.com Internet Source	<1%
24	portal.ditpsmk.net Internet Source	<1%
25	www.jawapos.com Internet Source	<1%
26	Submitted to University College London Student Paper	<1%
27	D I Amin, J Ikhsan. "A need analysis to optimization computer laboratory in chemistry learning process according to chemistry	<1%

teachers and natural science students in 3T regions", Journal of Physics: Conference Series, 2020
Publication

28	uws.pure.elsevier.com Internet Source	<1%
29	www.researchgate.net Internet Source	<1%
30	vcplist.com Internet Source	<1%
31	Submitted to University of Surrey Student Paper	<1%
32	fr.scribd.com Internet Source	<1%
33	www.cedefop.europa.eu Internet Source	<1%
34	docplayer.net Internet Source	<1%
35	www.leeds.ac.uk Internet Source	<1%
36	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
37	www.tesda.gov.ph Internet Source	<1%
38	krex.k-state.edu Internet Source	<1%
39	marchellapramadhana.blogspot.com Internet Source	<1%
40	zulfahsmile.blogspot.com Internet Source	<1%

docslide.us

41	Internet Source	<1%
42	helvia.uco.es Internet Source	<1%
43	www.sbaer.uca.edu Internet Source	<1%
44	dspace.uni.lodz.pl:8080 Internet Source	<1%
45	staffnew.uny.ac.id Internet Source	<1%
46	cft.vanderbilt.edu Internet Source	<1%
47	juliarmita.blogspot.com Internet Source	<1%
48	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
49	sajesbm.com Internet Source	<1%
50	aisberg.unibg.it Internet Source	<1%
51	www.cric.com.au Internet Source	<1%
52	www.framtidsfron.se Internet Source	<1%
53	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	<1%
54	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1%
	Submitted to Coventry University	

55	Student Paper	<1%
56	www.abacademies.org Internet Source	<1%
57	edoc.pub Internet Source	<1%
58	Submitted to The Robert Gordon University Student Paper	<1%
59	Submitted to University of Warwick Student Paper	<1%
60	recanati.tau.ac.il Internet Source	<1%
61	effendisanusi.blogspot.com Internet Source	<1%
62	detakindonesia.co.id Internet Source	<1%
63	www.nmefoundation.org Internet Source	<1%
64	Submitted to Liverpool John Moores University Student Paper	<1%
65	eprints.soton.ac.uk Internet Source	<1%
66	people.few.eur.nl Internet Source	<1%
67	www.tc.umn.edu Internet Source	<1%
68	Submitted to Universiti Malaysia Sarawak Student Paper	<1%
69	www.emrbi.org Internet Source	<1%

70	Submitted to Anglia Ruskin University Student Paper	<1%
71	Submitted to University of Wolverhampton Student Paper	<1%
72	Bagulho, Maria Leonor(Ilharco, Fernando). "Liderar para a criatividade : o papel da motivação intrínseca no desenvolvimento de novas ideias", Veritati - Repositório Institucional da Universidade Católica Portuguesa, 2014. Publication	<1%
73	publications.lib.chalmers.se Internet Source	<1%
74	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1%
75	www.puslitek-rekla.unja.ac.id Internet Source	<1%
76	www.iiste.org Internet Source	<1%
77	Submitted to University of Huddersfield Student Paper	<1%
78	Benchmarking: An International Journal, Volume 21, Issue 4 (2014-09-16) Publication	<1%
79	skape.no Internet Source	<1%
80	www.senatehall.com Internet Source	<1%
81	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1%
82	openarchive.cbs.dk Internet Source	<1%

83	Submitted to Mont Rose College Student Paper	<1%
84	Submitted to St Mary's University College Student Paper	<1%
85	Submitted to University of Newcastle upon Tyne Student Paper	<1%
86	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
87	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1%
88	pt.scribd.com Internet Source	<1%
89	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%
90	Kadek Pranetha Prananjaya, Supriyati Supriyati. "Pengembangan Mindset Akuntansi Perkoperasian Bagi Koperasi Paguyuban Karyawan (Pakar) Dekabe Jawa Timur", Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019 Publication	<1%
91	amilafi226.wordpress.com Internet Source	<1%
92	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1%
93	www.tinjakstar.com Internet Source	<1%
94	Subijanto --. "Analisis Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2012 Publication	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 20 words
Exclude bibliography	On		